



Museum
Kebangkitan
Nasional

108 tahun
Kebangkitan
Nasional

Soetardjo

Kartohadikoesoemo



Soetardjo

Kartohadikoesoemo



Museum Kebangkitan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Soetardjo

Kartohadikoesoemo

Prakata :

R. Tjahjopurnomo
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Penulis:

Djoko Marihandono,
Dr. Yuda B. Tangkilisan
Jaka Perbawa

Editor:

Djoko Marihandono,

Desain dan Tata Letak:

Sukasno

ISBN 978-602-14482-9-8

Diterbitkan:

Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Prakata

Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Dengan mengucapkan Syukur ke hadapan Allah SWT buku yang berjudul Soetardjo Kartohadikoesoemo selesai ditulis dan diterbitkan sesuai waktu yang ditetapkan. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses penulisan ini, dari waktu penulisan yang pendek, adanya libur Lebaran, dan kesiapan dari para pendukung pencetakan buku yang masih terkendala oleh kegiatan pribadi masing-masing. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada para penulis, editor, tim penerbit yang telah bekerja dengan baik, sehingga hasil karya nyata mereka saat ini berada di tangan kita.

Tokoh Soetardjo Kartohadikoesoemo mengawali karirnya sebagai seorang birokrat, yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan rakyat yang saat itu kondisinya sangat menderita. Di setiap tugas yang diembannya, ia selalu memprioritaskan kepentingan rakyat dengan tujuan agar kemiskinan segera dapat dientaskan. Rakyat harus diberdayakan. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan harus diutamakan. Demikian pola yang selalu diterapkan di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kariernya sebagai wakil rakyat di Volksraad, sangat menonjol. Walaupun bangsa Indonesia mengetahui tokoh ini hanya dari petisi yang dikeluarkannya, namun buku ini membahas tentang peran Soetardjo di Volksraad dan manfaat dan dampaknya bagi bangsa

Indonesia. Keberaniannya dalam memperjuangkan penggunaan istilah *Indonesia* untuk menggantikan kata *Inlander* menggugah sesama pejuang pergerakan kemerdekaan untuk bangkit kembali setelah dilanda kelesuan sebagai akibat dari ditahannya tokoh-tokoh pejuang oleh pemerintah kolonial. Kehadirannya di Volksraad tidak hanya memperjuangkan kepentingan konstituen yang diwakilinya, melainkan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat pada zamannya. Kepedulianya terhadap kondisi masyarakat memotivasi dirinya untuk berjuang tanpa pamrih walaupun hasil yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Keteladanan Soetardjo ini patut kita jadikan inspirator dan motivator dalam mengisi kemerdekaan selama ini. Kepentingan bangsa Indonesia berada di atas segalanya.

Akhir kata, kami menyambut gembira terbitnya buku ini. Semoga masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan akademik dapat memanfaatkan kehadiran buku ini.

Jakarta, Juli 2016



R. Tjahjo Poernomo

NIP. 195912271988031001



Daftar Isi

PRAKATA KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL	3
--	---

SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

WAKIL RAKYAT YANG BERNAS DI PARLEMEN.....	9
Pendahuluan	9
Awal Karir Soetardjo	11
Kiprah Soetardjo dalam Volksraad	12
Keprihatinan Masyarakat Bumiputera.....	19
Interpelasi Pembatasan Siswa Mulo.....	32
Kelaparan di Timor	45
Pemerintahan Eropa Versus Pemerintahan Bumiputera	46
Tanggapan atas Tulisan Soetardjo.....	47
Dualisme pemerintahan	57
Otonomi Daerah.....	61
Tahun Persidangan Volksraad	67
Rapat Umum PPBB wilayah Jawa Timur.....	72
Proyek Patjal	75
Petisi Prawoto--Soetardjo	88
Sidang Volksraad 1936.....	95
Petisi Soetardjo	105
Dampak yang ditimbulkan dari Petisi Soetardjo	120
Nirom	129
Penolakan Petisi Soetardjo.....	132
Peranan Soetardjo di Parlemen setelah Petisi Soetardjo.....	134
Penutup.	141
Daftar Pustaka	145

GAGASAN ALTERNATIF MENUJU KEMERDEKAAN: MENINJAU KEMBALI PERISTIWA, MAKNA DAN DAMPAK PETISI SOETARDJO 1936 DALAM DINAMIKA PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA.....	149
Birokrasi dan Kekuasaan	156
Priyayi dan Politik.....	164
Genealogi Gagasan dan Pola Perjuangan Kemerdekaan	173
Gagasan Kemerdekaan Soetardjo Kartohadikusumo.....	179
Petisi Soetardjo: Mengobarkan kembali Cita-cita Kemerdekaan	191
Jalur Damai Perjuangan Kemerdekaan	202
Turun ke Jalan	207
Kesempatan yang Hilang	212
DAFTAR PUSTAKA.....	245

TINJAUAN BUKU SOETARDJO: “PETISI SOETARDJO” DAN PERJUANGANNYA	249
Desa: Inspirasi Perjuangan.....	249
Pamong Praja Pengabdi Negeri	253
Modernisasi Desa (Tata Cara).....	255
Menjadi Pejabat Kejaksaaan.....	258
Sekolah Lanjutan Pamong Praja	259
Kembali Mengabdi.....	261
Menuju Volksraad: Perjuangan Menuju Kemerdekaan	266
Petisi Soetardjo: Indonesia Yang Mandiri.....	277
Penutup	284
TENTANG PENULIS.....	287





Wakil Rakyat yang Bernas Di Parlemen

Djoko Marihandono

*“Pendidikan yang lebih tinggi
bukan lagi merupakan
suatu keinginan, namun sebuah kebutuhan”
Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam sidang
Volksraad 7 Oktober 1932*

Pendahuluan

Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai seorang yang berani dan vokal di Volksraad pada masa kolonial, beberapa tahun sebelum Jepang berkuasa di bumi pertiwi. Sebagai anggota wakil rakyat dalam Volksraad, Soetardjo, sebutan akrab Soetardjo Kartohadikoesoemo, sangat peduli terhadap penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah kolonial yang dinilai merugikan rakyat, langsung diprotesnya. Soetardjo yang dilahirkan di dekat kota Blora pada 22 Oktober 1892 itu sebelum meniti karirnya sebagai anggota Volksraad,

mengenyam pendidikan di ELS (*Europeesche Lagere School*). Setamat ELS, ia mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai rendah (*kleineambtenaar*). Namun, ia mengurungkan niatnya, dan bertekad untuk melanjutkan studinya di OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) yaitu sekolah yang dibuka khusus bagi pegawai Pamong Praja. Ketika mengikuti pendidikan di OSVIA inilah, ia mulai mengenal pergerakan dengan organisasi yang menaunginya. Pada saat usianya mencapai 19 tahun, ia terpilih menjadi Ketua Cabang Boedi Oetomo hingga 1911. Setamat dari sekolah itu, ia harus magang bekerja di kantor Asisten Residen di kota Blora. Oleh karena itu, jabatannya sebagai Ketua cabang Boedi Oetomo untuk sementara harus ditinggalkannya. Karirnya di bidang birokrasi cukup baik, karena belum sampai 1 tahun bekerja di kantor Asisten Residen, ia diangkat menjadi Pembantu Jurus Tulis (*Hulpschrijver*) di kantor Residen Rembang. Nasib baik mengikuti kariernya, karena setelah hampir dua tahun menekuni pekerjaannya sebagai pembantu juru tulis, ia diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai *asisten wedono* di *Onderdistrik* Bogorejo di daerah Blora. Saat menjabat sebagai asisten wedono inilah ia mulai menggagas dan memelopori berdirinya koperasi untuk mensejahterakan masyarakat desa yang dipimpinnya. Ia paham betul bahwa rakyat sangat menderita karena ulah para tengkulak dan lintah darat yang sering mempermainkan rakyat yang dianggap tidak tahu apa-apa. Ia berhasil memelopori berdirinya Persatoean Pegawai Bestuur Bumipoetera (PPBB) yaitu organisasi yang menghimpun kelompok pamongpraja, atau aparat pemerintah bumiputera. Dalam perjalanan hidupnya, kelak ia banyak berhubungan dengan para siswa *Bestuur academie* yang dimanfaatkan untuk melontarkan gagasan-gagasannya demi memajukan rakyat dan

daerahnya. Setelah menjadi wakil rakyat di Volksraad, ia juga pernah menjabat sebagai Residen Batavia pada 1943, tatkala bumi pertiwi dikuasai oleh Jepang.¹

Awal Karir Soetardjo

Pada saat Soekarno diadili pada 1930, Soetardjo yang menjadi anggota PNI cabang Bandung dan menjadi peserta kursus kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PNI Bandung, ia diminta kesaksiannya secara tertulis tentang kegiatan tersebut. Pada sidang kelima, ketua sidang membacakan tinjauan yang dibuat oleh Soetardjo tersebut tentang organisasi masa dan tindakannya. Soetardjo menjadi kunci persidangan Soekarno yang dituduh akan melakukan pemberontakan saat melaksanakan kursus kepemimpinan itu. Hal yang dijadikan perdebatan adalah posisi Soekarno sebagai pimpinan PNI yang dianggap sebagai pemimpin dari pasukan Nasionalis. PNI memperoleh simpati dari masa Revolusioner dan menjadikan ketua PNI sebagai borjuis yang revolusioner.² Soekarno dituduh dalam kursus kepemimpinan itu akan “membentuk kekuatan yang revolusioner”. Tulisan Soetardjo diharapkan dapat membuat klarifikasi tentang hal tersebut. Dari sinilah karir Soetardjo dimulai.³

Propaganda PPBB yang dilakukan selama bertahun-tahun berjalan dengan sukses. Semua calon yang diajukan oleh organisasi ini baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur terpilih menjadi anggota *Volksraad*. Tersedia 4 kursi untuk wilayah Jawa Timur. Dari hasil pemungutan suara, diperoleh suara

- 1 Somya Saminta. (2011) . <http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soetardjokarto/hadikusumo/>
- 2 ‘De PNI Zaak’ dalam *De Indische Courant*, 26 Agustus 1930, lembar ke-2.
- 3 ‘De PNI Zaak’ dalam *De Indische Courant*, 25 Agustus 1930, lembar ke-1.

terbanyak dengan perincian: Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo memperoleh 34 suara, RAA Soejono yang saat itu menjabat sebagai Patih Gresik dan sedang berada di Eropa memperoleh 32 suara. Sementara itu, dua calon lainnya tidak muncul dalam penentuan suara tersebut. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Soetardjo dan Soejono akan duduk sebagai wakil rakyat di Volksraad.⁴ Kedua tokoh yang tidak muncul itu adalah Raden Panji Soeroso, memperoleh 37 suara dan Soebroto memperoleh 20 suara. Tokoh Soebroto adalah utusan dari tokoh nasionalis yang menolak dr. Soetomo duduk dalam Volksraad, sehingga nama dr. Soetomo tidak tercantum dalam daftar calon anggota Volksraad.

Kiprah Soetardjo dalam Volksraad

Pada kesempatan Rapat umum PPBB cabang Jawa Tengah yang diselenggarakan di kota Magelang pada 20 Desember 1920, Soetardjo mengusulkan agar pengurus pusat PPBB segera mengeluarkan mosi tentang situasi yang saat itu meresahkan para pegawai pamongpraja. Mosi ini untuk menanggapi rencana pemerintah kolonial yang akan menghapuskan OSVIA yang berada di kota Madiun. Usulan Soetardjo disambut dengan baik oleh peserta rapat tersebut. Adapun mosi yang diputuskan itu berbunyi sebagai berikut:

“Mendengar pembahasan rapat, PPBB berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, kenaikan pangkat Korps Pemerintahan bumiputera menjadi sangat penting bagi

4 ‘Devolksraadverkiezingen’, dalam *De Sumatra Post*, 27 Nopember 1930 Lembar ke-2.

masyarakat dan semua yang akan menghalangi kemajuan pegawai pamongpraja. Oleh karena itu, PPBB merasa perlu untuk mengeluarkan mosi untuk membatalkan rencana tersebut.

Memutuskan:

Pertama: Mendesak Pengurus Pusat PPBB untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membatalkan penghapusan Osvia di kota Madiun, yang menurut rencana akan digabungkan dengan OSVIA yang berada di kota Magelang;

Kedua: Pengurus cabang PPBB Jawa Tengah diberikan wewenang untuk meminta dukungan dari cabang-cabang organisasi lain.⁵

Menindaklanjuti dua kursi kosong yang tidak hadir pada saat pemilihan anggota Volksraad, Pengurus pusat PPBB akan mengirimkan ketua dan wakil ketua pengurus pusat PPBB untuk duduk dalam Volksraad walaupun di dalam kepengurusan PPBB terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang terpilihnya Soetardjo sebagai anggota Volksraad. Koran *Bataviaasch Nieuwsblad* memberitakan bahwa usulan dari surat kabar Melayu Cina adalah untuk menarik kembali pencalonan Soetardjo untuk digantikan oleh sosok yang lain. Kehadiran Wiranatakoesoemah, yang ikut hadir pada pemilihan anggota Volksraad dari Jawa Timur memberikan pencerahan kepada pengurus pusat PPBB

5 'Madioen' dalam *De Indische Courant*, 24 Desember 1930, lembar ke-2.

bahwa menurut dirinya, Soetardjo lebih disukai oleh masyarakat.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut pengurus pusat PPBB harus mengikuti hasil pemilihan, yang memilih Soetardjo, wakil ketua PPBB sebagai perwakilan di dalam Volksraad. Dalam perdebatan itu juga telah ditetapkan bahwa pengurus pusat PPBB tetap berada di Batavia karena secara *de facto*, kebanyakan pengurus pusat tinggal di kota ini. Bahkan Bupati Bandung pun akan segera menyusul pindah ke Batavia.

Penerimaan Soetardjo menjadi anggota Volksraad meyakinkan anggota Volksraad lainnya. Pada pembukaan Sidang Volksraad, tahun sidang 1931-1932, diputuskan agenda pada sidang tahun itu. Pembahasan pertama akan diprioritaskan pada bidang kehakiman. Soetardjo dalam pemaparannya, menekankan pentingnya percepatan proses hukum pidana. Sebagai contoh, ia berharap agar usulan adanya persamaan antara masyarakat bumiputra dan masyarakat Cina untuk sementara ditunda hingga proses hukum yang dimaksudkan untuk itu selesai dibahas.⁷ Anggota Volksraad secara aklamasi menyetujui untuk memberikan

Pada Sidang Volksraad kedua, dibahas tentang anggaran pendidikan. Ketua Volksraad J.W. Meijer Ranneft mempersilakan para anggota Volksraad untuk memberikan pandangannya di bidang pendidikan. Soetardjo mendapatkan giliran untuk mempresentasikan pengalamannya selama ini dan mengajukan pendapatnya. Ia menyoroti tentang pendidikan rakyat. Penduduk bumiputera di daerah pedalaman menurutnya sangat terlantar. Dengan data yang lengkap, ia membandingkan jumlah rakyat yang masih buta huruf di wilayah Hindia Belanda dengan negara

6 'Inlandsche bestuurambtenaren' dalam *De Sumatra Post*, 18 Maret 1931, lembar ke-2.

7 'Justitie' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 15 Juli 1931, lembar ke-2.

lain. Data yang dimilikinya membuktikan bahwa Hindia Belanda memiliki jumlah terbesar daripada negara-negara lainnya. Dalam kaitannya dengan pemberantasan buta huruf, ia meminta kepada Dewan untuk meningkatkan jumlah sekolah rakyat dan memperluas hingga ke pelosok-pelosok desa. Mengenai Europeesch Lagere School (ELS) Soetardjo menuturkan bahwa jumlah tenaga pengajar sekolah di daerah, jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak mencukupi. Kondisi ini membuat kualitas pendidikan sekolah dasar Eropa ini menjadi sangat memprihatinkan, dan berjalan tidak sesuai yang diharapkan. Soetardjo meminta agar kondisi yang sangat memprihatinkan ini segera diakhiri, dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah. Di samping itu, ditegaskan temuannya tentang perlakuan buruk atas siswa bumiputera di sekolah MULO dan HBS yang dilakukan oleh para guru Belanda.⁸

Sebagai pengurus PPBB, Soetardjo memiliki pandangan yang sangat revolusioner. Gagasannya adalah untuk mendukung organisasi-organisasi pergerakan yang non-kooperatif. Ia memiliki tujuan untuk mulai perjuangannya dengan mengganti istilah bumiputera dengan istilah Indonesia. Ia yakin benar bahwa

8 'Volksraad Zittingsjaar 1931-1932' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Juli 1931, lembar ke-2. Selain membahas tentang kondisi pendidikan di tanah air, Soetardjo memberikan apresiasi terhadap dipenuhinya permintaan pertanian para petani bumiputera. Pemerintah sudah memberikan perhatian kepentingan para petani. Bantuan itu dirasakan oleh para petani desa sebagai bantuan nyata dari pemerinta. Soetardjo mengomentari bahwa ia merasa bangga dengan kondisi para petani, namun belum merasa puas. Oleh karena itu, ia membuat usulan agar pelajaran pertanian diajarkan di sekolah-sekolah dengan memperhatikan keunggulan pertanian di daerah masing-masing. Ia juga mengusulkan agar dibuat kerjasama antara dinas penyuluhan pertanian dan aparat pemerintah bumiputera. Ia yakin langkah ini akan menghasilkan keuntungan bagi para petani di pedesaan. Selanjutnya lihat 'Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 17 Juli 1931, lembar ke-2.

usulan ini sangat radikal, karena dapat membahayakan dirinya dari ancaman fitnah yang dapat ditimpakan kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak langsung menyampaikan gagasan itu melalui Sidang Volksraad. Agar supaya mendapatkan dukungan dari sesama pegawai pamongpraja melalui organisasi PPBB. Gagasan itu disampaikan pada Kongres Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera. Melalui hasil Kongres PPBB inilah dikeluarkan resolusi untuk meminta pemerintah agar mengganti istilah bumiputera dengan istilah Indonesia dalam semua peraturan dan hukum.⁹

Pada sidang tahunan Volksraad berikutnya, dibahas tentang anggaran bidang pemerintahan. Hal ini berkaitan erat dengan penerimaan pegawai baru di pemerintahan, yang mau tidak mau harus dibahas dengan tingkat ketelitian yang tinggi, karena menyangkut hajat hidup para pegawai pemerintah bumiputera. Hal yang menonjol dalam agenda ini adalah aturan tentang seleksi masuk yang tidak sama antara satu daerah dan daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas tentang penerimaan pegawai baru. Menurut data yang ada, pada akhir 1930, terdapat 600 calon pegawai yang diseleksi oleh komisi pusat yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut. Walaupun komisi pusat sudah bekerja dengan baik, namun terjadi beberapa penyimpangan dari aturan penerimaan pegawai baru. Keresahan dari kalangan guru disampaikan melalui surat pernyataan yang mereka buat. Dalam surat pernyataan itu para guru mendesak agar pemerintah menghapuskan seleksi itu, seperti kondisi yang ada di Belanda. Pemerintah tidak memberikan masukan kepada para guru, buku-buku apa yang harus digunakan di semua sekolah menengah. Surat pernyataan para guru tersebut disambut baik oleh Soetardjo,

9 'Indonesier' dalam *Algemeen Handelsblad*, 30 Juli 1931, lembar ke-2.

yang juga memiliki opini yang sama tentang kondisi sekolah yang memprihatinkan. Soetardjo juga menyatakan bahwa perlakuan terhadap siswa Indonesia (istilah yang dia kehendaki) di sekolah negeri, perlu segera direformasi. Namun, hal ini mendapatkan tanggapan yang keras dari pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa isi surat yang disampaikan oleh para guru itu tidak benar dan tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Pernyataan itu tidak didukung dengan data yang sahih. Fraksi pemerintah menyatakan bahwa permasalahan pemindahan AMS dari Bandung ke Solo menjelang akhir 1931 sudah mendekati penyelesaian. Sementara itu, perpindahan MOSVIA¹⁰ dari Bandung ke Fort de Kock tidak mengalami kesulitan yang berarti. Sekolah pendidikan yang berada di kota Makassar untuk sementara belum memerlukan tingkat yang lebih tinggi lagi. Perubahan dan peningkatan pendidikan di Sulawesi, khususnya di Makassar baru akan dilaksanakan setelah dilakukan pembaharuan pemerintahan di pulau itu. Walaupun kursus kemaritiman sudah diusulkan dan dibahas di parlemen, akan tetapi masih dalam tahap pertimbangan dan belum dalam tahap pelaksanaan.

Kelanjutan dari pembahasan anggaran pendidikan ini menelan waktu yang cukup lama dan memicu perdebatan yang sengit. Pidato Soetardjo yang menganggap bahwa pendidikan negeri di Indonesia sangat memprihatinkan termasuk di dalamnya perlakuan terhadap siswa Indonesia.¹¹ Ia menunjukkan

¹⁰ Midlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren.

¹¹ Soetardjo mulai mengganti istilah bumiputera dengan istilah Indonesia. Konsistensi dalam mengangkat derajat bangsanya mulai ditunjukkan baik dalam kegiatan formal maupun informal, penting maupun tidak penting, lisan maupun tulis. Keteguhan menggunakan istilah 'Indonesia' ini bukannya tanpa resiko. Soetardjo sadar sepenuhnya bahwa rakyat harus diletakkan dalam posisi yang sebenarnya sebagai partner dan bukan sebagai hubungan subordinasi.

penanganan yang kurang tepat terhadap para siswa Indonesia di sekolah dasar dan sekolah menengah Eropa. Penduduk di pedalaman diperlakukan dengan buruk, meskipun angka yang disampaikan oleh pemerintah dianggap benar, karena hanya menyangkut kuantitasnya saja dan bukan kualitasnya. Soetardjo ingin agar sekolah mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menaikkan subsidi di sekolah-sekolah ini.¹² Dalam menanggapi pandangan Soetardjo, anggota Volksraad lainnya Soejono menganggap bahwa pandangan Soetardjo keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Pemerintahan bumiputera sudah harus mulai diperhitungkan oleh pemerintah. Menurut Soejono, semua pemimpin bumiputera harus menjadi orang-orang yang nasionalis, yang mencintai tanah airnya. Pernyataan Soejono mendapat tanggapan dari Thamrin yang berpendapat bahwa masyarakat bumiputera masih harus menunggu suatu saat yang baik, yang langsung ditanggapi oleh Soejono agar pemerintah tidak bersikap ekstrim dan radikal. Kini waktunya telah berlalu. Pemerintahan bumiputera tidak lagi memerlukan pengawasan, namun hidup berdampingan dengan bangsa Eropa. Para wakil rakyat bumiputera sependapat bahwa demokrasi Timur dapat disatukan dengan demokrasi Barat. Walaupun pembentukan pemerintahan kotapraja sudah berusia 25 tahun, namun kaum bumiputera masih merasa asing dengan pemerintahan kotapraja

12 'Onderwijs' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 13 Agustus 1931, lembar ke-2. Dampak dari Mosi ini adalah pemerintah mulai mengirim tenaga pengajar untuk pendidikan di sekolah swasta. Dengan kebijakan ini kebutuhan akan tenaga pengajar meningkat, yang mengakibatkan kekurangan tenaga pengajar. Langkah pemerintah ini merupakan langkah yang sudah ditunggu-tunggu sejak 1920, ketika Bregmeyer, anggota Volksraad mengirimkan mosi tentang pendidikan ini dan tidak memperoleh persetujuan dari Volksraad. Untuk jelasnya silakan dibaca 'Het bijzondere onderwijs' dalam *De Indische Courant*, 17 Agustus 1931, lembar ke-2.

itu. Diakui bahwa penggerak kaum bumiputera bukanlah berasal dari anggota Volksraad, akan tetapi lebih dirasakan berasal dari para walikota, yang bila perlu dibantu oleh dewan eksekutif.¹³

Keprihatinan Masyarakat Bumiputera

Dalam rapat Volksraad 7 Agustus 1931, Soetardjo menyoroti kemunduran pembatik di kota Lasem. Ia menyampaikan bahwa kondisi yang tidak jelas dan menganggap rendah aparat pemerintah bumiputera mengakibatkan buruknya kondisi seperti yang dialami oleh pembatik bumiputera di Lasem. Baik media maupun beberapa anggota dewan Volksraad telah menyalahkan aparat pemerintah bumiputera berdasarkan laporan batik. Tidak ada bukti kesalahan pada aparat Eropa yang sedang menjabat, yakni kepada salah seorang residen Rembang. Namun sebaliknya, penduduk dan aparat pemerintah bumiputera mempersalahkan mantan residen Rembang Gonggrijp.

Sebagai pembelaan atas tuduhan itu, mantan Residen Rembang Gonggrijp menulis laporan dalam *Koloniaal Tijdschrift* tahun 1929 halaman 61.¹⁴ Dalam tulisan itu, ia mengatakan bahwa orang yang dituduh bersalah ini memiliki pangkat tinggi dan mengarah pada dirinya. Ia mengajak agar semua orang mencermati tuduhan itu bahwa sumber keburukan dianggap terletak pada diri seorang residen, yang telah memerintah selama lima tahun. Seperti dalam kasus serupa sebelumnya, aparat pemerintah bumiputera yang terlibat telah menjalani hukuman sebagai akibat dari tuduhan yang dilontarkan. Tidak seorangpun berpikir bahwa persoalan ini harus dipandang lain, bahwa tidak seorangpun berminat untuk

13 'Volksraad Zittingjaar 1931-1932' dalam *De Indische Courant*, 12 Agustus 1931, lembar ke-2.

14 'De Verhoudingen in Rembang' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 12 Agustus 1931, lembar ke-2.

menduga dan mencurigainya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa mereka semua bisa berkata tentang pemerintah bumiputera yang tidak menerima hukuman apa pun. Secara kasat mata, apa yang lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan adalah mencari kesalahan pada pemerintah setempat, melimpahkan kesalahan itu kepada pemerintah bumiputera, yang tidak pernah membantah dan menerima semuanya itu.

Secara kebetulan sejak 15 Juni 1931, pemerintah bumiputera memiliki perwakilan dalam Volksraad. Hal ini diterima oleh mantan residen itu sebagai suatu kehormatan. Kejadian kedua adalah bahwa mantan residen ini telah banyak mengetahui tentang persoalan ini, karena saat itu, tiga tahun lamanya ia bertugas sebagai jaksa di Rembang. Selain itu, mertuanya adalah wedana di Lasem, sehingga ia telah mengetahui dengan baik seluk beluk perkampungan di Lasem. Ia telah lama menyelidiki apa yang diperintahkan oleh residen saat itu pada beberapa kasus penggelapan yang dilakukan oleh Sarikat Islam.

Selanjutnya, Gonggrijp menyimpulkan apakah pemerintah Eropa tidak memahami bila kondisi ini telah ada sejak dahulu, dan perlu menyalahkan pemerintah bumiputera. Mantan Residen itu merasa puas dengan meminta perhatian pemerintah atas beberapa kenyataan, yang kemudian dapat menarik kesimpulan jika diperlukan.

Pertama-tama, bupati RAA. Djojoadhiningrat, putra mantan pendahulunya, sangat terkenal di kabupaten Rembang. Djojoadhiningrat memiliki banyak kenalan dan sahabat penduduk Cina di Lasem. Dengan kondisi seperti ini, ia tidak dapat mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang batik Cina di Lasem.

Kedua, aparat pemerintah Eropa, dengan beberapa

perkecualian juga menjalin hubungan yang baik dengan penduduk Cina di Lasem, termasuk para pengelola usaha batik penting. Laporan batik secara singkat menyebutkan terjadi kunjungan para pejabat Eropa kepada para pedagang batik Cina ini. Gonggrijp kemudian menyatakan bahwa dengan kondisi seperti ini aparat pemerintah Eropa tidak dapat menindak mereka. Hal ini berakibat aparat bumiputera tingkat bawah tidak berani bertindak terhadap para pedagang batik Cina dimaksud.

Ketiga, saat Gonggrijp menjabat sebagai kontrolir pada 1930, ia telah mengetahui bahwa di Lasem kondisi buruk itu tidak bisa lagi dipertahankan. Tinjauan tentang kondisi ekonomi sebagian besar wilayah Hindia Belanda cukup jelas dan meyakinkan bahwa di Lasem kondisinya sangat buruk. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama 40 tahun, tidak mengubah kondisi yang buruk ini.

Keempat, seorang asisten wedana dari Pancur telah berani melawan kemauan para pedagang batik Cina ini terhadap penduduk bumiputera yang menganggur, meskipun mereka berhutang dalam jumlah yang tidak terlalu besar, pada beberapa orang Cina di Lasem. Wedana tersebut menolak untuk memenuhi permintaan orang Cina untuk mengembalikan para kuli batik yang melarikan diri. Sebagai manusia mungkin dia tidak tahu berterimakasih, akan tetapi sebagai pejabat ia memiliki sikap. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Cina itu? Mereka berangkat dari kota dan tidak lama setelah itu polisi lapangan muncul di desa dengan membawa senjata untuk menangkap kembali para pekerja batik yang melarikan diri itu. Hal ini mengakibatkan salah seorang pekerja batik dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan palsu melakukan penggelapan. Gonggrijp dalam tulisannya meminta perhatian dari pemerintah terhadap keputusan yang

diambil atas kasus ini.

Kelima, menurut apa yang didengarnya, dalam pemeriksaan oleh inspektur tenaga kerja pada akhir 1928 terungkap pelanggaran dan polisi telah melakukan penyelidikan. Pemerintah Eropa saat itu mengetahui kondisi di Lasem, akan tetapi ketika inspektur tenaga kerja pada tahun 1929 dan 1930 kembali ke Lasem, kondisi yang sama masih dijumpai di kota itu. Ia mempertanyakan apakah tidak ada yang dikerjakan oleh pemerintah selama periode antara Agustus 1928 sampai dengan Juli 1930 untuk mengakhiri kondisi yang buruk ini.

Keenam, asisten wedana Pancur tersebut telah membantu inspektur tenaga kerja dalam penyelidikannya. Ia membantu dalam mengungkapkan banyak hal. Ketika seorang pedagang batik Cina terlibat dalam kasus ini, dia mengambil tindakan terhadap asisten wedana itu. Dia menebus hutang asisten wedana pada beberapa orang Cina di Lasem dan mengadukannya kepada residen. Tanpa menunjukkan siapa pengadunya, Residen mengungkapkan kekecewaannya kepada asisten wedana atas tindakannya. Ia harus berangkat dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada residen. Akibatnya, ia menerima hukuman dengan dipindahkan ke Karimunjawa. Sebagai ganti promosi atas tindakannya yang berani, justru hukuman yang diterimanya.

Kondisi ini menyebabkan tidak ada seorang pun aparat bumiputera yang berani melakukan tindakan terhadap para pedagang batik Cina ini. Contoh pemindahtugasan Asisten Wedono Pancur ke Karimunjawa menunjukkan kesewenang-wenangan aparat pemerintah Eropa yang lebih cenderung membela para pedagang Cina daripada para pekerja bumiputera. Belum lama bertugas di Karimunjawa, istri dan anak-anaknya tidak betah hidup di sana, sehingga asisten wedana itu terpaksa

meminta berhenti. Oleh bupati Rembang, yang selalu bertukar pikiran dengan Gonggrijp aparat bumiputera ini dipulihkan kehormatannya sehingga dia menerima pengangkatan menjadi komis-redaktur di kantor dewan kabupaten di Rembang. Gonggrijp merasa senang bertanya kepada bupati itu apakah mereka tidak menemukan alasan untuk memulihkan kehormatan priyayi ini dengan mengangkatnya menjadi jaksa kepala atau sekretaris kabupaten klas-1 jika bukan kepala distrik. Namun, mantan wedana Pancur itu tampaknya telah puas.

Laporan batik memberikan kepastian bahwa pemulihan atas kondisi buruk pada 1928 dan sebelumnya tidak mungkin lagi dilakukan apabila pemerintah dari mulai bupati hingga lurah dijabat oleh orang-orang yang cakap. Gonggrijp mengingatkan pemerintah agar bersikap optimis. Oleh karenanya ia ingin mengusulkan agar secepatnya mengambil tindakan berikut ini, dengan harapan bahwa kondisi buruk di Lasem menjadi lebih baik.

1. Hendaknya didirikan sebuah bank perkreditan rakyat di Lasem dan bukan di Rembang, dengan tujuan untuk membebaskan penduduk bumiputera dari pedagang batik Cina;
2. Hendaknya segera dikirim ke Lasem petugas dinas penyuluhan pertanian yang berhubungan dengan koperasi dan penerangan kerajinan, dengan tujuan untuk mengorganisir ekonomi penduduk di atau dan sekitar Lasem.

Jika ini tidak terjadi, maka penduduk cepat atau lambat pasti akan kenbali pada posisi terbebas dari ketergantungan dari pedagang batik dan lintahdarat. Penduduk di sana telah menderita cukup lama, lebih dari setengah abad. Mungkin waktunya tiba

untuk menolong mereka. Gonggrijp tidak bisa meninggalkan masalah Lasem tanpa menunjukkan kepada pemerintah kekaburan hukum terjadi di daerah Lasem. Ada sejumlah contoh dari pemerintah bumiputera, bahwa ketika aparat demi kepentingan penduduk penganggur tiba, mereka sering menjadi korban. Yang mengherankan adalah, munculnya pandangan dari kalangan bumiputera bahwa aparat pemerintah bumiputera hanya siap untuk membebani penduduk, dan bukan untuk menolong mereka.

Dengan mengutip tulisan Gonggrijp ini, Soetardjo mengusulkan agar segera dilakukan perbaikan kondisi di wilayah Lasem. Oleh karena itu, pemberdayaan aparat baik aparat pemerintah bumiputera maupun Eropa harus dimaksimalkan. Untuk merealisasikannya diperlukan penambahan dana operasional. Dengan memberikan wewenang yang lebih kepada aparat pemerintah bumiputera akan menambah efektivitas pemerintahan di wilayah koloni ini.

Pemerintah menganggap tidak tepat apabila membandingkan kondisi saat itu dengan kondisi 100 tahun sebelumnya. Pembaharuan pemerintahan dan pembukaan cabang baru membuka perspektif luas bagi aktivitas pemerintah bumiputera. Dualisme pemerintahan yang diusulkan oleh Soetardjo ternyata tidak terbukti buruk. Aparat pemerintah bumiputera menjadi penguasa langsung penduduk sebagai konsekuensi dari keputusan itu. Fraksi pemerintah membantah bila posisi aparat pemerintah bumiputera direndahkan. Namun semua anggota Volksraad menganggap bahwa paparan Soetardjo dianggap sebagai *cri de coeur* atau teriakan dari dalam hati sanubari yang selama ini selalu ditentang secara kasar.

Penyusutan jumlah pegawai yang dicanangkan oleh pemerintah, justru berbanding terbalik dengan kebutuhan konkret

di lapangan. Korps kepolisian juga menurut rencana akan dikurangi. Namun hal itu ditegaskan bahwa pengurangan itu tidak akan menimbulkan resiko apa pun. Tarik ulur antara Soetardjo dan wakil pemerintah dalam sidang Volsraad tahun sidang 1931-1932 selalu dibarengi dengan perdebatan yang tajam, antara Soetardjo di satu pihak dan pihak pemerintah kolonial di pihak lain.¹⁵

Sebagai jalan keluar diputuskan bahwa anggaran pemerintahan akan dibagi dalam dua termin. Anggota Volksraad lainnya Burger, mewakili fraksinya menyerang visi yang telah disampaikan oleh Soetardjo. Burger dengan nada tinggi mengingatkan bahwa status aparat pemerintah Eropa di wilayah ini harus tetap dihargai. Pembentukan inspeksi pemerintahan dirasakan akan memperlebar jarak antara aparat pemerintah Eropa dan bumiputera.

Soetardjo kemudian meminta agar aparat pemerintah Eropa wawasannya diperbaiki. Para pemegang kekuasaan ini tidak akan keberatan selama tidak bertentangan dengan korps atasan mereka. Ia mencontohkan bahwa kondisi di Aceh sangat berbeda dengan di wilayah lain, sehingga perlu penerapan pemerintahan umum di bumi rencong itu. Walaupun pandangan Soetardjo ini juga ditentang oleh anggota Volksraad lainnya Beets, namun Soetardjo dan Wiraatmadja tetap bersikukuh bahwa perbaikan wawasan ini sangat diperlukan. Kenyataan yang ada di lapangan membuktikan bahwa pemerintah selama ini tidak peduli dengan penghinaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Eropa terhadap aparat pemerintah bumiputera baik dengan menggunakan kata-kata maupun tulisan. Dalam kaitan ini, Soetardjo tidak pernah bermaksud untuk menyalahkan pemerintah Belanda. Seperti

15 'De Inlandsche BB-er' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 19 Agustus 1931, lembar ke-2.

kondisi di Lasem, pemerintah harus memahami kondisi industri batik di sana. Namun, ia menginginkan agar aparat pemerintah bumiputera diberikan peran yang lebih daripada yang ada selama ini. Bagi aparat pemerintah Eropa hal ini sangat penting, karena dengan tidak adanya paksaan terhadap dualisme pemerintahan ini akan terbentuk pemerintahan yang lebih baik.¹⁶

Dalam masa Reses persidangan Volksraad, Soetardjo selaku wakil ketua PPBB menghadiri rapat umum yang diselenggarakan pada 27 Agustus 1931 di Gedung Kesenian Batavia di Gondangdia. Rapat dibuka oleh Ketua Pengurus Pusat PPBB, bupati Bandung RAA Wiranatakoesoema. Atas usul Soetardjo, rapat PPBB itu diharapkan dapat menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain pembentukan sebuah dana beasiswa (*studiefond*), pembentukan bank priyayi dan pengumpulan dana yang dapat disalurkan untuk kepentingan lainnya. Selain itu, diputuskan pula dalam rapat tersebut adanya perubahan peraturan tentang pengangkatan dan reorganisasi pengurus pusat PPBB. Anggota Volksraad lainnya yang berasal dari PPBB Prawoto mengulas tentang pemberian pensiun bagi para janda aparat pemerintah bumiputera. Sebelum memulai tahap pembahasan usulan itu, disampaikan usulan yang masuk, yang berasal dari berbagai cabang PPBB di daerah.

Soetardjo sebagai penggagas dibentuknya bank priyayi tampil ke mimbar untuk menjelaskan rencananya. Walaupun di kalangan PPBB sendiri muncul pro dan kontra tentang pembentukan sebuah bank ini. Akhirnya, usul itu disepakati secara aklamasi tanpa melalui pemungutan suara.

Hari kedua rapat itu, tepatnya 28 Agustus 1931, Soetardjo

16 'Volksraad Zittingjaar 1931-1932, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 19 Agustus 1931, lembar ke-2.

menyampaikan gagasannya untuk melakukan reorganisasi aktivitas pengurus pusat yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang perbaikan posisi tenaga penulis yang disampaikan oleh sekretaris PPBB Soenarjo. Secara aklamasi rapat menyetujui pengangkatan seorang sekretaris dengan sejumlah gaji tertentu.

Dalam rapat pleno itu, ketua meminta agar tetap merahasiakan arah politik yang akan diambil oleh organisasi PPBB ini. Oleh karena itu, rapat ini juga menentukan tokoh-tokoh yang duduk di Volksraad dari unsur PPBB. Disepakati, mereka yang terpilih untuk duduk di Volksraad antara lain: Gondosoebroto, Prawotokoesoemo, Soejono, Soetardjo, Wiranatakoesoema dan Wiradiatmadja. Mereka yang akan duduk di Volksraad diharapkan mampu mewakili penduduk pedalaman dan intelektual bumiputera yang belum memiliki organisasi apa pun. Diharapkan, dibentuk organisasi kaum intelektual yang belum memiliki organisasi, agar kepentingan kelompoknya terwakili. Organisasi ini diharapkan dapat bergabung dengan PPBB sejauh kepentingan kelompoknya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁷ PPBB sangat mendukung pembentukan kelompok Wiranatakoesoema dalam Volksraad yang akan membahas tentang anggaran negara. Pengurus Pusat PPBB meminta agar ketiga mosi ini disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda, Volksraad, dan media massa.

Sebagai reaksi atas penunjukan keenam calon anggota Volksraad itu, PPBB cabang Surabaya memberikan reaksi atas pemilihan keenam calon anggota Volksraad. Pada 8 September, PPBB cabang Surabaya mengadakan rapat di pendopo kantor wedono dekat stasiun kereta api Gubeng, Surabaya. Dalam rapat itu dibahas pemilihan dan pencalonan anggota Volksraad. Rapat

17 Lihat 'PPBB' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 29 Agustus 1931, lembar ke-2.

ini dihadiri oleh bupati, patih, dan beberapa anggota dewan kota dan dewan kabupaten bumiputera, di samping turut hadir pula beberapa aparat pemerintah. Rapat dipimpin oleh R. Harmani, guru sekolah pemerintahan di Weltevreden yang menerima mandat dari pengurus pusat organisasi pegawai pemerintah bumiputera (PPBB) untuk membahas sistem pemilihan dan pencalonan anggota Volksraad. Selain calon Soetardjo, Soejono, dan Soebroto, calon lain diharapkan dapat melakukan pendekatan dengan organisasi lainnya agar dapat dilakukan kerjasama dengan pengurus PPBB. Dalam keterangannya disampaikan bahwa fraksi bumiputra dan dewan kotapraja Surabaya mengusulkan tokoh yang dapat dipilih sebagai anggota Volksraad, antara lain: Soeroso, Soebroto, Latuharhary, Koesmadi, Roeslan Wonsokoesoemo, Soekardjo Wiriodiwigdo, dan Soetardjo.¹⁸

Pengurus PPBB merasa bersyukur atas diterimanya sebuah gedung baru yang diperuntukkan sebagai pusat penelitian kehutanan. Pada peristiwa itu juga diserahkan sebuah buku cetakan dari *Tectona* yang bekerjasama dengan penerbit Archipel di Buitenzorg (Bogor). Pada kesempatan ini pula terbit nomor 1 edisi 1 tahunan *Penyoeloeh*, sebuah majalah yang ditujukan bagi lembaga pemerintahan di Hindia Belanda dan diterbitkan oleh Serikat Bupati Sedyo Moelyo dan organisasi PPBB. Majalah ini direncanakan terbit sekali dalam dua bulan. Edisi pertama ini tertata rapi yang memuat tulisan Soetardjo tentang posisi pemerintah bumiputera. Sementara ada tulisan lain dari Wiranatakoesoema yang membahas tentang hari-hari bear Islam, dan tulisan Harmani tentang otonomisasi kabupaten. Penerbitan majalah *Penyoeloeh* ini untuk sementara masih dirahasiakan

¹⁸ 'Inlandsche volksraad candidaten' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 24 September 1931.

karena dirasakan perlu untuk menelaah isi majalah itu terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari penerbitannya.¹⁹

Keluhan masyarakat di sekitar Rangkasbitung dimuat dalam koran *Sin Po*. Organisasi PPBB cabang Raskasbitung diperintahkan untuk menyelidiki keluhan masyarakat tersebut. Dilaporkan bahwa telah terjadi pemungutan pajak oleh aparat kepolisian lapangan di wilayah itu. Soetardjo mencoba untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang pemungutan pajak itu. Bersama dengan Otto Iskandardinata yang juga duduk sebagai anggota Volksraad menolak aturan yang menganggap bahwa menunggak pajak dianggap suatu pelanggaran. Masalah ini mendapatkan perhatian dalam sidang Volksraad, yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak mengambil tindakan fisik kepada masyarakat bumiputera yang menunggak pajak.²⁰ Keputusan Volksraad dimuat di beberapa media masa bumiputera.

Dalam upaya meningkatkan produksi pangan, pemerintah memberikan bantuan kepada petani mesin penggiling gabah. Dengan digunakannya mesin giling tersebut, harga beras menjadi semakin mahal. Hal itu disebabkan untuk menjalankan mesin itu diperlukan bahan bakar. Dengan halus Soetardjo menyampaikan dalam sidang komisi Volksraad dengan menyindir bahwa di desa orang semakin langka mendengar suara lesung yang melankolis. Suara lesung kini telah berganti dengan suara yang monoton dan memekakkan telinga akibat digunakannya mesin penggiling

19 'Nieuwe Uitgaven' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 1 Oktober 1931, lembar ke-2.

20 'Belasting-inning te Rangkasbitoeng' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Januari 1932, lembar ke-2.

gabah di desa-desa.²¹

Dalam penutupan sidang Volksraad tahun sidang 1931 yang diselenggarakan pada 12 September 1931, ketua Volksraad dr. Meyer Ranneft mengajak para anggotanya untuk membahas tiga hal, yakni *pertama* tentang posisi anggota, seperti apa yang sudah diusulkan oleh organisasi-organisasi masyarakat bumiputera. Seperti halnya di Belanda, di Volksraad pun terjadi suara-suara yang mengkritik mereka yang baru diangkat menjadi anggota, bahkan mendesak mereka untuk segera mengundurkan diri. Tentang hal itu, Ketua Volkraads telah memberikan peringatan keras kepada para pelakunya. Ranneft menegaskan sekali lagi bahwa anggota Volksraad yang berasal dari perwakilan daerah hanya memiliki kursi dalam jangka waktu tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku bagi anggota Volksraad yang merupakan utusan daerah. *Kedua*, bahwa hak bicara mereka dilindungi oleh hukum, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk berbicara tanpa beban dan terbebas dari tekanan dari yang mengangkat mereka. Oleh karena itu, selama 1931 kondisi Volksraad sangat dinamis, dan tidak perlu khawatir dengan apa yang akan disampaikannya, termasuk kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini. *Ketiga*, karena desakan zaman dan kesulitan yang menerpa wilayah Hindia Belanda, maka sangatlah penting arti dari mosi, amandemen, atau bahkan penolakan sebagian atau seluruhnya dari suatu anggaran. Semua permasalahan yang ada perlu diulas secara kritis dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah terjadi dalam tahun sidang Volksraad 1931, keterlibatan anggota Volksraad dapat disampaikan melalui:

21 'Aan het Zoeklicht' dalam *Het nieuws dan den dag voor Nederlandsch Indie*, 19 Februari 1932, lembar ke-2.

- a. Melalui ungkapan dan keinginan anggota;
- b. Melalui nasehat Volksraad yang mengarah ke mosi;
- c. Melalui permohonan yang diwujudkan dalam amandemen untuk banding pada saat tertentu bahkan memungkinkan memberikan penawaran kepada pemerintah untuk mengambil permasalahan yang sedang dibahas;
- d. Melalui permohonan untuk menolak pos atau bagian atas dasar banding tentang prinsip tertentu, dan memungkinkan tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan Volksraad.

Sebagai contoh, pimpinan Volksraad merasa beruntung menerima jawaban atas mosi yang disampaikan oleh anggota Volksraad Thamrin tentang anggaran pemerintah. Mosi itu pada prinsipnya diterima oleh seluruh anggota dewan, kemudian diberitahukan kepada Volksraad untuk melakukan perubahan anggaran demi penghematan dan memberikan kesempatan kepada Volksraad untuk bisa membuktikan pendapatnya melalui aturan-aturan yang berlaku pada saat itu.

Pada akhir Sidang Volksraad 1931 ini, pimpinan Volksraad juga merasa puas atas sikap aktif para anggotanya dengan mendesak untuk berbicara dan membahas suatu persoalan tertentu. Bahkan sampai di tingkat perdebatanpun terjadi sesuai dengan perubahan zaman. Bahkan, tidak jarang pula perdebatan itu terjadi guna membahas masalah internal Volksraad sendiri. Saat ini terbit banyak koran, majalah, buku, organisasi masyarakat, maupun penerbitan lain yang jumlahnya menunjukkan *trend*

naik yang luar biasa, hingga meningkat tiga kali lipat dari masa sebelumnya. Untuk itu, Volksraad tidak boleh kehilangan arti penting dan nilainya dalam menghadapi suatu permasalahan.

Dalam laporan itu disinggung tentang anggaran yang dibahas pada 10 tahun sebelumnya. Dengan adanya anggaran yang jauh lebih banyak pada saat itu, tentunya dituntut lebih banyak waktu yang harus dicurahkan untuk pembahasannya. Pada 1922 dan 1923 jumlah persoalan yang serius hanya terdapat empat atau lima persoalan saja. Namun, sepuluh tahun kemudian, persoalan yang dibahas mencapai 34 masalah, termasuk permasalahan yang penting seperti yang ditunjukkan dalam beberapa interpelasi yang diajukan oleh Soetardjo selama tahun sidang 1931, antara lain mengenai jumlah siswa MULO, pembahasan beberapa kontrak minyak, rencana peraturan tentang kondisi hukum para pejabat, persiapan rencana pajak krisis, pembahasan pajak kendaraan bermotor, pengawasan atas sekolah swasta, dan cukai tembakau. Demikian banyak hal yang disampaikan oleh Soetardjo untuk dibahas dalam sidang Volksraad.

Interpelasi Pembatasan Siswa Mulo

Pergantian tahun sidang tidak menunjukkan surutnya penyampaian masalah dalam Volksraad tahun sidang 1932. Setelah Gubernur Jenderal memberikan sambutan pada acara pembukaan sidang Volksraad, dan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah anggota baru.²² Sutardjo langsung mengajukan interpelasi untuk membahas masalah pembatasan siswa bumiputera di MULO. Ia menyampaikan fakta tentang dibatasinya siswa bumiputera

²² Pada tahun sidang 1932 ini telah dilantik anggota baru Volksraad, antara lain Everts, Hart, dan Zuyderhoff. Selanjutnya lihat 'De opening van den Volksraad' dalam *Indische Courant*, 16 Juni 1932, lembar ke-2.

untuk masuk ke MULO. Pada akhir interpelasinya, Soetardjo mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah:

1. Apakah pemerintah dengan pengiriman surat edarannya yang ditujukan kepada Departemen Pendidikan dan Agama tanggal 12 April 1932 nomor 11863/B dan 11864/E 22 April 1932 nomor 13213/B, 28 April 1932 no. 13979/B dan 23 Mei 1932 no. 16775/B, telah memahami benar maksud surat tersebut;
2. Apakah pemerintah ketika memerintahkan kepada Departemen Pendidikan dan Agama mengusulkan penghematan lebih lanjut atas pendidikan yang bisa mengarah pada tindakan jauh seperti pembatasan siswa bumiputera untuk sekolah di MULO;
3. Bisakah pemerintah memberitahukan mengapa sekolah MULO saja dan hanya sekolah ini yang dipilih untuk dilakukan penghematan;
4. Bisakah pemerintah memberitahukan mengapa tidak ada kesepakatan yang dibuat dengan para direktur MULO atau rapat sekolah, juga dengan organisasi tentang sekolah keahlian lainnya. Apakah pemerintah tidak sependapat dengannya bahwa apabila kesepakatan ini terjadi, dampak tindakan yang diambil sebelumnya sudah bisa diperkirakan, setidaknya keresahan yang terjadi saat itu bisa dicegah.
5. Apakah pemerintah bersedia untuk menarik kembali pembatasan siswa bumiputera yang akan sekolah di MULO yang membawa dampak begitu jauh dan menimbulkan keresahan.²³

23 'Interpellatie Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 23 Juni 1932, lembar ke-2.

Pertanyaan itu dijawab oleh pemerintah dengan memberikan penjelasan tentang terbatasnya anggaran pemerintah. Hal yang paling mudah adalah memangkas anggaran pendidikan. Namun, dengan tegas, Soetardjo membantah, dan ia menghendaki agar dilakukan pemungutan suara untuk menentukan anggaran pendidikan. Dengan alasan bahwa rakyat di Hindia Belanda masih sangat tertinggal di bidang pendidikan, sangatlah tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk membatasi anggaran pendidikan itu. Dengan pembatasan ini masyarakat bumiputera sangat dirugikan. Bagi Soetardjo, penghematan tidak akan terbukti untuk mencapai tujuan penghematan itu. Justru kondisi sebaliknya yang akan terjadi. Oleh karena itu, Soetardjo meminta dukungan anggota Volksraad lainnya untuk mengajukan mosi dan amandemen. Ditegaskannya bahwa apabila parlemen mendukung pemerintah, maka lembaga volksraad akan lenyap karena tidak memiliki wibawa sama sekali. Permasalahannya justru penduduk bumiputeralah yang akan menerima dampak buruk dari penghematan itu.²⁴ Oleh karena itu, Soetardjo meminta agar diselenggarakan sidang khusus yang membahas tentang anggaran pemerintah secara keseluruhan. Usulan itu disepakati oleh seluruh anggota parlemen yang hadir pada saat itu.

Pembahasan tentang anggaran pemerintah dibuka dengan pidato Soetardjo atas nama fraksi dan atas nama serikat bupati sekaligus sebagai juru bicara pejabat pemerintahan bumiputera. Tekanan utama pidato Tuan Soetardjo ditekankan pada proses perwalian dan campur tangan aparat pemerintah Eropa yang masih selalu ada, khususnya yang menyangkut hubungannya dengan penduduk secara langsung. Dualisme dalam pemerintahan saat

24 'Onderwijs' dalam *Het nieuws dan den dag voor Nederlandsch Indie*, 5 Agustus 1932, lembar ke-2.

itu menurut Soetardjo sama sekali tidak ada. Kenyataan yang ada adalah bahwa apabila anggota Volksraad itu berbicara di depan penduduk bumiputera, tentunya akan sangat merugikan wibawa pemerintah.

Peraturan tentang pembagian tugas yang baru hanyalah berada di atas kertas saja. Setiap bupati, seorang asisten residen meskipun keduanya berwenang di atas kertas, pada kenyataannya muncul peraturan tentang perwalian dan pengurangan kekuasaan pemerintahan bumiputera. Ternyata asisten residen bertindak seperti kebanyakan bupati, yang seharusnya bertindak di atas itu, yakni sebagai asisten residen atau dengan kata lain sebagai wakil residen.

Soetardjo menegaskan bahwa persoalan kekuasaan dan wibawa menduduki posisi yang amat penting. Menurutnya, orang tidak menduga bahwa banyak pejabat yang menginginkan kembalinya kekuasaan lama, yang semuanya bergantung pada “rasa hormat”. Namun, kondisi feodal seperti itu harus diakhiri, karena sudah tiba waktunya keseimbangan batin harus di kedepankan. Sehubungan dengan itu, sangat disesalkan bila pemerintah menduga bisa menutup Movia di Probolinggo dan menghapuskan sekolah pemerintahan. Untuk bisa mewujudkan keseimbangan batin ini, pertama-tama diperlukan seleksi yang ketat terhadap sifat dan perkembangan teori yang lebih tinggi. Keduanya terbukti tidak mungkin terjadi apabila lembaga pendidikan itu dihapuskan.

Namun menurut Soetardjo, ada sebab-sebab lain, yang sangat melemahkan posisi kekuasaan aparat bumiputera. Pertama-tama, telah terjadi spesialisasi tugas pemerintahan yang semakin berkurang, yang merupakan akibat dari lonjakan perhatian pemerintah di berbagai bidang. Sebelumnya, tidak

terjadi aparat bumiputera tidak berperan. Namun yang terjadi saat itu adalah bertambah luasnya bidang pekerjaan yang tidak diimbangi dengan kewenangan. Dinas penyuluhan pertanian, dinas kedokteran hewan, dinas kesehatan, inspeksi keuangan, dinas peghasilan agraris, lembaga perkreditan rakyat, untuk koperasi dan sebagainya, sementara beberapa dinas dari dewan propinsi, dewan kabupaten dan kotapraja, semuanya bekerjasama untuk mengurangi arti penting aparat pemerintah bumiputera di mata penduduk.²⁵

Juga aksi politik di antara penduduk ikut berperan. Dimulai dengan aksi Sarekat Islam yang masih terus berlangsung. Semua ini bagi pejabat tingkat tinggi di daerah tertentu mudah untuk meyakinkan penduduk tentang tipuan kelompok dan semboyan politik mereka. Namun ada kondisi lain ketika pemerintahan bumiputera harus merasa prihatin, karena kekuasaan mereka benar-benar dikurangi. Sejak kepemimpinan organisasi rakyat dan organisasi masa diserahkan ke tangan kaum intelektual dan mereka yang berpendidikan, organisasi ini tidak jarang mampu memberikan pencerahan yang lebih baik dan lebih sesuai dalam berbagai bidang dibandingkan para pejabat yang kurang terdidik.

Tampak bahwa aparat pemerintah bumiputera tidak mampu memperjuangkan kepentingan penduduk mengenai sesuatu, misalnya perbedaan tentang ganti rugi dalam pembatalan kontrak sewa tanah, sementara perbedaan itu mendapatkan solusi yang memuaskan ketika PBI ikut campur tangan dalam perkara itu, bahkan langsung menyodorkan jalan keluarnya. Juga dengan pembentukan lembaga otonom, tidak bisa dipastikan apakah penduduk mengetahui bagaimana sejumlah orang yang berada di

25 'Uit 't hertogsopark' dalam *De Indische Courant*, 8 Agustus 1932, lembar ke-2.

luar lingkungan mereka memperoleh pengaruh dalam banyak hal, yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Untuk meyakinkan anggota parlemen lainnya, Soetardjo telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi aparat bumiputera yang kekuasaannya telah merosot dengan drastis. Ia membandingkan dengan pada era VOC dengan menunjukkan betapa mandiri aparat bumiputera pada masa itu, khususnya di luar kota. Ia menduga bahwa kemandirian ini bertahan hingga akhir abad lalu, meskipun orang bisa menduga bahwa penghapusan aparat bumiputera ini terjadi pada zaman Daendels. Penerapan polisi lapangan ikut membantu memperlemah posisi aparat bumiputera. Usaha yang bermaksud baik tentang pembaharuan dan reorganisasi pemerintahan, hampir tidak ada gunanya karena tenaga yang dikerahkan adalah tenaga yang reaksioner, yang menekan kembali aturan baru itu. Pergeseran kewenangan yang semula dimiliki pihak bumiputera dan penarikan aparat pemerintah Eropa secara bertahap terbentur pada pembagian tugas, yang juga masuk dalam peraturan baru ini.

Sebagian besar keluhan ini diterima oleh Soetardjo, dan mereka memperhitungkan akan munculnya zaman baru, yang seperti dikatakannya dalam sebagian pidatonya bahwa hal itu tidak dapat dihindari lagi. Di satu sisi dimilikinya kebebasan demi kepentingan aparat bumiputera sementara di sisi lain dimungkinkannya tumbuhnya kesan yang kuat untuk bisa memberikan semacam posisi otokratis kepada aparat ini, yang sama sekali tidak sesuai dengan gambaran radikal. Di mana-mana mereka memperoleh dukungan, juga di antara kelompok penduduk yang maju. Campur tangan aparat pemerintah Eropa dengan persoalan desa bukannya tanpa alasan.

Pandangan Soetardjo langsung ditanggapi oleh H.J. van

Mook yang mendukung gagasan Soetardjo. Ia beranggapan bahwa bagi aparat Eropa sangat mudah untuk membersihkan seluruh hal-hal yang kurang bersih, yang belakangan ini mulai terbukti terjadi dalam pemerintahan bumiputera. Hal ini bukan hanya terjadi di bidang keamanan dan keuangan, akan tetapi juga terjadi berbagai nepotisme yang merugikan negara dalam pengangkatan pegawai yang lama kelamaan mulai tampak. Dalam kondisi seperti inilah menurut van Mook, pemerintah harus segera mengambil tindakan.

Kesulitan terbesar bagi pemerintah bumiputera terletak pada perbedaan pendidikan yang tidak sepadan antara korps aparat bumiputera dan aparat Eropa. H.J. Van Mook menyetujui pendapat Soetardjo bahwa peraturan tentang pembagian tugas bisa menjadi ungkapan kurangnya kepercayaan itu. Seperti halnya pendapat Soetardjo yang menyitir adanya seleksi yang ketat dalam pengangkatan aparat bumiputera yang harus didasarkan pada sifat kandidat. Bagi kalangan atas di lingkungan dinas pemerintahan bumiputera, dia menganggap perlu pendidikan akademis yang lebih baik, sementara tuntutan pendidikan bagi kalangan bawah perlahan-lahan perlu juga diutamakan.²⁶

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya rapat tahunan ketiga dari Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB) dari 9 sampai dengan 11 Oktober, pada hari Sabtu, 8 Oktober 1932 pukul 19.00 malam diselenggarakan petang penyambutan. Untuk acara pembukaan, rapat diselenggarakan di ruang Teosofi, Koningsplein Barat. Acara hari pertama akan dibahas tentang pentingnya pendidikan bagi aparat pemerintah bumiputera. Pada kesempatan ini akan tampil sebagai sebagai penasehat H.J. van Mook dan wakil Ketua Umum Pusat Soetardjo Kartohadikoesoemo. H.J.

26 *Idem*, lembar ke-2.

van Mook dikenal selama ini mendukung Soetardjo dalam melakukan reformasi pendidikan bagi pemerintah bumiputera. Sebagai agenda akan dibahas tentang desa di Jawa dan Madura, terkecuali di Vorstenlanden dan di tanah-tanah partikelir. Yang akan bertugas sebagai penasehat adalah RAA Abdoelrachman. Pada hari kedua akan dibahas tentang tiga hal, yakni, *pertama*, aparat pemerintahan bumiputera dan dewan kabupaten dengan penasehat RT Abas Soerianaatmadja; *kedua*, perlunya kerjasama antara pemerintah bumiputera dan organisasi-organisasi yang berkarya di bidang tertentu. Bagian kedua ini yang menjadi penasehat adalah M. Harmani; *ketiga*, adalah permohonan kepada pemerintah untuk membimbing agar secepat mungkin kata *Inlander* dalam semua hukum dan peraturan resmi digantikan dengan kata *Indonesia*, dengan penasehat Soetardjo Kartohadikoesoemo. Sementara itu, pada hari terakhir dari pagi sampai petang diisi dengan diskusi tentang tema-tema yang dibahas dalam rapat. Malamnya penutupan diselenggarakan malam perpisahan di Maison Versteegh.

H.J. van Mook sepakat untuk mengajukan pendapat di depan rapat PPBB. Van Mook beranggapan bahwa sebagian dari rendahnya keinginan untuk memasuki dinas pemerintahan berasal dari kenyataan bahwa pemerintahan bumi putera sangat sering mendapatkan kritikan. Oleh karena itu pendidikan lebih lanjut sangat diperlukan. Penambahan peraturan, beban dalam mengatur penduduk dirasakan berat, meskipun itu semua dilakukan demi kepentingan penduduk sendiri. Padahal dengan kondisi yang ada saat itu, aparat pemerintah bumiputera akan meningkat pesat dan semakin rumit. Dengan melihat realitas yang ada selama ini, perlu dilakukan seleksi calon. Yang diperlukan adalah pembentukan watak aparat pemerintah, kejujuran, dan

keberanian mengungkapkan keyakinannya sendiri. Van Mook melukiskan kondisi saat itu bahwa aparat pemerintah yang mengikuti pendidikan akan diberikan tunjangan. Bahkan mereka juga dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke Sekolah Tinggi Hukum.²⁷

Mencermati pendapat H.J. van Mook dalam sidang Volksraad, Soetardjo pada kongres PPBB yang diselenggarakan di Hotel des Indes di Batavia pada 9 sampai dengan 10 Oktober 1932, meminta perhatian akan hal-hal sebagai berikut:

1. Tuntutan berat yang diajukan oleh dinas pemerintahan bumiputera sebagai akibat perubahan kondisi di Hindia Belanda, khususnya bagi para bupati, mendesak segera dilakukan pembentukan sebuah pendidikan akademik yang khusus ditujukan bagi dinas tersebut. Sementara itu, sehubungan dengan pembentukan kabupaten otonom, pendidikan untuk mereka itu mau tidak mau harus segera mereka ikuti;
2. Pembentukan pendidikan akademis yang ditujukan bagi dinas pemerintahan bumiputera membuat keberadaan MOSVIA menjadi mubazir;
3. Selama pendidikan akademis belum menghasilkan calon yang memadai bagi jalannya fungsi pemerintahan, sekolah pemerintahan MOSVIA sementara harus tetap dipertahankan. Syarat untuk memasuki pendidikan tersebut juga harus diperketat.
4. Dengan tujuan untuk memungkinkan seleksi yang lebih baik bagi aparat pemerintahan bumiputera yang ada selama ini, sistem magang perlu diterapkan kembali,

27 'De opkomende inlandsche beweging' dalam *De Sumatra Post*, 18 Oktober 1932, lembar ke-2.

- dan untuk sementara mereka itu harus dicutikan dari jabatan yang diemban sebelumnya.
5. Suatu aturan yang lebih baik diperlukan untuk mempromosikan mereka, dan mereka tetap memperoleh uang selama masa pendidikannya itu. Bagi mereka yang sekarang telah bekerja pada dinas pemerintahan, diharapkan segera untuk mendaftar.
 6. Peraturan sekolah perlu diperbaharui, dalam arti bahwa bagi mereka yang lulus dengan baik, diberi surat ijazah untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan apabila mereka akan melanjutkan ke Sekolah Tinggi Hukum.
 7. Untuk mencapai efisiensi pada penempatan pegawai pemerintahan bumiputera, suatu penempatan lebih lanjut baik dalam korps pegawai pemerintah maupun administratif seperti yang dianggap penting bagi dinas pemerintahan selama ini.
 8. Tuntutan tinggi bagi aparat pemerintah bumiputera juga berdampak bagi aparat yang berada di bawahnya. Kondisi mereka pun harus secepatnya dinaikkan. yang disebutkan pada nomor 1 memerlukan juga agar tingkat aparat pemerintahan bawah secepatnya dinaikkan.

Pertama-tama perlu ada aturan bahwa untuk menjadi juru tulis pembantu, minimal calon aparat harus memiliki ijazah HIS. Kedua, aparat dan pejabat bumiputera yang tidak memiliki ijazah, mereka harus mengikuti kursus tertulis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepada mereka ditawarkan kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Melalui kursus mereka akan memperoleh ijazah, yang dapat digunakan untuk mengisi jabatan tertentu di lapisan bawah seperti yang dimaksudkan oleh H.J. van Mook. Ketiga, mereka yang menunjukkan hasil terbaik setelah dua

tahun mengikuti pendidikan, akan menduduki jabatan tertinggi dari lapisan bawah korps birokrasi bumiputera, wedono, atau sekretaris kabupaten kelas-I di suatu daerah.²⁸ Semua keputusan dari Kongres PPBB akan dibahas kemudian di Volksraad.

Soetardjo memberikan nasehat lebih lanjut kepada peserta rapat PPBB. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang lebih tinggi bukan lagi merupakan sebuah keinginan, namun sebuah kebutuhan. Dengan perubahan yang ada di negeri ini, terutama melalui kebangkitan politik dalam masyarakat bumiputera. Tingkat perkembangan aparat pemerintahan bumiputera tidak sesuai dengan posisi yang harus mereka emban. Jika dibandingkan dengan tokoh politik, para pejabat pemerintah bumiputera sangat jauh tertinggal dibandingkan pendidikan dan perkembangan para politisi itu. Jika pemerintah ingin melayani kepentingan umum, maka mereka harus dididik secara lebih profesional, diberikan bekal agar mampu melayani masyarakat. Bila pendidikan mereka cukup, terbuka peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Hal ini menjadi perhatian Soetardjo karena lembaga pendidikan bagi aparat pemerintah bumiputera MOSVIA akan segera ditutup. Ditambah lagi, kemampuan para aparat bumiputera tidak lebih rendah bila dibandingkan dengan kebanyakan orang. Mereka memiliki bakat yang baik. Dengan demikian tradisi pengangkatan bupati yang didasarkan atas keturunan tidak dapat lagi dipertahankan. Melalui pendidikan yang lebih tinggi, nasib aparat bumiputera termasuk sekretaris pemerintah tidak harus puas dengan menerima upah yang rendah.²⁹

Menanggapi permasalahan usul Soetardjo untuk meminta

28 'Het Inlandsch Bestuur' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Oktober 1932, lembar ke-2.

29 'De Opleiding va het Inlandsch bestuur' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 10 Oktober 1932, lembar ke-2.

kepada pemerintah agar mengganti kata *inlander* dalam hukum dan perundang-undangan dengan kata *Indonesia*. banyak di antara aparat bumiputera yang tidak memahami hal itu. Aparat pemerintah bumiputera tidak memahami apa yang diinginkan oleh Soetardjo. Bagi dia, pemerintah kolonial diibaratkan memberikan “batu untuk roti”, dan “kerikil untuk padi”. Namun usulan ini tidaklah mendapatkan respons dari mereka. Selanjutnya Soetardjo mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta rapat dan memohon maaf apabila jawaban yang diberikan kurang memuaskan bagi beberapa pihak. Sebelum penutupan, dibentuk suatu komisi yang susunannya diserahkan kepada pengurus pusat PPBB.³⁰

Sebagai kelanjutan dari rapat tersebut, Pengurus PPBB di Batavia segera mengirimkan surat edaran kepada organisasi masa, organisasi politik dan kepada pers di wilayah Hindia Belanda. Dalam surat itu diminta agar semua organisasi termasuk pemerintah kolonial tidak lagi menggunakan kata *Inlander* lagi, dan sebagai gantinya digunakan kata *Indonesia*. Motif yang mendorong PPBB untuk menggantinya adalah keputusan rapat dan telah disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut. Untuk menjaga hubungan baik dengan penduduk lain, perlu dilakukan kerjasama dengan penduduk Cina, yang saat itu melakukan aksi khusus untuk tidak menggunakan kata *Cina* bagi mereka, karena dianggap penghinaan. Diusulkan diganti dengan istilah *Tionghoa*.³¹

Usulan ini mendapatkan tanggapan positif dari Wakil Ketua Boedi Oetomo, Woerjaningrat yang segera membentuk sebuah

30 ‘Jaarvergadering PPBB’ dalam *De Sumatra Post*’ 18 Oktober 1932, lembar ke-2.

31 ‘Rondschrjven van den PPBB’ dalam *De Sumatra Post*, 26 Oktober 1932, lembar ke-2.

komisi yang akan memberikan masukan tentang permasalahan pendidikan ini. Komisi ini meminta agar Soetardjo bersedia menjadi ketua komisi pendidikan yang bertugas menyampaikan sebuah pandangan tentang sistem pendidikan yang lebih baik bagi aparat bumiputera.

Beberapa anggota Volksraad menyampaikan dalam sidang, berhubung Thamrin memiliki banyak teman dan sering bergaul secara akrab dengan mereka di lingkungan orang Eropa, banyak orang menyandarkan harapannya bahwa perdebatan yang tajam di Volksraad mengenai masalah pendidikan aparat pemerintah bumiputera akan dapat diredam berkat lobby Thamrin ini. Namun, Soetardjo dan Wiranatakoesoema menghendaki lebih daripada apa yang diharapkan oleh anggota lainnya. Mereka lebih banyak mengharapkan kemandirian daripada kerjasama dengan aparat Eropa. Walaupun pengawasan hanya akan diterapkan di tingkat residen, namun mereka berdua tetap menolaknya.³²

Diberitakan bahwa bupati Trenggalek meninggal dunia, dan belum ada pengganti yang diusulkan. Soetardjo mengeluarkan mosi kepada Volksraad agar wilayah Trenggalek digabungkan dengan wilayah Tulungagung. Berkat mosi Soetardjo dalam Volksraad itu, dari Departemen pemerintahan diberitakan bahwa penyelidikan tengah dilakukan yang memungkinkan kabupaten Trenggalek digabungkan dengan Tulungagung yang dipimpin oleh seorang residen. Yang masih dipertimbangkan adalah bahwa Trenggalek berada di bawah seorang residen, sementara Trenggalek di bawah seorang kontrolir.³³

Sebuah amandemen diusulkan oleh Soetardjo, Soeroso,

32 'Het BB in den Volksraad' dalam *De Indische Courant*, 26 Agustus 1932, lembar ke-2.

33 'Het regentschap Trenggalek' dalam *De Indische Courant*, 16 November 1932 lembar ke-2.

Kasimo, Soejono dan Kan. Mereka berlima menandatangani amandemen yang akan diberlakukan pada tahun fiskal 1933, yakni mengurangi anggaran bagi semua aparat pemerintah Eropa masing-masing dipotong f 1. Amandemen Soetardjo dan kawan-kawan tersebut dianggap berlebihan, karena tidak mencerminkan azas keadilan. Peserta sidang menyatakan bahwa apabila aturan umum tentang hal tersebut diberlakukan untuk semuanya, pemerintah kemungkinan akan memberikan penilaian terhadap amandemen tersebut.

Kelaparan di Timor

Dalam sidang Volksraad berikutnya, Soetardjo meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kesulitan pangan yang terjadi di Timor. Banyak orang tua dan anak-anak yang meninggal dunia karena menderita kelaparan. Di daerah Amanuban yang terletak di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka tidak dapat lagi makan jagung. Mereka harus makan *putak*, yaitu sejenis sagu yang diambil dari pohon tertentu. Akibatnya daya tahan anak-anak dan orang tua berkurang, sehingga mengurangi kekebalan mereka dari serangan nyamuk malaria, yang dikenal banyak terjadi di sana.

Laporan itu langsung direspons oleh pemerintah dengan mengerahkan dinas kesehatan ke daerah itu. Untuk mengatasi kelaparan, segera dikirimkan jagung, ubi, dan makanan lain dan didistribusikan kepada penduduk yang memerlukan di Amanuban. Kebutuhan akan pil kina segera dikirimkan ke wilayah itu untuk mengatasi penduduk yang menderita penyakit malaria. Walaupun sudah dapat diatasi, namun belum semua penduduk di wilayah itu memperoleh pertolongan. Hal ini disebabkan daerah mereka yang sangat sulit dicapai karena letaknya yang jauh dari desa, karena

banyak di antara penduduk yang tinggal di pegunungan dan tidak melaporkan apabila ada penduduk yang meninggal sebagai akibat dari kelaparan dan epidemi malaria.³⁴

Pemerintahan Eropa Versus Pemerintahan Bumiputera

Perdebatan tentang dualisme dalam pemerintahan tidak kunjung selesai. Perdebatan yang sudah dimulai sejak awal sidang Volksraad periode 1931 belum mendapatkan kesepakatan di antara anggota dewan. Soetardjo mengkritik pedas kepada pimpinan Volksraad agar segera dijalankan oleh pemerintah. Semula Wiranatakoesoema tidak mau menanggapi apa yang dikeluhkan oleh Soetardjo. Namun, akhirnya ia tergerak untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Soetardjo. Ia menjelaskan bahwa 10 tahun sebelumnya, telah ada kesepakatan dengan Van der Jagt, pimpinan Volksraad saat itu. Penyelesaian masalah itu juga sudah ditulis oleh Schrieke dengan judul *politik India*, yang dimuat dalam berbagai media cetak. Wiranatakoesoema melukiskan kesulitan yang dialami oleh pemerintah bumiputera dan usaha korps itu untuk mandiri. Namun, para bupati memiliki pandangan bahwa kesempatan ini merupakan kesempatan emas. Perlahan tapi pasti bahwa asisten residen akan menjadi atasan baru bagi para bupati. Namun, perkembangan selama 10 tahun belakangan menghambat kemandirian pejabat bumiputera.

Soetardjo mengemukakan kekecewaannya setelah pengurus pusat PPBB yang mengadakan pengamatan dan penyelidikan terhadap pemerintahan bumiputera, berdasarkan keluhan-keluhan yang selama ini diterima oleh pengurus. Pidato Soetardjo mencerminkan kekecewaannya pada para aparat pemerintah

34 'wel gebrek aan mais' dalam *De Sumatra Post*, 7 Juli 1932, lembar ke-2.

bumiputera mereka yang belum siap lepas dari Belanda. Di Volksraad wakil rakyat memperjuangkan kemandirian itu, yang harus dibarengi dengan tekad aparat bumiputera untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu Juga harus dibuat peluang bagi pemerintah bumiputera untuk mencapai posisi kemandirian itu. Tanpa itu semua cita-cita tersebut tidak akan terwujud. Demikian Soetardjo mengakhiri pandangannya itu.³⁵

Menjelang akhir 1932, anggota parlemen J.J.W. van Ingen, menyusun sebuah buku panduan untuk mengatur lalu lintas motor di Hindia Belanda, yang akan diberlakukan bagi lalu lintas di Hindia Belanda. Di beberapa wilayah, ada yang padat dengan lalu lintas kendaraan bermotor. Alasan dari penerbitan buku panduan ini antara lain:

- a. Kendaraan bermotor bagi lalu lintas di jalan umum perlu diatur;
- b. Tuntutan dan aturan itu dibuat demi kepentingan keamanan umum agar kendaraan bermotor tetap dapat berjalan dengan aman di jalan raya.

Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda dan terjemahan bahasa Melayu yang dibuat oleh Soetardjo.³⁶

Tanggapan atas Tulisan Soetardjo

Sebelum tahun 1932 berakhir, Soetardjo menulis artikel di harian *Pemimpin* pada Desember 1932 yang berjudul ‘Kekoeatan Kita’. Dalam tulisan itu, ia mengungkapkan bahwa oleh pers Eropa telah dilakukan suatu aksi terhadap aparat pemerintah

35 ‘BB in de Volksraad’ dalam *De Indische Courant*, 15 Agustus 1932, lembar ke-2.

36 ‘Het motor verkeer’ dalam *De Indische Courant* 25 November 1932.

bumi putera dengan kecenderungan memperkuat posisi aparat Eropa dan dengan mengorbankan aparat pemerintah bumiputera. Soetardjo dengan tegas menunjukkan bahwa bupati Cianjur telah menjadi korban. Oleh karena itu, dalam tulisan itu, ia meminta agar pemerintah memberikan penjelasan secara rinci tentang situasi dan peristiwa di Cianjur.³⁷

Pada sidang Volksraad, atas inisiatif anggota parlemen Wiranatakusuma disampaikan mosi untuk mencabut peraturan pengawasan terhadap pendidikan Eropa. Usulan ini mendapatkan tanggapan keras dari Soetardjo yang menegaskan bahwa peraturan ini pelaksanaannya melebihi apa yang diatur dalam peraturan itu. Soetardjo mendesak agar pemerintah mengecek ke sekolah swasta yang tidak menerapkan aturan itu. Disinggung pula bahwa pers Eropa telah menghasut pemerintah untuk tidak memberikan tunjangan kepada sekolah dan guru-guru sekolah swasta. Ia yakin bahwa Volksraad masih mampu mendesak pemerintah untuk memperbaiki kondisi itu.

Untuk melakukan penghematan, pemerintah berencana menghapuskan kabupaten Sidoarjo dan Kraksaan. Menurut rencana kabupaten Sidoarjo akan digabungkan dengan kabupaten Surabaya, sementara kabupaten Kraksaan akan digabungkan dengan kabupaten Probolinggo. Soetardjo memberikan tanggapan bahwa batas waktu pelaksanaan penggabungan itu jelas tidak mungkin dilaksanakan pada 1 Januari 1933. Oleh karena itu perlu didiskusikan secara lebih rinci dengan tujuan tidak akan merugikan pihak manapun. Sebaliknya justru pemerintah akan dapat melakukan penghematan biaya pengelolaan dan penduduk juga lebih memperoleh perhatian, khususnya penduduk

37 'Tjoandjoer' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Januari 1933, lembar ke-2.

bumiputera dalam memperoleh hak-haknya.³⁸

Setelah pembahasan tentang penghematan yang dilakukan oleh pemerintah berakhir, sidang Volksraad selanjutnya membahas tentang kondisi wilayah Hindia Belanda. Soetardjo mengeluh bahwa banyak penduduk bumiputera berada dalam kondisi miskin. Pemerintah sedikit sekali memberikan bantuan, bahkan di beberapa daerah bantuan itu tidak pernah diberikan. Kritik tajam dilontarkan oleh Soetardjo yang mengkritik pandangan pemerintah bahwa petani dapat hidup hanya dengan beaya 2,5 sen per hari. Pandangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Jumlah yang diperoleh dari Komisi Ekonomi Lokal (dibentuk atas dasar usulan Wiranatakoesoema) tidak akurat. Oleh karena itu, jalan keluar yang diusulkan oleh Soetardjo adalah kota praja-kota praja kecil harus digabungkan agar dapat masuk ke dalam klasifikasi A, dengan pemberian bantuan yang lebih besar. Namun, perdebatan di Volksraad tidak berhenti sampai di situ. Dalam termin kedua dibahas tentang dampak keuangan dari tindakan penyederhanaan ini. Kembali Soetardjo menekankan agar pemerintah mencurahkan lebih banyak perhatian pada keluhan penduduk dari pada melakukan

38 Penghematan biaya yang dicanangkan oleh pemerintah telah merasuki beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan dan penggabungan beberapa bilayah dalam 1 pengelolaan. Selanjutnya lihat 'De wilde scholen ordonnantie' dalam *Soerabjasch Handelsblad*, 2 Februari 1933, lembar ke-2 dan 'Sidoardjo-Kraksaan' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 3 Februari 1933, lembar ke-2. Sementara dalam 'De wilde Scholen' dalam *De Indische Courant*, 3 Februari 1933, lembar ke-2 menyebutkan bahwa apa yang dijadikan bahan perdebatan di Volksraad ini De Dreu menanggapi apa yang disampaikan oleh Soetardjo dan Wiranatakoesoema, bahwa dipertahankannya keamanan dan ketertiban menjadi salah satu kewajiban utama pemerintah. Pemerintah sudah melaksanakan aturan itu dan telah menanggung resikonya. Peraturan ini tidak diterapkan di sekolah-sekolah swasta yang belum terdaftar.

provokasi kepada beberapa penduduk Hindia Belanda melalui pers Eropa.³⁹

Dalam sidang Volksraad, dilaporkan telah terjadi pemecatan terhadap patih Sumenep. Soetardjo melontarkan kritikan bahwa selama ini aparat pemerintah bumiputera tidak berdaya terhadap aparat Eropa. Direktur Pemerintahan memastikan bahwa masalah pemecatan Patih Sumenep memberikan alasan bagi Soetardjo untuk menyampaikan kritiknya, yang sudah berulang kali diusulkan untuk diberhentikan. Namun, tidak pernah mendapatkan tanggapan. Direktur pemerintahan mencoba meluruskan permasalahan pemecatan bupati itu bahwa aparat Eropa tidak berkaitan sama sekali dengan pemecatan itu. Ia memberikan contoh kejadian mantan patih Cianjur. Sepanjang hari ia berbicara di gedung Pengadilan Tinggi tanpa adanya waktu untuk istirahat makan. Pejabat ini tidak ada kaitannya dengan aparat Eropa, sehingga jika patih tidak bisa makan, petinggi itu juga akan menerima nasib yang sama, yang semuanya tidak diketahui oleh Soetardjo.

Dalam tahap perdebatan berikutnya, Soetardjo membela diri dengan mengatakan telah melakukan kampanye kepada pemerintah bumiputera. Ketika hak bicaranya dipotong oleh ketua sidang, ia mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kampanye. Sementara itu ia selalu menyampaikan bahwa ia selalu mendampingi pemerintah bumiputera, yang dapat disamakan dengan hewan buruan, agar dengan mudah dapat dicopot dari jabatannya.

Direktur Pemerintahan sangat beruntung dengan jawabannya

39 Perdebatan ini dilaporkan secara panjang lebar dalam 'Soetardjo: Bevolkingssteun' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 4 Februari 1933 dan dalam 'De Volksraad Replieert' pada harian yang sama terbitan 10 Februari 1933 lembar ke-2.

bahwa terhadap semua generalisasi dan pembodohan yang disampaikan oleh Soetardjo, dapat dirujuk pada sejarah kerjasama yang panjang antara aparat pemerintahan Eropa dan bumiputera. Direktur pemerintahan juga menegaskan bahwa dalam hal mengingatkan kasus kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Eropa dan bumiputera, ia tidak pernah melakukan perbedaan berkepanjangan di antara dua korps itu. Sementara itu walaupun hal tersebut masih berupa dugaan, Direktur pemerintahan mengakui bahwa tindakan Soetardjo dianggap sangat penting. Pernyataannya dibuat demi kepentingan negara. Namun apa yang dikatakan Soetardjo membawa pengaruh, khususnya mempertajam hubungan antara pemerintah Eropa dan bumiputera. Mendapatkan kritikan itu, Soetardjo mengancam dengan cara yang sopan, bahwa dia tetap melakukan penyelidikan itu. Walaupun pemerintah terpaksa harus membela diri, namun dapat diselesaikan secara damai. Menurut versi pemerintah, apa yang ditentang oleh pemerintah, tanpa perlu memperhatikan nasehat Soetardjo, pemerintah pada saatnya pasti akan bertindak. Namun Soetardjo tetap meragukan integritas korps aparat Eropa dengan berusaha mengganggu hubungan baik antara korps Eropa dan korps pemerintahan bumiputera.⁴⁰

Sidang berikutnya dalam pembahasan tentang pemerintahan bumiputera, pemerintah saat itu diwakili oleh pejabat Muhlenfeld. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus tetap berwenang untuk memberhentikan para pejabat. Pemerintah harus bersikap adil, tidak boleh membedakan antara aparat Eropa dan aparat bumiputera. Soetardjo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lemahnya dasar hukum aparat pemerintah, yakni bahwa

40 'Poging tot verscherping de verhouding' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 16 Februari 1933.

para pejabat tidak sedikitpun memiliki hak terhadap aparat pemerintah Eropa dan para pejabat lainnya. Ia juga menyinggung kasus pemecatan patih Cianjur.

Muhlenfled sebagai wakil pemerintah mengajukan protes keras terhadap pandangan Soetardjo. Ia mengatakan bahwa pengalamannya yang cukup panjang dalam pemerintahan dan dalam menyingkap kasus patih Cianjur, Soetardjo dianggap tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Muhlenfled memiliki bukti lengkap korespondensi dengan mantan patih Cianjur. Patih berulang kali diperingatkan agar memprioritaskan kepentingan negara. Feuilletau, salah satu anggota dewan memberikan komentar yang menambah kacau suasana sidang parlemen. Sebelum sidang ditutup, Muhlenfled menegaskan bahwa Soetardjo telah membuat generalisasi. Ia menolak anggapan bahwa pemerintah telah bersikap tidak adil terhadap aparat Eropa dan bumiputera. Perhatian sepenuhnya telah dicurahkan kepada kepentingan para pejabat tersebut.⁴¹

Direktur pemerintahan mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang keseriusan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang, di satu sisi membentuk hubungan tenang antara penduduk dan aparat pemerintah, dan di sisi lain mengusahakan agar kedua korps pemerintahan dalam birokrasi saling menghargai dan mengakui posisi masing-masing. Dalam kaitannya dengan kegiatan administrasi diutamakan kerjasama dan bersatu sepenuhnya demi kepentingan negara. Hal yang sangat penting dari isi surat edaran ini adalah bukan mengatur hubungan kepegawaian, melainkan lebih banyak mengatur hubungan antarpejabat, khususnya dalam kontak komunikasi birokrasi

41 'Inlandsch Bestuur' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 Februari 1933, lembar ke-2.

mereka yang tidak dapat dihilangkan. Hubungan yang baik ini memiliki pengaruh yang tinggi atas sifat kontak dan kemudahan serta keluwesan pembicaraan demi kepentingan dinas.

Jika dahulu orang sudah puas dengan surat edaran, kemudian ketika ditekan oleh perkembangan sosial yang tinggi, harus diupayakan untuk mewujudkan lebih banyak kemandirian bagi aparat bumiputera. Bantuan yang dimuat dalam surat edaran ini untuk mengutamakan upaya pemerintah, dengan mengeluarkan aturan yang lebih positif dan harus membentuk batas antara berbagai kewenangan aparat pemerintah Eropa dan bumiputera.

Tidaklah tepat tindakan beberapa aparat Eropa, seperti yang terjadi pada asisten residen Trenggalek, yang dicela oleh Zentgraff dalam *Java Bode* tanggal 15 Februari 1933, untuk digunakan sebagai ukuran dalam menilai perilaku para pejabat Eropa pada umumnya. Namun tidak salah apabila menganggap konflik yang bakal terjadi pada masa itu sebagai pertanda adanya krisis dalam tubuh birokrasi. Apabila orang tidak berusaha untuk merencanakan tindakan tepat waktu dan apabila orang tanpa sengaja membangkitkan ketegangan dalam pembagian tugas ini. Di antara kedua korps pemerintahan tidak bisa dibatasi dengan memetik manfaat, yang dihasilkan oleh saling menghargai dan menghormati dengan keuntungan simpati dari kedua pihak yang berpengaruh. Sebagai contoh, sangatlah tidak bertanggung jawab asisten residen Trenggalek mengungkapkan ancaman. Priyayi di sana bisa berfungsi sebagai dinamit yang siap diledakkan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan suatu upaya penyelidikan terhadap kekayaan pribadi aparat pemerintahan. Namun usulan Soetardjo dianggap tidak tepat, karena menganggap priyayi sebagai tak berdaya dengan adanya sejumlah konflik lokal dalam Volksraad dan menuduh aparat Eropa telah meninggalkan usaha

yang kurang berharga untuk menguasai kaum priyayi pada umumnya.

Rendahnya penghargaan pasti ditunjukkan kepada rekan-rekannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga asisten residen Trenggalek bisa memunculkan ungkapan dan tindakan demi kepentingan dinas. Kini situasinya sangat menguntungkan dan kondisinya sangat mendesak. Orang berharap pada tujuan baik pemerintah, seperti yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut. Pada umumnya kaum priyayi tidak mengeluh tentang sikap atasan mereka yang orang Eropa. Namun masih beberapa kali tampak bahwa seorang pejabat Eropa masih memiliki perhatian untuk menggunakan kebiasaan tua dan lama, seperti yang dia ketahui bahwa kaum priyayi tidak ingin mengetahui hal ini. Pers bumiputera menyebutkan adanya seorang asisten residen di sekitar Surabaya, yang telah mendorong penggunaan etika lama. Ini termasuk perkecualian khusus, akan tetapi lebih baik bila sesuatu tidak terjadi, untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.⁴²

Dalam koran *Onze Bode*, organ organisasi pegawai pemerintah pribumi (VAIB) bulan Maret 1933 nomor 3, ditemukan sebuah artikel yang berjudul “Kami memprotes”, yakni semua berkas yang berkaitan dengan konflik di Trenggalek. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan protes aparat pemerintah bumiputra:

1. Notulen rapat gabungan tertutup dari PPBB dan VAIB cabang Trenggalek pada tanggal 24 Januari 1933 yang diadakan di soos bumiputera “Langen Soeko” di Trenggalek;
2. Sebuah artikel dari *Soeara Oemoem* tanggal 3 dan 4 Januari 1933 dengan tulisan “Sarang kedjahatan”;

42 ‘Verhouding tusschen het Europeesch en Inlandsch BB’ dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 22 Maret 1933, lembar ke-2.

3. Dua buah surat tanggal 11 Februari dan 14 Februari 1933, yang ditujukan kepada residen Kediri dan ditandatangani oleh Djojokoesoemo, ketua PPBB cabang Trenggalek, selaku sekretaris kabupaten, Soebianto, wakil VAIB cabang Trenggalek yang bekerja sebagai ajun jaksa, baru saja diangkat, menurut sebuah berita mutasi dalam surat kabar yang sama, menjadi Asisten Wedana di Karesidenan Surabaya.

Di sini muncul protes yang berasal dari aparat pemerintah bumiputera terhadap cara bagaimana suatu penyelidikan dilakukan oleh bupati dan asisten residen, atas perilaku aparat pemerintah bumiputera di Trenggalek, atas perintah dari bupati Kediri, yang merupakan atasannya langsung.

Pelaksanaan penyelidikan ini juga dipengaruhi oleh tulisan tentang “Sarang Kedjahatan”, tetapi tidak perlu ditekankan bahwa residen Kediri tidak memerintahkan penyelidikan ini tanpa memiliki petunjuk yang memadai. Dalam tulisan *Soera Oemoem* 3 dan 4 Januari 1933, ditegaskan bagaimana residen Kediri menggunakan dasar yang lemah dengan memanfaatkan jasa orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sebagai contoh, tertulis “Tapi kita heran melihat residen sudah menunjukkan sikapnya yang jauh dari tata krama dan kurang lebar serta tenang pikirannya”. Selanjutnya, “Dari sini ada-ada rasanya bahwa percampuran bajingan Kamonadi dalam menyelidiki kasus korupsi Trenggalek ini sengaja dan disukai oleh residen dan asisten residen”. Masih ada sesuatu yang perlu dikutip di sini, “Semakin dalam kita memandang semakin tidak bisa dipertahankan, tingkah laku Residen Kediri dan asisten residen Trenggalek dalam pengusutan ini, dan fraksi BB Indonesia dalam Volksraad (orang teringat pada

aksi Soetardjo) tidak salah kalau mereka menjatuhkan protes yang panas dan menyala terhadap perbuatan ini”.

Akhirnya, kepada asisten residen disesalkan bahwa di toko-toko dia telah melakukan pemeriksaan atas bon-bon para priyayi; tindakan ini dicap sebagai penghinaan, dan ketidakpercayaan terhadap aparat bumiputera. ”Perbuatan seorang asisten residen macam ini amat mecolok mata jika diketahui juga, bahwa asisten residen sendiri memiliki bon hutang yang cukup banyak di toko-toko, angsuran pinjaman uang di bank ada yang sudah lebih dari empat bulan menunggak”. Demikian dituliskan dalam artikel tersebut.

Artikel yang indah ini ditutup dengan melontarkan kepercayaan bahwa Gubernur Jawa Timur “akan mengadakan pemeriksaan yang adil atas publikasi ini”. Kini aparat pemerintah bumiputera tidak akan memberikan penilaian tentang kenyataan sehubungan dengan korupsi di Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi mereka hanya melontarkan keyakinan bahwa cara seperti apa yang dapat ditempuh oleh aparat pemerintah bumiputera tersebut. Mereka menduga-duga dapat melakukan aksi untuk mengabaikan semua hirarki dan disiplin dalam suatu kondisi yang lebih baik. Apabila penyelidikan ini bertumpu atas dasar siapa yang lemah yang akan diselidiki, mau tidak mau harus dikritik dan dimusnahkan.

Banyak hal yang berhubungan dengan kedisiplinan di antara pemerintah Indonesia yang dilanggar. Notulen rapat tanggal 24 Januari memberikan kesaksian. Hingga rapat ditutup, walaupun undangan telah dikirim kepada para wakil organisasi lain dan kepada sebagian kelompok penduduk Eropa dan Cina, namun yang diundang dalam rapat ini, seperti asisten residen dan pejabat bupati yang membuat penyelidikan dan pertanggungjawaban tidak hadir juga.

Dualisme pemerintahan

Dalam *Rijkseenheid* tanggal 8 dan 15 Februari lalu nomor 19 dn 20, yang ditulis oleh organisasi Indie-Nederland dimuat sebuah artikel yang berjudul *Bedreigdbestuurs-dualisme*. Organisasi ini, yang terdiri atas para tenaga ahli mantan pejabat Hindia, telah menerbitkan sebuah laporan yang berbobot tentang para pengikut aliran Leiden, yang semakin lama semakin terbentur pada kenyataan. Mereka tidak lagi mungkin untuk melaksanakan rencana mereka meskipun orang sudah mencoba untuk berbuat sesuatu. Tulisan ini dengan keras menyerang maksud pemerintah, yang diterbitkan terakhir untuk melakukan pengurangan pejabat Eropa lebih lanjut dengan penghapusan asisten residen dari ibukota kabupaten, yang tidak memerlukan keberadaan aparat pemerintah Eropa.

Sehubungan dengan tulisan itu, gagasan telah dilontarkan oleh Soetardjo, patih Gresik yang pada 10 Agustus 1932 mendesak segera dihapuskannya dualisme pemerintahan dalam *Volksraad*. Ia memperingatkan pemerintah akan dipertahankannya kondisi ketergantungan pemerintah bumiputera sekarang ini dan mendesaknya agar memberikan bantuan kepada aparat pemerintah bumiputera dalam memperjuangkan kembali kemandirian mereka. Berdasarkan Undang-undang mereka harus memperjuangkan agar hak mereka dipulihkan yang telah dilanggar selama lebih dari 100 tahun.

Wakil dari PPBB itu menggambarkan perbedaan besar antara kondisi dalam suatu perwalian di tingkat kabupaten yang tanpa perwalian. Di kabupaten yang terjadi adalah tanpa perwalian aparat bumiputera. Aparat bumiputera di tingkat kabupaten merasa berada dalam “kurungan”, yang seharusnya dapat diupayakan suatu kondisi yang ideal bagi pemerintahan

bumiputera di tingkat kabupaten.

Suara yang menyatakan bahwa mereka tertekan dan jiwa yang terkurung ini muncul ketika aparat pemerintah bumiputera tidak menjalankan kewajibannya dan harus dikoreksi oleh pemerintah Eropa. Untuk mewujudkan tujuan itu Soetardjo mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah yang selama ini diabaikan. Walaupun semua itu membuktikan kualitas mentalitas pemimpin ini, yang demi kepentingan umum akan memberikan tekanan pada permasalahan yang menyentuh mereka. Oleh organisasi Indie-Nederland ditegaskan bahwa perubahan segera dilakukan, dengan melalui seleksi yang ketat di antara aparat bumiputera.

Pemerintah harus melakukan upaya dengan mengajukan tuntutan lewat korps aparat yang sangat disusutkan ini, pengontrolan yang ketat terhadap ketrampilan dan kewajiban para bupati. Namun saat itu masih sering timbul kesan seolah-olah para bupati berada di luar hukum dan norma kepatuhan yang dianggap melanggar aturan itu. Jadi aparat pemerintah bumiputera yang bersalah berat harus disingkirkan dari dinas, akan tetapi sering desas-desus masih beredar bahwa aparat pemerintah bumiputera yang telah menggelapkan ribuan gulden dan hampir tidak mampu membayar buga dari gajinya, tetap dipertahankan kedudukannya.

Juga terhadap kasus nepotisme yang muncul yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan oleh aparat pemerintah bawahan dan para kepala desa. Tanpa mempedulikan pelakunya, tindakan harus diambil agar unsur-unsur yang kurang baik dari korps pemerintahan bumiputera bisa dimusnahkan. Pembelaan Soetardjo menekankan secara khusus mentalitas aparat pemerintah bumiputera yang maju kecerdasannya, yang menduga lebih mampu melayani kepentingan

rakyat dalam Volksraad daripada dengan mencurahkan diri sepenuhnya pada kinerja lokal di desa dengan semua kesulitan dan hambatan yang melekat pada dinas pemerintahan.

Mereka ingin membebaskan pemerintah bumiputera dari tekanan pengawasan aparat Eropa dengan mengurangi jumlah asisten residen, dengan tujuan agar pengawasan kepada pemerintah Eropa tidak dilakukan. Mereka akan menjalankan pemerintahan menurut wawasannya sendiri. Mereka lebih suka kepada kelompok penduduk Eropa, Cina dan penduduk lainnya dan juga membantu menyiapkan kemerdekaan Hindia sesuai cita-cita sosial demokrat. Selama dualisme dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dihapuskan dan kepemimpinan Belanda dalam pelaksanaan pemerintahan atas Hindia tetap dipertahankan, tuntutan itu akan terus digulirkan.⁴³

Dengan melihat kenyataan tersebut, Soetardjo merasakan bahwa muncul konspirasi di antara organisasinya dan organisasi-organisasi lainnya. Ia kemudian mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan kepada media bahwa ia dalam perkara dualisme pemerintahan ini, ingin mengesampingkan organisasi PPBB, untuk menghindarkan diri dari *conflict of interest*. Ia ingin mempertanggungjawabkan sikap yang diambilnya secara pribadi, di luar organisasi PPBB.⁴⁴

Namun di luar dugaannya, pidato pertanggungjawabannya yang disampaikan dalam rapat rumah tangga parlemen pada 14 Februari 1933 tentang hubungan antara pemerintah Eropa dan bumiputera telah diterima oleh mayoritas anggota parlemen. Akhirnya, sebuah mosi diterima oleh Soetardjo dan disetujui

43 'Bedreigd bestuurs-dualism' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 29 Maret 1933, lembar ke-2.

44 'Soetardjo Uitte persoonlijke meening' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 31 Maret 1933.

oleh anggota dalam Volksraad, bahkan ia diberikan mandat dan kepercayaan sepenuhnya untuk mengatasi semua permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintah Eropa dan bumiputera.

Dalam sidang Volksraad berikutnya, anggota parlemen Wiranatakoesoema menduga bahwa orang telah lalai dalam mengusahakan kemandirian ekonomi di Hindia Belanda. Rakyat di Hindia yang berjumlah jutaan orang itu dibiarkan hidup atas dasar nasibnya sendiri. Anggota parlemen tersebut mempertanyakan apakah tidak ada lagi suatu strategi yang solid untuk menghindarkan diri dari krisis yang kemungkinan besar terjadi di wilayah ini. Dipertanyakan mengapa tidak ada upaya dari pemerintah untuk memberdayakan mayoritas penduduk yang pekerjaannya sebagai petani seperti yang terjadi di Belanda. Permasalahan yang disampaikan juga menyinggung tentang banyaknya petani yang kehilangan tanahnya, atau sudah menjaminkan tanahnya kepada pihak lain. Penduduk bumiputera banyak yang hidup dari dedaunan yang diambil dari kebun halamannya.

Secara panjang lebar Wiranatakoesoema menyampaikan pandangannya bahwa kondisi seperti yang ada saat itu harus segera diakhiri. Oleh karena itu ia mengusulkan adanya semangat kebangkitan nasional yang diterima sebagai suatu kenyataan yang ada dan bukan suatu upaya untuk tidak mempercayai pemerintahan Eropa di Hindia Belanda. Istilah *bumiputra* memiliki makna ‘merendahkan’. Oleh karena itu Wiranatakoesoema sangat menyesalkan tidak diakuinya istilah *Indonesia* untuk menggantikan istilah *bumiputera* yang sebelumnya telah dicetuskan oleh anggota parlemen Soetardjo Kartohadikoesoemo pada sidang 22 Februari 1933. Ia juga meyakini bahwa konflik

tidak dapat dicegah, namun hal ini bukanlah merupakan alasan untuk menghilangkan aparat pemerintah bumiputera.⁴⁵ Kata *Inlander* (bumiputera) memiliki makna merendahkan. Oleh karena itu, Soetardjo mencela tidak diakuinya penggunaan istilah *Indonesier* (Orang Indonesia). Larangan ini dimuat dalam surat edaran tentang pemisahan antarkedua korps pemerintah. Keputusan pemerintah yang termuat dalam surat edaran itu melarang penggunaan istilah *Indonesier* (orang Indonesia) dalam korespondensi resmi.

Larangan ini ditanggapi oleh Soetardjo dengan kritikan yang cukup keras. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah kolonial Belanda tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kerja keras pemerintah bumiputera. Dengan munculnya surat edaran itu, konflik tidak dapat dihindari, namun hal ini bukanlah berarti alasan untuk menyalahkan aparat pemerintah bumiputera.⁴⁶

Otonomi Daerah

Dalam rapat Volksraad berikutnya, anggota parlemen H.J. van Mook membahas persoalan otonomi daerah. Telah disampaikan bahwa ketika diusulkan suatu korps yang ada saat ini, yang diwujudkan berdasarkan tradisi yang ada, kesulitan pertama-tama terungkap dari pihak pemerintah bumiputera. Tampaknya hal ini bisa dipahami karena ini merupakan suatu lembaga, yang posisinya lebih tinggi, lingkungan kerjanya menjadi lebih luas. Aparat pemerintah bumiputera melihat kemungkinan baru bagi mereka, yang menimbulkan terjadinya gesekan di antara aparat pemerintah.

45 'Volksraad' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 23 Juli 1933 lembar ke-2.

46 'Inlander en Indonesier' dalam *De Indische Courant*, 14 Juli 1933, lembar ke-2.

Perlu ditegaskan ketika dalam kondisi alami demikian, generalisasi berulang kali muncul. Hal ini pada tahun lalu sudah disampaikan oleh Soetardjo. Walaupun hal ini sudah diputuskan, namun van Mook memberikan alasan bahwa pemerintah tidak dapat menutup mata akan kenyataan yang terjadi di lapangan, bahkan yang dinilai sebagai suatu generalisasi juga terjadi di lapangan. Generalisasi, dari sisi lain ini tidak muncul dari pemerintah Eropa, namun muncul dari pemerintah bumiputera. Generalisasi ditemukan ketika dalam berita pers orang membahas tentang kondisi yang kurang baik di kabupaten tertentu, yang karena kurangnya pengawasan dan bisa terungkap. Generalisasi muncul dengan cara yang tidak tergeneralisasi, akan tetapi pada sebagian besar masyarakat Eropa di Hindia Belanda ini. Tidaklah adil apabila di sisi lain orang memperingatkan dan menolak terhadap generalisasi beberapa orang.⁴⁷

Dalam sidang paripurna anggota parlemen, Soetardjo mengajukan pertanyaan kepada pemerintah. Berdasarkan berita di *Indische Courant*, pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus sejumlah distrik dan onderdistrik di Jawa Timur, dengan menggabungkannya ke wilayah lain. Dalam sidang paripurna itu, Soetardjo mengajukan keberatan terhadap tindakan penghematan yang berdampak pada penggabungan beberapa wilayah ke wilayah yang lain. Ia mendesak agar pemerintah tidak melakukan pengurangan pemerintahan bumiputera di Jawa Timur.⁴⁸

47 'De regentschaps autonomie' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 17 Agustus 1933, lembar ke-2.

48 'Het Inlandsch Bestuur' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Oktober 1933, lembar ke-2. Berita ini juga dibahas dengan agak sedikit mendalam dalam artikel yang berjudul 'Bezuiniging inheemsche bestuuramtenaren' yang dimuat dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 18 Oktober 1933, lembar ke-2.

Walaupun di Volksraad perdebatan tentang penghematan masih terus terjadi, aparat pemerintah bumiputera menjelang akhir 1933 merasa bangga dengan diberikannya perhatian yang meningkat dari masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagai konsekuensi logis dari pemahaman masyarakat di bidang hukum. Hal yang sangat mencolok adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan, di mana masyarakat bumiputera ikut terlibat di dalamnya, sehingga keberhasilan sistem itu berasal dari masyarakat bumiputera sendiri, yang mencurahkan perhatian mereka pada aparat tersebut. Naiknya perhatian kepada aparat bumiputera membawa dampak bagi anggota pemerintahan, dan hal ini menunjukkan ke hal-hal yang bersifat positif. Dalam harian *Pemimpin* edisi 2 bulan Agustus 1933, Soetardjo menulis artikel yang berjudul 'Djaga diri'. Artikel ini menyadarkan kepada para aparat pemerintah bumiputera bahwa sebagai penyebab utama penggelapan uang yang terjadi di kalangan aparat bumi putera disebabkan karena mereka tidak memiliki lemari kas. Soetardjo mengakui bahwa hubungan antara lemari kas dan korupsi memang sulit dibuktikan. Namun, setelah disediakannya lemari kas, orang akan mengisi 10 lemari kas yang tersedia itu dengan uang pajak yang diserahkan oleh para asisten wedono. Masalah lemari kas kemungkinan dapat dibobol oleh para penjahat merupakan masalah yang lain. Sejauh orang mampu menjaga lemari kas ini tidak terpancing untuk melakukan tindakan kejahatan, maka hubungan antara lemari kas dan penggelapan hubungannya menjadi semakin jelas.

Soetardjo menggunakan masalah lemari kas ini sebagai argumentasinya merupakan taktik cerdas untuk memotivasi pemerintah dalam upaya melengkapi peralatan yang ada di daerah yang selama ini terabaikan. Taktik yang diterapkan oleh pengurus

pusat PPBB itu akan menguntungkan kedua belah pihak, yakni aparat Eropa dan aparat bumiputera. Diharapkan dengan status Soetardjo sebagai pengurus organisasi yang besar dan sebagai anggota Volksraad gagasan yang dituliskan dalam artikel tersebut segera terwujud.⁴⁹

Pada akhir 1933, Wiranatakoesoema, anggota Volksraad, mantan bupati Bandung mengunjungi negeri Belanda. Hujan di akhir tahun menerpa atap restoran ketika Ketua PPBB ini dijamu di Belanda. Udara dingin dan berangin, saat itu menerpa ketua PPBB yang sudah dua kali mengunjungi Belanda (Kunjungan pertama dilakukan pada 1927). Tampaknya ia telah mengenal iklim ini, yang menjadi tanda pergantian musim sehingga ia tidak begitu merasa terganggu.

Sepanjang hari Wiranatakoesoema melakukan perjalanan di Jawa yang panas dan dia masih sempat berpamitan kepada orang-orang penting lainnya. Akan tetapi, ia memiliki waktu untuk berdiskusi dengan beberapa orang Belanda tentang hal-hal menarik saat itu. Pembicaraan saat itu berkisar artikel dalam *De Rijkseenheid* dari mantan gubernur van der Jagt tentang hubungan antara korps pemerintahan Eropa dan bumiputera, termasuk berdiskusi tentang tulisan Wiranatakoesoema belum lama ini tentang surat edaran pemerintah. Van der Jagt memberikan komentar sebagai berikut:

Pembagian tugas baru pada 1931 melalui goncangan telah mengganggu hubungan antara korps pemerintahan Eropa dan bumiputera, dan gesekan yang muncul dari situ tidak begitu saja bisa dihilangkan, meskipun surat edaran pemerintah tanggal 22 Juni itu menekankan bahwa pembagian tugas ini disesuaikan

49 'Over verduisteringen en nog wat' dalam *De Indische Courant*, 7 November 1933, lembar ke-2.

dengan praktiknya di lapangan. Suatu kepastian unik yang memunculkan ketakutan bahwa pembagian tugas baru ini seperti sebelumnya yang berasal dari reorganisasi, lebih banyak tampak dalam teori daripada dalam praktek.⁵⁰

Kedua korps pemerintahan yang bertumpu pada kerjasama lama dan kemitraan, meskipun demikian mencoba untuk bisa tampil lebih baik dan di sini dengan cara memuaskan berhasil betapapun sedikitnya juga menurut kehendak para tokoh nasionalis dalam Volksraad. Selain itu anggota Soetardjo, mantan patih, mengusulkan pembubaran dualisme dalam pemerintahan ini, yakni sarana terbaik untuk bisa membantu kedua korps itu di Hindia Belanda sendiri. Oleh karenanya, anggota parlemen Wiranatakoesoema menekankan terbentuknya sebuah komisi penyelidikan, karena kondisi di Hindia Belanda tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karenanya anggota Thamrin juga mencoba, kadang-kadang orang berusaha menghadapinya dan memanfaatkan ketidaklayakannya sebagai pembicara (orang mengikuti persidangan ini) untuk menjadikan Volksraad sebagai kantor pengaduan, arus tuduhan dan kecurigaan yang dituangkan tentang korps pemerintahan Eropa dan organ utamanya, aparat kepolisian. Wiranatakoesoema menghadapi serangan mereka, mampu menghadapinya dan hanya melindungi diri dari kekuasaan dan aparat pemerintah Belanda, dengan kepastian bahwa keberadaan korps ini diperlukan bukan hanya di luar tetapi juga sebagai imbalan dalam Volksraad. Betapapun sulitnya dan betapapun juga kelemahan posisinya sebagai aparat pemerintah sekaligus anggota Volksraad.

Berdasarkan berita yang dimuat di surat kabar *Soerabajasch*

50 'Een Javaan over Nederland' dalam *De Indische Courant*, 18 November 1933 lembar ke-2.

Handelsblad, pada 1 Desember 1933, diberitakan bahwa Ketua pengurus PPBB Pusat sekaligus anggota Dewan Volksraad RA Wiranatakoesoema telah mendarat dengan selamat di pelabuhan udara Cililitan yang membawanya dari Medan. Sebagai ketua organisasi PPBB, atas perintah organisasi ini berangkat ke Belanda untuk menyampaikan kepentingan organisasi yang diwakilinya sehubungan dengan pelaksanaan aturan gaji yang baru kepada Menteri Koloni di Belanda. Ia dijemput di Bandar Udara Cililitan oleh Soetardjo, anggota Volksraad dan Wakil Ketua PPBB, dr. G.F. Pijper, kepala kantor Urusan Bumiputera dan beberapa anggota keluarga. Berdasarkan keterangan langsung dari Wiranatakoesoema, ia telah diterima oleh Menteri Koloni pada 25 Oktober 1933.

Menjelang akhir tahun dalam sidang Volksraad, Sutardjo menanyakan tentang kebenaran dua buah berita yang mengatakan bahwa beberapa kabupaten berada dalam kondisi sulit, dan menurut berita, penghapusan dewan kabupaten akan dihapuskan pada 1935. Dalam menjawab pertanyaan pertama, anggota Volksraad Thamrin memeriksa anggaran sejumlah kas kotamadya dan kabupaten. Dari pemeriksaan ini, ia menduga bahwa retribusi pasar menjadi sebagian besar pendapatan daerah. Mendengar laporan dari anggota dewan Thamrin, Soetardjo merasa keberatan apabila retribusi pasar tersebut akan dinaikkan, mengingat bahwa retribusi dianggap sebagai kenaikan beban pajak, maka kenaikan retribusi pasar tidak memerlukan persetujuan dari pemerintah. Utusan pemerintah bidang desentralisasi Mr. Fuchter menjawab pertanyaan Soetardjo, bahwa beberapa dewan kabupaten telah menunjukkan posisi sulit. Penyelidikan daerah Banjarnegara dan Banyumas sedang dilakukan. Menjawab pertanyaan kedua, tentang rencana pemerintah membubarkan dewan kabupaten,

wakil pemerintah membantahnya. Rencana penghapusan dewan kabupaten belum dipertimbangkan oleh pemerintah. Jawaban ini cukup membuat tenang Soetardjo dengan mengucapkan terima kasih kepada wakil pemerintah. Demikian pula anggota dewan Thamrin, juga melakukan hal yang sama dengan Soetardjo.⁵¹

Menjelang akhir 1933, dalam sidang Volksraad dibahas usul yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya yaitu menyangkut dampak penghapusan beberapa kabupaten seperti Kutoarjo, Kraksaan dan Sampang. Pemerintah menolak permintaan untuk menunda penghapusan itu karena berkaitan dengan kesulitan praktis yang melekat pada penghapusannya dan bukan pada awal pelaksanaan program. Mr. Fuchter. Utusan pemerintah untuk urusan desentralisasi menguraikan lebih lanjut tentang kerugian negara sebesar 10.000 Gulden apabila penghapusan itu tidak dilaksanakan tepat waktu. Menanggapi hal tersebut Soetardjo sangat kecewa dengan sikap pemerintah dan mencela cara bertindak yang cepat.⁵²

Tahun Persidangan Volksraad

Anggota Volksraad Soetardjo pada 23 Januari mengirimkan pertanyaan tertulis berikut ini. Penulis ingin mendengar dari pemerintah apakah pemerintah mengetahui bahwa pada rapat umum Budi Utomo yang diadakan di Magetan, Madiun dan Ponorogo pada bulan November 1933 larangan dikeluarkan oleh polisi, antara lain:

- a. Untuk tidak menggunakan kata-kata “Indonesia merdeka” (Magetan)

51 ‘Landsuitkeeringen aan openbare gemeenschappen’ dalam *Soerabajasch Handelblads*, 13 Desember 1933 lembar ke-2.

52 ‘Opheffing der regentschappen’ dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 28 Desember 1933, lembar ke-2.

- b. Tidak mengkritik tindakan pemerintah (Madiun)
- c. Tentang politik dan tindakan pemerintah (Ponorogo)

Ia membenarkan telah mendapatkan penjelasan lisan apakah pemerintah menyetujui tindakan aparat itu, jika ya atas dasar apa dan jika tidak, atau jika tidak ada tindakan yang perlu diambil, akan melanggar undang-undang tentang hak berkumpul. Pada sidang yang diselenggarakan pada 29 Januari 1934, dibahas tentang rencana pembentukan sebuah bank perkreditan rakyat di seluruh wilayah Hindia Belanda. Wakil pemerintah C.E. Barre memberikan tinjauan secara panjang lebar tentang rencana ini.

Diketahui bahwa kas sentral selalu bekerja dengan biaya tinggi dan aparat pengawasannya juga perlu diperluas. Tidaklah mungkin hanya dengan menghapuskan kemandirian para pengurus bank bisa melakukan penghematan besar. Selanjutnya C.E. Barre melihat perbedaan antara pandangan yang saat itu ia lontarkan bersama dengan pemimpin lembaga perkreditan rakyat. Anggota dewan yang bernama Soekowati menduga bahwa kepemimpinan pusat lembaga baru ini hanya bisa menyusun program secara garis besar. Pengurus bank lokal akan ikut terlibat di dalamnya. Untuk menunjang ini semua, keberatan akan sentralisasi seharusnya segera dihapuskan. Selanjutnya ia membahas komisi lokal dan menyatakan persetujuannya dengan keinginan Soetardjo, anggota Volksraad sekaligus wakil ketua organisasi PPBB.⁵³

Tahun 1934 merupakan tahun kritis. Salah satunya tentang produksi gula di Hindia Belanda. Soetardjo menerima banyak laporan tentang jatuhnya NIVAS organisasi yang mengurus gula di wilayah koloni ini. Soetardjo di parlemen mempertanyakan kinerja yang didasarkan atas peraturan kontrak gula. Wakil

53 'De Volkscredietbank' dalam *De Indische Courant*, 31 Januari 1934, lembar ke-2.

pemerintah mempresentasikan bahwa kinerja NIVAS mampu menjawab harapan pemerintah khususnya budi daya gula. Selama 1933 terdapat 35.000 hektar lahan ditanami tebu. Soetardjo mengecam keras data yang dibebankan oleh pemerintah, karena ia telah menerima data yang cukup akurat dari para petani tebu. Dari data yang dimilikinya, Soetardjo menunjukkan angka-angka yang menunjukkan bahwa persediaan gula naik dan tidak turun. Ia mengajukan pertanyaan kepada Ir. E.P Wellenstein, wakil dari pemerintah, mengenai mana yang lebih penting antara kepentingan produsen gula atau kepentingan penduduk. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi semacam ini kepentingan pemilik modal dan kebutuhan penduduk tidak berjalan seirama. Walaupun luas lahan dilaporkan menurun, namun kenyataannya luas lahan justru bertambah. Namun pemerintah tidak dapat menekan produsen gula. Oleh karena itu Soetardjo dan anggota dewan lainnya mendesak pimpinan sidang untuk meninjau kembali kontrak pemerintah tentang produksi gula.

Soetardjo menyimpulkan bahwa NIVAS telah jatuh dan sudah selayaknya apabila pemerintah membatalkan kontrak gula di samping mengambil tindakan lain. Wakil pemerintah Ir. E.P. Wellenstein menjawab bahwa pemerintah memiliki keyakinan bahwa tanpa campur tangan NIVAS, harga gula di Jawa akan jatuh dan akan rugi bila dibandingkan dengan kondisi saat itu. Tindakan yang akan diambil pada tahun-tahun berikutnya masih dikaji, dan pada kesempatan sidang Volksraad ini kesepakatan antarkedua lembaga dapat dicapai. Menanggapi kritikan Soetardjo Wellenstein menjelaskan bahwa harga gula konsumsi di dalam negeri terlalu tinggi. Kebijakan NIVAS untuk secepatnya mengeluarkan cadangan gula yang masih berada di gudang-gudang pemerintah sangat dianjurkan. NIVAS akan

melakukan operasi pasar guna menurunkan harga gula di pasar lokal.⁵⁴ Pendapat Soetardjo langsung mendapatkan jawaban dari pemerintah mengingat bahwa persediaan gula di pasaran mulai langka, sehingga memicu naiknya harga di dalam negeri. Operasi pasar dari pemerintah diharapkan mampu menekan ulah para penimbun gula dan mengeluarkan gula dari gudang pemerintah untuk mengisi kelangkaan gula.

Sidang khusus Volkraad diselenggarakan untuk membicarakan kelangkaan beras dan kedelai di Hindia Belanda. Dalam sidang ini dibahas tentang peraturan pemerintah yang menjamin produk pertanian kedelai dan beras. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah melarang impor beras dan kedelai beserta produk turunannya. Anggota Volksraad Soetardjo mendukung peraturan ini karena melindungi produk petani dalam negeri dan menjadi produk kebutuhan penduduk. Setelah melalui tanya jawab yang cukup lama dan diperoleh data yang benar, Soetardjo mendorong pemerintah untuk meningkatkan kedua produksi pertanian tersebut guna memenuhi kebutuhan penduduk di Hindia Belanda tanpa harus membelinya dari luar. Dengan demikian para petani memperoleh jaminan bahwa produk pertaniannya akan laku di pasar lokal dan regional.⁵⁵

Sehubungan dengan keputusan pemerintah yang akan menutup pendidikan lembaga MOSVIA yang berada di Bandung

54 'Suiker' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Februari 1934 lembar ke-2. Soetardjo meminta agar perluasan lahan harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat dikontrol dengan baik produksi gula di bawah naungan NIVAS. Oleh karena itu, ia bersama anggota lainnya seperti Thamrin, Kan, dan beberapa tokoh lainnya mendesak agar segera ditinjau kontrak produksi gula di wilayah ini. Selanjutnya lihat 'Suiker-Uitvoerordonnantie 1934' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 11 April 1934, lembar ke-2.

55 'Bescherming van den Inheemsche Landbouw' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 26 Februari 1934.

dan 3 lainnya, termasuk sekolah pemerintahan di Batavia, pemerintah hanya mempertahankan satu lembaga MOSVIA yang berada di Magelang terhitung mulai Juni 1934. Dengan demikian pendidikan bagi aparat pemerintah bumiputera akan dibatasi mulai 1934 ini. Sementara itu, perkembangan di dalam negeri mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang menuntut aparatnya memiliki profesionalisme yang tinggi. Soetardjo dalam sidang Volksraad menunjukkan data-data yang akurat tentang tuntutan profesionalisme aparat pemerintah bumiputera. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengurangi lembaga pendidikan bagi aparat pemerintah bumiputera, namun sebaliknya harus menambahnya. Ia menyarankan agar pemerintah berkonsultasi dengan Komisi Penasehat Pendidikan Aparat Pemerintahan Bumiputera dan meminta agar lembaga ini segera menyerahkan laporannya kepada pemerintah. Dengan demikian, dalam waktu singkat pemerintah dapat mengambil keputusan mengenai keinginan para wakil rakyat di Volksraad, yang sudah dilontarkan dalam mosi Wiranatakoesoema yakni agar pemerintah menyediakan pendidikan akademik bagi pemerintah bumiputera di negeri ini.⁵⁶

Berita mengegerkan dimuat di koran *Soeara Oemoem* terbitan 23 Maret 1934 dan di *Bintang Timoer* terbitan 29 Maret 1934. Di kedua koran itu dimuat berita tentang peristiwa di Kabupaten Brebes. Di kabupaten itu terdapat penduduk miskin, yang karena kemiskinannya menjual anak-anak mereka kepada orang Tionghoa dengan harga antara 5 dan 7 Gulden per anak. Berita ini mengagetkan semua wakil rakyat di Parlemen. Soetardjo segera menemui Kepala Pemerintahan dengan membawa

56 'De Mosvia's' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Maret 1934, lembar ke-2.

pertanyaan tentang kebenaran berita tersebut. Pemerintah harus melakukan penyelidikan dengan harapan apabila peristiwa itu benar terjadi, tidak akan terjadi lagi di daerah lain. Ia meminta agar disiapkan tindakan yang segera diambil oleh pemerintah untuk mengakhiri penjualan anak-anak yang terjadi dan mencegah terulangnya peristiwa tersebut.⁵⁷

Dalam menjawab pertanyaan Soetardjo tentang penjualan anak yang diungkap oleh koran *Soeara Oemoem* dan *Bintang Timoer* di sekitar Brebes, pemerintah membuat pernyataan bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan ternyata seorang pengemis yang tidak dikenal telah bertanya kepada seseorang, siapa yang mau membeli anaknya. Kasus disebutkan dalam *Soeara Oemoem* dan *Bintang Timoer* hanyalah merupakan desas desus saja. Orang itu akan melepaskan anaknya kepada keluarga yang tidak memiliki anak karena alasan lain dan bukan karena alasan keuangan.⁵⁸

Rapat Umum PPBB wilayah Jawa Timur

Pada Kamis, 10 Mei 1934, di *Societeit* Concordia Surabaya telah diselenggarakan rapat umum PPBB wilayah Jawa Timur. Terdapat 14 cabang terwakili dalam rapat tersebut. Ketua wilayah PPBB, yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan R.A.A. Tjakraningrat membuka rapat dengan mengucapkan selamat datang khususnya kepada pengurus pusat PPBB sekaligus wakil rakyat di Volksraad M. Soetardjo yang hadir pada rapat ini. Setelah mengucapkan selamat datang, ketua sidang meminta semua hadirin untuk berdiri untuk mendoakan arwah Ibu Suri Ratu Belanda yang

57 'Verkoop van Inlandsche Kinderen' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 3 April 1934.

58 'Kinderverkoop' dalam *De Indische Courant* 30 Juni 1934, lembar ke-2.

wafat beberapa waktu sebelumnya.

Dalam pidato pembukaan rapat itu, ketua sidang menguraikan kondisi sulit yang dialami oleh korps bumiputera karena harus memberhentikan 1.000 orang tenaga penulis di wilayahnya. Masalah ini dibahas oleh Soetardjo tatkala ia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya. Ia merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Kemudian, ia mulai menyikapi pemberhentian itu dengan menyampaikan bahwa dengan adanya lembaga perwalian kabupaten, penggabungan daerah pemerintahan lain dan tindakan lainnya mengakibatkan peningkatan aktivitas, sehingga penulis dalam aparat pemerintah yang ada selama ini tidak mungkin dihilangkan. Ia juga memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh para kepala desa.

Rapat ini diakhiri dengan pemilihan pengurus. Hasilnya adalah sebagai berikut: Wakil ketua adalah Drajat, patih Bangil. Bendahara sekaligus sekretaris kedua wilayah PPBB Jawa Timur dijabat oleh A. Amiroelkoesni Tjokroamidjojo, yang sekaligus menjadi ketua PPBB cabang Surabaya. PPBB cabang Jawa Timur mengajukan wakil-wakil mereka yang akan duduk di Volksraad, antara lain: M. Soetardjo, R. Prawotokoesoemo, R. Djoewito, R. Tjokrosoeprodjo, R.P. Amang Makmoer, M. Oeripan dan Soediman.⁵⁹

Dalam kasus menstabilkan harga padi, beberapa anggota Volkstraad yang dipimpin oleh Soetardjo, telah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menstabilkan harga padi yang saat itu jatuh. Menjawab surat anggota dewan, pemerintah memberikan penjelasan bahwa jatuhnya harga padi sifatnya

59 'Vergadering PPBB' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 11 Mei 1934, lembar ke-2.

hanya sementara, karena bertepatan dengan musim panen. Harga padi yang berlaku tetap didukung dengan pasokan rutin ke luar Jawa, untuk menghindarkan impor beras dari wilayah lain, seperti telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan pusat benih di Belanda.

Dengan tibanya musim panen sekaligus dengan kekurangan uang yang melanda penduduk desa, Soetardjo dan kawan-kawan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah tentang tindakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mencegah penduduk desa menjual padinya dengan harga murah. Dengan kondisi seperti ini keuntungan dari peraturan impor beras hanya menguntungkan orang lain dan bukan para petani bumiputera. Dalam pandangan umum, hingga saat itu harga padi untuk masa panen hanya mengalami sedikit penurunan. Harga yang berlaku tetap didukung oleh pengiriman ke luar Jawa. Wilayah di luar Jawa sangat membutuhkan beras karena kekurangan bahan makanan, seperti telah disepakati bersama dengan pusat benih di Belanda tentang penghapusan pungutan monopoli sebesar f 1 per kuintalnya untuk pengiriman sebesar 15.000 ton beras unggulan pada 1934. Dengan demikian, penurunan harga padi tidak dapat ditolerir dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Di antara sarana yang tersedia untuk itu, di samping kesepakatan dengan penggilingan beras, perdagangan dan perusahaan pengangkutan, pemerintah telah memberikan fasilitas pengangkutannya.⁶⁰ Pemerintah juga telah merencanakan membuat peraturan untuk mencegah pengangkutan beras yang tidak dikehendaki. Perdebatan pendapat terjadi antara H.J. van Mook dan Soetardjo. Akhirnya rencana

60 'Stabilisatie van den Padi Prijs' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlndsch Indie*, 18 Mei 1934, lembar ke-2, dan 'Rijsprijs en geldgebrek: vraag van heer Soetardjo' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 23 Mei 1934 lembar ke-2.

peraturan ini diterima tanpa pemungutan suara dengan catatan bahwa Soetardjo menolak rencana peraturan itu.⁶¹

Proyek Patjal

Koran *Indische Post* menemukan adanya kelemahan dalam pembangunan proyek irigasi Patjal. Muncul kelemahan yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi dan material yang digunakan. Koran lain *Indische Courant* segera membantahnya. Masalah pembangunan proyek irigasi segera diangkat ke ranah parlemen. Soetardjo mengajukan pertanyaan tertulis kepada pemerintah tentang proyek irigasi Patjal yang dimuat dalam *Indische Post* 24 Mei 1934.

Dalam pertanyaan tertulisnya, Soetardjo mempertanyakan tentang fungsi dari proyek Patjal yang telah menelan biaya sebesar f 100.000 yang menjadi tumpuan harapan penduduk Bojonegoro Timur. Kelemahan proyek itu terkuak sehingga ada kemungkinan proyek irigasi itu tidak dapat digunakan lagi. Hal ini akan menjadi bencana yang besar bagi penduduk setempat. Soetardjo menanyakan kepada pemerintah, apabila berita yang ditulis di *Indische Post* itu benar, pemerintah harus bersedia:

- a. Perlu dibentuk sebuah komisi ahli yang akan melakukan penelitian cermat dengan tujuan melacak penyebabnya. Sementara itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kelemahan tersebut;
- b. Pemerintah mengambil tindakan sehingga proyek irigasi yang rusak itu dapat berfungsi kembali;
- c. Pemerintah harus menjelaskan kepada Volksraad

61 Rijstovervoerordonnantie' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 13 Juni 1934, lembar ke-2.

tentang hasil penelitian dan tindakan perbaikan yang diambil.

Dengan munculnya masalah proyek irigasi Patjal, agenda sidang bergeser untuk memprioritaskan penuntasan masalah ini.⁶²

Pemerintah segera menjawab pertanyaan anggota Volksraad, khususnya kepada Soetardjo yang memimpin komisi di Volksraad. Mengenai kelemahan proyek Patjal yang dimuat dalam koran *Indische Post* 26 Mei 1934, bahwa proyek Patjal di dekat Bojonegoro menunjukkan kelemahan yang sangat parah. Dengan keadaan seperti itu, pekerjaan proyek harus dihentikan sama sekali. Pada pintu air terdapat kerusakan, akan tetapi tidak menghentikan sama sekali proses pengairannya. Setiap sara pintu air sudah diperhitungkan dengan debit air aliran irigasi secara maksimal, sehingga dengan sarana penampungan kedua yang belum rusak, kebutuhan air dapat dipenuhi. Pemerintah memberikan penjelasan bahwa kerusakan yang dimaksud menunjukkan bahwa sebagai akibat kebocoran pada lingkaran penutup dari karet, penutupnya terkelupas seperti dalam usaha untuk membuka kumparan yang penutupnya rusak. Melalui Kantor Teknis pada Departemen Koloni, kerusakan itu akan diganti dengan yang baru dan proses pengelasannya akan dibantu dari Pangkalan Angkatan Laut. Bisa diharapkan dalam waktu dekat, kumparan yang rusak dapat diperbaiki segera.⁶³

Pada Jumat 6 Juli 1934, Volksraad mengadakan sidang untuk membahas rencana peraturan penjatuhan hukuman dan banding serta izin cuti dengan nota perubahan bagi para pejabat.

62 'De Patjalwerken' dalam *De Indische Courant*, 1 Juni 1934, lembar ke-2 dan 'Loos alarm' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 Juni 1934, lembar ke-2.

63 'De Patjalwerken' dalam *De Indische Courant*, 16 Juni 1934, lembar ke-2.

Soetardjo meminta perhatian khusus bagi korps aparat pemerintah bumiputera. Di lingkungan ini dengan mudah dapat ditemukan petunjuk di mana orang akan menyalahkan para pejabat, tiak hanya bagi pejabat rendah, tetapi juga pejabat tinggi. Masalah pembahasan rencana peraturan ini dibahas di Volksraad, yang selama ini mengecewakan bagi aparat pemerintah bumiputera. Pada kesempatan itu juga dibentuk Komisi Hoekman yang mempersiapkan pembentukan dewan banding.⁶⁴

Pada November tahun lalu (1933), dalam artikel di koran *Soerabajasch Handelsblad*, 8 November 1933 yang berjudul ‘Pinjaman Bank Nasional’ dan pengaruhnya, disebutkan bahwa almarhum bupati Pasuruan R.T. Kartohadiprodjo telah meminjam uang pada Bank Nasional Indonesia, dan sebagai tambahan dalam melaksanakan kewajibannya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Anggota Volkstraad Soetardjo mengajukan pertanyaan tertulis kepada pemerintah apakah dasar dari tuduhan yang dilontarkan kepada almarhum Bupati Pasuruan dalam surat kabar tersebut dengan cara yang jelas. Jika tidak, apakah pemerintah tidak sependapat dengannya bahwa salah satu penerbitan tulisan ini meskipun bukan merupakan kasus pidana menurut hukum, namun telah menyerang nama almarhum aparat pemerintah bumiputera dan memiliki pengaruh yang merugikan posisi dan martabat pemerintah bumiputera di masyarakat.

Pemerintah dalam menjawab pertanyaan Soetardjo menyatakan bahwa tidak ada kenyataan yang ditemukan, yang membuktikan bahwa bupati terakhir Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya telah mempengaruhi transaksi Bank Nasional Indonesia. Pemerintah menduga bahwa artikel tersebut

64 ‘Deambtelijke positie’ dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Juli 1934, lembar ke-2.

tidak akan merugikan posisi dan martabat pemerintah bumiputera. Pencelaan atau persetujuan atas artikel itu dianggapnya bukan menjadi kewenangan pemerintah.

Selanjutnya, terdapat berita dalam pers bahwa residen Malang telah melarang penjualan inventaris rumah bupati yang sama secara terbuka. Kenyataannya bahwa rumah itu sudah menjadi milik Bank Nasional Indonesia sebagai konsekuensi transaksi sebelumnya. Oleh anggota Volksraad Soetardjo secara tertulis ditanyakan kepada pemerintah apakah pemerintah bersedia melakukan penyelidikan sejauh mana kebenaran berita tersebut. Apabila memang benar, apakah pemerintah tidak sependapat dengannya sehingga larangan dimaksud telah menyinggung kerabat almarhum Bupati Pasuruan. Hal ini menjadi suatu peristiwa yang menggemparkan yang sebenarnya tidak perlu dan patut dikritik.⁶⁵

Dalam sidang untuk membicarakan kemakmuran rakyat, anggota Parlemen Koesoemo Oetojo meminta tindakan konkrit dari pemerintah untuk mendorong kemakmuran rakyat. Soetardjo melukiskan kondisi penduduk saat itu yang makin lama makin buruk. Ketua melakukan interupsi agar Soetardjo tidak membicarakan masalah tersebut dengan menghilangkan ‘gambaran’ masyarakat yang kondisinya memburuk. Anggota lainnya Dedreu menengahi dengan mengusulkan perluasan kewenangan Volksraad dan hak pergerakan masyarakat bumiputera.

Soetardjo menyampaikan tinjauan umum tentang kondisi ekonomi penduduk yang sangat memprihatinkan, meskipun ia juga tidak menampik banyak hal yang baik yang telah dilakukan selama 25 tahun terakhir. Ia mengingatkan dengan gambar

65 ‘Regent en bank Nasional’ dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 21 Juni 1934, lembar ke-2.

menakutkan tentang kemiskinan yang melanda penduduk. Tentang penyebabnya ia mempermasalahkannya, namun yang penting bagi Soetardjo adalah segera diakhirinya kondisi buruk tersebut.

Pemerintah merasa tidak puas dengan melihat kenyataan bahwa penduduk saat itu sudah mulai tenang dan patuh. Yang patut mendapatkan perhatian adalah telah terjadi kekeringan parah yang akan membawa dampak yang sangat serius bagi penduduk. Dengan membaca berita di media, Soetardjo mengajak para anggota Volksraad lainnya untuk mencermati keadaan ekonomi penduduk. Di desa terjadi kekurangan uang. Para petani menjaminkan atau bahkan menjual tanahnya, untuk meningkatkan usaha mereka. Di antara penduduk hanya ada satu pandangan bahwa semua yang terjadi telah membebani penduduk. Ia menyajikan sebuah karikatur tentang kondisi ini, yang melukiskan seorang wanita dan beberapa anak yang mulutnya menganga, seorang petugas pajak dan seorang Tionghoa yang mengelilinginya serta seorang petani yang banyak peluhannya serta kelihatan capek. Ketua sidang menginterupsinya dan meminta agar Soetardjo tidak menggunakan karikatur itu. Namun Soetardjo meminta agar ketua sidang, Fruin, tidak menyalahkan PPBB. Kembali Soetardjo diinterupsi, namun ia mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan masyarakat bumiputera sangat berbahaya apabila kondisi seperti itu terus dibiarkan.⁶⁶

66 Menurut artikel 'Vortzetting der debatten' yang dimuat dalam *De Soematra Post*, 13 Juni 1934, lembar ke-2, Soetardjo menunjukkan karikatur tersebut di depan mimbar, yang menyebabkan banyak orang Belanda yang menjadi anggota Volksraad tersinggung. Sementara penolakan Soetardjo atas interupsi yang dilakukan oleh ketua sidang Fruin, dibahas secara rinci dengan mengutip dialog mereka dimuat dalam 'De Geest van den PPBB' yang dimuat dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 14 Juli 1934, lembar ke-2.

Selanjutnya Soetardjo menilai bahwa tekanan pemerintah tidaklah fokus ketika dibahas masalah kemakmuran rakyat. Dengan berasumsi bahwa pemerintah lemah dalam mengambil sikap, Soetardjo mengajukan beberapa pertanyaan positif dan meminta pemerintah segera memberikan kriteria tentang batasan kemakmuran tersebut sebelum membantahnya. Dengan lantangnya Soetardjo mengatakan bahwa kekayaan Hindia tertimbun di tangan beberapa orang. Ia menangkap kesan bahwa pemerintah tidak merasa senang dengan paparannya. Namun bagi Soetardjo hal ini lebih baik daripada pemerintah menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya dari penduduk bumiputera.⁶⁷

Dalam persidangan yang membahas tentang anggaran pemerintah, ternyata Volksraad tidak pernah membahasnya secara tuntas. Soetardjo mengajukan interpelasi untuk membicarakan kembali penghematan yang ditujukan kepada aparat pemerintah bumiputera. Sidang paripurna Volksraad sementara ditunda sehubungan dengan meninggalnya Ir. Wellestein. Perdebatan tentang anggaran diundurkan beberapa hari kemudian.

Soetardjo membahas pandangan yang perlu dijadikan pertimbangan tentang pergerakan politik dan sikapnya terhadap masalah aparat pemerintah Eropa. Eksistensi kabupaten secara bertahap akan dihapuskan, sekretaris kabupaten akan diberhentikan, onderdistrik akan digabungkan. Yang perlu mendapat perhatian serius adalah reorganisasi aparat pemerintahan. Soetardjo sedang merencanakan untuk meminta suatu interpelasi tentang penghematan atas pemerintahan bumiputera. Mereka sudah merasa resah meskipun tidak pernah terlontar keluar dari mulut mereka. Dengan alasan apa pun kenyataannya bahwa kekuasaan aparat pemerintahan bumiputera pada tahun-tahun itu dikurangi.

67 'Soetardjo' dalam *bataviaasch Nieuwsblad*, 3 Agustus 1934, lembar ke-2.

Dalam paparannya, Soetardjo menunjukkan ikatan historis yang ada antara priyayi dan rakyat. Namun saat itu tugas pemerintahan bumiputera sudah tidak tersisa. Pemberian baru menjadi salah satu hal yang tidak menyenangkan dari peraturan itu. Ia menagih ucapan Gubernur Jenderal yang mengatakan bahwa bupati adalah pimpinan penduduk secepat mungkin, sehingga perlu diubah posisinya. Pemerintah harus memberdayakan mereka. Soetardjo menuliskan bagaimana organisasi pemerintah bumiputera diperlukan oleh pemerintah Eropa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar diselenggarakan pendidikan akademis bagi pemerintah bumiputera agar mereka dapat lebih diberdayakan daripada sebelumnya. Namun kenyataannya, justru sebaliknya yang dilakukan oleh pemerintah.⁶⁸

Paparan Soetardjo mendapatkan tanggapan dari Soangkoepon, anggota parlemen lain. Ia menganggap bahwa sebagai dampak dari penghematan itu, tindakan polisi lapangan salah dalam menangani seorang penumpang yang pada suatu malam harus dilempar keluar dari bus yang ditumpangnya. Pembubaran kotapraja kecil disebabkan oleh kenyataan bahwa kota-kota kecil ini akan memberikan beban yang besar untuk menggaji para pegawainya. Menurut Soangkoepon, pembaharuan pemerintahan seperti pada kondisi yang ada pada saat itu, lebih baik dimulai dengan membagi pulau Sumatera menjadi tiga wilayah. Konsekuensinya, penghematan besar akan dicapai. Ia juga meminta agar Volksraad dilibatkan dalam masalah kontrak politik dengan para penguasa swapraja (*Zelfbestuur*). Anggota parlemen Soeroso membahas perkembangan kontrak sewa tanah di Jawa Timur, sebab menurut dugaannya, petani di Jawa Timur tidak

68 'BB in den Volksraad' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 7 Agustus 1934, lembar ke-2.

terlalu dirugikan. Ia juga membahas apa yang disampaikan oleh Soetardjo mengenai pergerakan rakyat dan para pemimpinnya. Ia mempertanyakan apakah gagasan Soetardjo tersebut dapat diwujudkan. Aparat pemerintah bumiputera tetap merupakan pegawai yang harus mematuhi peraturan pemerintah. Usulan dari anggota Volksraad Soekawati yang membahas kerjasama aparat pemerintah Eropa dan bumiputera perlu dicoba, untuk mencari jalan keluar dari polemik yang terjadi di Volksraad.⁶⁹

Termin kedua dari sidang Volkraad membahas tentang anggaran pemerintahan. Utusan pemerintah diwakili oleh Van Lith, wakil pemerintah bidang pemerintahan. Ia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Volksraad secara panjang lebar. Topik yang dibahas selain pemerintahan Eropa dan bumiputera, juga masalah lain yang menyangkut pemerintahan, antara lain perkreditan rakyat, cukai ekspor karet, sensor film, kontrak sewa tanah, masalah *vorstenlanden*, dan swapraja lainnya. Pembebanan cukai ekspor sudah disosialisasikan melalui *Aneta*, dan sudah diterbitkan dalam surat kabar, karena pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada publik.

Pada pos 44, yang membahas anggaran pemerintah bumiputera, beberapa anggota parlemen seperti Soetardjo, Barre, Mandagie, Kasimo, dan Ratu Langie telah mengusulkan diamandemen. Mereka mengusulkan pos anggaran 44 tersebut sebesar f 120.000. Soetardjo menambahkan bahwa jumlah anggaran yang besar tersebut sesuai dengan penambahan beban tugas pemerintah bumiputera dan perbaikan nasib mereka seperti telah diungkapkan dalam media cetak.

Wiranatakoesoema tidak mendukung amandemen ini. Ia melakukan itu karena menghormati anggota lainnya yang telah

69 'Diversen' dalam *De Indische Courant*, 8 Agustus 1934, lembar ke-2.

mengusulkan untuk melakukan penghematan. Usulan dari komisi Hardeman harus dipegang semboyannya, yaitu pemerintah harus melakukan penghematan, dan tidak boleh ada lagi pemborosan. Aparat pemerintah harus tetap bertahan, meskipun beberapa di antaranya sudah dilakukan perombakan. Ketua sidang Fruin mengingatkan bahwa fraksi VC (*Vaderlandsche Club*) tetap konsisten dengan usulan komisi Hardeman. Perdebatan yang terjadi di parlemen tetap tidak akan dapat memaksa pemerintah untuk mengubah keputusannya. Soetardjo masih meminta pertimbangan dan menunjukkan bukti adanya perdebatan di masyarakat antara yang pro dan kontra terhadap penghematan itu. Ketika dilakukan pemungutan suara tentang amandemen Soetardjo, ternyata 36 suara mendukungnya, sementara 9 suara menolaknya. Dengan demikian pada sidang yang akan datang akan dilakukan jajak pendapat tentang anggaran bagian III (keuangan).⁷⁰

Dalam sidang Volksraad hari Selasa, 11 September 1934, berkas yang masuk pertama menyangkut surat-surat pemerintah berikut: Surat Sekretaris I Pemerintah, tertanggal 8 September 1934 nomor 2228/B tentang pemberitahuan bahwa bagian IV dari anggaran tahun 1935, telah ditetapkan oleh Gubernur Jenderal tanpa pos 44, yang diubah oleh dewan dari bab II (Amandemen Soetardjo sebesar f 120.000). Hal ini sejalan dengan Surat Sekretaris Pemerintah 8 September 1934 nomor 2227/A yang berisi pertimbangan baru dari Gubernur Jenderal yang menolak mosi Soetardjo beserta anggota Dewan lainnya mengenai pegawai pos dalam dinas pemerintahan.⁷¹

70 'Begrootingsbehandeling beeindigd' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 25 Agustus 1934.

71 'Uit den Volksraad' dalam *De Sumatra Post*, 18 September 1934, lembar ke-2.

Sehubungan dengan penolakan amandemen Soetardjo oleh Gubernur Jenderal, Soetardjo menghadap kepada pemerintah dengan menyerahkan pertanyaan tertulis apakah pemerintah bersedia untuk mengangkat kembali dalam jumlah besar jabatan penulis pertama di kantor-kantor pemerintahan. Hal ini sudah terjadi di Jawa Timur dalam koprs aparat pemerintah bumiputera yang ia anggap tidak adil karena melanggar peraturan, dan seyogyanya segera dibatalkan.

Soetardjo menolak anggapan bahwa ia terlalu memikirkan angka-angka dalam penggabungan wilayah ini. Ia menjelaskan bahwa di Magetan terbukti bagaimana sebuah kabupaten bisa dilanda terorisme ketika terlalu banyak yang diambil dari aparat pemerintahan oleh pemerintah. Sementara itu, di daerah Cirebon, kriminalitas terbukti meningkat, namun Soetardjo tidak yakin bahwa kenyataan ini akan meyakinkan pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa penghapusan kabupaten Kraksaan sebenarnya tidak perlu dilakukan. Penghapusan kabupaten Gresik, ditinjau dari sudut sejarah, dianggap tidak perlu. Gresik adalah kota pelabuhan penting di Jawa Timur. Selanjutnya betapa besarnya peran Gresik dalam sejarah Islam. Penduduk Gresik sifatnya sangat khusus bila dibandingkan dengan penduduk di wilayah lain. Mereka dibedakan dengan wilayah lain karena ketekunannya beribadah. Bupati di Gresik adalah sosok yang sangat penting. Menurut pandangannya, lebih baik menghapuskan Kabupaten Surabaya daripada menghapuskan Kabupaten Gresik.

Dalam penggabungan Gresik dan Surabaya, simpati datang dari anggota dewan Helsdingen. Bagi Surabaya, menurut dia penggabungan ini bukan merupakan bencana, apabila bupati dihilangkan dan pemerintahan akan dijalankan di Gresik. Dalam kasus ini, ada faktor non-material yang tidak dapat

diperhitungkan. Ia sepenuhnya sependapat dengan pandangan Soetardjo, yang mengajukan mosi mengenai penggabungan Gresik dengan Surabaya. Helsdingen meminta informasi lebih lanjut dari perwakilan pemerintah agar penggabungan tersebut jangan diputuskan sebelum mendengar pertimbangan Volksraad. Helsdingen didukung oleh anggota dewan lainnya Blaauw yang meminta agar pemerintah melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Perwakilan pemerintah Urusan Desentralisasi menyampaikan pendapat tentang mosi Soetardjo, dan memberikan pernyataan yang menenangkan semua pihak. De Hoog menduga bahwa usulan Soetardjo adalah menjadikan Gresik sebagai ibukota kabupaten baru dan juga kabupaten baru ini dinamai Gresik. Apabila hal ini dipenuhi, Soetardjo akan menarik mosinya ini.⁷²

Dengan pergantian tahun, yang terjadi di Volksraad tetap difokuskan pada masalah ekonomi, khususnya tentang perluasan organisasi pemerintahan. Soetardjo berpendapat bahwa reorganisasi ini sangat simpatik asalkan dilakukan sesuai dengan semua tuntutan penyederhanaan. Ia yakin bahwa pemerintah dapat mengabaikan semua amandemen yang diterima. Hal ini tidak bisa dibantah bahwa apabila tidak sesuai dengan apa yang disepakati, harus diberikan kritikan. Ia menunjukkan bahwa kabupaten akan digabungkan dan pemerintah bumiputera akan menerima tugas ganda. Tanpa penambahan pembayaran, departemen urusan ekonomi akan menjadi berbeda, karena tidak menyentuh kaum miskin seperti yang disebutkannya.

Utusan pemerintah untuk urusan ekonomi meminta perhatian dari ketua sidang tentang penyelesaian masalah ini. Ketua meminta

72 'Opheffing van regentschappen' dalam *Bataviaasche Courant*, 19 Desember 1934, lembar ke-2.

agar Soetardjo membatasi diri pada rencana yang diajukan. Soetardjo menyatakan bahwa dirinya bisa menyetujui rencana itu asal atas dasar sederhana. Soetardjo menduga bahwa utusan pemerintah bisa menerimanya, karena orang akan menghargai pengungkapan pendapat yang benar.

Soetardjo menjelaskan bahwa Soejono setidaknya dibayar 1.000 gulden tiap bulan. Ia menyatakan masih ada tujuan yang tepat bila membuat persamaan dengannya. Tentang amandemen van Helsdingen, Soetardjo berbicara atas nama fraksinya dan menyatakan bahwa penduduk memiliki lebih banyak kepentingan demi terciptanya pemerintahan yang baik daripada organisasi politik. Rencana yang ditawarkan adalah untuk memajukan ketertiban dan ketenangan. Bagi beberapa kelompok kecil, ketentuan ini berdampak terlalu luas. Akan tetapi, bagi PPBB, organisasi ini lebih memperhatikan kepentingan penduduk luas dan oleh karenanya mendukung rencana itu.⁷³

Urutan pembahasan selanjutnya dalam sidang Volksraad adalah pembahasan tentang peraturan penghapusan lembaga lokal. Soetardjo memberitahukan bahwa tidak ada lembaga lokal yang belum dibicarakan. Ia menanyakan apakah pemerintah bersedia mendengar pendapat dewan-dewan lokal. Orang-orang lapangan itu tidak bisa diabaikan begitu saja.

Anggota parlemen Blaauw mendukung usul Soetardjo dan memberikan motivasi selanjutnya. Soetardjo menunjukkan bahwa orientasi yang lemah dari dewan lokal apabila dibicarakan sebanyak 50% setidaknya harus dibebankan kepada pemerintah. Disesalkan bahwa daerah lokal terlalu sedikit melakukan pembelian, tidak didukung oleh kenyataan. Akhirnya, ia menduga

73 'De organisatie van EZ' dalam *Bataviaasche Courant*, 21 Februari 1934, lembar ke-2.

bahwa daerah lokal masih membuka mata terhadap kepentingan industri bumiputera. Berdasarkan pengalaman, hal ini bisa dibenarkan. Apabila kesalahan dibuat, mengapa tidak mencoba untuk mengatasi kesalahan itu melalui kesepakatan, melalui penunjukkan atau dengan sebuah pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

Anggota parlemen Monod de Froideville yakin bahwa daerah otonom bisa diberi peran yang memadai sejauh mereka siap untuk itu. Melalui peraturan yang sekarang diusulkan, otonomi tentu akan dibatasi. Oleh karenanya, bukan kesepakatan lebih dahulu seperti yang diminta oleh Soetardjo. Ia mendukung usulan Soetardjo. Ketua sidang Fruin juga terkejut dengan dikesampingkannya musyawarah. Ia juga mendukung usul Soetardjo.

Setelah mendengar utusan pemerintah untuk urusan ekonomi dan desentralisasi, Mr. Hart dan Dr. Hensius, masih ada beberapa orang anggota menyampaikan pendapatnya dan kemudian usul Soetardjo diterima dengan perbandingan suara 16 menyetujui dan menolak 1 suara. Untuk menerima usul Soetardjo ini, tidak diputuskan kecuali setelah melewati debat panjang yang telah diikuti oleh anggota dewan Fournier dan Kan.⁷⁴

Dalam sesi perdebatan, Soetardjo mengajukan pertanyaan kepada pemerintah apakah pemerintah sanggup menangani kolonisasi orang Jawa ke luar Jawa secara lebih serius. Yang dimaksudkannya adalah kemungkinan memperluas penampungan mereka di luar Jawa. Sebagai contoh, di Sumatra Selatan. Pemerintah Eropa dan bumiputera telah melakukan propaganda intensif mengenai kolonisasi ini. Dana untuk kolonisasi negara

74 'Aanschaffings ordonnantie' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 23 Februari 1935, lembar ke-2.

sudah dibentuk lembaganya, yang nantinya akan menjadi pos penting dalam anggaran negara. Pos ini dianggap sebagai pinjaman yang akan dikembalikan dari hasil cukai ekspor atas karet rakyat, yang dengan kolonisasi ini akan menghasilkan dana yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilan saat itu.⁷⁵

Petisi Prawoto--Soetardjo

Ketua Volksraad telah mengumumkan secara resmi bahwa anggota Volksraad Prawoto dan Soetardjo telah menggunakan hak petisinya yang ditujukan kepada Ratu Belanda dan kepada pemerintah Belanda mengenai rencana gula pemerintah Hindia, telah disampaikan kepada Volksraad oleh Mr. G.H.C. Hart. Melalui pemberitahuan ini tidak diadakan perdebatan, dan para anggota itu memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pemerintah yang menurut pendapat mereka tidak bermanfaat bagi kepentingan industri, perdagangan dan penduduk bumiputera.

Pada bagian pertama petisinya, dipermasalahkan pembatasan produksi yang diusulkan setelah bulan April 1936. Pengalaman selama dua tahun terakhir tampak campur tangan pemerintah di bidang gula, sehingga muncul keraguan akan kebutuhan dan kesesuaian tindakan tersebut. Pada pandangan ini tidak ada keterangan lebih lanjut yang ditambahkan. Para pembuat petisi menduga bahwa dugaan mereka umumnya diakui sebagai sesuatu yang benar, sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan tentang hal ini.

Terlihat titik lemah pertama kritik yang dimaksudkan. Lembaga Volksraad mengetahui bahwa sebagian besar kehidupan usaha bumiputera memiliki keyakinan kuat bahwa campur tangan

75 'De Javanen transmigratie' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 23 Maret 1935, lembar ke-2.

pemerintah selama dua tahun terakhir telah membawa bencana. Dikhawatirkan persediaan menjelang akhir musim panen tahun 1936 seluruhnya telah habis.

Tidak bisa dipastikan bahwa dalam penjualan bebas dan produksi tak terbatas akan bisa menggantikan proses penjualan ini. Gula sejak lama tidak lagi menjadi suatu produk yang hanya ditawarkan melalui penjualannya untuk dikonsumsi. Sangat jarang daerah pemasaran menolaknya, karena gula merupakan sesuatu yang lebih banyak dibeli lebih dari untuk kebutuhan saat itu. Jika tidak ada kebutuhan ini, maka orang bisa menawarkan di bawah harga pasaran dunia yang berlaku tanpa memicu harga jual yang lebih tinggi.

Suatu industri yang melayani kepentingan umum di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersedia bekerjasama dengan baik, bisa meminta campur tangan pemerintah. Wawasan industri gula di Jawa justru sebaliknya, malah terbagi. Dengan kondisi seperti ini untuk kepentingan umum rakyat menuntut agar pemerintah memberikan arahan untuk membatasi produksi. Untuk menghabiskan persediaan ini, dibutuhkan waktu selama beberapa tahun.

Hal ini tidak dianggap sebagai suatu kerugian. Industri gula memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Sebuah perusahaan yang karena pengalamannya tidak menguntungkan, terpaksa berpaling kepada krediturnya atau mencari pemodal baru, tidak akan berhasil apabila mereka tidak melakukan kesepakatan dalam waktu singkat. Banyak perusahaan gula yang memproduksi gula murah tetapi modal kerjanya terlalu besar, sejak kejatuhan VISP dan VJP pemerintah harus mengambil tindakan agar industri gula dapat menjamin kelangsungannya.

Kedua sosok pemrakarsa petisi menuliskan bahwa tekanan

pemerintah juga memiliki andil merugikan industri gula, karena tidak adanya pembatasan produksi dan penjualan. Sebenarnya pengurangan industri gula di Jawa tidak perlu dilakukan. Pabrik yang tampaknya buruk dapat dihidupkan lagi dan usaha yang secara keuangan lemah dan merugi layak hidup kembali. Dari semua ini, penduduk bumiputera mengalami kerugian langsung dan tidak langsung.

Dari apa yang disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kelangsungan pengurangan produksi banyak sasaran yang baik bisa terlewat, sehingga pada suatu saat akan lenyap. Para pembuat petisi yakin bahwa tidak ada pabrik buruk yang perlu dihidupkan kembali.

Penerbitan izin produksi menurut teori bisa dianggap sebagai beban tambahan bagi kebanyakan perusahaan yang layak hidup. Ternyata hanya sedikit yang disampaikan tentang informasi ini. Perusahaan besar menutup 80% produksinya. Perusahaan kecil dan pabrik mandiri hanya mewakili pengurangan produksi sebanyak 300 ribu ton dibandingkan 1.200.000 ton untuk pabrik-pabrik yang bekerja dalam ukuran besar.

Orang tidak perlu membuat praduga berlebihan tentang nilai izin tanam tebu. Pada saat pabrik yang dijual, kemudian mesinnya dijadikan besi tua, atau untuk dipindahkan ke daerah produksi lain, harga penjualannya berkisar antara 50 dan 100 ribu gulden. Orang tidak akan menduga bahwa izin tanam ini akan membawa banyak hasil. Sehubungan dengan kerugian langsung dan tidak langsung penduduk bumiputera, akan diungkapkan dan diuraikan dalam industri gula.

Melalui proses pemangkasan perlahan, penduduk bumiputera akan diuntungkan. Juga mereka memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Dapat

diduga sepenuhnya bahwa nasib orang bumiputera di daerah gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih kurang menguntungkan dibandingkan di wilayah lain di Hindia Belanda. Perlahan-lahan proses pembongkaran dan pengawasan pemerintah yang berlaku atas harga tanaman pangan seperti beras, jagung dan kedelai, telah jauh lebih banyak menyelamatkan penduduk bumiputera.

Para penggagas petisi itu menduga bahwa dalam penyelesaian masalah gula, tidak cukup diperhitungkan dengan kenyataan bahwa gula menjadi masalah dunia. Sangat disesalkan bahwa pemerintah bertumpu pada faktor yang tidak pasti, hipotesa, harapan dan wawasan subjektif. Dalam membahas rencana pemerintah oleh Mr. Hart, *Indische Courant* sebagai corong kehidupan usaha Jawa Timur, melontarkan penilaiannya tentang cara bagaimana posisi dunia dan posisi gula Jawa diuraikan.

Rencana biasanya harus didasarkan pada kemungkinan dan harapan. Pada masa darurat ini, hal ini tidak dapat dihindari. Akan tetapi, oleh karena pemerintah memiliki batas aman 10% ke atas dan ke bawah, ketika selama tiga tahun setelah 1935 mereka harus menetapkan produksi 1 ½ juta ton gula Kristal. Para pembuat petisi tidak memahami tentang NIVAS. Dari kesimpulan mereka tampak bahwa mereka menganggap sangat mungkin apabila tindakan pemerintah dalam kaitannya dengan pembatasan gula tidak bisa ditolak.

Mereka menduga bahwa suatu organisasi penjualan dalam bentuk apapun juga, merugikan kepentingan bumiputera. Mereka menegaskan bahwa NIVAS telah membawa dampak merugikan langsung atau tidak langsung bagi penduduk bumiputera. Dampak apa yang dialami konsumen tidak dapat diungkapkan. Bila disebutkan tentang kerugian tidak langsung, dapat diduga bahwa kedua anggota Volksraad ini menilai bahwa kenaikan harga

sedikit yang terjadi secara perlahan-lahan telah disampaikan oleh NIVAS dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Namun, tidak seorangpun menganggap industri gula ini tidak peduli ketika mereka dibiarkan berjalan sendiri dalam menjual produknya, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Para pengusaha gula untuk daerah penjualan luar negeri akan saling bersaing. Untuk pasaran Hindia mereka harus bekerjasama. Untuk penjualan dalam negeri, suatu organisasi bersama akan dibentuk sehingga kepada setiap pabrik akan diberikan lahan distribusinya yang telah ditentukan.

Tentang kerugian tidak langsung bagi penduduk bumiputera, yang dimaksudkan oleh para pembuat petisi ini, tidak dapat diprediksi. Mereka berbicara sambil lalu tentang perkembangan harga gula Hindia, yang tidak sesuai harapan. Namun, mereka bisa diduga tidak mendapatkan banyak dukungan. Dengan cukai yang ditetapkan atas gula kristal, harga gula yang diolah secara tradisional harganya terus naik. Kenaikan harga ini tidak berlaku bagi sebagian produk Hindia, yang dikapalkan keluar Hindia Belanda. Tampaknya ini bisa dipahami karena cukai tidak berjalan di luar wilayah ini. Akan tetapi apa yang dikapalkan jauh lebih kecil, sementara penjualan dalam negeri dari produk bumiputera naik tajam. Dengan ini jelas usaha gula bumiputera diuntungkan.

Penjualan gula oleh lembaga NIVAS lebih banyak dikekang daripada didorong. Tekanan orang-orang itu tetap berada di luar lingkup perdagangan gula. Seharusnya bersikap hati-hati dalam membaca kritik terhadap NIVAS dan keberatan terhadap campur tangan pemerintah. Lembaga Volksraad telah berusaha keras untuk menemukan titik-titik kelemahan dari para penulis petisi ini. Namun lembaga parlemen ini belum berhasil.

Diperkirakan bahwa argumen yang diajukan ke Belanda

dapat dibantah. Keberatan yang disampaikan diterima tetapi tidak ditunjukkan. Masih dicoba untuk meneruskan diskusi yang secara terus menerus diberikan kesempatan. Untuk itu, anggota parlemen sebaliknya tidak perlu memperhatikannya. Terhadap pekerjaan mulia yang sudah dirinci oleh Mr. Hart, para penentang petisi itu akan memberikan penilaian yang kurang meyakinkan dan tidak terdokumentasi dengan baik.⁷⁶

Anggota Volksraad berkumpul kembali untuk rapat di bawah pimpinan ketua pengganti F.H. de Hoog. Dalam rapat ini dibahas tentang kemungkinan perpanjangan waktu yang ditetapkan untuk membahas peraturan impor gula tahun 1935. Dalam rapat ini tidak akan dibahas petisi Prawoto dan Soekardjo. Dengan demikian perdebatan tentang hal itu tidak diizinkan dibahas, karena munculnya peraturan yang baru, yang sudah diterbitkan pada 18 Februari 1935. Berdasarkan peraturan yang baru ini, pembahasan dalam Volksraad hanyalah merupakan formalitas saja. Oleh karena itu, Soetardjo mengingatkan bahwa untuk memperjuangkan usulan petisi itu, diperlukan persiapan dengan konsekuensi akan menghabiskan biaya yang besar.⁷⁷

Sidang Volksraad yang diselenggarakan pada 1 Mei 1935, telah mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara diperoleh suara 9 menolak dan 8 menerima. Dengan demikian, petisi ini telah dihentikan dalam sidang Volksraad.⁷⁸

76 'Petitie Prawoto Soetardjo' dalam *De Indische Courant*, 14 Maret 1935, lembar ke-2.

77 'Suiker aangelegenheden in den Volksraad' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 2 April 1935, lembar ke-2 dan 'Suiker aangelegenheden in den Volkstraad, 3 April 1935, lembar ke-2.

78 'Petitievoorstel verworpen' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 1 Mei 1935, lembar ke-2.

Dalam kesibukannya dalam sidang Volksraad, Soetardjo masih menyempatkan diri untuk menghadiri rapat organisasi PPBB di Sumenep, Madura. Pengurus pusat Perhimpoean Pegawai Binnenlandsch Bestuur (PPBB), Soetardjo memimpin rapat organisasi ini. Rapat ini dihadiri 60 orang. Kehadiran Soetardjo disambut oleh patih Bangkalan Thendrokoesoemo. Kehadiran Soetardjo di Bangkalan dan Sumenep ada dua, yakni: menghubungi cabang-cabang dan memajukan kepentingan seluruh anggota PPBB.⁷⁹

Sekembalinya dari Bangkalan dan Sumenep, kembali Soetardjo menghadiri sidang Volksraad yang khusus membahas tentang lembaga kehakiman (Bagian II). Ia dalam sidang ini mengusulkan penggantian tenaga penulis ‘onderdistrik’ yang memperoleh tugas tambahan seperti melaksanakan beberapa vonis, keringanan dalam biaya persidangan. Para petugas pengadilan masing-masing menanggung biaya pengangkutan sepenuhnya, walaupun sebenarnya biaya ini sepenuhnya fiktif.

Menjelang akhir tahun 1935, anggota lembaga parlemen mulai melakukan pembahasan tentang penyesuaian gaji yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Westerouen van Meeteren dan Beets. Pada awal pembicaraan, Soetardjo mengajukan pertanyaan apakah penerapan gaji yang sudah diputuskan itu dapat dipastikan atau tidak, karena Gubernur Jenderal selama audiensi dengan wakil pemerintah bumiputera telah mengungkapkan ketidakmungkinan melaksanakan penetapan gaji yang baru. Oleh karena itu Soetardjo meminta jawaban positif tentang hal tersebut. Selanjutnya, Westerouen van Meeteren menjelaskan bahwa pertanyaan itu harus ditolak.

79 ‘De PPBB te Pamekasan’ dalam *De Indische Courant* 12 Juni 1935, lembar ke-2.

Walaupun sudah dilakukan persiapan, namun dalam surat edaran itu telah ditegaskan bahwa aturan itu dibatalkan apabila diputuskan walaupun hanya sementara saja sifatnya.⁸⁰ Sebuah mosi telah dilayangkan oleh Soetardjo, bersama dengan Soeroso, Sosrohadikoesoemo, Ratulangie, Thamrin, Prawoto dan Soangkoepon. Ada pun mosi tersebut berisi sebagai berikut:

Lembaga Perwakilan

Mendengar perdebatan

Mendesak pemerintah agar:

- a. Tidak melaksanakan kenaikan gaji yang diusulkan, akan tetapi bila diperlukan menerapkan potongan gaji umum untuk itu;
- b. Membentuk sebuah komisi baru dalam waktu sesingkat mungkin yang akan mendiskusikan masalah ini secara lebih terarah, dan diberikan wewenang untuk merencanakan sistem gaji yang baru yang berumpu pada dasar logika di semua aspeknya, dan bertolak pada norma yang berlaku di wilayah Hindia Belanda.⁸¹

Selanjutnya Soetardjo menolak pengadaan ‘gaji transisi’. Mengenai dipertahankannya potongan peralihan dalam bentuk yang lebih lunak, ia juga tidak secara terbuka mendukungnya.

Sidang Volksraad 1936

Dalam mengawali tahun 1936, sing Volksraad dimulai dengan

80 ‘De salarismaatregelen’ dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 12 Desember 1935, lembar ke-2.

81 ‘De salarisdebatten in tweede termijn’ dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 18 Desember 1935, lembar ke-2.

membahas agenda mengenai pembaharuan pemerintahan, dan anggaran tentang pembayaran oleh perusahaan minyak sebesar f 5 juta. Dalam agenda rapat juga tercantum acara pembahasan sebuah mosi yang diusulkan oleh anggota Soeroso, Thamrin dan Wirjopranoto tentang bagaimana penyetoran sebesar f 5 juta pada tahun ini dapat diterima dari perusahaan minyak yang selama ini tidak bisa diterima pemerintah. Mosi ini berisi mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam memungut cukai ekspor atas produk minyak. Setelah tengah hari juga akan dibahas mosi Thamrin dan kawan-kawan (tekanan untuk menetapkan harga maksimal penjualan minyak dalam negeri atas dasar harga per 1 Januari 1935) yang sudah diputuskan dalam rapat 20 Agustus 1935 dengan pemungutan suara. Soetardjo mengingat kata-kata yang diucapkan oleh ketua dalam penutupan tahun sidang sebelumnya dan kritik telah dilontarkannya. Ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa anggota dewan hanya bisa bicara, namun tidak mampu untuk mengambil pungutan. Ia mengingatkan pernyataan anggota dewan Sosrohadikoesoema yang meragukan pungutan ini.

Tuan Soetardjo tidak puas dengan jawaban pemerintah atas persoalan apakah beban pajak tambahan ini tidak akan dialokasikan untuk kepentingan penduduk. Tentang hal ini ia tidak merasa tenang dan meminta penjelasan yang tegas. Juga mengenai persoalan apakah beban ini tidak ditimpakan pada biaya pegawai Asia, ia masih belum puas dengan jawaban yang diberikan. Soetardjo meminta pengajuan informasi dengan meminta agar pemerintah mengambil langkah-langkah supaya harga sewa lahan minyak desa kembali dinaikkan. Akhirnya, ia meminta pemerintah untuk menerima kembali usul itu dan jika mungkin dimasukkan dalam sebuah usulan yang berupa

pemungutan pajak minyak.

Ketua sidang berterimakasih kepada Soetardjo atas bantuannya yang disampaikan pada acara pidato penutupan sidang pada 20 Agustus 1935 itu. Namun ia masih berharap agar anggota lain tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Soetardjo. Ketua sidang menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang direncanakan itu. Ia yakin bahwa sikap Volksraad akan mendukung pemerintah.

Dalam sidang yang sedang berlangsung, anggota Volksraad De Hoog masih mempersoalkan pernyataan Soetardjo tentang pidato penutupan oleh ketua. Ketua hanya menetapkan bahwa ia memiliki hak untuk berbicara demikian. Atas jawaban pemerintah tentang berbagai pernyataan, De Hoog tidak puas. Ia tidak mengungkapkan kembali pandangan perusahaan minyak, akan tetapi hanya menyatakan pandangan pribadinya sendiri. De Hoog keberatan bahwa beban yang menimpa industri minyak di tempat lain tidak dikenakan pajak minyak. Ia membayangkan betapa berat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan minyak Astra Romana pada 1928. Mengenai kebijakan harga, pemerintah memiliki waktu beberapa tahun untuk memenuhi permintaan mengadakan suatu penyelidikan di sana. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil atas penyelidikan itu.⁸²

Pembicaraan dalam sidang pertama 1936 ini berkembang ke pajak-pajak lainnya yang bisa dipungut oleh pemerintah. Ketua meminta pendapat para anggota, untuk membahasnya dalam sidang ini, walaupun belum diagendakan sebelumnya. Soetardjo mengajukan pendapat bahwa secara pribadi ia menganggap sangat perlu untuk membicarakannya dalam sidang kali ini. Ia

82 'De bijzondere betaling uit de olie' dalam *De Indische Courant* 11 Februari 1936, lembar ke-2.

sampaikan bahwa ada berita pers dari Belanda yang menyatakan bahwa Menteri Koloni akan memberikan bantuan lebih lanjut ke Hindia, sehingga orang bisa membahas persoalan ini dalam musyawarah. Ketua bersedia untuk menanggapi keinginan itu meskipun dia tidak sependapat dengan motif Soetardjo. Anggota dewan van Helsdingen menganggap motivasi yang diajukan oleh Soetardjo kurang tepat. Orang tidak memiliki naskah lengkap dari pidato menteri. Van Helsdingen menganggap tidak perlu menunda pembahasan hanya karena memberikan sebuah rangkuman singkat, yang asal beritanya belum begitu jelas. Sikap bersama bisa diambil setelah ada telegram atau hal lain yang langsung dikirimkan dari negara induk.

Anggota lainnya, Weyer, sependapat dengan paparan van Helsdingen. Weyer mengingatkan janji direktur urusan ekonomi untuk mengungkapkan hasil pembahasan itu seluruhnya. Dia menganggap benar semua alasan yang disampaikan oleh anggota dewan untuk menerima usul-usul yang akan diajukan secepatnya. Setelah selesai menyampaikan pendapat itu, Ratu Langie langsung menentang pendapat ini dan setuju dengan permohonan Soetardjo. Berita pers bisa salah, bisa diterima bahwa inti pernyataan Menteri Koloni dapat mengungkapkan kembali kebenaran.

Pandangan De Hoog sedikit berbeda dengan anggota lainnya. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak mendukung motivasi Soetardjo, dia merasa setuju dikabulkannya permohonan Soetardjo untuk membahas usul-usul yang disampaikan dalam musyawarah. Akhirnya ketua menyatakan persetujuannya untuk membahas permasalahan itu secara tertutup.⁸³

Sidang dilanjutkan pada hari berikutnya, hari Selasa,

83 'Gedelegeerden bijeen' dalam *De Indische Courant* 11 Maret 1936, lembar ke-2.

untuk membahas agenda rapat yang telah ditentukan. Wakil pemerintah H.J. van Mook, pejabat tinggi urusan krisis umum, menduga bahwa pembahasan yang berlangsung di Volksraad bagi pemerintah sangat mengejutkan. Pembicaraan ini didasarkan pada berita pers tentang pernyataan menteri. Pemerintah tidak akan melakukan perubahan dalam pandangannya karena belum tiba saatnya untuk melaksanakannya. Van Mook menunjukkan bahwa titik berat perdebatan panjang lebar terletak di luar lingkup usulan-usulan yang belum waktunya untuk diperdebatkan.

Soetardjo kembali mempermasalahkan pada beberapa persoalan. Ia menghilangkan kesan seolah Ratu Langi termasuk mereka yang mencetuskan kedua mosi dan memberikan pernyataan tentang kemunculannya. Ini dilakukan dengan sumbangan pemikiran dari semua anggota yang ikut menandatangani. Selanjutnya Soetardjo menunjukkan bahwa ia telah menanggapi usulan anggota lainnya yang berasal dari Mr. Roep. Mosi pertamanya yang disampaikan akan diubah dan kemudian akan dirujuk pada pernyataan Weyer dan Kerstens. Ia akan membahas kembali permasalahan standar upah Belanda. Soetardjo menguraikan pendapatnya bahwa ia mendasarkan pandangan itu pada berita pers yang diterima melalui telegram. Disampaikannya bahwa ia juga mengetahui laporan pers panjang lebar dan meminta Weyer dalam sidang termin kedua yang akan digelar setelah istirahat siang, untuk tampil dengan menunjukkan laporan lengkap yang dimilikinya. Soetardjo selanjutnya kembali pada keterangannya mengenai kebutuhan penduduk dan menggambarkannya dengan berbagai contoh baru, termasuk suatu drama di Buitenzorg yang disebutkan kemarin dari koran *Pemandangan*.

Soetardjo menduga bahwa pandangan menteri koloni yang

benar adalah Hindia pasti akan memperoleh bantuan dari Belanda. Ia mengemukakan bahwa orang harus menunggu pembahasannya (*handelingen*). Soetardjo dengan tegas mengatakan bahwa Weyer telah mengetahui semuanya rencana itu.

Soetardjo menganggap pandangan sangat logis karena apa yang dikehendaki oleh menteri koloni itu benar. Sementara itu, ia menekankan bahwa suatu penelitian cermat harus dilakukan terhadap kondisi yang digambarkannya. Anggota Volksraad Kan menyampaikan bahwa wali negeri telah memerintahkan kepada semua pejabat wilayah untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap kondisi ekonomi penduduk. Apabila kondisi tersebut muncul seperti yang digambarkan oleh Soetardjo, maka juga dibicarakan tentang bagaimana cara mengatasinya agar kekurangan dan kesalahan pengelolaannya dapat segera diperbaiki.

Weijer mengikuti segera langkah ini. Dia tidak memberikan tanggapan terhadap ajakan Soetardjo. Ia juga tidak mau mengutip dari *Handelingen* (pembahasan), yang dianggap tidak lengkap. Namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada Soetardjo. Weijer menduga bahwa orang-orang di parlemen Belanda memiliki pengertian yang lebih baik tentang kesulitan di Hindia, dibandingkan tentang kesulitan di Belanda sendiri.

Weijer tampil sebagai pengacara bagi pekerja Belanda, tetapi menolak pandangan yang berbeda. Drama keluarga seperti yang ditulis oleh Soetardjo juga muncul di Belanda. Utusan pemerintah H.J. van Mook memberikan kepastian bahwa persediaan pangan yang disampaikan oleh Departemen Urusan Ekonomi telah diselidiki secara cermat. Ia mempertanyakan apakah berita yang dimaksudkan oleh Soetardjo sudah benar, ia tidak mengetahuinya.

Soetardjo menyatakan bahwa fraksinya akan menunjukkan

niat baiknya. Ia tidak menolak rencana itu melainkan untuk tidak ikut dalam pemungutan suara. Peraturan impor kain katun pada 1936 segera memasuki tahap pemungutan suara. Hasilnya 10 suara mendukung dan 2 suara menolak. (yang menolak adalah Thamrin dan Soangkoepon).

Setelah membuka kembali rapat, mosi yang dikeluarkan oleh Soetardjo dan Verboom mulai dibahas. Utusan pemerintah H.J. van Mook mendukung sebagian pertimbangan mosi ini, akan tetapi pada sisi lain tidak mau menanggung resikonya. Jadi ia merasa keberatan terhadap pertimbangan bahwa tindakan perizinan dan pembatasan pasti akan mengakibatkan kenaikan harga. Ia menekankan pada kata “pasti”. Pemerintah selanjutnya merasa keberatan terhadap kesimpulan kedua, yang menekankan sambil menunggu aturan-aturan lebih lanjut dewan tidak akan melangkah dengan mengeluarkan perizinan dan pembatasan yang baru.

Secara umum, van Mook menolak untuk menerima mosi Soetardjo dan Verboom. Keinginan yang dilontarkan ini bisa dialihkan kepada lembaga yang berwenang melalui cara yang biasa. Soetardjo mempertahankan mosinya dan tetap berpendapat bahwa tindakan yang dimaksud akan mengarah pada kenaikan harga. Soetardjo meminta dalam pemungutan suara untuk membagi mosi itu dalam dua bagian. Bagian pertama mencakup pertimbangan yang terkait di samping kesimpulan yang berbunyi: “Meminta kepada pemerintah agar mendesak pemerintah pusat supaya kerjasama ekonomi antara Hindia dan Belanda didasarkan pada azas keadilan. Pemerintah di negeri Belanda harus membantu Hindia Belanda dalam kondisi keuangan dan ekonominya saat ini kondisinya sangat sulit”. Kemudian pemungutan suara dilakukan dengan hasil 13 suara menerima dan 3 suara menolak (mereka

yang menolak adalah C.C. van Helsdingen, Kerstens dan Weyer).

Bagian kedua mencakup pertimbangan yang berbunyi: "Meminta kepada pemerintah, sambil menunggu aturan-aturan selanjutnya, agar tidak mengambil tindakan baru dalam membatasi industri dan perizinan yang baru. Dampak dari tindakan itu pasti mengakibatkan kenaikan biaya hidup di Hindia demi kepentingan industri Belanda dan asing". Pengambilan suara ini menghasilkan: 10 menerima, dan 6 menolak. Mereka yang menolak adalah C.C. van Helsdingen, Kerstens, Weyer, De Hoog, Wermuth dan ketua sidang. Mengingat keterbatasan waktu sidang, Mosi kedua yang telah disebutkan atas usul ketua ditunda sampai sidang paripurna yang akan datang.⁸⁴

Sehari setelah penutupan rapat Volksraad, beberapa permasalahan kecil telah diselesaikan, antara lain permasalahan rencana pengambilan tindakan dalam kaitannya dengan pendirian Lembaga Proyek Negara. Soetardjo menegaskan bahwa kebutuhan pendirian lembaga proyek negara ini sudah lama ditunggu. Adanya proyek koloni fakir miskin atau rumah miskin sudah dirasakan kebutuhannya. Ia mengusulkan agar setelah didirikan, lembaga ini nantinya bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang tersebut. Organisasi ini nantinya akan dilibatkan oleh pemerintah.⁸⁵

Dalam pembahasan di sidang Volksraad sebagian anggaran sebesar f 25 juta akan segera dicairkan pada 1936. Utusan pemerintah, de Bruyn Kops, direktur keuangan memberikan jawaban atas anggaran tersebut. Banyak di antara anggota dewan yang mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat ini tentang tidak diajukannya seluruh rencana penggunaan seperti yang

84 'Contingenteeringontwerpen aangenomen' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Maret 1936.

85 'Landswerkinrichtingen' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 22 Juni 1936.

disusun oleh komisi van den Bussche. Oleh de Bruyn Kops ditunjukkan seperti yang telah dijelaskan dalam memori jawaban, bahwa tujuan pemerintah sama sekali bukan untuk menunda peninjauan yang lengkap dan rinci kepada Volksraad tentang rencana penggunaan dana tersebut. Namun sebaliknya, pemerintah bermaksud secepat mungkin mengadakan pertukaran pendapat dengan lembaga perwakilan itu mengenai cara pembagian kredit. Hanya saja pemerintah berbeda pendapat dengan beberapa orang anggota tentang waktu pembahasannya. Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak terlalu banyak, akan tetapi juga tidak terlalu sedikit.

Kepada Soetardjo, De Bruyn de Kops memberitahukan bahwa dalam urutan yang merangkum pedoman dalam memori penjelasan tidak terdapat hal urgent. Terhadap pemikiran yang dilontarkan oleh sejumlah anggota tentang pembuatan kapal dan pendirian atau perbaikan bangunan, ia menyampaikan bahwa dana yang disediakan untuk itu bagi sebagian penduduk dan dunia usaha menjadi beban yang sangat berat, karena mereka menduga bahwa kondisi ekonomi rakyat saat itu sangat parah.

Dengan pandangan seperti perbaikan kondisi kerja, tujuan utama bisa dikorbankan. Yang diperlukan adalah memperkuat kondisi ekonomi. Namun pemerintah menolaknya. Ia mengungkapkan bahwa memang kolonisasi termasuk beberapa kasus yang pemerintah sendiri tidak merasa keberatan terhadap beberapa penundaan batas waktu 3 tahun. Atas pertanyaan Soetardjo bangunan mana yang akan dibiayai oleh pemerintah dari sumber dana ini, untuk saat itu sangat sulit dijawab kecuali memberikan jawaban dalam batasan umum yang dilakukan secara tertulis. Ia menegaskan bahwa sebagian besar dana pembangunan tetap berada di dalam negeri. Penduduk akan banyak memetik

keuntungan dari peningkatan usaha bangunan.

Dalam perdebatan termin ke dua, Doeve menegaskan bahwa di bidang peternakan perhatian belum sepenuhnya dicurahkan seperti yang dituntut oleh De Bruyn de Kops. Kemudian, Dove mengulangi desakannya bahwa konsumsi produk susu di Hindia masih bisa ditingkatkan lagi. Soetardjo mengajukan sebuah mosi yang mencela terhadap penggunaan sebagian dana kesejahteraan itu digunakan untuk mendirikan bangunan. Ia menyarankan lebih baik menggunakan dana itu untuk pengembangan kolonisasi dan mengusulkan untuk mendorong kembali kemajuan peternakan.

Dengan adanya permintaan anggota Volksraad van Eekhout untuk tampil dalam rapat dengan rencana yang sudah pasti, pemerintah menyanggupi bahwa dalam sidang itu akan dijelaskan gambaran umum tentang rencana itu. Utusan pemerintah urusan pemerintahan de Waal dalam termin kedua masih menyampaikan sebuah pidato singkat dengan menduga bahwa pandangan pemerintah dalam bidang kolonisasi sebenarnya tidak berbeda apa yang sudah disampaikan oleh Soetardjo.

Setelah ini urutan pembahasan adalah mosi Soetardjo, yang dia pertahankan. Soetardjo menganggap bahwa mosi itu sebenarnya tidak prematur, tetapi justru ingin menanyakan apakah pemerintah bisa menjelaskan bahwa hanya proyek bangunan yang sangat penting seperti sanatorium di kota-kota besar yang dapat dibiayai dengan biaya ini. Selanjutnya sebuah pertanyaan diajukan, apakah pemerintah menyanggupi bahwa jumlah dana untuk kolonisasi bisa ditambah? Utusan pemerintah de Bruyn Kops tetap menganggap mosi ini prematur dan menyampaikan bahwa pandangan pemerintah tidak akan berubah. Pemerintah hanya akan mencurahkan perhatian pada bangunan yang sangat penting dan terutama fasilitas kesehatan. Kesanggupan lebih

lanjut tidak bisa dibuat oleh pemerintah. Soetardjo menyatakan lebih lanjut tentang ini untuk menahan mosinya sampai sidang berikutnya.⁸⁶

Petisi Soetardjo

Soetardjo pada sidang Volksraad 15 Juli 1936 mengusulkan sebuah petisi yang ditujukan kepada Volksraad, yang ditandatangani juga oleh anggota lainnya seperti Ratu Langie, Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong dan Alatas. Petisi itu berisi agar Volksraad dengan menggunakan kewenangannya pada pasal 68 Undang-Undang Hindia, menuntut untuk diselenggarakannya konferensi para wakil Belanda dan bumiputera atas dasar persamaan, dengan menyusun sebuah rencana, untuk diterapkan di Hindia Belanda, melalui pembaharuan bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar memperoleh otonomi sesuai batas-batas pasal 1 *grondwet*. Usul ini disertai dengan rencana menyerahkan pernyataan itu kepada Ratu Belanda dan kedua majelis yang ada di parlemen Belanda (*Staten General*).⁸⁷

Selain itu juga ditambahkan sebuah memori penjelasan yang menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir sebagian masyarakat bumiputera telah mempunyai perasaan tidak puas, apatisme dan ketidakpedulian politik yang secara perlahan menjiwai jutaan penduduk. Menghadapi masalah tersebut, tampaknya diperlukan pembangunan Hindia Belanda yang disusun dan direncanakan untuk membangun Hindia yang lebih baik, sesuai kebutuhan nasional, budaya dan ekonomi kedua bangsa.⁸⁸

86 'Besprekingen over f 25 millioen' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 14 Juli 1936, lembar ke-2.

87 Susan Abeyasekere, 1973. 'The Soetardjo Pttition' dalam *Indonesia*, no. 15, hlm. 80-108.

88 'Het petitievoorstel Soetardjo' dalam *De Indische Courant*, 16 Juli 1936, lembar k3-2.

Setelah diselenggarakannya perdebatan tentang petisi Soetardjo, ternyata tidak ada kata sepakat dari semua anggota dewan yang hadir. Sesuai aturan yang berlaku, untuk menghindarkan diri dari kebuntuan, dilaksanakanlah pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara itu, terdapat 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Dengan demikian, ketua Volksraad harus menjalankan petisi tersebut kepada Gubernur Jenderal, Menteri Koloni, Ratu Belanda, dan Parlemen Belanda.

Pada 1 Oktober 1936, petisi tersebut sudah dikirimkan kepada Menteri Koloni, Ratu Belanda dan Parlemen. Namun, keputusan tidak dapat diambil seketika itu juga, karena harus diagendakan untuk dibahas dalam parlemen dan eksekutif di Belanda. Namun, dua tahun setelah dilayangkannya petisi, pada sidang Volksraad di Batavia bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal yang ikut hadir dalam sidang Volksraad sudah memberikan signal bahwa petisi Soetardjo tidak memperoleh restu dari Ratu Belanda, karena petisi tersebut sangat mengagetkan para petinggi di negeri Belanda. Petisi Soetardjo tidak terdengar lagi beritanya, sehubungan dengan demikian padatnya agenda yang harus dibahas di Volksraad. Baru pada 16 November 1938, dua setengah tahun setelah dikeluarkannya petisi tersebut, keluarlah surat penolakan dari Ratu Belanda berdasarkan Keputusan Ratu nomor 40 tertanggal 16 November 1938. Keputusan Ratu tersebut dibacakan pada Sidang Volkraad di Batavia pada 29 November 1938. Berdasarkan keputusan Ratu tersebut, alasan penolakan petisi itu adalah Bangsa Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab untuk memerintah sendiri.

Sidang Volksraad Pasca Petisi Soetardjo

Setelah pengambilan suara tentang petisi Soetardjo, aktivitas di

Parlemen tetap sibuk seperti biasanya, yang dipenuhi dengan agenda yang harus dibahas dalam sidang. Tiba saatnya dalam sidang untuk membicarakan tentang rencana anggaran pendidikan dan agama untuk anggaran tahun depan, 1937. Soetardjo sebelumnya telah mempunyai anggapan bahwa sehubungan dengan adanya penghematan, maka pasti akan terjadi penghematan di bidang pendidikan. Untuk anggaran tahun 1937, perlu dibuat terobosan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain karena adanya penghematan dalam segala bidang. Beberapa HIS dan sekolah rakyat lanjutan akan ditutup. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan sekolah-sekolah itu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Anggota Volksraad Wiriopranoto mengajukan pertanyaan, kerjasama seperti apa yang diperlukan, dan ia meminta jawaban tertulis. Soetardjo menjelaskan secara singkat tentang kondisi saat itu yang mengarah pada tindakan yang akan diambil dalam rangka penghematan yang perlu dikaitkan dengan penutupan beberapa sekolah. Namun sebaliknya Wiriopranoto justru mengusulkan untuk memperluas pendidikan Barat demi kepentingan penduduk bumiputera, dan penanganan semua hambatan tentang penggabungan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ia meminta perhatian pemerintah akan kemungkinan menerima siswa secara gratis dalam lembaga pendidikan HIS. Pada pos Sekolah Tinggi Hukum, Wiriopranoto kembali mengusulkan pemberian pendidikan akademis untuk aparat pemerintah bumiputera. Jika diperlukan, ia akan mengajukan amandemen. Sebelum menutup pidatonya, Wiriopranoto menganggap layak untuk memberikan tunjangan kepada tenaga pengajar yang juga bersedia bimbingan di luar sekolah.

Giliran Ratu Langie menyampaikan pendapatnya secara

panjang lebar tentang sifat kualitatif dan kuantitatif pendidikan HIS. Ia kembali mengingatkan pada karya Komisi Pendidikan HIS. Sehubungan dengan penghematan ekonomi, hal ini dianggap fatal apabila sebagian HIS dibubarkan, karena hal ini akan mengakibatkan pergeseran intelektual masyarakat. Ia memahami pandangan pemerintah yang akan dijalankan saat itu. Ia menduga bahwa pendidikan harus mengarah pada pengentasan kondisi ekonomi yang terpuruk. Ia juga meyakini bahwa di masa sulit ini pemerintah dapat meninjau kembali apa yang sudah direncanakan. Ia setuju dengan pendapat Soetardjo mengenai pendidikan akademis bagi aparat pemerintah bumiputera. Ia yakin bahwa pendidikan Barat sangat penting bagi kemajuan wilayah Hindia Belanda, walaupun jumlah siswanya sangat terbatas.⁸⁹

Dalam kelanjutan sidangnya, Volksraad pada hari Kamis mengadakan rapat di bawah pimpinan Mr. W.H. van Helsdingen. Dalam urutan agenda, topik yang akan dibahas adalah bagian VIII anggaran tahun 1937, departemen peperangan di mana kesempatan dibuka untuk membahas masalah angkatan laut. Wakil panglima angkatan laut pun ikut hadir dalam sidang ini.

Anggota dewan Gondosoebroto meminta informasi mengenai sersan bumiputera. Ia menanyakan apakah benar pangkat sersan klas-1 praktis tidak bisa dicapai oleh orang bumiputera. Selanjutnya ia meminta pembukaan kembali pendidikan bintangara. Ia membahas kemungkinan persamaan orang bumiputera dengan orang Eropa dan menyetujui permintaan yang disampaikan dalam tinjauan umum, yang disampaikan oleh Soetardjo untuk memberikan pendidikan kaum intelektual bumiputera dan untuk diangkat menjadi perwira angkatan laut dan angkatan darat.

Ketua sidang, C.C. van Helsdingen mengungkapkan

kepuasannya tentang peningkatan anggaran pertahanan. Mengenai organisasi dan teknik, tampaknya dia percaya pada kepemimpinan angkatan darat. Atas pidato Wirjopranoto dia menyatakan bahwa di Belanda pada prinsipnya tidak ada semangat militerisme. Selanjutnya dia menduga adanya kontradiksi dalam pidato ini, di satu sisi pembicara ingin melibatkan unsur bumiputera dengan mengajukan syarat Indonesia merdeka. Selanjutnya pembicara menyoroti pembicaraan tentang beberapa masalah penting seperti mendorong industri peralatan perang, pemisahan antara polisi dan tentara, pendidikan perwira kesehatan, dan mobilisasi umum.

Sementara itu, Roep menanyakan apakah Wirjopranoto menduga bahwa kemerdekaan benar-benar akan bermanfaat bagi kemajuan negeri ini. Apakah dia telah memperhitungkan resiko apa yang muncul dengan penguasaan oleh negara lain. Roep yakin bahwa kepemimpinan Belanda adalah yang terbaik bagi negara ini, lebih baik daripada kepemimpinan yang diberikan oleh negara besar lainnya. Selanjutnya, ia menyoroti resiko bahwa berbagai suku bangsa akan saling berselisih. Ia menjelaskan bahwa perselisihan ini bukan hanya merupakan pandangan saja, melainkan sudah terbukti. Namun, ada suatu ikatan yang dapat menyatukan semua etnis itu, yakni kepemimpinan Belanda. Roep melanjutkan pada kebutuhan untuk memperkuat sarana pertahanan dan menyampaikan rangkuman tentang apa yang dia jumpai dalam surat kabar yang menyangkut berita mengkhawatirkan sehubungan dengan munculnya ketegangan internasional. Dia juga merasa puas bahwa saat ini anggaran untuk pertahanan di Hindia mengalami kenaikan. Ia menegaskan bahwa VC (*Vaderlandsche Club*) menghargai kenyataan ini dengan mengambil inisiatif untuk mengajak masyarakat meningkatkan sarana pertahanan. ia percaya pada mosi yang diterima oleh Volksraad dalam rapat lalu.

Soetardjo mendengarkan dengan penuh perhatian pada semua pidato yang disampaikan, terutama dari Tuan van Hellsdingen. Namun, dalam pidato Tuan Roep dia mendengar sesuatu yang mengetuk hatinya. Soetardjo menghendaki agar usulannya tidak mempertajam perbedaan antara orang kulit putih dan kulit coklat. Ia juga memahami keuntungan apa yang muncul dengan dipertahankannya ikatan sekarang ini. Ia mengharapkan bantuan dari van Hellsdingen dan Roep sehubungan dengan usahanya untuk memajukan hubungan politik antara Belanda dan Hindia.⁹⁰

Sementara itu, pemerintah merasa yakin bahwa angkatan laut kolonial telah menjalankan tugasnya dan atas dasar ini menduga bahwa suatu kinerja preventif diperlukan yang dalam kondisi sekarang tidak bisa diabaikan. Juga tentang angkatan darat, diharapkan agar dari pemerintah ada tindakan terhadap kesan yang muncul pada sejumlah pembicara, yang beranggapan tidak ada kegiatan pertahanan selama ini, yang dapat disamakan dengan tidak banyak manfaatnya.

Kekuatan darat memang cukup besar, akan tetapi sudah lama dan kinerja preventifnya lebih banyak daripada yang diperlukan. Orang jangan berpikir bahwa sepanjang tahun ini dalam bidang angkatan darat tidak banyak yang dilakukan. Sebaliknya, ada banyak langkah diambil. Kebutuhan untuk menjalin kontak pribadi dengan para pejabat di Asia Timur dengan kawasan Timur menarik perhatian pemerintah. Kini telah diputuskan bahwa para pejabat di kantor angkatan darat yang kembali dari cuti di Eropa dan kembali ke Hindia Belanda harus melalui Cina dan Jepang dengan tujuan dapat berorientasi kembali di negara-

90 'Onze defencie in de Volksraad' dalam *De Indische Courant*, 14 Agustus 1936, lembar ke-2.

negara ini sebelum memulai kerjanya. Perpindahan kantor urusan Asia Timur kini dianggap memadai.

Dengan adanya pertanyaan Tuan Soetardjo mengenai korps birokrasi bumiputera, pembicara menyatakan bahwa laporan itu tidak sampai kepada pemerintah, akan tetapi telah memberikan petunjuk bahwa ada perdebatan serius dan kemarahan di kalangan korps bumiputera. Sebaliknya, diduga bahwa kedua korps pemerintahan ini bisa saling bekerjasama dalam menjalankan tugas mereka. Mengenai pendidikan akademis bagi korps pemerintahan bumiputera pembicara menyampaikan bahwa tentang pendidikan yang ditujukan bagi dinas pemerintahan bumiputera, pemerintah belum mengambil tindakan yang pasti.⁹¹

Sidang Volksraad dilanjutkan hingga pada hari Sabtu, untuk membahas anggaran birokrasi pemerintahan. Soetardjo tidak mau menerima tuduhan pemerintah bahwa kritiknya terhadap kebijakan anggaran timpang. Pandangan yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Soetardjo dalam forum ini mempengaruhi sikap priyayi pemerintahan adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa ungkapannya hanya menunjukkan sisi gelap dari apa yang sebenarnya ada dalam hati para priyayi. Yang diperlukan saat ini adalah menghilangkan penyebabnya yang mengarah ke arah sana. Penyebabnya sangat banyak. Soetardjo berharap agar utusan pemerintah yang baru berhasil memenuhi keinginan aparat pemerintah bumiputera.

Sementara itu, anggota Volksraad lainnya, Sosrohadikoesoemo beranggapan bahwa tugas gubernur terlalu banyak untuk dapat ikut campur secara efektif dalam memecahkan persoalan yang menyangkut keamanan. Hanya dalam kasus-kasus tertentu yang

91 'Laisser faire, laisser aller' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 27 Juli 1936, lembar ke-2.

dilaporkan, pimpinan departemen baru dapat bertindak.⁹²

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada di dalam negeri, Volksraad mengadakan sidang maraton, termasuk di dalamnya melakukan sidang pada hari Minggu pagi. Sidang dimulai pukul 10.30. Rapat ini sengaja diadakan untuk membicarakan rencana peraturan untuk mengubah peraturan hak pilih propinsi Jawa Barat. Sementara untuk membahas ini akan diajukan dalam rapat paripurna pada 25 September. Ketua sidang meminta untuk menunda sebentar rapat karena telah diterima telegram dari Ratu Belanda Wilhelmina. Ketua membacakan surat itu yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Sangat penting bagi kehidupan bersama Volksraad dalam hari-hari yang begitu membanggakan buat saya, saya mohon Anda menyampaikan ucapan terimakasih saya – Wilhelmina".

Selanjutnya yang dibahas adalah usulan petisi Soetardjo untuk mencabut aturan gaji regional. Doeve, ketua sidang, menegaskan bahwa kebijakan gaji pemerintah telah menciptakan hubungan antara gaji tinggi dan rendah, yang di kalangan banyak orang harus membangkitkan rasa kemandirian terhadap peraturan sosial saat itu. Ia mengungkapkan bahwa di Belanda orang menemui ilmuwan yang menduduki jabatan juru tulis sebagai awal dari karirnya. Sementara itu wilayah Hindia orang-orang dengan ijazah akhir Mulo menduduki jabatan yang sama. Akan tetapi tidak tepat bila menyamakan juru tulis di Hindia dengan seorang penulis di Belanda. Mungkin juru tulis Hindia lebih cerdas dan lebih rinci, akan tetapi tidak ada perbedaan antara kondisi dan kebutuhan hidup mereka. Ia kemudian melukiskan hubungan antara penggajian beberapa pegawai tinggi dan rendah.

92 'De tweede termijn van BB' dalam *De Indische Courant*, 24 Agustus 1936 lembar ke-2.

Anggota dewan van Helsdingen mengajukan keberatan formal terhadap usul petisi Soetardjo yang juga menganggap bahwa usulan itu tidak benar, sementara campur tangan pemerintah pusat tetap diminta dalam mencari solusi terhadap persoalan Hindia murni. Ia menduga bahwa selain itu bagi Parlemen sama sekali tidak mungkin untuk memberikan penilaian tentang masalah ini, juga terhadap Volksraad yakni perwakilan rakyat di tempat ini, yang hampir tidak bisa memberikan suatu penilaian yang memadai.

Terhadap usulan kepada pemerintah pusat, ia juga tidak berharap apapun. Juga usul kepada Gubernur Jenderal dianggap dianggap tidak sesuai dan tidak pada tempatnya. Ia tampaknya kecewa, bila mengharapkan keberhasilan dari sebuah petisi kepada wali negeri. Apakah orang berharap agar gubernur jenderal baru bersikap lebih responsif, tetapi yang memberikan bukti pemikiran naif, sementara tidak bisa diharapkan bahwa wali negeri yang baru akan mengambil suatu keputusan dengan menyisihkan dan menolak semua nasehat yang telah diberikan.

Van Helsdingen bisa juga memberikan dukungan kepada usul ini atau tidak, bahkan bisa mengajukan semua suara menolak. Dia memperoleh kesan bahwa usul ini mirip dengan usaha untuk membenturkan Volksraad pada gerbong organisasi massa yang belum lama ini telah mengajukan permohonan. Kartowisastro juga memberi komentar usul ini menjadi satu bagian atas sisi formal dan sebagian lain atas isi usul itu. Pembicara menganggap usul ini layak, asalkan dilakukan suatu perubahan.

Terhadap usul penundaan ini, ia melihat berbagai pertimbangan. Mengenai sisi formal perkara itu, dibandingkan dengan usulan van Helsdingen, menurut Kartowisastro, usul ini layak dan sangat dibenarkan. Soangkoepun pun menegaskan

bahwa ia setuju dengan usul itu. Ia juga mendukung. Sementara itu, Thamrin menanyakan apakah Van Helsdingen selalu menentang terhadap campur tangan menteri dalam persoalan internal murni Hindia, baik ketika berada di balik layar maupun ketika menyangkut perkara umum. Hal ini sama dengan kebijakan Gubernur Jenderal de Graeff tentang kebijakan dalam negeri, dan tindakan Kiewit de Jonge dalam proses pengadilan Soekarno. Orang tidak pernah mendengar protes dari van Helsdingen.

Paparan Verboom menunjukkan bahwa orang mengetahui pandangan fraksinya dalam hal kebijakan gaji. Mengenai petisi, mereka hanya berpaling kepada Gubernur Jenderal, sementara pemerintah pusat tidak bisa memberikan petunjuk rinci dan parlemen pasti tidak siap untuk menilai masalah ini. Selain itu pembicara memandang perlu bila orang meminta penundaan aturan dan pembentukan sebuah komisi untuk memperbaharui seluruh sistem gaji di wilayah Hindia.

Sementara itu Soetardjo menegaskan kepada rekan-rekan yang mendukung usul petisinya dalam bentuk ucapan terimakasih. Ia menentang panjang lebar tekanan yang datang dari van Helsdingen. Secara resmi Soetardjo menganggap bahwa usulnya telah terjawab. Tentang lembaga komisi pembaharuan gaji, ia tidak mencantumkan dalam usulnya sementara masalah ini diselesaikan oleh lembaga perwakilan. Pembicara mengakhiri dengan suatu tinjauan tentang dasar-dasar aturan sekarang ini, yang telah menimbulkan banyak ketidakpuasan dan menekankan penerimaan usul untuk meninjaunya kembali.⁹³ Sidang Volksraad sementara ditunda untuk dilanjutkan pada Senin pagi.

Pada Senin pagi, Volksraad bersidang dengan agenda

93 'Sluitering der eerste zitting' dalam *Indische Courant*, 15 September 1936, lembar ke-2.

membahas usul petisi Soetardjo mengenai penyelenggaraan sebuah konperensi tentang kemungkinan pemberian status otonomi kepada Hindia Belanda dalam ikatan kerajaan. Sebagai pemrakarsa petisi, Soetardjo menjawab para pembicara dalam termin pertama sidang. Bersama Kan, ia menyelaskan bahwa pemerintah sendiri dalam membahas usul ini tidak mengirimkan wakilnya. Selanjutnya pembicara menguraikan mengapa dia sebagai aparat pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan usul itu. Dari aparat pemerintah, ia menerima sebuah ucapan pujian yang juga memuat keterangan bahwa tugas aparat pemerintah jauh di atas usaha bagi suatu karya yang lebih baik.

Soetardjo menjawab pertanyaan Soeria Nata Atmadja dan para pembicara lain, yang menyatakan bahwa pembicara PPBB telah menyampaikan usul yang kurang berbobot. Ia menguraikan bahwa PPBB hanya mewakili kepentingan korps aparat bumiputera. Semua yang berada di luar itu tidak termasuk perwakilannya. Sementara itu apa yang tidak bisa dibantah adalah bahwa di antara para anggota PPBB dalam berbagai hal ada suatu ikatan batin. Yang tidak ada dalam hal ini adalah ikatan organisasi.

Soetardjo menunjukkan bagaimana pemberitahuan dalam pers mengenai pengajuan usul hanya siap jika pembicara bisa mengajukan sejumlah saksi. Baginya juga tidak perlu diragukan bahwa di antara kelompok yang berkuasa dan setia kepada mereka, tidak akan muncul perbedaan pandangan khususnya tentang kebutuhan kemandirian. Ia selanjutnya menunjukkan kepada mereka yang ragu pada ungkapan dalam pers bumiputera. Jawaban terhadap keberatan van Helsdingen, bahwa di Hindia, orang masih kurang percaya pada para tokoh intelektual bumiputera. Ia tegaskan bahwa kejadian yang tidak bisa dipercaya juga muncul di lingkungan pimpinan di Eropa. Soetardjo menyetujui hal ini.

Selain itu, jangan dilupakan bahwa dengan kemandirian ini tidak akan bisa sekaligus menyingkirkan semua orang Belanda. Jauh setelah itu, orang Belanda dan bumiputera masih harus tetap bergandengan tangan.

Petisi ini memuat suatu agenda utama, yakni penghargaan terhadap kebijakan kolonial orang Belanda melalui konsolidasi proyek yang sebelumnya menjadi sasaran kebijakan kolonial. Selanjutnya Soetardjo mendukung usul itu dengan merujuk pada posisi internasional Hindia. Posisi ini lebih terlindungi oleh kekuatan moral kelompok yang dominan di kalangan masyarakat daripada melalui meriam dan senjata lain.

Selanjutnya, Soetardjo menekankan kelompok mana yang dipertimbangkan untuk diberi status kewargaan Hindia. Orang Indo-Eropa saat itu tidak dianggap sebagai orang Belanda, seperti halnya orang Indo-Cina, dan Indo-Arab. Jika dia tidak mau mempertimbangkan kewargaan Hindia, maka jangan berpaling ke Hindia melainkan ke Belanda untuk memutuskan apakah dia tetap menjadi orang Belanda. Pembicara berterimakasih kepada mereka yang telah mendukung usulannya. Selain itu, waktu itu sangatlah tepat waktunya untuk mengambil alih istilah baru “Indonesia” dan “orang Indonesia”, dengan tujuan mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Inggris juga tidak merasa keberatan ketika penduduk India meminta agar bisa menyebut tanah mereka India. Straits Settlements juga secara eksplisit menggunakan istilah Malaya.

Selanjutnya, Soetardjo membela kebenaran batas waktu 10 tahun yang disebutkan dalam rencana usulan. Namun dengan maksud untuk mengatasi berbagai keberatan, ia bersedia untuk menghapuskan dari rencana itu. Kalimat “dalam waktu 10 tahun” adalah gambaran untuk menyebut sebuah batas waktu

dalam menentukan pandangan yang hanya disebutkan dalam penjelasannya. Kemudian, ia menjawab secara panjang lebar pertanyaan Wirjopranoto, yang menunjukkan bahwa melalui panggilan kepada para penulis konservatif tentang hukum Belanda, ternyata dia telah tampil sebagai pendukung aliran Utrecht.

Mengenai VC (*Vaderland Club*), jika dianggap benar dapat dianggap sebagai “sebuah karung tanpa isi” seperti yang dilontarkan oleh Verboom kepada Wirjopranoto, maka Soetardjo tidak memahami bahwa mereka akan berpikir mendukung petisi. Verboom mengatakan bahwa “Vaderland Club tidak mendukung petisi”. Ia selanjutnya berbicara panjang lebar tentang keberatannya ditinjau dari segi hukum terhadap usulan tersebut dan menegaskan lebih lanjut bagaimana dia bisa berpikir tentang konstruksi kerajaan dan posisi imperialisme Belanda, yakni *primus inter pares* dalam hubungan rakyat dalam Kerajaan berdasarkan pengalaman tertua dan terluas di bidang pemerintahan.

Sementara itu, Soetardjo menegaskan kembali bahwa atas pertanyaan ini dia tidak mau peduli dan menegaskan lebih lanjut bahwa selain perwakilan rakyat dari empat daerah otonom kerajaan, suatu pemangkasan perlu dilakukan dalam bentuk sebuah dewan kerajaan, seperti yang diusulkan oleh de Hoog beberapa waktu lalu. Ia sampai pada akhir pertanyaannya dan masih berusaha untuk membujuk para penentang usul itu untuk mengubah pendapatnya. Pidato Soetardjo dari tribun yang disediakan untuk publik dihadiri oleh sejumlah besar peminat, yang hampir semuanya bumiputera.

Sementara itu, van Helsdingen menyalahkan beberapa pembicara sebelumnya bahwa mereka telah salah membaca pidatonya dan menunjukkan kesalahan itu. Hal ini ditegaskan

oleh van Helsdingen dalam menjawab pertanyaan Soetardjo. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa di beberapa Negara Eropa ada penyimpangan, tetapi prinsip mereka sama. Menanggapi hal tersebut, Iskandar Dinata memberikan pendapatnya bahwa mereka tidak mengenal kondisi dalam masyarakat bumiputera. Ia menunjuk pada gerakan “Hidup Baru” di bawah pimpinan Chiang Kai Shek di Cina dan menggunakannya sebagai contoh bagi masyarakat bumiputera di negeri ini. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa juga setelah perubahan yang ditimbulkan dari petisi Tuan Soetardjo, usul petisi ini tidak bisa dia terima.

Sementara itu, Soeroso menyesalkan bahwa van Helsdingen berani berbicara seperti yang dia lakukan. Dia tidak membaca surat kabar bumiputera tetapi hanya surat kabar Eropa. Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat bumiputera. Dia selain itu dalam hal ini tertipu. Ia juga menyesalkan bahwa van Helsdingen telah menekankan pada ajaran Kristen sebagai faktor penting bagi perkembangan politik Hindia. Ketua menunjukkan bahwa hal itu tidak benar dan ia menunjukkan dan membacakan kutipan dari pidato van Helsdingen.

Soeroso menahan pandangannya dan mengakhiri dengan pernyataan bahwa usul ini tidak bisa ia terima, apabila tidak memenuhi petunjuk bahwa dalam konperensi itu kepentingan orang bumiputera perlu dipertimbangkan. Setelah istirahat, ketika lembaga perwakilan itu berkumpul untuk membahas peraturan ekspor emas, pembahasan tentang usul Petisi Soetardjo diteruskan.

Wirjopranoto tetap berpendapat bahwa sebuah petisi seperti yang sekarang ini diusulkan tidak perlu mencapai apa yang dikehendaki oleh pengusulnya. Tentang penyelenggaraan konperensi, sebaliknya ia tidak memiliki gagasan apa pun. Permasalahan ini kabur dan tidak jelas tertulis. Kemudian ia

berharap dari sebuah konperensi seperti yang dimaksudkan oleh para pengusul tidak ada bedanya dengan omong kosong. Konsesi di bidang politik tidak bisa dicapai dengan menolak pertanyaan. Orang hanya bisa mencapainya melalui tekanan moral atau rohani. Ia menganggap lebih baik untuk menarik kembali usul petisi itu dan memulihkan ikatan dengan opini publik di luar Volksraad. Seperti bunyi usulan saat itu, ia menganggap tidak efektif tetapi naif.

Dalam perdebatan ini, Sosrohadikoesoemo mempertanyakan apakah penandatanganan usul yang lain ini sepakat dengan Soetardjo bahwa dewan kerajaan yang dibentuk hanya akan menerima kewenangan memberikan nasehat. Sosrohadikoesoemo menegaskan lebih lanjut bahwa ia harus berpegang pada pandangan pertama, yakni bahwa dia tidak bisa mendukung usul ini meskipun ia juga mengajukan inisiatif untuk hal yang sama. Datoek Toemenggung menerima kepastian bahwa van Heldsinghen tidak memiliki maksud buruk terhadap orang bumiputera dengan pernyataan dan keluhan yang dikutipnya. Juga keluhan seperti bagi orang Belanda akan diingatkan pada ungkapan berbagai penulis yang memegang kekuasaan tentang kesalahan di bawah kekuasaan VOC. Ia menyodorkan sebuah kutipan dari artikel Pastur van Lith mengenai perkembangan politik Hindia kepada Kerstens. Akhirnya ia membahas panjang lebar pertanyaan dari Verboom.

De Hoog menyatakan bahwa fraksinya masih selalu menyadari manfaat usul petisi itu. Atas dasar ungkapan pers bumiputera di mana Soetardjo hampir menang, sebaliknya dia tidak memerlukannya lagi. Ia ingat pada cara bagaimana pers bumiputera telah menulis tentang hak-hak dasar pemungutan suara yang menyangkut anggaran keuangan. Masalah istilah “Indonesia” dan “orang Indonesia” tidak dianggap penting.

Dengan memperhatikan kerjasama ekonomi antara Hindia dan Belanda, ia menganggap adanya usaha ke arah kemandirian bisa dibenarkan. Dalam kaitan itu ia tetap menganggap bahwa lembaga dewan kerajaan masih tetap berguna. Jika perlu, sebagai langkah pertama dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat memberikan nasehat. Mengenai konperensi, ia yakin bahwa apabila mereka sependapat, demikian juga Verboom dan Van Helsdingen pasti mau diajak kerjasama.⁹⁴

Dampak yang ditimbulkan dari Petisi Soetardjo

Dengan disampaikannya Petisi Soetardjo pada 15 Juli 1936, banyak kalangan yang memberikan reaksi terhadap petisi tersebut. Setidaknya petisi tersebut membawa dampak pada tiga hal, yakni mereka yang menyetujui petisi tersebut; mereka yang menolak petisi, dan mereka yang menunggu dampak dari petisi tersebut. Apabila petisi tersebut menguntungkan kelompoknya, maka ia akan mengikutinya. Sementara itu bila petisi tersebut ditolak, maka kelompok tersebut tidak akan ikut menanggungnya.

Dengan diterimanya petisi Soetardjo dalam sidang Volksraad, dalam waktu yang tidak terlalu lama, berita tersebut tersebar di masyarakat. Di Surabaya, diselenggarakan pertemuan rakyat untuk membahas petisi Soetardjo. Sponsornya adalah Serikat Pekerja dan wakil partai politik. Demikian hebatnya pertemuan tersebut menyatukan banyak pihak, yang sebelumnya berlawanan ideologi. Para anggota oposisi dari Partai Sarekat Islam pun ikut hadir pada acara tersebut.⁹⁵

94 'Zelfstandigheid in Rijksverband' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 29 September 1936, lembar ke-2.

95 'Een Volksmeeting te Soerabaja' dalam *De Indische Courant*, 2 Februari 1937.

Pada bulan Januari, Barisan Penyadar PSII, kelompok oposisi Partai Sarekat Islam Indonesia, mengadakan rapat umum di gedung IEV di Batavia. Rapat tersebut dihadiri lebih dari 500 orang, termasuk di dalamnya hadir Mr. Gobee, Dr. Pijper dari Kantor Urusan Pribumi, anggota Volksraad Soetardjo, Thamrin, Datoek Toemenggung, dan Alatas. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang mendukung Petisi Soetardjo di Volksraad. Sementara itu juga hadir Asisten Wedana dan seorang Inspektur Polisi.

Mohammad Roem yang membuka rapat menjelaskan bahwa rapat ini adalah rapat pertama yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi dalam PSII. Kesempatan pertama diberikan kepada H. Agus Salim untuk membahas petisi Soetardjo. Dalam penjelasannya itu, H. Agus Salim menyampaikan bahwa kelompok oposisi PSII telah mencantumkan Petisi Soetardjo dalam agendanya. Keinginan seluruh pergerakan rakyat adalah kemandirian. Pers bumiputera juga menekankan arti pentingnya agenda ini setelah berminggu-minggu para kuli tinta membahasnya dalam koran-koran mereka. Selanjutnya H. Agus Salim mengingatkan tentang pengajuan surat permohonan dari Verbond der Edelen pada 1566 kepada perwakilan pemerintah Spanyol di Belanda. Contoh lainnya yang lebih baru yang serupa terjadi juga di Wafd di Mesir, bahkan di Cina pun juga memiliki peristiwa serupa yang memiliki arti sejarah perjuangan yang besar.

Nasib lebih jauh dari usul petisi ini tidak ada kaitannya dengan inisiatif dan penerima inisiatif. Mereka didominasi oleh hubungan politik di dalam dan di luar. Akan tetapi terdapat faktor lain, yakni: bagaimana rakyat bereaksi. Dari situ harus dibuktikan apakah ada makna politik atau tidak. Namun, di sini orang harus

berurusan dengan suatu bangsa yang sedang tumbuh. Rapat pertama ini adalah mengirimkan permintaan kepada semua partai politik dan kelompok dan pada kaum intelektual masing-masing untuk bisa bangkit. Untuk itu rakyat harus diberitahu tentang apa yang terjadi.

Suatu manfaat penting dari inisiatif yang mengarah pada pengajuan usul ini, H. Agus Salim beranggapan tentang kondisi ini, yang bisa dipisahkan dari pergerakan yang mengarah pada kemerdekaan politik. Keinginan bagi kemerdekaan memang hidup dalam jiwa setiap manusia dan jiwa tidak bisa hidup tanpa cita-cita kemerdekaan, akan tetapi jalan bagi tujuan itu tertutup. Orang ingin melakukan aksi massa. Menurutnya Usul petisi ini telah membuka jalan resmi.

Sejarah menempuh jalannya sendiri, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Namun dalam kondisi teratur dan dalam suatu masyarakat yang teratur juga dalam rencana dan pelaksanaan aksi teratur, orang harus tunduk pada tuntutan. Pada pergerakan teratur ini, sarana resmi harus dimanfaatkan. Usul petisi ini membuka jalan menuju aksi resmi. Hanya tampak adanya pemanfaatan yang benar. Setiap aktivitas dalam hal ini bertolak dari pengetahuan tentang kenyataan. Tujuan pertemuan ini adalah: memberikan suatu tinjauan dan wawasan dalam usul petisi dan juga mendorong terungkapnya apa yang dibahas dalam Volksraad, yang dalam waktu beberapa hari saja bisa dijumpai dalam terjemahan bahasa Melayu. Masalah kemandirian ini kemudian digambarkan cermat tentang tujuan usul petisi itu. Hal itu menunjukkan bahwa semua tinjauan tentang kemandirian itu sendiri, yang diadakan di dalam dan di luar Volksraad, yang dimulai dalam konperensi. Oleh karenanya diminta agar usul ini disahkan oleh pemerintah kolonial. Hasil akhir yang dicapai sebagian besar tergantung

pada ukuran arti penting yang ditunjukkan rakyat di Hindia untuk kondisi sekarang ini. Secara panjang lebar, ia menguraikan apa yang dalam Volksraad dengan adanya usul ini diungkapkan di mana dia terutama melontarkan kritik terhadap sikap Tuan C.C. van Helsdingen, yang telah merendahkan petisi itu.⁹⁶

Setelah kegiatan rapat, ini H. Agus Salim memberikan ceramah di Gedung Taman Siswa di Yogyakarta. Ia diminta untuk membahas tentang petisi anggota Volksraad yang digagas oleh Soetardjo dan kawan-kawan. Ceramah tertutup ini hanya boleh dihadiri oleh para undangan, sementara masyarakat yang ingin mengetahui tentang petisi ini tidak diperkenankan mengikuti jalannya pertemuan tersebut.

H. Agus Salim membahas sebelum membahas Petisi Soetardjo, memberikan paparan tentang organisasi politik yang menolak berkooperasi dengan pemerintah. Kegiatan mereka begitu terbatas, sehingga sulit bergerak. Oleh karena itu, H. Agus Salim memandang perlu untuk meninggalkan pandangan non-kooperasi. Dengan engajuan petisi Soetardjo, H. Agus Salim menyampaikan tekadnya untuk meninggalkan PSII dan membentuk Barisan Penyadar PSII. Setelah itu, mulailah dibahas Petisi Soetardjo yang mengarah pada keyakinan H. Agus Salim bahwa organisasi politik yang non-kooperatif, tujuannya tidak akan tercapai.⁹⁷

Melihat dampak dari Petisi Soetardjo, banyak organisasi dan kelompok masyarakat yang meminta penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan Petisi Soetardjo tersebut. Oleh karena itu, atas desakan beberapa pihak, di Batavia telah didirikan Panitia Pusat Petisi Soetardjo, dengan susunan pengurus sebagai berikut: M. Soetardjo sebagai Ketua; Mr. Hendro Martono sebagai

96 'Hadji Salim propageert Petitie Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Februari 1937, lembar ke-2.

97 'De Petitie Soetardjo' dalam *De Indische Courant*, 24 Maret 1937.

Sekretaris-1; Atik Soetardi sebagai Sekretaris-2, Abdullah bin Salim Alatas sebagai bendahara. Sementara anggotanya adalah: Mr. Sartono, I. Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Otto Iskandardinata, Mr. Ko Kwat Tiong, H. Agus Salim dan K.E.I. Sinsoe. Sementara itu panitia lokal akan didirikan. Baik panitia tingkat pusat maupun tingkat lokal, mereka akan melepaskan diri keanggotaannya dari partai-partai politik. Anggota panitia hanya mewakili aliran semangat tertentu dalam masyarakat bumiputera.⁹⁸

Panitia Pusat Soetardjo memiliki gedung sekretariat di Jalan Karet nomor 44, kota Batavia. Surat edaran dan daftar anggota telah dikirimkan kepada khalayak dan orang-orang yang memintanya. Hal ini dimaksudkan agar para anggota dapat diajak untuk bekerjasama agar petisi yang sudah diterima oleh Volksraad juga diterima oleh Ratu Belanda dan Parlemen. Daftar itu akan dikirimkan ke Belanda agar timbul kesan positif. Sementara itu, bagi yang menginginkan, bisa membentuk sub-panitia, untuk mengadakan rapat dan membubuhkan tanda tangan dalam daftar untuk kepentingan tersebut.⁹⁹

Banyak panitia dan sub-panitia didirikan di banyak tempat untuk melakukan propaganda petisi Soetardjo. Namun, Parindra tidak mau terlibat dalam pergerakan ini. Begitu juga organisasi ini akan menyatakan sikapnya terhadap petisi ini. Sikap Parindra memberikan alasan di surat kabar bumiputera. Namun, para pelajar di Belanda sangat menyesalkan sikap netral Parindra dalam menyikapi petisi ini. Akhirnya pada 12 November 1937, Parindra mengagendakan untuk rapat guna membahas secara khusus tentang petisi ini di Batavia. Setelah rapat tersebut barulah

98 'De Petitie Soetardjo' dalam *De Indische Courant*, 7 Oktober 1937, lembar ke-2.

99 'Comite Petitie Soetardjo, dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 25 Mei 1937, lembar ke-2.

Parindra akan menyatakan sikapnya terhadap petisi ini.¹⁰⁰

Oleh Panitia Pusat Petisi Soetardjo, empat belas organisasi dan pergerakan politik bumiputera telah dikirim undangan untuk berkumpul pada Minggu, 21 Desember 1937 di Gedoeng Perkoempoelan Indonesia, di jalan Kramat nomor 158 di Batavia. Agenda utama kegiatan itu adalah untuk mengadakan pembicaraan dan pemberian bantuan pada aksi Pengurus Petisi Soetardjo. Panitia Pusat juga akan melaporkan bahwa telah berdiri 21 sub-komite dan masih terdapat 1 sub-komite lagi yang akan berdiri dalam beberapa hari mendatang.¹⁰¹ Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat yang telah diselenggarakan pada Minggu, 28 November 1937 di Gedoeng Pemoefakatan Indonesia di Gang Kenari, Batavia. Rapat ini dihadiri oleh 1.500 orang. Dalam kesempatan ini Soetardjo memberikan penjelasan tentang petisi tersebut. Petisi Soetardjo memuat tujuan dan usaha untuk memperoleh perubahan tata hukum yang berguna bagi bangsa dan negeri Indonesia. Rapat ini memberikan dua rekomendasi, yakni: melanjutkan gerakan petisi Soetardjo dan memperkuat dengan berpegang teguh pada usaha pergerakan nasional dalam upaya menyempurnakan nasib bangsa dan negara Indonesia, dan mengirimkan hasil mosi ini kepada instansi yang berwenang.

Menanggapi petisi ini, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mengumumkan bahwa PSII tidak memihak pada gerakan Petisi Soetardjo dan melarang anggotanya dalam bentuk apa pun ikut terlibat dalam Panitia Pusat Petisi Soetardjo dengan alasan sebagai berikut:

100 'De Petitie Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 November 1937, lembar ke-2.

101 'Petitie Soetardjo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 12 Desember 1937 dan 'De Actie duur voort' dalam *De Indische Courant*, 12 November 1937, lembar ke-2.

- a. Sungguh naif bisa berharap, mengingat pengalaman pergerakan rakyat di India, tanpa dorongan kuta dari pergerakan rakyat yang terorganisir baik, untuk memperoleh status dominion meskipun hanya dalam bentuk embrio dalam arti Pasal 1 Undang-Undang dasar Belanda;
- b. Sangat sedikit manfaat yang bisa diharapkan dari Konferensi Kerajaan yang disebutkan dalam Petisi Soetardjo, selama pemerintah Hindia masih melakukan batasan-batasan pergerakan rakyat Indonesia, seperti pembatasan hak berserikat dan sistem surat izin di daerah tertentu di Hindia Belanda;
- c. Atas dasar petisi yang disebutkan sebelumnya, melalui sebuah aksi massa yang diadakan, semangat pergerakan Indonesia lebih banyak diperlemah daripada diperkuat;
- d. Orang tidak memiliki hak untuk menuntut dari rakyat Indonesia kebebasan mereka demi kekuasaan kolonial yang tidak berada dalam status *dominion*, seperti telah dijelaskan oleh Panitia Pusat Petisi Soetardjo dalam rapat umumnya pada 28 November 1937 di Batavia, selama kepentingan jasmani dan materi serta kebutuhan bangsa ini tidak terpenuhi seperti yang seharusnya.¹⁰²

Dalam rapat umum PSII cabang Jawa Timur, yang diselenggarakan di Surabaya, pengurus organisasi ini meminta tokoh Kartawinata yang didatangkan dari Batavia untuk menjelaskan

102 'De Petitie Soetardjo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 30 November 1937, lembar ke-2.

tentang Petisi Soetardjo. Dari hasil rapat itu diputuskan bahwa PSII Jawa Timur tidak menyetujui usulan yang disampaikan dalam Petisi Soetardjo, namun pengurus juga tidak menentanginya. Kebijakan untuk mengikuti Organisasi Panitia Petisi Soetardjo diserahkan kepada kebijakan masing-masing pribadi.¹⁰³

Di Sukabumi, di Gedung Sekolah Pasoendan, pada hari minggu, 23 Januari 1938, telah diselenggarakan rapat sub-panitia Petisi Soetardjo. Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 600 orang. Soetardjo selaku penggagas petisi, didampingi oleh Mr. Sartono, Mr. Hendromartono, dan Sinsu, tiba dari Batavia, langsung menuju ke gedung sekolah Pasoendan. Setelah dijelaskan tentang maksud dan tujuan petisi itu oleh Soetardjo sendiri, rapat menerima sebuah mosi bahwa Petisi Soetardjo bermaksud untuk memperbaiki posisi politik bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sub-panitia Sukabumi mendukung petisi ini.¹⁰⁴ Setelah sukses dengan kegiatan sub-panitia Sukabumi, di bawah pimpinan M. Hilmami, telah dibentuk sub-panitia Petisi Soetardjo. Tujuan dari dibentuknya sub-panitia ini adalah untuk menyebarluaskan petisi ini. Setelah pembentukan sub-panitia Petisi Soetardjo, pengurus terus mengadakan rapat untuk menyusun program mempropagandakan Petisi Soetardjo.

Sub-panitia Petisi Soetardjo Jawa Timur telah membentuk sub-panitia Jawa Timur. Pada rapat pembentukannya di Jalan Plampitan no. 29-31. Rapat itu dihadiri oleh utusan dari semua sub-panitia di Jawa Timur. Tujuan dibentuknya sub-panitia Jawa Timur adalah untuk memudahkan hubungan dan komunikasi

103 'Het petitievoorstel Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 17 Januari 1938, lembar ke-2.

104 'De petitie Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 25 Januari 1938, lembar ke-2.

berbagai panitia dan mengajak wilayah lain untuk segera bergabung. Rapat ini akhirnya memutuskan untuk mengadakan rapat propaganda yang akan diselenggarakan di Taman Kranggan pada 15 Mei 1938, dengan pembicara tunggal pencetus petisi Soetardjo, di samping itu juga akan dihadiri oleh Alatas, Mr. Sartono, dan H. Agus Salim sebagai pemimpin gerakan Penyadar.¹⁰⁵

Selain itu, Pengurus Pusat Gerindo telah mengadakan rapat guna menentukan sikap sehubungan dengan Petisi Soetardjo. Keputusan yang diambil oleh Pengurus Pusat dan sudah disampaikan kepada Kongres, bahwa Pengurus Pusat dihadapkan pada Konperensi Kerajaan. Saat itu posisi hukum Hindia Belanda masih dibicarakan, sementara otonomi luas yang dimuat dalam Petisi Soetardjo ditolak.¹⁰⁶

Sementara itu, di kota Den Haag, Panitia Petisi Soetardjo dibentuk, untuk menyebarkan pemikiran yang dimuat dalam petisi ini. Mantan anggota Majelis Rendah dari Partai Sosial Demokrat Ir. Ch. Cramer, ikut duduk dalam panitia yang baru dibentuk. Pembentukan panitia ini untuk menyiapkan kemandirian politik Hindia dalam Kerajaan Belanda.¹⁰⁷ Adapun susunan panitia di Den Haag adalah sebagai berikut: Ketua terpilih Hadiono Koesoemo Oetoyo, pelajar di Universiteit Leiden dan putra wakil ketua Volksraad, anggota: E. Soedjoko Poesponegoro, H. Adi, Tjondro, Ir. Moenandar, S.R. Tjokronegoro dan H. Roesman.

105 'Openbare Vergadering: De Petitie Soetardjo' dalam *De Indische Courant*, 6 Mei 1938, lembar ke-2.

106 'Gerindo en de Petitie Soetardjo' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 5 Oktober 1937, lembar ke-2.

107 'De Petitie Soetardjo' dalam *De Sumatra Post*, 15 November 1937, lembar ke-2, 'Comite Petitie Soetardjo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 15 November 1937, lembar ke-2.

Panitia telah menerbitkan brosur tentang rencana lima tahun dari Petisi Soetardjo dan sudah disebarakan ke berbagai pihak.¹⁰⁸

Pembentukan panitia Petisi Soetardjo juga membawa pengaruh pada pemerintah di Hindia. Meskipun pemerintah meragukan apakah pandangan baru bisa dibuka sehubungan dengan Petisi Soetardjo, pemerintah tidak merasa berkeberatan untuk membuka kembali dialog dengan masyarakat, asalkan parlemen mengizinkannya.

Panitia Pusat Petisi Soetardjo menerima berita bahwa Parindra telah melarang semua anggotanya terlibat dalam organisasi ekonomi bumiputera Pomer, yang belum lama dibentuk oleh anggota Volksraad Soetardjo. Organisasi Pomer dinilai terlalu kooperatif, yang akan menjadi corong pemerintah, sehingga tidak searah dengan tujuan Parindra. Oleh karena itu, organisasi politik ini melarang anggotanya mengikuti organisasi ekonomi bumiputera Pomer.¹⁰⁹ Namun, berkat kelihaihan Soetardjo dalam melakukan negosiasi dengan pengurus Parindra, diberitakan bahwa menurut pernyataan Soetardjo, Parindra tidak mengeluarkan larangan bagi anggotanya untuk menjadi anggota organisasi ekonomi bumiputera Pomer.¹¹⁰

Nirom

Soetardjo telah mengajukan sebuah usul inisiatif dengan maksud menjamin kontribusi tertentu bagi siaran radio swasta. Dana yang terkait dengan kegiatan itu harus diperoleh melalui penyisihan

108 'De Petite Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 3 September 1937; 'De Petite Soetardjo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 3 September 1937, lembar ke-2.

109 'Parindra kontra Pomer' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 8 Januari 1938, lembar ke-2.

110 'Parindra en Pomer' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 Maret 1938.

sebagian sumbangan dari para pendengar Nirom. Soetardjo pada awalnya berfikir tentang siaran dari, untuk, dan oleh penduduk bumiputera, yang memang sangat diperlukan, karena Nirom selama ini tidak menerima subsidi. Ia mengusulkan agar Nirom menyisihkan sebagian dananya yang diperoleh dari para pendengarnya. Namun, usulannya tidak mendapatkan sambutan khusus dalam Volksraad. Berdasar pada laporan yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, ia juga tidak memperoleh tanggapan sama sekali. Koran *Bataviaasch Nieuwsblad* mengetahui bahwa Departemen Perhubungan dan Pengairan mempertimbangkan suatu tindakan yang dapat memenuhi keinginan Soetardjo. Dari sini diharapkan usul inisiatif ini dapat diterima kembali.

Direktur Perhubungan bertemu dengan Hille, Van Staveren, dan Stenfert dari Nirom. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, ia berhasil berdiskusi dengan ketiga pengurus Nirom, yang bersemangat mendengarkan rencana yang diajukan oleh Soetardjo. Dalam kesepakatan itu, pengurus Nirom menjanjikan akan mempelajarinya, dan apabila berdampak baik bagi masyarakat, mereka akan mendukung usulan itu.¹¹¹

Organisasi Pendengar Radio Bandung mengadakan sebuah rapat umum pada hari Minggu di sekolah Pasoendan yang dihadiri oleh bupati Bandung, patih, anggota Volksraad Otto Iskandar Dinata dan Soetardjo, redaktur siaran radio PTT dr. Haaksma dan banyak tokoh dari kalangan masyarakat bumiputera.

Yang dibahas pertama-tama adalah peralihan dari siaran radio Timur NIROM kepada Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, yang persoalannya disampaikan dalam sebuah mosi oleh Soetardjo, diterima dengan 36 menerima berbanding

111 'Imheemsche radio omroep' dalam *De Indische Courant*, 24 Mei 1937, lembar ke-2.

12 suara menolak. Sebagai pembicara juga Soetardjo tampil yang mengingat kemunculan lembaga NIROM dan kemudian menerangkan mosinya secara panjang lebar. Pada akhir rapat, sebuah mosi diterima yang membuktikan kesetiaan kepada mosi Soetardjo dan mendesak kepada pemerintah agar mempercepat pengalihan siaran Timur kepada PPRK.¹¹²

Tidak hanya di kota Bandung, di Surabaya, sebelum dilaksanakannya rapat di kota Bandung, para pendengar radio Timur telah mengadakan rapat untuk menunjukkan dukungannya kepada mosi Soetardjo. Dalam mosi itu diharapkan Soetardjo juga menyalurkan aspirasi mereka, yaitu keinginan mereka agar pengalihan siaran Timur segera dilaksanakan.¹¹³

Di surakarta, juga telah diselenggarakan rapat Federasi Pendengar Radio Timur, setelah para pendengar Radio Timur mengadakan rapat di kota Surabaya. Dalam rapat ini dihadiri pula oleh Dr. Phillips, yang disambut oleh Sri Mangkunegoro di istananya. Untuk memeriahkan rapat tersebut, dipentaskan pertunjukan wayang petilan Damarwulan dan Gatotkaca Gandrung. Pagi harinya Dr. Phillips menghadiri rapat Federasi Pendengar Radio Timur yang dipimpin oleh Soetardjo, anggota Volksraad. Rapat ini berlangsung di studio SRV. Hari Senin, Dr. Phillips meninggalkan Surakarta untuk beristirahat di pesanggrahan Mangkunegaran di Tawangmangu.¹¹⁴

112 'Overdraft Oostersche Omroep' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 26 September 1938, lembar ke-2.

113 'Motie van Oostersche Raadioluistenaars' dalam *De Sumatra Post* 1 September 1938.

114 'Dr. Phillips te Solo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 8 Maret 1938.

Penolakan Petisi Soetardjo

Pada sidang Volksraad 29 November 1938, ketua sidang membacakan Surat Keputusan Ratu Belanda nomor 40 tertanggal 16 November 1938 tentang penolakan Petisi Soetardjo. Adapun penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa bangsa Indonesia belum mampu untuk memikul tanggung jawab di wilayah Hindia Belanda berdasarkan kekuatannya sendiri. Mendengar langsung dalam sidang Volksraad, Soetardjo mengomentarnya bahwa pemerintah Belanda telah bersikap sombong dan ceroboh. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru tanah air.

Penolakan Petisi Soetardjo segera menghiasi halaman utama surat kabar di tanah air. Koran *Tjahaja Timoer* membahasnya bahwa penolakan itu adalah uji coba untuk mengukur kekuatan politik di balik petisi itu. Menurut sikap fraksi nasional dalam Volksraad, petisi ini tidak mendapatkan dukungan rakyat. Aksi Soetardjo hanya berasal dari seorang pegawai yang tidak berdasar, mencari jalan tengah. Sebagian penduduk non-intelektual tidak berterimakasih kepadanya sementara orang di kalangan Belanda tidak mepedulikannya.

Politik kolonial tidak pernah merasa sanggup menemukan sesuatu tanpa dipaksa, apakah oleh penduduk bumiputera atau oleh kepentingannya sendiri. Dalam perkara politik, orang tidak pernah memperhitungkan belas kasih. Jika dalam kasus ini orang bisa menerima pengangkatan orang bumiputera menjadi anggota Dewan Hindia, maka harus dilihat sebagai tindakan politik, yang didorong oleh kepentingan dan bukan didorong oleh belas kasihan. Tindakan ini ternyata merupakan konsesi bagi pergerakan rakyat yang saat itu semakin lama semakin menjadi non-kooperatif.¹¹⁵

115 'Het 'ei' van Soetardjo' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 8 Desember 1938.

Tabrani, redaktur kepala *Pemandangan*, menuliskan sebuah artikel penting mengenai penolakan Ratu terhadap petisi Soetardjo. Dengan tibanya penolakan terhadap petisi Soetardjo, berbagai suara dari sejumlah kalangan mulai terdengar. Dari kubu bumiputera terutama, terdapat tiga suara:

- **Kelompok anti:** mereka berpendapat bahwa hal itu memang tidak mungkin diterima. Petisi itu hanya menghabiskan energi Soetardjo dan rekan-rekannya yang bukan manusia realistik melainkan manusia yang idealis.
- **Kelompok pro:** apa yang menyebabkan penolakan ini harus diketahui, dan harus jalan terus, karena tidak ada cara lain selain terus memperjuangkannya.
- **Kelompok netral:** Mereka menghendaki untuk menghentikan semua aksi di parlemen dan berunding dengan Belanda. Yang perlu adalah menggalang persahabatan, yang telah ditolak.

Dalam kelompok Belanda yang diwakili oleh golongan Zentgraaf, orang menyambut baik penolakan itu. Soetardjo harus mengetahui bahwa petisinya tidak berarti apa-apa apabila bertujuan untuk melemahkan integritas Belanda.

Sikap Indo-Eropa yang dalam Volksraad memberikan suara mendukung petisi itu bersikap sangat dingin, tidak mengeluarkan suara sedikitpun ketika mendengar penolakan itu. Namun, terlepas dari semua ini, apakah orang mendengar atau tidak, gerakan petisi akan terus berlangsung; Soetardjo tetap berjuang. Tanpa mempedulikan ras: Belanda, Cina, Arab, Indonesia, setiap orang yang menghendaki kemajuan Hindia berkepentingan pada tujuan yang dimuat dalam petisi Soetardjo.

Kini Belanda menolak karena suara di Hindia tidak bersatu.

Namun harus diyakini bahwa Belanda dan Hindia akan menyadari hal itu bila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Menurut Tabrani, nasib petisi Soetardjo tidak terletak di tangan Belanda, melainkan tergantung pada Hindia di bawah pengaruh kondisi politik internasional.¹¹⁶

Peranan Soetardjo di Parlemen setelah Petisi Soetardjo

Dalam kehidupan berparlemen, Soetardjo tetap bersifat kritis. Walaupun petisinya ditolak oleh Ratu dan parlemen Belanda. Perhatiannya tetap terfokus yaitu untuk memperbaiki nasib aparat pemerintah bumiputera. Dalam sidang Volkstraad yang diselenggarakan pada awal tahun 1937, Soetardjo mengusulkan sebuah mosi kepada Volksraad untuk segera didirikan sebuah yayasan dana sosial (*weezenfonds*) yang ditujukan bagi para pegawai non Eropa. Mosi pembentukan dana sosial ini mendapatkan simpati dari anggota dewan lainnya, dan akan segera ditindaklanjuti.¹¹⁷

Beberapa anggota Dewan melakukan perjalanan untuk meninjau istana Cipanas. Sebelum sampai ke istana Cipanas, rombongan singgah di istana Bogor. Dalam kunjungan itu, ia menemukan bahwa perabotan di kedua istana ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai sebuah istana yang diperuntukkan bagi tempat istirahat. Oleh karena itu, pada saat dimulai Sidang Volksraad untuk membahas anggaran, Soetardjo mengajukan sebuah amandemen untuk mengganti atau mereparasi

116 'Wij gaan door' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 22 Desember 1937, lembar ke-2

117 'Voor een weezenfonds voor niet-Europeesche ambtenaren' dalam *De Sumatra Post*, 18 Februari 1937, lembar ke-2.

perabot yang berada di kedua istana tersebut.¹¹⁸

Kini giliran Volksraad membahas tentang rencana anggaran pemerintah untuk tahun fiskal 1938. Dalam sidang parlemen itu hadir utusan pemerintah bidang pemerintahan Drossaers. Perdebatan tentang anggaran sangat keras pada sidang termin kedua. Soetardjo diduga menerima penjelasan dari utusan pemerintah tersebut. Drossaers mempertanyakan tujuan apa yang mendominasi pembentukan akademi pemerintahan.

Institut kurator diusulkan kembali untuk dibuka, dengan tujuan terutama untuk menunjuk seorang bekas pejabat pemerintah. Keterangan tentang program belajar telah sampai di Dalam termin kedua dilakukan pembahasan amandemen tentang akademi pemerintahan. Amandemen yang diusulkan oleh Soetardjo, Thamrin, De Hoog dan Sosrohadikoesoemo, berbunyi sebagai berikut: "Penandatanganan amandemen mengusulkan untuk menaikkan pos 5,2 Pendidikan Tinggi untuk anggaran 1938, yang kenaikannya diusulkan dalam anggaran pelengkap di Bagian V dari anggaran. Alasan pengusulan kenaikan anggaran ini karena dibentuknya sebuah akademi pemerintahan.

Soetardjo membela amandemen itu. Prinsip yang dianutnya bagaikan tulang yang kuat akan menopang kerangka yang tegap. Pamong harus bertindak dengan cara khusus. Murid harus berusaha menyelesaikan kesulitannya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Kerstens memandang perlu untuk menyerahkan kepada calon patih dan bupati agar berpaling kepada penasehat, yang dianggapnya perlu. Utusan pemerintah yakin bahwa Soetardjo tidak mendengar dengan baik apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerstens menganggap perlu hadirnya kurator dan

118 'Onvoldoende paleizen-meubillering' dalam *De Sumatra Post*, 15 Juli 1937, lembar ke-2.

membela lembaga itu demi kepentingan siswa. Terjadi perdebatan, yang ujung-ujungnya mengarah kepada pengambilan suara. Amandemen Soetardjo diteri dengan jumlah 25 suara menerima berbanding 18 suara yang menolak.

Berikut adalah mosi yang diusulkan oleh Tuan Soetardjo, Thamrin, De Hoog dan Sosrohadikoesoemo:

Volksraad

Mendengar perdebatan:

Mempertimbangkan bahwa suatu pendidikan menurut usul pemerintah pada akademi pemerintahan yang didirikan sampai tingkat tinggi di pemerintahan bumiputera sebagai tindak peralihan, dapat diterima. Sangat dianjurkan untuk menempatkan pendidikan peralihan ini lebih tinggi daripada rencana yang disusun oleh pemerintah, dengan tujuan untuk agar kondisi para siswa akademi pemerintahan ini benar-benar selaras dengan ilmuwan.

Soetardjo menjelaskan mosi ini. Salah satu kelemahan terbesar dari sekolah pemerintah adalah tidak ada ujian yang ditempuh. ia mengubah mosi ini. Perubahan yang diusulkan oleh van Helsdingen telah dimuat dalam mosi yang tercetak di atas. Setelah dua tahun belajar mereka bisa menempuh ujian seperti yang diusulkan oleh anggota parlemen Moelia. Berhubung mosi ini dibagi dalam tiga bagian, ia meninjau ketiga bagian itu. Yang terpenting adalah bahwa usul pemerintah memberikan kesan merendahkan pada korps pemerintah bumiputera. Apakah ini menjadi imbalan bagi kesetiaan yang sudah berlangsung selama selama berabad-abad. Demikian Soetardjo menutup

penjelasannya.¹¹⁹

Situasi pada akhir sidang 29 Juli 1938 berakhir agak panas. Ketua Volksraad pada akhir rapat memberitahukan ada tiga kesalahpahaman. Anggota parlemen Verboom tidak memiliki dugaan buruk terhadap Soetardjo. Seperti yang disampaikan kepada ketua sidang bahwa telah terjadi salah paham. Namun ia menyesalkan pada Soetardjo bahwa kepercayaan yang datanginya dari pihak lawan, sering diragukan, sehingga masing-masing saling meragukan kepercayaan itu. Hal itu tidak dapat diabaikan.

Datoek Toemenggoeng dalam menyampaikan pidatonya bertolak dari pandangan yang salah, seperti halnya yang disesalkan oleh Soetardjo dalam aspek yang lain dibandingkan dengan peristiwa yang baru berakhir. Ia tidak menyesalkan sikap Verboom kepada Soetardjo. Selain itu ia akan mengungkapkannya kembali apabila Datoek Toemenggoeng tersinggung, yang menyerangnya dalam bahasa Melayu. Kesan ini tidak benar sama sekali, karena Datoek Toemenggoeng telah menjelaskan kepadanya dalam menjawab pertanyaan Wirjopranoto yang disampaikan dalam bahasa Melayu. Ahli stenografi Melayu juga hadir dalam peristiwa ini.¹²⁰

Dalam sidang berikutnya, anggota Dewan White, Soetardjo, dan Wirjopranoto mengajukan mosi kepada pemerintah untuk membuka sekolah perkebunan di Sukabumi terhitung musim tanam yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi oleh pegawai perkebunan adalah mereka memerlukan bimbingan sejak musim tanam, pemeliharaan hingga masa panen. Penduduk bumiputera tidak memperoleh pengarahan dari mandor-mandor

119 'Bestuuracademie' dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 15 September 1937, lembar ke-2.

120 'Misverstanden' dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 29 Juli 1938, lembar ke-2.

mereka, sehingga kesalahan selalu ditimpakan kepada para penduduk bumiputera. Agar supaya diperoleh hasil yang baik, beberapa anggota dewan mengajukan mosi untuk membuka sekolah perkebunan di Sukabumi.¹²¹

Beberapa anggota Volksraad yang masih menunggu keputusan dari pemerintah di negara induk, menghadap kepada pemerintah untuk menyampaikan pertanyaan tertulis, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pemerintah tidak sependapat dengan mereka bahwa dengan memperhatikan kondisi internasional sekarang ini mungkin masa depan Hindia Belanda akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, mohon agar secepat mungkin mempertimbangkan dasar pemikiran petisi Soetardjo dengan maksud agar setelah konperensi antara perwakilan Belanda dan Hindia pernyataan bersama dikeluarkan, di mana keinginan rakyat Hindia Belanda tetap menjadi bagian integral dengan kerajaan.
- b. Apakah pemerintah tidak sepakat dengan mereka bahwa pernyataan demikian akan membawa dampak lebih luas dalam penilaian internasional daripada yang diperlukan sebatas kemampuan keuangan pemerintah untuk memperluas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan kepolisian?
- c. Apakah setelah menjawab pertanyaan a dan b, pemerintah bersedia (dengan mengubah pandangan yang diterima sebelumnya) meminta pemerintah pusat untuk bisa mengabulkan petisi Soetardjo?

Secara singkat bisa dilihat pada pasal-pasal yang membahas

121 'Soekabumi's Cultuurschool' dalam *Bataviaasche Nieuwsblad*, 8 Agustus 1938, lembar ke-2.

persoalan ini, baik dalam pers Eropa maupun pers di Hindia pada awal bulan ini. Isi pasal-pasal ini dirangkum dalam sebuah rumusan umum. Keresahan tentang dampak-dampak keputusan belakangan ini dalam krisis internasional dalam penentuan Hindia Belanda. Alasan dari keresahan ini yang dimuat dalam surat kabar, adalah ungkapan pers Inggris mengenai bagaimana cara memenuhi ambisi kolonial Jerman, mungkin Italia, Polandia dan Jepang akan menyusul. Dalam ungkapan-ungkapan yang ada pada militer Inggris, Hindia Belanda juga dilibatkan sebagai salah satu wilayah yang dipertimbangkan untuk dibagi kembali di antara Negara-negara kolonial.

Di samping pernyataan di atas, ungkapan-ungkapan pers negara-negara terkait pada tahun-tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam Volksraad oleh berbagai pihak. Menanggapi telegram dari luar negeri sejak awal bulan ini, ada alasan untuk menduga bahwa persoalan pembagian kembali wilayah kolonial dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi. Sudah jelas bahwa keputusan tentang hal ini dipengaruhi oleh keinginan penduduk kolonial terkait, termasuk penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, amatlah penting apabila penduduk Hindia Belanda harus mengutamakan pelestarian ikatan politik dengan Belanda. Hal ini merupakan suatu pernyataan, namun bila tidak didukung oleh lembaga umum, tidak akan memiliki kekuatan moral.¹²²

Permintaan tentang karet alam pada saat itu meningkat drastis. Hasil karet domestik tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, masalah karet dibicarakan dalam sidang Volksraad. Dalam pembahasan di Volksraad, diduga kuat

¹²² 'Alweer Petitie Soetardjo' dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 25 Oktober 1938, lembar ke-2.

bahwa krisis ini terjadi hanya karena alasan praktis tentang pembatalan penyediaan sebagian lahan untuk Sehubungan dengan itu, diusulkan, demi kepentingan kolonisasi, sebagian lahan disediakan dengan tujuan untuk ditanami karet.

Anggota Volksraad Kasimo kembali membahas perlakuan pemerintah terhadap tanaman rakyat dan perkebunan yang tidak sama. Kondisi ini harus diperbaiki. Kini tiba saatnya untuk memperbaiki hubungan itu. Anggota parlemen Kolkman menyatakan bahwa para pengusaha kini telah menerima perhitungan dari Kasimo, hasil karet di Hindia mendekati 27 juta kilogram atau setara dengan sekitar 77 juta gulden. Merupakan hal yang tidak etis apabila perhitungan ini ditujukan kepada debitur.

Soetardjo menganggap saatnya tiba untuk memperbaiki tindakan cukai ekspor tambahan yang salah. Sangat disesalkan apabila hal ini tidak ditindak. Akhirnya Soetardjo, Thamrin dan White, mengajukan amandemen tentang masalah karet ini.

Pemerintah menjawab bahwa utusan pemerintah untuk urusan ekonomi H.J. van Mook menyatakan untuk disampaikan kepada Kolkman bahwa hal itu tidak benar bila perhitungan jutaan gulden disampaikan kepada pengusaha. Akan tetapi pemerintah juga menghendaki untuk tidak membayar perhitungan ini, khusus untuk penghitungan yang salah ditulis.

Dalam pembahasan Amandemen Soetardjo ini, maksud dan tujuannya adalah untuk menyamakan kuota karet perkebunan dan karet rakyat. Amandemen Thamrin bermaksud memberikan potongan lima persen bagi pendaftaran atau pengalihan kecuali atas petunjuk Direktur Ekonomi.

Amandemen White bermaksud menyisihkan cadangan demi kepentingan para petani kecil Eropa dan kaum kolonis intelektual

bumiputera. Verboom mengajukan mosi dalam merundingkan perpanjangan pembatasan kesepakatan internasional semuanya agar Hindia Belanda bisa sepenuhnya menerima kuota yang berasal dari karet rakyat dan karet perkebunan yang sama.

Amandemen Soetardjo ditolak dengan 29 berbanding 21 suara. Amandemen Thamrin ditolak dengan 31 berbanding 19 suara. Pembahasan atas amandemen White belum diputuskan.¹²³

Penutup.

Soetardjo merupakan tokoh yang kontroversial. Ia dengan kemampuan yang dimilikinya terus menerus membela kepentingan penduduk bumiputera. Walaupun dalam sejarah Indonesia Soetardjo hanya dikenal sebagai pencetus Petisi Soetardjo bersama dengan beberapa anggota Volksraad, namun ternyata sepanjang kariernya sebagai anggota Volksraad selalu diabdikan untuk membela penduduk bumiputera yang menderita. Hal-hal yang memiliki kecenderungan merugikan penduduk bumiputera langsung diprotes dan diamandemen, sesuai dengan hak dan kewenangannya sebagai anggota dewan.

Soetardjo memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Ia melihat bahwa pendidikan bagi aparat pemerintah bumiputera dianggap perlu dan wajib. Dengan pendidikan yang lebih baik, aparat bumiputera akan mampu untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, permasalahan yang timbul di wilayahnya dapat dengan mudah diatasi, sehingga tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah.

Di bidang hukum, Soetardjo melakukan kritik terhadap

123 Lihat 'De rubberrestrictie in de Volksraad' dalam *De Sumatra Post*, 1 Desember 1938, lembar ke-2.

permasalahan yang ada di masyarakat, yang ia anggap sebagai tindakan ketidakadilan antara aparat Eropa dan aparat bumiputera. Walaupun kesalahan terjadi di kalangan aparat Eropa, namun seakan-akan mereka kebal hukum, dan yang harus menanggung resikonya adalah aparat pemerintah bumi putera. Kasus Rembang dan Lasem merupakan contoh yang membuktikan kesewenang-wenangan aparat Eropa. Namun akhirnya masih ada juga aparat Eropa yang memberikan rasa simpati kepada aparat bumiputera.

Dalam upaya menyetarakan antara penduduk Eropa dan penduduk bumiputera, Soetardjo telah mempelopori penggantian istilah *Inlander* dengan istilah *Indonesia*. Usulan ini tentunya tidak hanya sekadar tanpa makna. Ia memahami betul bahwa penduduk bumiputera, siapa pun dia, memerlukan identitas, yang sama dengan penduduk lainnya. Istilah *Indonesia* merupakan identitas yang diperjuangkan oleh berbagai organisasi baik yang kooperatif maupun non-kooperatif. Soetardjo berani menghadapi resiko dengan mengusulkan penggunaan istilah *Indonesia* yang dimulai dalam bidang hukum. Dengan menggunakan istilah ini, tidak ada lagi unsur superioritas dan inferioritas, walaupun penduduk Eropa menganggap diri mereka lebih superior daripada penduduk bumiputera. Namun, perjuangan tidak mengenal lelah. Walaupun usulannya ditolak, namun Soetardjo tetap dengan gigih memperjuangkan melalui organisasi PPBB yang diwakilinya. Dimulai dari wilayah yang kecil, kemudian akan berkembang ke wilayah yang lebih besar.

Soetardjo sangat peka terhadap penderitaan penduduk bumiputera. Sebagai wakil rakyat ia tidak segan-segan untuk memperjuangkan perbaikan nasib penduduk bumiputera. Pokok permasalahannya adalah penderitaan bumiputera seakan-akan disengaja oleh pemerintah, agar jarak di antara mereka tetap

terjaga. Hal inilah yang diperjuangkan oleh Soetardjo, bahwa antara kedua bangsa seharusnya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Upaya pengurangan anggaran di sektor pemerintah bumiputera, merupakan penghinaan yang harus diberantas. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan untuk mengirimkan mosinya kepada pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Belanda dan Parlemen Belanda guna memperoleh kesetaraan di antara mereka. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa keduanya merupakan mitra yang eksistensinya harus dijaga, agar menguntungkan kedua belah pihak.

Soetardjo dalam Sejarah Indonesia sangat terkenal karena ia berani mengajukan petisi kepada pemerintah Belanda. Namun, sejak ia berkiprah sebagai wakil rakyat, banyak mosi, petisi, amandemen, interpelasi yang diajukannya demi memperjuangkan nasib rakyat yang keadaannya sangat menderita. Ia aktif dan berani, serta mampu memotivasi sesama anggota dewan lainnya, baik bangsa Eropa maupun bangsa Indonesia, demi memperjuangkan kondisi yang lebih baik. Sebagai anggota Volksraad, ia memperjuangkan nasib rakyat tanpa mempedulikan apakah perjuangannya membahayakan dirinya atau tidak. Sosok Soetardjo telah berupaya memajukan bangsanya di tengah perjuangan melawan tirani penjajah yang tetap menginginkan untuk bercokol di tanah air tercinta.

Depok, 8 Juli 2016

Daftar Pustaka

Koran

- *Bataviaasch Nieuwsblad* periode 1930--1938
- *De Indische Courant*, periode 1930—1938
- *De Sumatra Post*, periode 1930--1938
- *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* periode 1929—1938
- *Soerabajasch handelsblad*, periode 1930 – 1938

Jurnal

- Abeyasekere, Susan. 1973 'The Soetardjo Petition' dalam *Indonesia*, no. 15.
- Abeyasekere, Susan. 1972. 'Partai Indonesia Raja, 1936-42: A Study in Cooperative Nationalism' dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 3, No. 2 (Sep.).
- Benda, Harry J. 1966. 'The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia' dalam *The Journal of Asian Studies*. Asosiation for Asian Studies.
- Hering, Bob. 1987. 'Indonesian Nationalism Revisited' dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 18, No. 2 (Sep.).
- Kartohadikusumo, Setiadi. 1990. *Soetardjo: "Petisi Soetardjo" dan Perjuangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kattenburg, Paul. 1946. 'Political Alignments in Indonesia' dalam *Far Eastern Survey*, Vol. 15, No. 19.

- Lindsay, Jennifer. 1997. 'Making Waves: Private Radio and Local Identities in Indonesia' dalam *Language and Media*, no. 64. (Oct.).
- Mrazek, Rudolf. 1977. 'Let us become Radio Mechanics: Technology and National Identity in Late Colonial Netherlands East Indie' dalam *Comparative Study in Soeciety and History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pluvier, J.M. 1967. 'Recent Dutch Contributions to Modern Indonesian History' dalam *Journal of Southeast Asian History*. Vol. 8, No. 2 (Sep.).
- Soejatno and Benedict Anderson. 1974. 'Revolution and Social Tensions in Surakarta 1945-1950' dalam *Indonesia*, No. 17 (Apr.)
- Veur, Paul W. van der. 1954. 'The Eurasians of Indonesia: Castaways of Colonialism' dalam *Pacific Affairs*. Pacific Affairs, University of British Columbia. Vol. 27, No. 2, June.

Internet:

- Saminta, Somya. 2011. <http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soetardjokartohadikusumo/>



Gagasan Alternatif Menuju Kemerdekaan:
*Meninjau Kembali Peristiwa,
Makna Dan Dampak Petisi
Soetardjo 1936 Dalam
Dinamika Perjuangan
Kemerdekaan Indonesia*

Memproklamasikan kemerdekaan, jadi atas kekuatan rakyat sendiri, yang dimungkinkan oleh pergolakan internasional dalam bentuk perang dunia kedua. Akan tetapi perang dunia saja untuk memungkinkan proklamasi itu tidaklah cukup. Jiwa seluruh rakyat harus sudah siap (*vaardig*) untuk menjalankan langkah yang menentukan hal itu. (Soetardjo Kartohadikusumo)

Oleh: Dr. Yuda B. Tangkilisan

*Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia*

Pada umumnya, penulisan sejarah pergerakan nasional lebih menonjolkan peran dan sumbangsih pola perjuangan non kooperatif, yang tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, ketimbang kooperatif, yang bekerja sama seperti bergabung dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*) bentukan pemerintah kolonial. Dalam kaitan itu, gagasan perjuangan kemerdekaan yang langsung dan segera (*direct and immediate independence*) lebih berarti daripada upaya memperoleh penentuan nasib sendiri (*self determination*), otonomi atau pemerintahan sendiri (*self government*) dan kemerdekaan bertahap (*gradual independence*). Seolah-olah, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan kemerdekaan pergerakan kebangsaan non-kooperatif semata. Padahal, pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang umumnya bekerjasama dengan pemerintahan militer, yang disebut sebagai kolaborator. Memang, sejumlah tokoh nasionalis berjuang di bawah tanah (*underground*) dan tidak bekerja untuk politik Jepang, namun sumbangsih mereka dapat dikatakan tidak jelas, karena tidak melakukan sesuatu kecuali memelihara komunikasi dan mendengarkan radio untuk memperoleh informasi tentang perkembangan keadaan perang. Sebagian kecil lainnya yang mencoba melakukan perlawanan bersenjata mengalami tindakan penindasan dan kekerasan yang berujung pada bergelimpangan korban dan hukuman di balik jeruji besi. Ketika berada di penjara di Bengkulu, Soekarno diberi pilihan apakah mau mengikuti kehendak dan bekerjasama dengan Jepang atau dihabisi. Ia memilih mengikuti Dai Nippon untuk mewujudkan cita-cita dan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Mrazek 1996; Lucas 1986; Dahm 1987).

Masa pergerakan nasional memperlihatkan spektrum sosial politik, ekonomi dan budaya yang beraneka. Keragaman itu

tampak pada latar belakang gerakan dan gagasan kemerdekaan dari spektrum politik. Pergerakan nasional tidak hanya tampak pada kalangan nasionalis politisi, dalam artian bergiat dalam partai politik atau perkumpulan sosial yang memiliki tujuan politik, namun juga nasionalis birokrat, yaitu para pejabat pemerintahan yang bertujuan politik dan aktif dalam organisasi modern. Di samping keduanya terdapat kategori lain seperti nasionalis pengusaha, nasionalis profesional, agamawan dan budayawan yang memiliki beberapa ciri yang tidak jauh berbeda. Masalah emansipasi, kebangsaan dan kemerdekaan tidak hanya dimonopoli oleh pergerakan nasionalis politik. Kancah perjuangan itu tidak hanya bergerak di jalur dan kancah politik. Kesemarakkan kancah pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan melibatkan berbagai kalangan elite masyarakat yang hendak melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Pergerakan nasional di pulau Jawa memperlihatkan gejala dan perkembangan yang selalu menarik untuk diamati dan dipelajari. Kesadaran dan kebangkitan kebangsaan bermula di kalangan elite tradisional yang biasanya disebut sebagai Priyayi. Sejumlah tokoh pergerakan nasional yang radikal dalam memperjuangkan gagasan kemerdekaan Indonesia seperti R.M. Tjiptomangoenkoesoemo, R.H.O.S. Tjokroaminoto dan Soekarno berasal dari kalangan elit itu (Tangkilisan 2005). Mereka adalah tokoh-tokoh yang bergerak di kancah partai politik. Mereka memilih kancah perjuangan berhadapan dengan atau konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah kolonial sehingga sempat mengalami peradilan jajahan dan menikmati hukuman penjara (*prison*) atau pengasingan (*exile*).

Sementara sebagian Priyayi lainnya tetap berada di jalur pemerintahan dengan menjadi bagian dari administrasi

politik kolonial. Sebagian mereka memiliki kesadaran politik emansipatif yang memiliki semangat bahkan cita-cita perjuangan untuk meraih kebebasan dari belenggu kolonialisme. Hanya cara mereka tidaklah konfrontatif dan memiliki gagasan kemerdekaan yang gradual. Walau begitu, justru merekalah penyambung dan penerus nafas dan semangat perjuangan kemerdekaan ketika gerakan non kooperatif dan konfrontatif mengalami penindasan dan tindakan tegas di bawah kebijakan politik pemerintah kolonial yang semakin menekan (*suppressive*) menyusul terpaan Malaise tahun 1930-an sehingga banyak tokohnya yang mengalami penindasan politik pemerintah kolonial.

Salah satu wujud sumbangsih dan keterlibatan Nasionalis Birokrat itu adalah peristiwa pengajuan sebuah petisi yang menyerukan pertemuan untuk membicarakan bentuk otonomi bagi Hindia Belanda atau Indonesia. Pemrakarsa pengajuan itu adalah seorang priyayi bernama R.M. Soetardjo Kartohadikusumo, seorang pejabat di lingkungan kabupaten, anggota perkumpulan pangreh praja dan anggota Dewan Rakyat. Peristiwa itu kemudian lebih dikenal sebagai Petisi Soetardjo, yang memperoleh dukungan luas tidak hanya dari berbagai perwakilan dan anggota di dewan itu, namun juga di luar dewan dari kalangan pergerakan nasional lainnya. Selain itu, gerakan petisi itu menyebar di kalangan masyarakat dalam upaya untuk memperoleh dukungan rakyat. Bahkan penggalangan dukungan itu meluas hingga ke Negeri Belanda. Juga petisi itu, walau ditolak oleh Kerajaan Belanda, memiliki dampak yang cukup signifikan untuk perkembangan politik jajahan dan perjuangan pergerakan nasional (Abayasekere 1973).¹

1 R.E. Elson (2008: 142-143) memandang signifikansi dan dampak petisi itu dalam kutipan berikut, bahwa “Dan karena itulah upaya-upaya pribumi, terutama petisi Sutardjo 1936 di Volksraad---sangat

Petisi Soetardjo hadir ke pentas kebangkitan nasional (*national awakening*) yang memperjuangkan kemerdekaan (*struggle for independence*) pada saat terjadi kekosongan kegiatan di kalangan pemimpin pergerakan kebangsaan (*nationhood movement*). Sejak akhir tahun 1920-an, kebijakan kolonial mulai memperlihatkan watak garangnya dengan tindakan keras dan menekan terhadap gerakan politik emansipatif anak jajahan yang bergerak di jalur non koperatif dan konfrontatif dalam wadah partai-partai politik. Para pemimpinnya ditangkap, diadili dan dihukum dalam suatu proses peradilan kolonial, baik berupa ganjaran penjara (*prison*) maupun diasingkan (*exile*). Perubahan sikap pemerintah kolonial yang juga konfrontatif itu mempengaruhi dinamika pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di tengah-tengah reorientasi oleh kalangan pergerakan non koperatif, tongkat estafet perjuangan kemerdekaan diambilalih oleh seorang nasionalis birokrat, yang berada di lembaga perwakilan kolonial, atau Dewan Rakyat yakni Soetardjo. Petisinya membuka ruang alternatif untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui cara dan jalan damai dalam tahapan memperoleh tahapan otonomi dengan meninjau kembali (*review*) hubungan ketatanegaraan Kerajaan Belanda (*het Koninkrijk der Nederlanden*). Berkat kehadiran dan pengajuan usulan politik itu, ruang dan semangat pergerakan nasional yang sempat memperlihatkan tanda-tanda meredup, bergairan lagi dan cita-cita kemerdekaan tidak sampai tenggelam.

Salah satu pendapat tentang dampaknya adalah berkenan dengan kesempatan yang hilang atau *gemiste kansen*. Pandangan itu muncul dan berkembang dalam historiografi tentang petisi

merendah dan lemah nada serta isinya—yang meminta diskusi antara ‘wakil-wakil Belanda dan Hindia Belanda’ dalam peralihan gradual menuju pemerintahan sendiri dan otonomi dalam persemakmuran yang disponsori Belanda ditolak oleh pemerintah Belanda.”

tersebut. Konteks dan teks petisi itu selaras dan merefleksikan keadaan kolonialisme Hindia Belanda di lingkungan internasional. Kesempatan untuk mempertahankan Hindia Belanda, atau setidaknya memelihara hubungan yang lebih baik pasca dekolonisasi, meredup seraya penolakan usulan itu. Pandangan *Gemiste kansen* muncul dalam pembahasan proses perundingan Indonesia dan Belanda pasca Perang Asia Timur Raya (Pasifik). Belanda dipandang kehilangan peluang untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada perundingan awal dengan Indonesia. R.Z. Leirissa (2006: 11-12) menggambarkan bahwa “sudah sejak Hoge Veluwe Belanda sesungguhnya mempunyai banyak kesempatan untuk menyelesaikan masalah Indonesia itu secara damai dan menguntungkan semua pihak. Kalau saja ada pengertian Belanda mengenai perubahan mendasar yang telah terjadi di Indonesia selama pendudukan Jepang, kalau saja ada pendekatan yang lebih manusiawi terhadap para pemimpin RI, maka penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan baik-baik pula. Tetapi kesempatan-kesempatan itu tidak dimanfaatkan atau luput, sehingga harus terjadi dua kali perang yang tidak menguntungkan siapa-siapa. Perspektif ini paling lama bertahan justru dalam periode dimana hubungan antara Indonesia dan Belanda jatuh hingga titik nadir. Maka dapat dikatakan, bahwa perspektif sejarah tersebut sesungguhnya mencerminkan frustrasi bangsa Belanda yang nampaknya disana-sini masih berlangsung hingga dekade-dekade akhir ini. Di pihak Indonesiapun masih terasa adanya sikap mencurigai bangsa Belanda karena berbagai keadaan yang tidak menyenangkan yang dialaminya dalam tahun-tahun 1970-an ketika hubungan Indonesia-Belanda telah pulih kembali.”²

2 Hubungan Indonesia dan Belanda terus memburuk pasca pengakuan kedaulatan. Dalam rangka perjuangan merebut kembali Irian Barat,

Dalam konteks yang berbeda, perspektif itu berkembang juga dalam pengkajian Sejarah Ekonomi Indonesia yang memandang bahwa kesempatan industrialisasi tidak dimanfaatkan pada saat modernisasi ekonomi abad 19 berupa introduksi kebijakan komersialisasi pertanian dan perkebunan, seperti yang dikemukakan oleh Howard Dick (2000). Nada serupa juga diserukan oleh Anne Booth (1998) dalam menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia abad 19 dan 20. Demikian pula dengan dampak langsung petisi Soetardjo, menurut sejumlah pendapat, penolakan terhadap permintaan itu menimbulkan kekecewaan besar di kalangan nasionalis yang bekerjasama dengan tatanan kolonialisme dan memupus kepercayaan mereka terhadap pemerintah kolonial yang berkaitan dengan masa depan wilayah jajahan. Hingga saatnya, ketika pemerintah Belanda jatuh ke tangan Fasisme Jerman dan Hindia Belanda di bawah bayang-bayang serbuan Fasisme Jepang, seruan untuk menggalang dukungan dari kalangan masyarakat jajahan, yang dikukuhkan dengan janji perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda oleh Ratu Wilhelmina, tidak mendapat tanggapan yang berarti, termasuk

pemerintah Indonesia melancarkan politik nasionalisasi, repatriasi dan konfrontasi terhadap aset dan warga Belanda di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda untuk membina hubungan yang lebih baik setidaknya sejak masa Orde Baru, ketika Indonesia memerlukan bantuan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan sehingga wakil Belanda menjadi ketua dari perhimpunan negara donor untuk Indonesia, IGGI (*Inter-governmental Group for Indonesia*) yang dibubarkan tahun 1992 dan diganti oleh CGI (*Consultative Group for Indonesia*). Di kalangan intelektual, upaya itu tampak misalnya dengan pembentukan kerja sama Indonesia dan Belanda di bidang Sejarah dan Humaniora, dan penyelenggaraan seminar menelusuri Linggarjati. Salah seorang tokoh dari pihak Belanda adalah Prof. Dr. Mr. C. Fasseur yang berpulang tanggal 13 Maret 2016. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengenang sosok sejarawan yang banyak memberikan sumbangsinya terhadap historiografi Indonesia itu, bersama-sama dengan tokoh-tokoh lainnya yang juga telah tiada.

dari para priyayi nasionalis birokrat yang diikuti oleh kalangan priyayi lainnya. Segera perhatian dan pandangan tertuju pada penguasa pemenang yang melancarkan propaganda emansipatif yang hendak membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu kolonialisme Barat. Pada masa menjelang akhir penjajahannya, Pemerintah kolonial kehilangan kesempatan untuk memperoleh dukungan masyarakat jajahan karena kekecewaan dan ketidakpercayaan sebagai akibat dari penolakan terhadap petisi Soetardjo.³

Birokrasi dan Kekuasaan

Dalam kajian politik, pembahasan tentang birokrasi mulai marak setelah dirintis oleh Max Weber. Menurut etimologi, kata birokrasi yang berasal dari kosa kata Bahasa Latin, timbul dari pembentukan dua kata dasarnya yaitu *bureau* dan *kratein*, yang

-
- 3 Kajian tentang Petisi Soetardjo telah dilakukan oleh Susan Abayasekera (1973), Yusmar Basri (1976), JM Pluvier (1963/4) dan NGB Gouka (2001). Apabila ketiga tulisan pertama berupa artikel jurnal, karya Nicolaas George Bernhard Gouka adalah sebuah disertasi yang diterbitkan dengan judul *De petitie-Soetardjo; Een Hollandse misser in Indie? (1936-1938)* (Amsterdam: Rozenberg). Pada tahun 1936 terbit terjemahan oleh Agus Salim yang berjudul *Hindia Berdiri Sendiri: Oesoel Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo* ('s Gravenhage, Batavia). Setahun setelah itu terbit karya J.M. Somer. "Het Petitie Voorstel Soetardjo cs.," dalam *Indische Gids*. Lalu, Soetardjo Kartohadikoesoemo. *De Petitie Soetardjo*. Perhimpunan Indonesia, 1937, dan Volksraad. *Indonesie Zelfstandig - Petitie - Soetardjo*, Van Ark, 1937. Lihat juga, M. Natsir. "Di sekitar Petisi Sutardjo." *Pandji Islam*, Desember 1938. Pada tahun 1990 terbit karya Setiadi Kartohadikusumo, putera tertua Soetardjo Kartohadikusumo, yang merupakan catatan kenangan ayahnya. Kesemua karya itu baik langsung maupun tidak, bersama sumber lainnya, menjadi bahan dan rujukan dalam analisis dan penulisan ini. Pada 27 Agustus 2015 selama sebulan, Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta menyelenggarakan pameran mengenai "Petisi Soetardjo: Sumbangan Kaum Pamong Praja untuk Perintisan Kemerdekaan Indonesia".

berarti meja (biro) dan kekuasaan. Birokrasi berarti kekuasaan melalui meja, yang merujuk pada suatu proses penyelenggaraan kekuasaan yang melalui mekanisme administrasi melalui jenjang atau tahap tertentu. Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan penguasa tertinggi hingga menyentuh ke jenjang dan lapisan terbawahnya, yaitu rakyat. Idealnya, birokrasi melayani kebutuhan dan keperluan rakyat selain mengabdikan pada kekuasaan tertinggi, dalam kehidupan negara adalah abdi negara.

Dalam pemerintahan negara modern yang berdasarkan demokrasi (liberal), birokrasi memiliki rasionalisasi seperti kualifikasi personal, kompetensi jabatan, pembagian tugas (*division of labor*), hirarki yang jelas, penggajian (*salaries*), dan deskripsi tugas (*job description*). Birokrasi juga harus profesional. Tugasnya menggerakkan dan melancarkan proses administrasi pemerintahan dan melayani warga. Dalam politik modern, birokrasi berbeda dengan politisi yang menjadi anggota dewan (legislatif) dan menjadi presiden serta menteri sebagai pembantu presiden (eksekutif). Birokrasi adalah jajaran kementerian, badan, dan lembaga yang membantu kelancaran tugas mereka. Birokrasi harus bebas dari patrimonialisme, nepotisme dan afiliasi politik. Kerancuan dan kekacauan birokrasi disebut *red tape*.

Dalam kehidupan politik negara yang belum sepenuhnya demokratis, kerap timbul apa yang disebut sebagai birokratis politik (*bureaucratic politics*), atau masyarakat politik birokratik. Keadaan ini timbul ketika perangkat demokrasi (*democratic tools*) seperti lembaga legislatif tidak berfungsi sepenuhnya sebagai pelaksana dan representasi kekuasaan tertinggi yakni perwakilan rakyat. Kekuatan eksekutif lebih besar ketimbang legislatif yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi, mengimbangi dan menjadi mitra. Kekuatan eksekutif dijalankan dan dilaksanakan

oleh birokrasi pemerintahan. Birokrasi tidak lagi menjadi abdi rakyat dan negara melainkan menjadi pemangku kekuasaan (*power holder*) yang mengontrol kehidupan politik. Militer dalam politik dan pemerintahan merupakan keadaan yang kerap terjadi terutama di negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua melalui dekolonisasi ketika keterlibatan militer ikut menjadi andil dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam kajian hubungan sipil-militer, keterlibatan militer dalam politik (*military in politics*) disebut sebagai Praetorianisme (Nordlinger 1977), yang diangkat dari keadaan masa kerajaan Romawi Kuno ketika pasukan penjaga kaisar (*praetorian*) mengambilalih kekuasaan dan menjadi pemerintah. Keadaan ini disebut juga supremasi militer terhadap sipil. Pola militer Praetorianisme antara adalah militer sebagai penguasa (*ruler*), mitra penguasa (*co-ruler*) dan bawahan (*ruled*). Dalam teori birokrasi modern, tentara (militer) adalah abdi negara dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilihan umum (*elections*) menjadi calon wakil yang dipilih. Negara modern yang demokrasi menganut prinsip supremasi sipil terhadap militer. Gerakan Turki Muda (*Young Turks*) merujuk pada gebrakan Kemal Attaturk, seorang perwira tentara di Turki yang bersama perwira-perwira muda lainnya mengambilalih kekuasaan dari penguasa sipil yang dipandang telah menyimpang tidak untuk merebut dan memegang kekuasaan sendiri melainkan menyerahkannya kembali kepada sipil melalui penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin sipil yang baru. Gerakan itu menyatakan bahwa mereka akan melakukannya kembali apabila keadaan negara memerlukannya. Indonesia, Filipina dan Muang Thai pernah mengalami masa Praetorianisme yang kerap

disebut juga sebagai diktatur militer dalam sejarah politik dan pemerintahannya masing-masing.

Dalam perspektif sejarah, birokrasi muncul dan berkembang melalui sejumlah proses menuju kehidupan modern atau modernisasi setelah melampaui masa dan formasi sosial Feodalisme. Birokrasi modern berawal dari masa Revolusi Prancis 1789 yang menghancurkan pola pemerintahan monarki absolut dan feodalisme. Napoleon Bonaparte membentuk militer yang profesional yang tidak tergantung pada kekuatan militer para bangsawan seperti masa sebelumnya (*ancien regime*). Selain itu dibentuklah birokrasi modern untuk menjalankan roda pemerintahan, yang mengakhiri kekuasaan bangsawan berpedang (*noble of sword*) dan bangsawan berjubah (*noble of robe*) dalam politik negara. Namun, sejak itu pula birokrasi dalam dinamika politik negara berakhir untuk menjadi abdi negara (*civil servant*). Bentuk pemerintahan ini, Republikanisme dan Birokratisme menyebar ke berbagai pemerintahan di Eropa yang dibawa juga ke Asia melalui jaringan dan perkembangan kolonialisme-imperialisme. Pemikiran, tindakan dan kebijakan W.H. Daendels di pulau Jawa tidak terlepas dari perintah dan kesetiaannya pada gagasan dan politik Napoleon Bonaparte (Marihandono 2005). Daendels memperkenalkan dan menerapkan pola birokrasi modern di pulau Jawa, yang tidak sempat berlangsung lama karena digantikan oleh Jansen yang kemudian menyerah kepada Inggris di bawah pimpinan Thomas Stanford Raffles yang sempat melanjutkan birokratisasi modern itu namun juga tidak berlangsung lama karena harus menyerahkan kembali koloni itu kepada Belanda.

Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan di pulau Jawa mengalami birokratisasi modern. Namun, proses terjadi dalam

lingkup kepentingan kolonialisme sehingga birokratisasi itu tidak berjalan sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya terjadi dualisme ketika birokrasi tradisional tidak dilebur sepenuhnya ke dalam pemerintahan atau birokrasi kolonial, melalui pola pemerintahan langsung dan tidak. Kebijakan birokratisasi kolonial memunculkan, menegaskan dan memperkuat kedudukan para priyayi. Dalam sejumlah analisis, kekacauan pemerintahan terutama masa pascakolonial disebabkan oleh pola dan kinerja priyayi sebagai aparat birokrasi, yang bersifat patrimonialisme, nepotisme, feodalistik, kolusi dan korupsi. Merupakan permasalahan yang memerlukan penjelasan mendalam, adalah apakah keadaan *red tape* ini adalah karakter priyayi sebagai birokrasi tradisional sebelum masa kolonialisme atau disebabkan oleh birokratisasi kolonial modern yang semu dan bertujuan eksploitatif. Artinya, kolonialisme merusak tatanan pemerintahan tradisional priyayi yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dan falsafah pemerintahan serta kekuasaan yang dyadik dengan kawulanya sebagaimana yang diungkapkan dalam *manunggaling kawulo lan gusti* (penyatuan hamba dan tuan). Kerusakan itu kian parah pada masa pendudukan Jepang ketika birokrasi dieksploitasi untuk kepentingan memenangkan perang Asia Timur Raya (Pasifik) sebagai bagian dari pemerintahan militer.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kebijakan dan pengalaman birokratisasi berjalan dengan pembenahan politik kolonial seperti penancangan dan pelaksanaan politik Etis yang berujung pada pembentukan suatu dewan perwakilan yang semu berupa Dewan Rakyat (*Volksraad*). Walau tidak memiliki kekuasaan dan fungsi yang jelas, dewan itu memberikan kesempatan untuk elite politik jajahan untuk berpolitik, seperti

menyatakan pendapat, berorganisasi modern dan mengajukan mosi, petisi atau sejenisnya. Di dalam dewan itu terdapat berbagai perwakilan kepentingan dan perkumpulan pergerakan kebangsaan, termasuk dari kalangan priyayi yang tersebar ke beberapa partai dan perkumpulan. Partai dan perkumpulan priyayi juga mendapat kesempatan untuk menjadi anggota dewan itu. Dalam konteks pergerakan melalui perwakilan itu, sebuah petisi dilayangkan yang tuntutan utamanya adalah otonomi wilayah jajahan Indonesia melalui seruan penyelenggaraan konperensi untuk membicarakannya. Petisi segera menarik perhatian berbagai kalangan, baik di antara anggota Volksraad dan yang bukan, bahkan hingga ke Negeri Belanda. Pencetusnya adalah seorang priyayi dan merupakan anggota organisasi priyayi, PPBB.

Petisi Soetardjo merupakan bagian dari rangkaian pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah dimulai sejak penancangan pendirian organisasi sukarela modern pertama, Boedi Oetomo, yang antara lain dicetuskan oleh seorang priyayi yang berpendidikan sekolah kedokteran, Raden Soetomo. Setelah itu, berbagai gagasan, pemikiran, kiprah dan gerakan kebangsaan meluas ke berbagai kalangan seperti Islam, Kristen, Indo Eropa, Keturunan Arab, Tionghoa, Sosialis, Komunis, Gerakan Etnik, Ulama, Santri, Pemuda, Perempuan, Buruh, Guru, Priyayi dan berbagai kategori sosial politik lainnya. Perjuangan emansipasi bergerak menuju perjuangan menuntut penentuan nasib sendiri (*self determination*), pemerintahan sendiri (*zelf bestuur*) dan kemerdekaan (*vrijheid*), di tengah-tengah pola perjuangan bekerja sama (*cooperatie*) dan tidak (*non-cooperatie*). Kesemua itu, yang intinya adalah perjuangan kemerdekaan, berakhir dengan kebuntuan dan kegagalan pada masa kolonialisme Hindia Belanda.

Gerbang kemerdekaan mulai terkuak kembali pada masa pendudukan Jepang. Perkembangan itu berkaitan erat dengan keadaan dan posisi tentara Jepang dalam medan pertempuran melawan kekuatan militer Sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Propaganda awal perang Jepang untuk menggalang dukungan wilayah sasaran pendudukan militernya adalah kesejahteraan bersama di lingkungan Asia Timur Raya (*Greater East Asia*) dalam ideologi *Hakko Ichuu*, yang kerap diterjemahkan sebagai “delapan jalur di bawah satu atap.” Jepang bermaksud untuk membebaskan Asia dari belenggu penjajahan Barat, yang telah diperlihatkan sejak perang dengan dan kemenangannya atas Rusia tahun 1904-1905, yang dipandang juga sebagai Pan Asianisme. Janji kemerdekaan tampaknya merupakan bagian dari propaganda awal tersebut, walau sulit untuk dipastikan apakah memang benar niat Jepang untuk memberikan kemerdekaan sudah ada sejak awal tanpa dipengaruhi oleh perkembangan perang yang menyudutkan gerak dan pertahanannya atau juga seolah-olah, mewujudkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa pergerakan nasional di bawah cakrawala kolonialisme Hindia Belanda. Walau pihak Jepang tentunya tidak mungkin tidak mengetahui perjuangan masa pergerakan itu. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, perjuangan kemerdekaan tidak dapat dilakukan sepihak secara terbuka tanpa izin, keterlibatan dan prakarsa Jepang karena diawasi secara ketat oleh penguasa militernya melalui kegiatan polisi militer (Kempetai).

Petisi Soetardjo yang diajukan di kancah Volksraad pada tahun 1936 dan dibicarakan pada masa persidangan tahun 1937 berkaitan erat dengan gagasan dan perjuangan kemerdekaan. Petisi itu lahir di tengah-tengah keadaan dan perkembangan pergerakan kebangsaan dan nasionalisme yang mengalami

tindakan keras dari pemerintah kolonial. Menghadapi sikap dan tanggapan keras itu, pencarian alternatif kebebasan pun muncul, yang salah satunya adalah tuntutan otonomi itu. Jelas, Petisi itu merupakan rangkaian pola dan strategi perjuangan bangsa Indonesia, bangsa yang lahir sejak tahun 1928, untuk memperoleh kemerdekaan karena terselip pemikiran bahwa kemerdekaan akan menyusul dalam waktu 10 tahun berikutnya. Petisi itu kemudian ikut disebut-sebut dalam analisis mengenai kekalahan Belanda dalam upaya memulihkan (restorasi) kekuasaan kolonialismenya (rekolonisasi) di Indonesia pasca pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang melalui suatu babakan revolusi bersenjata di sela-sela perjuangan diplomasi dan berujung pada pengakuan kedaulatan sebagai hasil dari Konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag.

Petisi itu tidak lahir dari pergulatan pemikiran yang bersentuhan dengan gagasan-gagasan besar. Petisi itu berasal dari keprihatinan dan kegalauan tentang kemerosotan keadaan dan tingkat penghidupan serta kehidupan rakyat yang diayominya selaku pamong praja dan perwakilan di dewan. Seperti Sir Isaac Newton, pencetus teori dan hukum gravitasi, yang menemukan teorinya itu dari pengamatan sederhana terhadap buah apel yang jatuh dari pohon, bukan hasil dari percobaan di laboratorium. Gagasan bernas dapat muncul tanpa diduga, kapan, dimana dan kepada siapa saja, seperti yang menimpa Soetardjo Kartohadikusumo. Dalam keprihatinan dan kegalauan itu, tatapan dan pikirannya tertuju pada buku tentang Undang-undang Dasar (*Grondwet*) Kerajaan Belanda yang pasal satunya mengatur wujud dari Kerajaan Belanda (Kartohadikusumo 1990: 119). Ternyata, gagasan cemerlang hadir di benaknya pada saat berusaha mendalami dan memahami kalimat pada pasal itu.

Pemahaman alternatif yang berdasarkan pembacaan kritis dan progresif dan yang telah menyingkap kebenaran itu membingkai kelahiran petisi tersebut.

Priyayi dan Politik

Petisi Soetardjo tidak terlepas dari tradisi, orientasi dan pengalaman politik priyayi sebagai birokrasi tradisional dalam pemerintahan kolonial. Petisi itu lahir dari perjuangan untuk meraih kemerdekaan Hindia Belanda melalui jalur politik dan lembaga resmi kolonial. Petisi itu merupakan refleksi dari perubahan sosial politik yang melanda kehidupan masyarakat kolonial Hindia Belanda yang tidak terlepas dari pengaruh dan perkembangan internasional. Priyayi merupakan salah satu sendi dan pilar politik dan pemerintahan kolonial yang dibangun sejak pembentukan negara kolonial itu. Priyayi muncul dan berkembang selaras dengan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda berdasarkan kepentingan dan arah negeri induknya, Negeri Belanda.

Sejak masa Nusantara sebelum kedatangan bangsa Barat hingga pascakolonialisme, keberadaan, peranan dan pengaruh suatu kekuatan politik selalu tampak dalam perkembangan Indonesia. Perkembangan politik biasanya tidak terlepas dari kekuasaan seorang penguasa, yang bergelar raja dan kerajaannya pada masa pra Islam dan Sultan serta Sunan beserta masing-masing kesultanan dan kasunanan sejak masa Islam. Namun gelar-gelar penguasa tertinggi itu kerap digunakan silih berganti. Gelar lainnya adalah seperti Tuanku, Tengku, Datuk dan lainnya. Kekuatan politik itu adalah struktur dan jenjang pemerintahan birokrasi.

Susunan pemerintahan tradisional di Nusantara sejak

pengaruh Islam terdiri atas Raja (Sultan), Bangsawan dan pejabat rendahan untuk kerajaan pedalaman yang berbasis perekonomian agraria. Sedangkan, variasi lainnya seperti di kerajaan pesisir adalah Raja, Orang Kaya dan pejabat rendahan yang bertumpu pada perekonomian perdagangan lintas lautan. Perbedaan kedua pola itu adalah pada kekuasaan penguasa tertinggi. Pada kerajaan pedalaman, kekuasaan sang raja sangat kuat terhadap para bangsawannya, sedangkan di kerajaan pesisir sebaliknya, yakni lemah terhadap para orang kaya. Oleh karena, para bangsawan di kerajaan agraris adalah para pemilik dan pengelola lahan yang bersifat tidak bergerak (*immobile*) sehingga mudah diawasi untuk sewaktu-waktu dirampas oleh kerajaan. Sementara, kekuatan ekonomi para orang kaya yang berasal dari perdagangan bersifat mudah bergerak (*mobile*) sehingga luput dari pengawasan dan penyitaan kerajaan.

Ketika berinteraksi dengan dan menjadi bagian kolonialisme Belanda, perubahan politik pun berlangsung. Politik pemerintahan kolonial di pulau Jawa mengenal dua pola, yaitu pemerintahan langsung dan tidak langsung (*direct and indirect rule*). Pemerintahan tidak langsung berlaku di wilayah Swapraja atau *Vorstenlanden*, yang merupakan kelanjutan dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya di pedalaman pulau Jawa. Kerajaan itu adalah Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati dan ketika mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung menghadapi persaingan dari Batavia, yang didirikan di atas reruntuhan kota yang didirikan oleh Pangeran Jayakarta dari Banten. Ketika Negara Kolonial Hindia Belanda dibentuk pada awal abad 19, segera terjadi aneksasi wilayah kerajaan itu yang sejak tahun 1755 mengalami perpecahan. Perkembangan akhir kesultanan itu menjadi 4 wilayah swapraja, yaitu Ngayogyakarta

Hadiningrat, Surakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman.

Pemerintahan di Vorstenlanden masih dikendalikan oleh para penguasa tradisional, yang memakai berbagai gelar seperti Sultan, Sunan, Pangeran dan Sri Pakualam. Mereka masih diperkenankan melaksanakan beberapa hak monarki tradisional seperti *primogeniture*, patrimonialisme, mengangkat pejabat birokrasi, mengendalikan administrasi pemerintahan, pemungutan pajak, kepemilikan tanah dan lainnya di bawah pengawasan dan persetujuan pemerintah kolonial. Birokrasi tradisional di lingkungan wilayah itu mengenal hirarki dan jenjang wewenang (*authority*). Dalam perkembangan modern kolonial, wilayah swapraja itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dikenal memiliki pemikiran yang progresif terutama ketika menghadapi peralihan-peralihan politik. Pada masa kemerdekaan Indonesia, kesultanan itu memperoleh status sebagai daerah istimewa pada tingkat propinsi.

Di daerah lainnya di pulau Jawa, yang sebagian besar diperoleh dari wilayah swapraja itu kecuali Jawa Barat, berlaku pemerintahan langsung. Birokrasi kolonial, yang dikenal sebagai *Binnenlandsche Bestuur* (Pemerintahan Dalam Negeri) mengenal dua hirarki yaitu, *Europeesche Bestuur* dan *Inlandsche Bestuur*. Tingkatan pertama terdiri atas jajaran pejabat Belanda yang memiliki wewenang lebih tinggi di bawah Gubernur Jenderal. Pemerintahan tradisional, yakni *Inlandsche Bestuur* merupakan jajaran pejabat yang berasal dari kalangan birokrat terjajah, yakni para bupati (*regents*) dan bawahannya. Daerah Kabupaten (*regency*) merupakan bagian dan bawahan dari Residensi (*Residency*). Bangunan struktur pemerintahan langsung itu adalah sebagai berikut:

Gubernur Jenderal	
Gubernur (Propinsi)	
Residen (Residensi)	
Asisten Residen (Asisten Residensi)	Bupati (Kabupaten)
Kontrolleur	Wedana (Kewedanaan)
Asisten Wedana (Camat/ Kepala Distrik)	
Kepala Desa	

Dalam pemerintahan langsung itu, Bupati tidak hanya berada di bawah wewenang Residen, melainkan juga didampingi oleh seorang pejabat Asisten Residen yang membawahi kontrolleur, pejabat yang mengawasi wedana sebagai bawahan langsung bupati. Struktur itu diterapkan pula dalam pemerintahan di luar pulau Jawa (*Buitengewesten/ Outer Island*) menyusul ekspansi kolonialnya melalui ekspedisi-ekspedisi militer karena menemui berbagai perlawanan. Perang Aceh dan Perang Batak merupakan fase-fase akhir dalam ekspansi kolonial Hindia Belanda di kepulauan Indonesia. Dalam proses itu, terbentuklah struktur pemerintahan Hindia Belanda yang wilayahnya merentang dari

ujung utara pulau Sumatera hingga Papua.

Dalam proses pembentukan birokrasi kolonial itu, sebagai tuntutan perkembangan politik dan ekonomi daerah jajahan dalam dinamika global dunia modern, birokrasi tradisional yang terserap dalam mekanisme pemerintahan kolonial itu disebut juga sebagai Priyayi. Mereka memiliki peranan dan pengaruh dalam melaksanakan kebijakan kolonial terhadap rakyat jajahan. Wewenang mereka antara lain meliputi pemungutan pajak (*tax collecting*), baik dalam bentuk hasil bumi (*in natura*), uang hingga tenaga kerja/ rodi (*heerendiensten*). Kewibawaan mereka disokong oleh kekuasaan, kekuatan dan hukum kolonial, seperti militer, kepolisian, jaksa dan peradilan. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kekuasaan yang besar terhadap kaula (*subjects*) mereka. Para bupati yang sebelumnya merupakan pemimpin (kepala) rakyat (*volkshoofd*) kemudian beralih menjadi pejabat (*ambtenaar*) kolonial. Tidak jarang sikap dan kebijakan mereka menjadi sewenang-wenang.⁴ Penguatan kuasa dan peranan mereka tampak pula pada pengenalan dan pelaksanaan pendidikan sekolah modern.

Melalui pendidikan, priyayi memperoleh kesempatan untuk mengenal dunia modern. Berbagai pengetahuan dalam batas-batas

4 Pembentukan administrasi pemerintahan modern sejak masa W.H. Daendels, yang melibatkan pemerintahan tradisional di dalamnya antara lain bertujuan untuk melindungi praktik menyimpang yang sewenang-wenang dari penguasa tradisional terhadap rakyatnya. Sikap dan kebijakan serupa dilakukan oleh Thomas S. Raffles pada masa peralihan Inggris (*British Interregnum*). Namun birokratisasi yang berlangsung setelah pemulihan kekuasaan dari Inggris tampaknya menjadi agak berbeda karena lebih ditujukan untuk pelaksanaan kebijakan kolonial (*colonial policy*) untuk mengelola dan menyelia daerah jajahan (*to manage a colony*). Keadaan itu tampak pada, misalnya pengamatan dan keluhan pejabat kolonial Hindia Belanda seperti E. Douwes Dekker yang menuangkannya dalam karya *Max Havelaar* dengan nama samaran Multatuli.

tertentu mereka peroleh. Melek aksara Latin (*literacy*) merupakan kunci untuk mengenal kebudayaan global. Berbagai pengetahuan tentang perkembangan internasional itu berasal dari pemberitaan pers yang mulai muncul berkembang luas hingga menyentuh ke berbagai segmen sosial masyarakat kolonial berkemampuan membaca tulisan sejak abad 19. Berbagai gagasan dan pemikiran modern merasuk ke dalam benak dan kesadaran mereka. Surat-surat Raden Ajeng Kartini merupakan hasil dari introduksi budaya membaca dan kemampuan menyerap unsur-unsur modern di kalangan masyarakat terjajah terutama pada lapisan priyayi (Marihandono dkk. 2016). Bersamaan dengan itu gaya dan pola hidup masyarakat modern ala Barat meresap ke dalam kehidupan priyayi. Pada paruh pertama abad 19, gejala itu telah ditengarai oleh Pangeran Diponegoro yang memandangnya sebagai ancaman terhadap budaya Jawa yang akan menyebabkan erosi dan dekadensi sehingga akan menghasilkan kemerosotan budaya sebagaimana yang diamatinya di kalangan elite kraton Ngayogyakarta ketika itu. Persepsi itu merupakan faktor budaya dalam penyebab dan pemicu pemberontakannya (Carey 2012; Tangkilisan 2013).

Tampaknya, pengamatan itu ada benarnya. Introduksi aksara dan pendidikan modern itu menghantarkan lapisan priyayi pada suatu keadaan transisi dan dualisme. Proses modernisasi itu tidak berlangsung secara bebas, melainkan disertai pengekangan dan pembatasan. Kelompok priyayi berpendidikan modern itu tidak dapat memasuki sepenuhnya lingkungan masyarakat modern kolonial. Dalam persepsi masyarakat Belanda (Eropa), penduduk terjajah itu bukan bagian dari budaya dan sosial mereka. Introduksi budaya modern itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kelangsungan kolonialisme Belanda. Sementara, priyayi modern

itu tidak dapat diterima atau tercerabut dari akar masyarakat dan budaya tradisional. Oleh karena itu, mereka berada di tengah-tengah keadaan yang transisional dan mengambang (*floating*).

Budaya priyayi menjawabnya dengan sikap reseptif, adaptif, akulturatif dan sinkretif. Interaksi yang tidak seimbang (*unbalanced*) itu menghasilkan suatu alam budaya (*cultural realm*) transisi yang sekaligus menjadi penghubung antara keduanya, yaitu budaya modern dan tradisional yang bertemu di lingkungan budaya priyayi. Budaya modern diterima, diolah dan dijadikan bagian dari budaya sendiri dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan pemahaman, manfaat dan orientasi, bahkan kepentingan, mereka. Dalam dinamika pertemuan budaya, para priyayi menyerap unsur-unsur yang datang itu secara sinkretis, terutama dalam alam kepercayaan mereka. Salah satu wujud kemampuan budaya Priyayi itu adalah formulasi Indonesia yang modern dalam artian tidak berdasarkan pada kenyataan politik yang ada saat itu (Hindia atau Hindia Belanda) dan sebelumnya (masa silam) seperti nativisme, revivalisme atau restorasi. dan gagasan kemerdekaan yang diwujudkan dan diperjuangkan dalam bentuk gerakan organisasi modern, tidak melalui perlawanan bersenjata seperti masa-masa sebelumnya.

Perlahan dan pasti, para priyayi menyadari bahwa mereka bukan merupakan bagian tatanan sosial kolonial maupun tradisional, yang diwakili oleh tatanan keraton sebagai penyangga dan sumber budaya Jawa yang luhur dan diwariskan turun temurun. Kesadaran itu tampak pada gambaran dan cita-cita ideal tatanan sosial politik masa depan mereka bukan mengambilalih dan melanjutkan negara Hindia Belanda atau restorasi kekuasaan politik kerajaan Jawa, seperti Majapahit dan Mataram, melainkan

suatu gagasan kebangsaan yang modern.⁵ Bangsa Indonesia yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan tidak berdasarkan pada kesadaran dan kesetiaan primordial dan apalagi kolonial, melainkan pada keinginan (*will*) dan kepentingan bersama untuk bersatu. Ikatan politik dan ideologi menjadi relevan dan signifikan dalam mewujudkan tatanan yang sebenarnya tidak sepenuhnya baru karena berasal dari perpaduan budaya yang telah ada dan pendatang dalam kerangka pemahaman, wacana, sudut pandang dan pemikiran priyayi selaras dengan perkembangan dan semangat zaman (*the spirit of age*).

Gagasan dan wacana sosial politik sinkretik modern mereka diterima oleh etnis lainnya yang memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan kolonialisme di daerah asal masing-masing, termasuk pengenalan pendidikan modern. Gagasan dan visi Indonesia merupakan wujud faktor pengikat untuk pluralisme masyarakat jajahan Hindia Belanda. Kesepahaman, rasa senasib dan semangat bersatu segera timbul yang memudahkan dan melancarkan proses integrasi sosial politik dalam semangat dan pergerakan kebangsaan hingga memperoleh bentuk tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Priyayi adalah penjaga kebangsaan (*nationhood*) dan nasionalisme (*nationalism*) Indonesia, yang tidak jarang melancarkan wacana dan kebijakan yang berlandaskan pada wujud persatuan (*integrity*), kesatuan (*unity*) dan penyatuan (*united*).

- 5 Tentunya, formulasi dan pembentukan identitas politik modern itu tidak terlepas dari peranan dan keterlibatan kelompok terpelajar (intelegensia) etnik lainnya dalam interaksi, simbiosis dan dialog intelektual dalam berbagai forum yang sengaja atau tidak sengaja dan disadari atau tidak lahir dari perkembangan dan perubahan kolonialisme yang berawal dari pengenalan pendidikan dan sekolah modern. Polemik Kebudayaan, sebagaimana yang terjadi tahun 1938an, yang memperdebatkan esensi dan wujud kebudayaan Indonesia yang didambakan, melibatkan berbagai tokoh dalam lintas etnik (*multiethnics*) (Tangkilisan 2012).

Penemuan kebangsaan Indonesia melalui proses perkembangan kesadaran politik priyayi. Pendirian Boedi Oetomo merupakan refleksi gagasan nasionalisme etnik Jawa walau sudah menyebutkan wawasan Hindia dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya. Pemikiran dan wacana Jawa mulia (*noble Java*) tersebar di kalangan elit politik dan sosial budaya masyarakat Jawa dengan kesamaran pembentukan perkumpulan-perkumpulan tradisional. Priyayi merupakan penggerak dan penggiat gerakan-gerakan emansipasi sosial budaya itu. Perkembangan nasionalisme etnik selanjutnya merebak hingga melampaui batas-batas primordial menggapai cakrawala keberagaman (heterogen).

Nasionalisme plural pun muncul dan berkembang dalam pergerakan kebangsaan. Gagasan itu merupakan sinkretisasi faham politik modern seperti yang dikemukakan oleh Ernest Renan tentang bangsa (*nation*). Pemikiran itu merasuk ke berbagai kalangan priyayi, seperti Ir. Soekarno. Nasionalisme plural Soekarno tidak hanya berdiri di atas keragaman etnik dan budaya masyarakat terjajah di Hindia Belanda ketika itu, melainkan juga berada pada perbedaan ideologi yang berlandaskan pada ajaran agama, yakni Islam, dan sekularisme Sosialisme. Pergerakan kemerdekaan lainnya yang berkembang di kalangan priyayi berpendidikan modern berlandaskan pada ajaran Komunisme, yang diperkenalkan oleh H. Sneevliet dan mendapat tanggapan dari antara lain Alimin, Musso, Semaun dan lainnya. Nasionalisme plural dan Komunisme, serta pergerakan Islam yang disebarkan oleh S.M. Kartosuwiryo berasal dan berakar pada gagasan, pemikiran, rintisan dan pergerakan kebangsaan R.H.O.S. Tjokroaminoto (Tangkilisan 2015).

Genealogi Gagasan dan Pola Perjuangan Kemerdekaan

Gagasan perjuangan kemerdekaan bukan sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja (*falling from the sky*). Awal mula dan perkembangannya menempuh suatu proses dan perjalanan yang panjang dan penuh liku, bahkan melalui juga perubahan. Berbagai latar belakang, faktor dan pengaruh memainkan peranan dalam proses dan perubahan itu, berupa dorongan, hambatan, kendala, dukungan dan lainnya, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang dari luar (eksternal). Kesemua arah, aliran dan gerakan itu bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Walau terdapat juga berbagai proklamasi kemerdekaan lainnya di berbagai tempat dan waktu, Proklamasi itu menjadi fondasi dan awal mula pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan sepenuhnya berdasarkan pada pengakuan internasional.

Gagasan dan perjuangan kemerdekaan itu bermula dan berkembang dalam alur kronologis dan spasialistik. Berawal dari kesadaran emansipatif sebagai anak jajahan sebagaimana yang dilirihkan oleh surat-menyurat R.A. Kartini,⁶ emansipasi itu meningkat menjadi perjuangan kesamaan kemampuan melalui kesempatan menempuh pendidikan sekolah, sebagaimana yang digagas oleh dr. R.M. Wahidin Surohusodo dalam kampanye keliling hingga bertemu dengan mahasiswa STOVIA yang mengembangkannya menjadi sebuah gerakan dalam bentuk organisasi modern yang diberi nama Boedi Oetomo dan didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia (Tangkilisan 2013).

Emansipasi dalam ekonomi digulirkan oleh sejumlah pedagang

⁶ Banyak karya yang dibuat tentang Kartini dan surat-menyuratnya, suatu penelaahan mutakhir adalah kumpulan artikel yang disunting oleh Djoko Marihandono (2016).

dengan membentuk Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam tahun 1912, dan melakukan perjuangan melalui jalur politik. Pembentukan Boedi Oetomo dilandasi juga oleh semangat dan kesadaran sosial politik untuk memicu sebuah kebangkitan budaya dalam mencapai kemajuan dan kesetaraan yang merupakan landasan untuk sebuah gagasan kebangsaan (*nationhood*), walau awalnya masih dalam lingkup etnis Jawa. Sarekat Islam menjadi pelopor kebangkitan kesadaran berbangsa di bawah pemikiran Islam. Indische Partij yang didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker memperjuangkan kebebasan Hindia.

Formulasi kebangsaan, nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan mengerucut pada lingkup Indonesia, suatu gagasan modern dalam masyarakat politik (*political society*) untuk menuju dan menjadi bangsa (*nation*), tampak pada pencanangan cita-cita dan perjuangan sebuah perkumpulan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang sebelumnya bernama *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia), yaitu Perhimpunan Indonesia (*Indonesische Vereeniging*) tahun 1924. Di Hindia Belanda, gagasan dan corak perjuangan yang serupa dikumandangkan oleh pembentukan Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Ir. Soekarno di Bandung pada tahun 1927. Sebelumnya, pergerakan Komunisme juga mengibarkan gagasan Indonesia sebagaimana perubahan nama partai, dari Perserikatan Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia (Ave 1989: 226-227). Pergerakan komunisme mencuat menjadi perlawanan nyata pada tahun 1926 di Silungkang, Sumatera Barat, dan Banten, yang segera dipadamkan oleh pemerintah kolonial (Zed 2004; Williams 1982).

Corak perjuangan masa kebangkitan nasional berawal dari kesadaran kolektif yang berangkat dari identitas

primordial, kultural dan daerah (Henley 1993: 92). Beberapa kalangan menyebutnya sebagai kebangkitan kebangsaan atau nasionalisme etnik. Emansipasi kultural dan etnik tampak pada kemunculan dan pembentukan perkumpulan-perkumpulan etnik dan kedaerahan, seperti Tri Koro Dharmo, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan lainnya. Gerakan serupa berkembang di lingkungan agama tidak hanya di pulau Jawa, melainkan juga di sejumlah daerah lainnya, seperti Sumatera. Dari nasionalisme etnik, gagasan emansipasi mengerucut lebih tajam menjadi gagasan kebebasan dan kemerdekaan yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya sebatas etnis, daerah dan agama, dalam wujud dari Hindia menuju Indonesia. Dari pergerakan Islam, gagasan kemerdekaan yang diperjuangkan berlandaskan pada ajaran dan kaidah Islam, sebagaimana yang dikembangkan dalam pemikiran R.H.O.S Tjokroaminoto dan gerakan Sarekat Islam yang kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (Tangkilisan 2015).⁷

Gagasan kemerdekaan mulai menemukan bentuk, kesadaran dan visi besarnya berupa persatuan, kesatuan dan penyatuan (*unity, integrity and integration*). Perjuangan awal gagasan kemerdekaan nasional adalah menembus batas-batas primordial dan merekat perbedaan dan keanekaragaman itu dalam ikatan keindonesiaan dan Indonesia. Di dalam gagasan itu, landasan kemerdekaan adalah nasionalisme plural sekular yang dipandang selaras dan sesuai dengan keragaman dan kemajemukan Indonesia. Walau pola pikir, harapan dan perjuangan untuk menggapai cita-cita dan tujuan itu adalah persatuan dengan peleburan segala perbedaan dan keragaman, yang mirip dengan sudut pandang *melting pot*

⁷ Mengenai pergerakan Islam pada masa kebangkitan nasional lihat karya Deliar Noer (1980).

dalam kajian masyarakat dan budaya Amerika Serikat, sebuah negeri dan bangsa yang majemuk pula, bahkan berasal dari berbagai negara dan bangsa (*nationality*) yang datang melalui gelombang migrasi sehingga bagaikan mosaik atau miniatur dunia.

Bangsa modern pertama yang merdeka tahun 1776 itu pernah membayangkan pembentukan bangsa dan budayanya yang majemuk itu bagaikan sebuah peleburan atau percampuran. Amerika Serikat adalah mangkuk peleburan (*melting pot*) yang mencampurkan semua latar belakang, identitas, budaya dan nasionalitas dari semua warganya. Amerikanisasi merupakan wujud harapan dan cita-cita itu. Ternyata, *melting pot* tidak dan tidak pernah terjadi karena budaya tidak dapat menyatu atau melebur dalam artian diseragamkan sehingga pandangan kekinian bergeser menjadi multikulturalisme yang menjunjung dan mengakui keragaman dan kemajemukan, tidak hanya sekedar pluralisme dalam ungkapan *salad bowl*. Pengalaman Indonesia memperlihatkan keadaan, gejala dan perkembangan yang tidak jauh berbeda.

Memang, cita-cita kemerdekaan dan wujud nasionalisme selalu cair, bergerak dan berkembang selaras dengan keadaan dan perubahan zaman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal). Menjadi Indonesia merupakan suatu proses yang dinamis dan tidak akan selesai selama cita-cita dan keinginan untuk tetap mempertahankannya masih ada. Indonesia dan keindonesiaan tidak lebih merupakan keinginan dan kemauan yang bersumberkan dari kepentingan dan kesadaran utuh mengenai ingatan kolektif (*colletive memories*) dari warisan kultural historis (*historical cultural heritage*) yang diperjuangkan

oleh perintis, pencanang dan pendiri bangsa.

Cita-cita kemerdekaan dan pembentukan bangsa berkaitan juga dengan esensi dan lingkup tujuannya. Dalam spektrum ini tampak dua aliran pemikiran yaitu kemerdekaan politik dan kesejahteraan ekonomi. Dr. R. Soetomo, pendiri Boedi Oetomo dan Partai Indonesia Raya (Parindra) yang berhaluan kooperatif memiliki pandangan bahwa kesejahteraan dan kemajuan perekonomian rakyat lebih penting untuk didahulukan atau dicapai sebelum memperoleh kemerdekaan politik. Menurutnya, kemerdekaan politik tidak berarti apabila kehidupan rakyat masih belum makmur. Gagasannya dituangkan ke dalam ungkapan Indonesia Moelia (Tangkilisan 2015).

Corak pemikiran lainnya dikumandangkan oleh Ir. Soekarno, pendiri Partai Nasional Indonesia dan murid R.H.O.S Tjokroaminoto, yang berhaluan non kooperatif dengan gigih memperjuangkan dan mengedepankan pencapaian kemerdekaan politik. Kemerdekaan itu menurutnya adalah jembatan emas untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang diimpikan dan menjadi tujuan perjuangan. Pola pemikiran kemerdekaan ini memikat dan mempengaruhi berbagai kalangan pergerakan kebangsaan karena mencuatkan suatu tujuan yang tegas dan pasti, yaitu segera mendobrak dan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Juga, gagasan itu menimbulkan pandangan tandingan yang tidak sepakat dan sepaham. Tentunya, cita-cita perjuangan kemerdekaan seperti itu mendapat tanggapan dan tindakan keras dari pemerintah kolonial. Perjuangan gagasan kemerdekaan politik itu sempat seolah-olah kehilangan daya, arah dan ritme ketika para pemimpinnya seperti Soekarno dan Hatta ditangkap, diadili dan dihukum oleh peradilan kolonial. Kekosongan itu kemudian segera terisi oleh suatu perjuangan

kemerdekaan lain yang lebih lunak dan bertahap.

Suatu fakta lain di seputar kemerdekaan Indonesia adalah bahwa fase akhir perjuangannya justru melalui jalur damai yang dibuka oleh pemerintah militer pendudukan Jepang. Dalam forum tersebut, yang beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah, etnis, ras, lapisan sosial, ideologi dan agama namun bukan dari partai-partai politik karena tidak diperkenankan oleh penguasa ketika itu, nuansa dan spektrum kemajemukan dan keragaman sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia muncul, walau secara wilayah masih terbatas pada kekuasaan dan otoritas Angkatan Darat ke-16 Jepang yang mencakup hanya pulau Jawa dan Madura. Perwujudan kemerdekaan dibahas, didebat dan dipersiapkan dalam forum itu hingga menghasilkan rancangan dasar negara, konstitusi dan naskah proklamasi, walau tidak pernah dikumandangkan. Namun, presiden dan kelengkapan pimpinan negara lainnya tidak dibahas. Jadi Presiden, Wakil Presiden dan jajaran pimpinan negara diputuskan dan ditetapkan dalam suasana politik yang telah merdeka, walau sebenarnya masih di bawah keadaan mendadak, mendesak, perlu segera dan berlandaskan pada aturan peralihan.

Walau begitu, kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu pemberian atau hadiah dari Jepang.⁸ Oleh karena cita-cita dan gerakan menuju kemerdekaan tidaklah tiba-tiba muncul pada masa pendudukan Jepang, melainkan telah timbul dan berkembang sejak masa sebelumnya, yang lazim disebut sebagai kebangkitan nasional (*national awakening*). Semangat dan harapan itu

8 Sejarahwan yang menolak pandangan kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah antara lain adalah Nugroho Notosusanto yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul: "Bung Karno mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada Tahun 1945," dalam: Aristides Katoppo (ed.). *80 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Sunar Harapan, 1991.

tampak jelas saat kehancuran Hindia Belanda dan menyambut kedatangan sang pemenang yang secara budaya diformulasikan secara simbolisme dari kanzanah ramalan Jayabaya, bahwa kekuasaan Jepang hanya akan seumur jagung dan segera fajar kebebasan menyingsing untuk Indonesia. Kesempatan merdeka terbuka ketika terjadi kekosongan kekuasaan atau *the vacuum of power*; bahwa tentara Jepang harus menjaga *status quo*, sementara tentara Sekutu (*Allied Forces*) yang diwakili Inggris belum tiba, pilihan diambil, yang bukannya tanpa resiko, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Juga, selanjutnya, perjuangan kemerdekaan tidak hanya terbatas di kalangan politisi dan partai-partai politik, melainkan juga melibatkan kalangan birokrasi pemerintahan walau peran dan sumbangsih mereka masih belum banyak diungkapkan. Mereka ada di meja perundingan dan di kancah pertempuran, di dalam dan luar negeri.

Gagasan Kemerdekaan Soetardjo Kartohadikusumo

Sebelum pengajuan petisi, sosok Soetardjo tidak banyak menarik perhatian. Padahal, ia juga terjun dan bergerak dalam dunia politik, seperti menjadi anggota perkumpulan modern seperti Boedi Oetomo dan PPBB (Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera) yang membawanya ke kursi anggota Dewan Rakyat. Perjalanan dan kiprah politiknya juga tidak memperlihatkan suatu peranan besar dalam gagasan atau peristiwa penting dalam perkembangan pergerakan kebangsaan dan nasionalisme, yang memang didominasi oleh pemikiran, organisasi dan tokoh yang berhaluan nonkooperatif dan konfrontatif terhadap pemerintahan kolonial.

Soetardjo Kartohadikusumo lahir di Kunduran, Blora pada 22

Oktober 1892 dari lingkungan keluarga priyayi. Ayahnya adalah pejabat pamong praja di jajaran kabupaten Blora. Ia tumbuh dan besar dalam tradisi priyayi, hingga menempuh pendidikan sekolah kolonial seperti ELS (*Europesche Lagere School*) dan OSVIA (*Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren*) tahun 1911 di Magelang. Seusai sekolah, ia menjadi bagian pemerintahan kolonial sebelum memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan lanjutan di *Bestuursschool* (Sekolah Pemerintahan) di Batavia tahun (1919-1921). Setelah itu, ia kembali meneruskan pengabdianya dalam pemerintahan. Di samping menekuni jabatan, ia juga berkiperah di tengah-tengah masyarakat melalui mendirikan dan bergabung dengan sejumlah perkumpulan dan gerakan, yang merentang dari bidang sosial, pers, ekonomi, olah raga, pendidikan, budaya dan kesenian. Kiperah sosial itu dilakukannya untuk mengembangkan dan memajukan pelbagai bidang kehidupan rakyat sebagai panggilan, tuntutan dan pamrih dari pengabdian seorang pamong praja yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya.⁹

Susan Abayasekere (1973: 86) menelusuri jejak keprihatinan, kiperah dan sikap kritis dalam semangat pembaharuan dan emansipasi masyarakat jajahan pada penggambaran sebagai berikut,

“Probably his (Soetardjo, pen) dissatisfaction with the political situation stemmed originally from his deep resentment at the inferiority of the prijaji’s position vis- a-vis that of the European civil service. The first sign of this sentiment was his pamphlet, Grieven van den Inlandschen

9 Dalam karya Rudolf Mrazek (2002) tercantum keterlibatan Soetardjo dengan perkembangan radio di Hindia Belanda.

Bestuursambtenaar (Grievances of the Native Civil Servant), published in 1919, which complained that Indonesian civil servants were badly treated, were frequently reprovved in public by the Dutch, and had no right of initiative, of intellectual development or of expression of opinion. His campaign to raise the status and morale of the pamong pradja was later seen in such matters as his sponsorship of Volksraad motions urging the government to appoint more Indonesians to higher administrative posts.”

Ia pernah membuat tulisan pada tahun 1919 yang berisikan keluhan-keluhan terhadap perlakuan para *Europeesche Bestuuren*, pejabat Belanda terhadap pejabat pamong praja, *Inlandsche Bestuuren*, yang tidak sepatasnya serta mereka tidak memiliki hak untuk mengembangkan pemikiran dan mengajukan pendapat.¹⁰

Ia adalah seorang pamong yang menjunjung kesetiaan terhadap profesi dan jabatannya sebagai pegawai pemerintahan. Sempat ia memberikan tanggapan yang membela atasannya dari

10 R.Z. Leirissa memiliki pendapat yang berbeda dan mengaitkannya dengan pengajuan petisi, yaitu: “Sesungguhnya usul itu (petisi) adalah puncak dari perjuangan Soetardjo yang sejak tahun 1912 telah berusaha agar pemerintah memperbaiki nasib pamong praja. Ia merasa prihatin melihat kemajuan-kemajuan dalam birokrasi Eropa dan ketinggalan-keinggalan dalam pamong praja. Gagasan ini telah dikemukakan dalam pelbagai tulisannya yang terbit sejak tahun 1912.” Tampaknya, keterangan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena, tahun 1912 Soetardjo menjabat Mantri Kabupaten dan memang menjadi ketua cabang Boedi Oetomo di Magelang. Sementara ia menjadi pemimpin redaksi kalawarta *Oud Osviaan* (1919-1921). Namun Leirissa tidak menjelaskan lebih lanjut tentang tulisan-tulisan Soetardjo itu.

kritik tajam seorang jurnalis Belanda, sehingga ia memperoleh dukungan dan sambutan baik di lingkungan pejabat Belanda. Namun ia sempat mengalami suatu peristiwa yang disebutnya sebagai insiden “Indonesia Raya”. Kisahnya adalah: “Pada suatu hari, sedang saya melakukan *tourne* di daerah, maka di rumah saya oleh anak-anak saya yang masih kecil, diperdengarkan lagu ‘Indonesia Raya’ dari sebuah *plaat gramafon*. Pada saat itu, residen dengan kendaraan mobil melihat di muka rumah saya anak-anak banyak berkerumun...Setelah kendaraan residen berhenti untuk melihat apa yang terjadi di rumah kepatihan itu, dengan terkejut ia mendengar dari dalam rumah saya lagu ‘Indonesia Raya’. Ia sangat marah dan terus pulang ke rumah keresidenan yang berjejer dengan rumah saya...Setelah siang harinya saya pulang dari *tourne*, maka saya menerima panggilan dari residen. Saya harus mempertanggungjawabkan lagu ‘Indonesia Raya’ yang diperdengarkan di rumah saya tadi paginya...Saya mohon maaf kepada residen dengan menerangkan bahwa *plaat gramafon* yang diputar oleh anak saya tadi pagi itu, adalah kepunyaan anak keponakan saya. *Plaat gramafon* itu akan segera saya suruh ambil kembali oleh orang yang punya...Demikianlah maka selesai insiden ‘Indonesia Raya’ di kepatihan Gresik itu.” (Kartohadikusumo 1990: 97).

Melalui keanggotaannya pada PPBB dan setelah mengikuti pemilihan, ia pun menjadi wakil rakyat di Dewan Rakyat. Keanggotaan ini membuatnya bangga karena diperoleh melalui pemilihan bukan diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah, dari Jawa Timur. Kesadaran itu jelas tampak pada penegasannya tentang keanggotaannya dan perkumpulannya dalam dewan, yaitu: “Menjadi jelas bahwa anggota-anggota PPBB yang duduk di *Volksraad* itu, bukan hanya wakil dari PPBB, tetapi juga

wakil dari rakyat...Oleh karena itu, kedudukan wakil-wakil kita dalam *Volksraad* ditetapkan sebagai berikut:.. 1. Dalam hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan dalam negeri yang menjadi kompetensi Departemen Dalam Negeri, anggota-anggota dalam *Volksraad* berkedudukan sebagai wakil-wakil dari dan bertanggung-jawab kepada PPBB...2. Dalam hal-hal lain, mereka dianggap sebagai wakil rakyat dan bebas atas tanggung jawabnya sendiri untuk memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya” (Kartohadikusumo 1990: 107).

Dalam forum dewan, ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan usulan-usulan terutama yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat yang dimulai dari reformasi birokrasi.¹¹ Dalam pidato

11 Burgers (2010: 234) memaparkannya sebagai: “*Eén van hen was het Javaanse Volksraadslid Soetardjo Kartohadikoesoemo. Hij behoorde niet tot een politieke partij, maar was voorzitter van de ambtenarenbond PPBB. Zijn politieke denkbeelden verschilden aanzienlijk van die van de radicale nationalisten. Hij was conservatief gezind en beschouwde de leden van de inheemse adel als de natuurlijke leiders van de Indonesische bevolking. Naar zijn mening werd hun gezag echter voortdurend ondermijnd omdat het gouvernement hen niet als een brug naar die bevolking gebruikte maar als een buffer ertegen. Soetardjo was geporteerd voor afschaffing van het dubbele stelsel van het BB, opdat Indonesiërs ook bestuursfuncties zouden kunnen vervullen die nu voor Nederlanders gereserveerd waren. Hij was gegriefd door de vernederingen die inheemse bestuursambtenaren vaak van Nederlandse kant ondervonden en wilde de term ‘Inlander’ zien verdwijnen. Hij betreurde het dat Indonesiërs telkens weer gepasseerd werden voor de vervulling van verantwoordelijke posten. Een voorbeeld hiervan was het besluit van de regering in 1933 om niet twee Indonesiërs maar slechts één tot lid van de Raad van Indië te benoemen. Een ander voorbeeld was de benoeming van de voorzitter van de Volksraad in 1935. De Volksraad had hiervoor zelf drie kandidaten aanbevolen, namelijk Koesomo Oetojo, Wiranatakoesoema en Jonkman (in die volgorde). De Nederlandse regering vond dat de Raad hiermee zijn bevoegdheden overschreden had en benoemde de Indische Nederlander W.H. van Helsdingen, die vroeger secretaris van de Raad was geweest.*”

dan perbincangan itu terselip semangat dan pemikiran yang berkaitan emansipasi, kebebasan hingga kemerdekaan melalui cara koperatif dan dialog, tidak secara konfrontatif apalagi destruktif yang tentunya akan menimbulkan berbagai kehancuran, kerusakan bahkan korban jiwa. Dimensi intelektualnya itu terlihat pada kisah pengalaman dalam pidato di hadapan sidang dewan itu, yakni “Akan tetapi dengan pidato itu maksud saya hendak menggariskan *hoofdlijnen* (garis-garis besar) dari suatu haluan baru bagi kebijaksanaan pemerintahan daerah, yang kelak harus ditingkatkan kepada haluan politik negara...Sebab Volksraad di mana kita berjuang adalah sebuah badan politik kenegaraan, maka perjuangan dalam badan itu tidak bisa lain bagi bangsa Indonesia yang terjajah, daripada menuju kepada pembentukan negara yang merdeka, dalam mana bangsa Indonesia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri...Tanpa melepaskan hubungan sahabat baik dengan bangsa Belanda, yang dengan pengalamannya dalam negara yang sudah lama merdeka dapat memberi bantuan intelektual dan material kepada kita membangun negara...Dengan menggunakan rencana yang tertib-beraturan, hasil baik dari usaha pembangunan itu tidak perlu disangsikan. Hal itu hanya terserah kepada kemauan dan kemampuan kita sendiri...Garis-garis besar haluan politik yang saya gariskan itu ternyata diterima baik oleh persatuan pamong praja (PPBB) beserta seluruh pimpinan termasuk sebagian besar para bupati, yang hampir semua menjadi anggota perhimpunan kami.” (Kartohadikusumo 1990: 102-103).

Ia juga mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dengan sejumlah pejabat kolonial. Ia pernah dipanggil oleh Direktur *Binnenlandsch Bestuur* untuk diinterogasi, didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan asisten polisi dengan tuduhan merong-rong kewibawaan dan kekuasaan pemerintah. Dari

pemeriksaan itu tidak ditemukan bukti yang mengarah ke tuduhan tersebut. Namun, kecurigaan dan tuduhan itu berlanjut ke Jaksa Penuntut Umum (*Procuur Generaal*). Pada saat itu, ia sempat membela Soekarno dan Hatta dari tindakan yang dialami mereka oleh pemerintah kolonial. Pemeriksaan pun melebar hingga ke masalah kedua tokoh pergerakan nasional radikal itu. Rupanya ia hendak digiring ke arah masalah yang serupa agar dapat dikenakan hukuman berdasarkan *exorbitant rechten*, yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal. Kekuasaan ini memungkinkan seseorang dapat dijatuhi hukuman pengasingan tanpa melalui proses peradilan, seperti yang dikenakan kepada kedua tokoh itu. Tampaknya, pemeriksanya menyebut-nyebut kasus itu untuk menakut-nakutinya agar mau mengakui segala tuduhan yang ditimpakan terhadapnya. Sebagai catatan, kanzah sejarah Indonesia sempat dibuat heboh dengan penemuan surat permohonan ampun Soekarno kepada *Procuur Generaal*.¹²

Soetardjo melukiskannya sebagai berikut: “Semua pertanyaan saya balas secukupnya. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada satupun yang dapat mencapai tujuannya, maka ia menjadi marah. Akan tetapi kemarahannya itu tidak dapat ditujukan kepada diri saya pribadi, melainkan dicarikan sasaran lain yaitu Bung Karno dan Bung Hatta... Saya biarkan ia *uitvaren* (melampiaskan kemarahan) terhadap saudara-saudara yang sudah

12 Lihat karya John Ingelson (1984). *Jalan ke Pengasingan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Pada surat itu tidak terdapat tanda tangan Soekarno, sehingga diragukan keasliannya, walau tidak tertutup kemungkinan surat itu adalah sebuah tembusan. Namun, peristiwa itu tidak ditemukan dalam karya otobiografi, biografi dan memoar Soekarno, atau dalam dokumen dan dokumentasi kolonial lainnya. Penelusuran dan pembahasan lebih lanjut oleh Bob Hering (1987) menemukan ada 4 pucuk surat permohonan ampun yang kesemuanya menurutnya adalah palsu.

dalam pengasingan itu. Setelah ia kelihatan sudah menghabiskan hawa nafsunya, maka saya balikkan tuduhan-tuduhan dan pertanyaan-pertanyaan kepadanya...Saya jelaskan kepadanya, bahwa pada hakikatnya Soekarno dan Hatta tidak bersalah. Yang salah ialah pemerintah Belanda, mereka hanya menjadi korban dari kesalahan-kesalahan itu...Saya sebut satu persatu tindakan-tindakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang dilakukan dalam tahun-tahun terakhir. Tindakan-tindakan yang menimbulkan kekecewaan dan amarah rakyat terhadap pemerintah. Saya paksa ia mengakui tindakan-tindakan itu sebagai kebijaksanaan pemerintah yang tidak semestinya (*wanbeleid*)... Setelah ia tidak dapat menghindarkan diri dari membenarkan fakta-fakta yang saya tuduhkan kepada pemerintah itu, maka ia membentak saya dengan pertanyaan, "*Zeg, mijnheer Soetardjo, wie is hier de verhorende autoriteit, U of ik?*" (Hai tuan Soetardjo, siapakah di sini kekuasaan pemeriksa, tuan atau saya?)... Jawab saya, "*Maar dat was Uw eigen schuld. Wat hebben Soekarno en Hatta er mee te maken in deze zaak?*" (Tetapi itu tuan punya salah. Apa urusan Soekarno dan Hatta dalam soal ini?)...Ia lalu menjadi tenang kembali dan dengan tertawa ia menyudahi pertemuan dengan berkata, "*Laat het maar hierbij blijven. Ik heb slechts mijn plicht tegenover Z.E. den G.G. moeten vervullen*" (Sampai di sini saja. Saya hanya melakukan kewajiban saya terhadap gubernur jenderal)...Jawab saya, "*Dat begrijp ik*" (saya tahu)." (Kartohadikusumo 1990: 141). Ia hampir pula "terkena getah" dari apa yang dilakukan oleh kedua nasionalis itu walau dapat berkelit dari jebakan pemeriksaan kolonial dengan berani, penuh ketenangan, wawasan luas dan kearifan. Tidak tertutup kemungkinan, banyak kalangan pergerakan yang dijejloskan ke tahanan atau mengalami tindakan hukuman lainnya berkenan

dengan dan sebagai rentetan dari penindakan itu.

Pada masa pendudukan Jepang ia memimpin departemen dalam negeri atau *naimubu sanyo* dan kemudian menjadi residen (*syucokan*) Jakarta.¹³ Selain perjuangannya untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat yang mengalami banyak kesulitan pada masa itu di tengah-tengah kedudukannya sebagai abdi pemerintah pendudukan Jepang, ada beberapa pengalamannya yang menarik untuk diungkapkan. Pengalaman pertamanya adalah: “Bahwa Jepang dan Jerman telah ditinggalkan oleh Italia, akan kalah dalam peperangan itu sudahlah Nampak dengan jelas. Jenderal-jenderal Jepang pun sudah merasa demikian, sebab pada satu hari saya dipanggil seorang diri oleh *Gunseikanbu* untuk ditanya pendapat saya tentang situasi perang... Saya menjawab, bahwa saya sebagai seorang pamong praja, apapun yang akan terjadi, tetap hanya mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan daerah saya. Rupanya *Gunseikan* merasa puas dengan jawaban saya itu.” Tentunya, jawabannya bukanlah sekedar bualan omong kosong yang menjilat penguasa Jepang, melainkan berdasarkan apa yang sudah dilakukannya, tidak hanya pada masa perang dunia kedua yang penuh dengan krisis dan kesulitan, tetapi sudah sejak

13 Ketika persaingan politik dan militer di Eropa kian memanas serta memperlihatkan tanda-tanda konflik bersenjata, ia bersama nasionalis lainnya mengawatirkan nasib negerinya dengan berupaya meminta perlindungan Amerika Serikat, yakni: “*Little could be expected from Holland while that country was under threat of a German attack. Thamrin via Dr. Ratulangie, a nationalist from Menado and a Volksraad member, took up contacts with a clerk of the American consulate-general in Batavia. Thamrin and Soetardjo had a talk with the American about the possibility of an American protectorate of the Indies should Holland cease to exist. Dutch intelligence was entirely unaware of this move. In a report to the State Department five days later the American consul in Batavia, Rickover, thought the idea not so fantastic given the dependence of the United States on the raw materials from Southeast Asia*” (Sluimers 1998: 428).

menjadi pamong praja masa kolonial Hindia Belanda. Solidaritas dan toleransi sesama (sosial) serta rasa cinta tanah air merupakan landasan dan wujud dari rasa dan semangat kebangsaan dan nasionalisme, sebagai benih-benih menuju cita-cita kemerdekaan.

Pengalaman berikutnya adalah sebagai berikut, “Pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dirayakan sebagai hari lahirnya *Pancasila*, dalam rapat pleno *Dokuritzu Jumbi Tyosakei* tersebut, Bung Karno menguraikan usulnya untuk memberikan dasar lima pokok kebudayaan bangsa Indonesia, yang olehnya diberi nama Pancasila kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial...Setelah selesai uraian tentang Pancasila itu, oleh Ketua sidang Dr. Rajiman Wediodiningrat, saya diminta untuk memberi sambutan. Saya anjurkan kepada para hadirin, yang terdiri dari orang-orang terkemuka calon pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia, supaya suka memelihara kemerdekaan batin, yaitu merdeka terhadap hawa nafsunya sendiri atau dengan kata lain perkataan: tidak mementingkan diri sendiri...Mendengar anjuran saya itu, Bung Karno menjadi marah. Bilangnya, kalau kita menuruti anjuran saya itu, sampai hari kiamat bangsa kita tidak akan merdeka. Sejarah memberi bukti nyata, bahwa anjuran saya itu bukan tiada beralasan” (Kartohadikusumo 1990: 161-162).¹⁴ Dari pengalaman itu, tampak bahwa persepsi,

14 Catatan untuk hari lahir Pancasila yang dewasa ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah tertanggal 1 Juni 2016 adalah bahwa rumusan usulan dasar negara dalam pidato Soekarno tentang Pancasila tidaklah seperti rumusan yang terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yang resmi. Bahkan tata urutan silanya pun terbalik dimana sila Ketuhanan pada pidato Bung Karno itu berada di urutan terbawah, yaitu kelima. Juga perlu disimak bahwa rumusan resmi Pancasila diperoleh dari pemangkasan rancangan yang disusun oleh panitia pada persidangan BPUPKI dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan memotong 7 kata yang berkenaan dengan kewajiban menjalankan

sikap dan hubungan antar keduanya yang mewakili aliran pergerakan yang radikal dan konservatif masih membayang walau sudah sama-sama bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang, selain tentunya alam pemikiran priyayi pamong praja yang sarat dalam pandangannya itu.

Sumbangsihnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tampak pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menghadapi ujian berat pertamanya. Setelah pembentukan kelengkapan negara yang baru merdeka, mulai dari Undang-undang Dasar, Pemerintahan dan partai-partai politik, segera muncul dan menyebar berita tentang kedatangan pasukan Sekutu yang diwakili oleh bala tentara Inggris untuk mengambilalih wilayah pendudukan Jepang. Kekawatiran pun menerpa bahwa kemungkinan besar Republik yang masih muda itu mengalami penindasan dari pasukan yang akan datang itu. Kemerdekaan terancam karena pemerintah militer Jepang, sebagai pihak yang kalah, harus menyerahkan wilayahnya kepada pihak pemenang Perang Dunia Kedua. Berbagai gagasan pun muncul. Sutan Syahrir yang didukung oleh kelompok pemuda dan bergerak di bawah tanah selama masa pendudukan Jepang, muncul dengan gagasan perubahan bentuk pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, sehingga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sedianya dibentuk sebagai badan pembantu tugas presiden beralih menjadi parlemen dan kabinet pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perubahan itu diperlukan untuk memberikan gambaran kepada wakil Sekutu itu bahwa republik dan pemerintahannya bukanlah bentukan Jepang yang fasis.

syariat Islam bagi pemeluknya, sebagaimana yang menjadi Piagam Jakarta. Persoalan Pancasila sempat menjadi polemik luas pada tahun 1980-an, yang melibatkan berbagai kalangan tidak hanya di antara para sejarawan, melainkan hingga para politisi dan kalangan awam.

B.R.O.G (Ben) Anderson (1988) melihat tindakan itu sebagai kudeta diam-diam (*silent coup*) dari kelompok Syahrir terhadap kekuasaan Soekarno dan Hatta yang disebutkan didukung oleh kaum tua.

Sementara, Soetardjo Kartohadikusumo yang diajak rapat untuk membicarakan masalah itu oleh Soekarno dan elite politik lainnya menyetujui kemungkinan itu.¹⁵ Ia yang lebih banyak diam pada pertemuan itu, ketika diberi kesempatan untuk berbicara, meminta pendapat dari hadirin yang sebagian besar adalah kalangan pergerakan politik, bahwa apakah pamong praja diakui sebagai pemimpin rakyat. Segera hadirin menyatakan persetujuan mereka yang memberikan legitimasi kepadanya untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, tindakan yang penting adalah kesetiaan para bupati di berbagai daerah kepada negara dan pemerintah yang baru. Oleh karena, apabila terjadi penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan Jepang, keadaan politik daerah memperlihatkan kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Berbeda dengan keadaan di tingkat pusat yang memperlihatkan adanya pemerintah republik. Penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Jepang akan menanggalkan rantai kekuasaannya di daerah-daerah, yang meninggalkan para bupati sebagai penerusnya. Untuk itu ia menyarankan agar mereka diundang dalam suatu upacara yang disiasati sebagai pemberian penghargaan dan rasa terima kasih kepada petinggi pemerintahan Jepang. Pihak Jepang menyambut baik penyelenggaraan itu dan memberikan pula penghargaan kepada para bupati. Pada kesempatan itu, Soekarno

15 Theodore Friend (1988: 229) memaparkan sebuah pertemuan, yaitu: "On August 30, 1945, before having assembled the first cabinet, Sukarno and Soetardjo convened a Java-Madura conference of the pangreh praja."

menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia sudah merdeka dan pilihan diserahkan apakah hendak bergabung dan mengikuti Republik yang baru itu. Kepastian yang diberikan dan didukung oleh korps pamong praja itu ikut menyelamatkan keberadaan dan kelangsungan kehidupan Republik Indonesia (Kartohadikusumo 1990: 168-171).

Ia juga memiliki pandangan tentang bangsa terutama bangsa Indonesia yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya. Dengan kata lain, pendapatnya itu meliputi siapa orang Indonesia yang merdeka. Menurutny, identitas mereka adalah “warga negara Indonesia merdeka adalah orang Indonesia, yakni mereka yang berdasarkan kelahiran, asal usul, dan tujuan masa depan terkait dengan Indonesia, yakni mereka yang ingin mengakui Indonesia sebagai tanah air. Dengan kata lain, orang Indonesia dalam arti sempit, orang Indo-Eropa, orang Indo-Tionghoa, orang Indo-Arab, orang Belanda, dan siapa pun yang menganggap rumahnya berada di sini.” (Elson 2008: 94-95). Tampak jelas, ia memiliki landasan pandangan, sikap dan pemikiran Indonesia yang majemuk, sebagaimana kenyataan sosial masyarakat kolonial yang beragam. Tali pengikat identitas kebangsaan itu hanyalah pengakuan. Soetardjo menyimpan banyak gagasan, pemikiran dan analisis mengenai berbagai pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, namun belum dieksplorasi, dieksploitasi dan diekspos ke ranah publik nasional.

Petisi Soetardjo:

Mengobarkan kembali Cita-cita Kemerdekaan

Petisi, mosi dan bentuk artikulasi politik lainnya merupakan bagian dari kehidupan berpolitik. Petisi dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang dituju atau jajaran atasannya.

Cara pengungkapan aspirasi ini telah sering berlangsung dalam hubungan politik dengan Belanda melalui surat menyurat (korespondensi). Salah satu contohnya adalah pengiriman petisi para kepala walak Minahasa kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1877 dan Majelis Rendah (*Tweede Kamer*) Parlemen Negeri Belanda tahun 1878. Petisi, atau disebut sebagai *rekest* (permohonan) itu berkenan dengan kebijakan kolonial berupa Penerapan Peraturan Kepemilikan Tanah Negara (*Domein Verklaring*) tahun 1877. Petisi itu mempertanyakan hubungan politik (*politieke betrekkingen*) Minahasa dan Belanda yang diatur sejak dan melalui suatu perjanjian persahabatan tahun 1679 sebagai bentuk persekutuan (*bondgenootschap*) bukan kaula (*onderdaan*). Petisi itu merupakan refleksi kesadaran para elite Minahasa terhadap status yang sebenarnya diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu kaula (Tangkilisan 1987).

Petisi juga dikenal di lingkup lembaga perwakilan (*representatives*). Petisi merupakan kelengkapan dan hak seorang anggota atau fraksi untuk menyampaikan aspirasinya tentang suatu gagasan dan tujuan. Pengajuan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok atau fraksi, yang disampaikan kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti melalui persetujuan seluruh anggota pada persidangan dewan. Pilihan terhadap petisi itu berupa menyetujui, menolak atau tidak berpendapat (*abstain*). Petisi menjadi keputusan atau resolusi dewan jika diterima oleh anggota dewan di bawah persyaratan memenuhi jumlah kehadiran minimal (*quorum*) dan pemungutan suara (*voting*) sesuai rumusan dan ketentuan dewan yang berlaku dan disepakati.

Sejak pembentukan Volksraad di Hindia Belanda tahun 1918, sejumlah petisi atau kerap juga disebut mosi, *voorstel* dan *rekest*,

telah lahir dan dicanangkan mencakup berbagai permasalahan yang dipandang perlu dan penting untuk dibahas serta berkisar dari aspek politik, sosial hingga ekonomi. Volksraad adalah dewan perwakilan rakyat kolonial yang semu karena tidak memiliki hak-hak politik sebagaimana lembaga legislatif dalam kehidupan politik yang demokratis. Dewan memiliki hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah kolonial yang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Tampaknya pembentukan dewan itu merupakan upaya untuk melangsungkan kepentingan kolonial pada saat hubungan dan dukungan dari negeri induk mengalami gangguan sebagaimana yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama yang memutus komunikasi antara Negeri Belanda dan jajahannya, Hindia Belanda. Salah satu usulan penting berkaitan dengan identitas kebangsaan dan nasionalisme Indonesia adalah mengenai penggantian penyebutan atau pemakaian istilah *inlanders* dengan Indonesia di lingkungan resmi kolonial yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikusumo. Pengajuan itu berulang kembali tahun 1939, ia bersama-sama M. Husni Thamrin dan Sukawati (Ave 1989: 227).

Dalam wacana dan pandangan kalangan pergerakan nasional Indonesia, dewan itu merupakan wadah perjuangan politik melalui kerja sama (kooperatif). Bentuk perjuangan lainnya adalah tidak bekerja sama atau non-kooperatif yang dilancarkan di luar dewan, berupa agitasi terhadap kebijakan kolonial, lewat cara-cara rapat umum, pidato-pidato dan pernyataan pers sebagai organ penting aspirasi partai politik. Sebenarnya, dualitas perjuangan itu tidak terpisah dan bertentangan satu dengan lainnya, melainkan merupakan corak dan cara perjuangan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu persamaan dan kemerdekaan. Namun dinamika politik pergerakan nasional memperlihatkan

pertentangan, silang pendapat, kontroversi dan perdebatan di antara kedua kelompok itu. Oleh karena bentuk perjuangan jalur kerja sama itu tidak gegap gempita dan bergelora seperti gerakan yang menolak jalur kerja sama itu, kerap tampak peminggiran dan penggerusan relevansi dan signifikansinya dalam upaya meraih kemerdekaan dalam berbagai pembahasan. Padahal semangat, substansi dan visi yang disampaikan memperlihatkan tekad, daya kritis dan keteguhan sikap, pemikiran dan tindakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang tampak pada peristiwa Petisi Soetardjo.

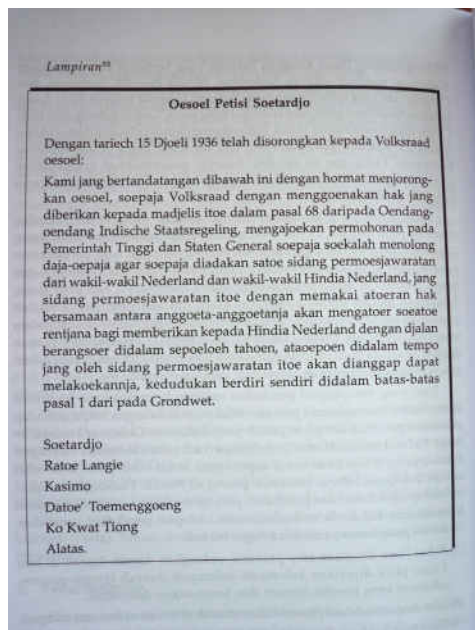
Dalam kenangan Soetardjo, peristiwa penyampaian petisi itu adalah sebagai berikut: ¹⁶ “Demikianlah, maka waktu mulai bulan Juni 1936, Volksraad membicarakan Anggaran Belanja/ Pendapatan tahun 1937, tanggal 9 Juli 1936 saya mendapat giliran untuk mengucapkan pidato dalam bagian Pemandangan Umum, maka saya kemukakan usul petisi itu...Saya terangkan kepada sidang *Volksraad* bahwa keadaan di dalam maupun di luar negeri, tidak mengizinkan pemerintah Belanda bersikap acuh tak acuh (*zelfgenoegzaam*), seperti tidak ada apa-apa yang harus diperhatikan...Di dalam negeri, keadaan rakyat bangsa Indonesia,

16 M.C Ricklefs (2005: 395) mengemukakan sesuatu di balik pengajuan petisi itu adalah “Soetardjo Kartohadikusumo (l. 1892) adalah seorang Jawa anggota Volksraad yang mempunyai karier dalam birokrasi kolonial. Oleh karenanya, dia berasal dari luar kelompok politikus nasionalis yang utama. Akan tetapi, dia dan pegawai pemerintah lain semakin merasa tidak puas dengan pengurangan-pengurangan gaji, pemecatan-pemecatan, pembatasan kesempatan dalam bidang pendidikan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang umumnya bersifat mencurigai, campur tangan, dan kikir sejak sekitar tahun 1930. Pada bulan Juli 1936, Soetardjo mengajukan suatu petisi kepada Volksraad...” Sementara wujud petisi itu memiliki beberapa versi, yaitu berbahasa Indonesia dan Belanda. Beberapa sumber yang menyajikan wujud petisi itu antara lain adalah Kartohadikusumo (1990) dan Puspongoro & Notosusanto (2008). Masih banyak versi lainnya yang memuat petisi itu seperti pada berbagai surat kabar dan terbitan.

baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik, bertambah lama bertambah merosot...Setelah pergerakan rakyat pada sayap kiri berhasil dikendalikan, maka pergerakan yang bersifat loyal pun, atas dorongan pergerakan penduduk Belanda yang berhaluan *extreme* kanan, mendapat serangan dari pemerintah kolonial..Kepercayaan para terpelajar bangsa Indonesia terhadap itikad baik dari pemerintah Belanda telah sangat merosot..Di luar negeri kita melihat tanda-tanda dengan jelas, bahwa daerah Pasifik akan menjadi medan pertempuran negara-negara besar, yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri...Kalau hal itu terjadi, maka kita hanya akan dapat mempertahankan diri jikalau kita lahir dan batin bersatu, tidak, kalau kita bertentangan satu terhadap satu terhadap yang lain..Saya peringatkan pula bahwa Dr. Colijn, minister Presiden (perdana menteri, pen) Negeri Belanda, dulu sebagai pemimpin partai antirevolusioner, untuk memprogandakan partainya dalam bukunya menulis, bahwa ia tidak takut untuk memberi kedudukan sendiri (*zelfstandig*) kepada Hindia Belanda...’Kalau orang minta saya berjalan satu langkah untuk mencapai itu,’ katanya,’saya berani berjalan dua langkah.’... Oleh karena itu, maka saya mengharap supaya pemerintah yang dipimpinnya sekarang menjalankan dua langkah itu, rakyat Indonesia sudah lama menunggu, ia tidak bisa lebih lama lagi menunggu hal itu.” (Kartohadikusumo 1990: 126-127).

Isi dari petisi itu adalah “yang bertanda tangan berpendapat, bahwa melalui perobahan berangsur-angsur dalam tempo sepuluh tahun, atau dalam suatu tempo yang oleh *conferentie* dipandang cukup untuk mencapai tujuan yang dimaksud, kepada Hindia Belanda dapat diberikan kedudukan sendiri dalam batas-batas sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 *Grondwet*...Dengan hormat memajukan pertimbangan, supaya mengadakan *conferentie*

antara kedua rakyat, yang atas dasar persamaan hak menyusun rencana untuk melaksanakan permohonan yang tersebut di atas.” (Kartohadikusumo 1990: 127).

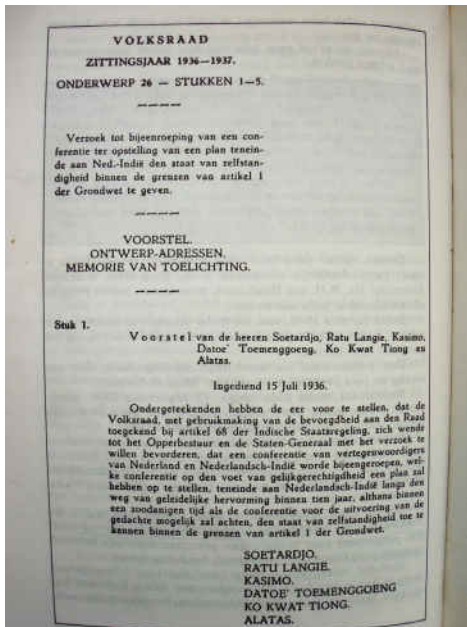


Sumber: Poesponegoro, Notosusanto 2008: 386.

Dalam versi Bahasa Belanda, petisi tertanggal 15 Juli 1936 itu berbunyi sebagai berikut:

“Ondergeteekenden hebben de eer voor te stellen, dat de Volksraad, met gebruikmaking van de bevoegheid aan den Raad toekend bij artikel 68 der Indische Staatsregeling zich wende tot het Opperbestuur en de Staten-Generaal met het verzoek te willen bevorderen. Dat een conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indie worde bijeengeropen, welke conferentie op den voet van gelijkrechtigheid een

plan zal hebben op te stellen, ten einde aad Nederlandsch-Indie langs den weg van geleidekijke hervorming binnen tien jaar, althans binnen een zoodanigen tijd als de conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten, den stat van zelfstandigheid toe te kennen binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet” (van Helsdingen 1946: 123).



Sumber: Kartohadikusumo 1990: 128

Adapun memori penjelasannya (*memorie van toelichting*), adalah (van Helsdingen 1946: 123, 124):

“Memorie van Toelichting

Ondergeteekenden zijn van mening,

1. *Dat de historie van eeuwen de materieele en ideeële be-*

langen van Nederland en Nederlandsch-Indie dusdanig met elkaar verwerven heeft, dat een uiteengaan van beide landen niet zonder ernstige nadeelige gevolgen zou zijn,

2. *Dat in het belang van den opbouw van beide gebiedsdeelen een innige en hartelijke samenwerking noodzakelijk is,*
3. *Dat zich evenwel in de laatste jaren van een groeiend aantal van het denkend deel der inheemsche samenleving een gevoel van ongenoegen, politieke maatheid en onverschilligheid heeft meester gemaakt, welk gevoel ook geleidelijk tot de millioenen massa doordringt en elke bezieling verlamt,*
4. *Dat bezieling volkstrekt noodig is voor den opbouw van Nederlandsch-indie, omdat immers voor den opbouw alle krachten van het indonesische volk in beweging gebracht moeten worden, zoowel op social, economisch als staatkundig gebied,*
5. *Dat bezieling alleen gewekt kan worden, als doelbewust en volgens een vooral opgezet plan aangestuurd wordt op een verhouding tusschen Nederlandsch-indie en het Moederland, die aan de nationale, cultureele, economische en staatkundige behoeften van dat deel van beide volken, dat de door de historie geboden samenwerking, kan voldoen.*

Ondergeteekenden—die ter verdure ondersteuning van hun meening verwijzen naar de door eersten

ondergeteekende bij de algemeene berschouwingen over de Indische begrooting voor 1937 in eersten termijn uitgesproken rede (zittingsjaar 1936-1937, H 74-82, in het bijzonder H 80-82)—stellen zich voor, dat een verhouding als hierboven sub 5 bedoeld verkregen zal kunnen worden, indien langs den weg van geleidelijke hervorming aan Nederlandsch-Indie binnen tien jaar, althans binnen een zodanigen tijd als voor de uitvoering van de gedachten mogelijk zal blijken, een staat van zelfstandigheid binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet zal worden toekend.”

Pasal 1 Konstitusi (*Grondwet*) itu menyebutkan bahwa “*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao*”, yang berarti Kerajaan Belanda mencakup wilayah Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao. Pembacaan fasal itu menghasilkan pemikiran bahwa Hindia Belanda memiliki tempat yang sejajar dengan Negeri Belanda karena bersama-sama dengan dua wilayah lainnya membentuk Kerajaan Belanda.

Soetardjo mengungkapkan pemahamannya tentang bunyi fasal-fasal ketatanegaraan itu, sebagai berikut: “Tentu saja orang bisa berlainan pendapat tentang makna dari isi pasal 1 *Grondwet* itu, akan tetapi saya tentang isi pasal itu berpendapat sebagai berikut..Yang dimaksud dengan istilah *koninkrijk* dalam pasal itu adalah bukan suatu kesatuan sosial, tetapi suatu kesatuan *staatkundig* (politik) yang di dalamnya tersusun dari 4 (empat) kesatuan hukum. Menurut pasal 2, maka kesatuan hukum yang pertama disebut *het rijk in Europa*. *Het rijk in Europa* itu adalah suatu negara (*staat*)..Kalau pasal 2 *Grondwet* menetapkan ada

sebuah *rijk in Europa*, ketentuan itu *impliceert* adanya *rijk* di luar Eropa, yaitu: Nederlandsch Indie di Asia, Suriname dan Curacao di Amerika..Oleh karena bagian *Koninkrijk der Nederlanden* yang berada di Eropa adalah suatu ‘negara’ (*staat*), maka bagian-bagian lain yang berada di Asia dan Amerika itu bukanlah suatu kesatuan hukum, yang berkedudukan administratif (propinsi) melainkan negara-negara juga seperti bagian Eropa..Saya mengingatkan waktu itu bahasa dalam Grondwet 1887 dan 1917, pasal 1 itu bunyinya: ‘*Het koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa, benevens de kolonien en bezittingen in andere wereldelen.*’..oleh karena yang demikian itu, maksud dari isi pasal 1 *Grondwet van Nederland* itu tidak bisa lain daripada menentukan, bahwa *Koninkrijk der Nederlanden* terdiri dari empat negara, yang kedudukannya satu terhadap yang lain *gecoördineerd*, tidak *gesubordineerd*..Nederland tidak lebih tinggi dari *Nederlandsch-Indie*. *Nederlandsch-indie* tidak lebih tinggi dari Suriname dan Suriname tidak lebih tinggi dari Curacao. Semua kedudukannya, derajatnya sama...Akan tetapi, empat negara itu bersama dan satu per satu di bawah dan menjadi bagian dari dan *gecoördineerd* di dalam dan oleh *het Koninkrijk der Nederlanden*.” (Kartohadikusumo 1990: 119-120).

Pada sidang pembahasan yang berlangsung pada bulan September 1936, penjelasan petisi itu disampaikan dalam sebuah tim, yakni nama-nama yang terpampang pada bagian akhir petisi sebagai pengusulnya. Mereka berbagi tugas dalam memaparkan petisi itu. Pemaparan diawali oleh pidato G.S.S.J (Sam) Ratu Langie tentang penjelasan umum mengenai tujuan petisi. Setelah itu, I.J. Kasimo, dari Partai Katolik yang menyebrang mendukung pengajuan petisi itu memberikan penjelasan aspek ekonominya. Kemudian, Lanjumin Datuk Tumenggung menjelaskan aspek

sosial, politik dan budaya, yang diikuti oleh penjelasan Ko Kwat Tiong tentang kedudukan golongan Indo, yang mencakup Belanda, Cina, Arab dan lainnya). Sebelum Soetardjo menguraikan inti permasalahan yang tercantum dalam petisi itu, pemaparan akhir dari pembuka itu disampaikan oleh Alatas tentang hubungan kelompok antar umat beragama.

Kenyataan menarik di balik para pengusul itu adalah keragaman latar belakang kelompok sosial budaya dan daerah asal, yang mencerminkan mosaik kemajemukan dan pluralitas bangsa Indonesia dari berbagai ras, etnik dan golongan, serta bukan dari Fraksi Nasional yang lebih dikenal sebagai kelompok nasionalis kompromistik yang gencar membicarakan dan memperjuangkan kebebasan Indonesia.¹⁷ Justru gagasan yang membuka gerbang menuju kemerdekaan berasal dari kelompok beraneka itu, yang sebagian tidak mewakili fraksi dan suara partainya.¹⁸ Menurut

17 “Atas gagasan Husni Thamrin, anggota yang mewakili Kaum Betawi, pada bulan Januari 1930 terbentuklah Fraksi Nasional yang terdiri dari sepuluh orang. Tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan nasional dalam waktu yang singkat dengan jalan mengusahakan perubahan ketatanegaraan dan penghapusan perbedaan politik, ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa fraksi ini bersikap radikal pula. Perlu disebut di sini, bahwa istilah fraksi sebenarnya kurang tepat karena anggotanya tidak terdiri dari satu partai saja.” (Leirissa: 82)

18 Latar belakang tim pengusul petisi itu antara lain adalah “*the petition was signed by such relatively moderate men as Soetardjo Kartohadikoesoemo, a patih [administrator directly under bupati] and the president of the Perhim- poenan Pegawai Bestuur Boemipoetra (Association of Native Civil Servants--PPBB), Ratu Langie, a lone-wolf Christian representative of Persatoean Minahasa [Minahasa Union], Kasimo, the Javanese president of the Koempoelan Politiek Katoliek di Indonesia (Political Association of Indonesian Catholics--PPKI), Datoek Toemenggoeng, a Minangkabau aristocrat and secretary of the PPBB, and two representatives of racial minority groups, Ko Kwat Tiong and Alatas, Chinese and Arab respectively. Not a Nationale Fractie member among them, although Ratu Langie was so close to Thamrin's group that many Dutchmen considered him as dangerous as an organized nationalist*” (Abayasekere 1973: 84). Menurut R.Z.

Herman Burgers (2010: 235) sumber ilham untuk menuntut suatu konferensi berasal dari kebijakan Inggris terhadap koloninya India, sedangkan inspirasi rentang waktu untuk merdeka adalah dari contoh Filipina yang memperolehnya dari Amerika Serikat.

Jalur Damai Perjuangan Kemerdekaan

Gagasan dan usulan dalam petisi Soetardjo bertalian dengan perkembangan internasional yang sedang menuju pada persaingan dan ketegangan antar negara dan aliansi yang baru bahkan telah berada di jurang bentrokan langsung. Gagasan Soetardjo menyangkut pula masalah perubahan dan pengaturan hubungan kolonial yang ada, yang berkaitan juga dengan restrukturisasi dan reorganisasi pemerintahan. Butir-butir gagasan perubahan politik dan pemerintahan itu adalah (Poesponegoro & Notosusanto 2008: 385, 387):

- “1. Pulau Jawa dijadikan satu provinsi, sedangkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dijadikan kelompok-kelompok daerah (*groeps-gemeenchappen*) yang bersifat otonom dan berdasarkan demokrasi.
2. Sifat dualisme dalam pemerintahan daerah (*binnenlandsbestuur*) dihapus.
3. Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja dan mempunyai

Leirissa (83) menjelaskan bahwa “Dukungan tokoh-tokoh tersebut di atas sesungguhnya mewakili kepentingan golongan masing-masing, yaitu golongan minoritas menurut peristilahan dalam zaman kolonial. Ratulangi mewakili masyarakat suku bangsa di Indonesia Bagian Timur, Alatas mewakili minoritas Arab, Ko Kwat Tiong mewakili minoritas Cina, Kasimo mewakili minoritas Kristen. Mereka beranggapan bahwa *self-government* bisa menguntungkan kepentingan golongan-golongan itu. “ Persatoean Arab Indonesia (PAI) juga mendukung petisi itu (de Jonge 2004: 388).

hak kekebalan (*onschendbaar*).

4. Direktur Departemen mempunyai tanggung jawab.
5. *Volksraad* dijadikan parlemen yang sesungguhnya.
6. *Raad van Indie*: anggota-anggota biasa dan seorang *Vice President* diangkat oleh raja; di samping itu ketua dan wakil ketua *Volksraad* sebagai anggota mempunyai hak suara.
7. Dibentuknya (Pembentukan, pen) Dewan Kerajaan (*Rijksraad*) sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kedua daerah dengan satu pimpinan yang diangkat, pimpinan bukan seorang menteri atau direktur atau salah seorang dari ketua parlemen.
8. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya adalah untuk Indonesia. Terhadap orang-orang asing yang dilahirkan di sini diadakan seleksi yang ketat.”

Tampaklah, petisi Soetardjo bukanlah sekedar luapan emosional seorang priyayi, melainkan suatu usulan berpemerintahan sendiri sehingga mencakup pula pembenahan dan penyusunan kembali struktur politik negeri jajahan termasuk status dan hubungan antar negeri di lingkungan Kerajaan Belanda. Jelas terlihat, tuntutan dari petisi itu sedemikian lunak dan masih mengakui, menghargai dan menjalin hubungan dengan Negeri Belanda. Usulan itu membuka ruang untuk kedua belah pihak agar mampu bertahan di tengah-tengah gejolak dunia ketika itu, namun ruang itu tetap kosong, sehingga ketika perubahan terjadi, kesempatan yang sempat terbuka menjadi penyesalan yang berkepanjangan.

Selanjutnya, pengajuan petisi itu memperoleh berbagai

tanggapan, dukungan dan penolakan, baik dari kalangan Dewan Rakyat maupun di luar dewan, serta di Hindia Belanda dan Negeri Belanda pada saat dibicarakan dalam pertemuan dewan bulan Agustus 1936 yang tidak dihadiri oleh wakil dari pihak pemerintah. Masing-masing sikap dan pernyataan memiliki latar belakang, alasan dan argumentasi. Kesemua itu membiaskan refleksi, kilas balik, visi, dan prediksi yang meliputi kecemasan, harapan, analisis, menghargai dan melecehkan sebagaimana yang lazim terjadi dalam suatu forum dan pembicaraan politik yang sarat kepentingan dan tujuan, baik dalam bentuk yang tersurat maupun tersirat. Seketika cakrawala politik Hindia Belanda menjadi semarak dalam silang pendapat terhadap gagasan penyelenggaraan konperensi membicarakan hubungan ketatanegaraan Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda itu terutama ketika petisi itu diterima oleh dewan dan dikirim ke Negeri Belanda. Harapan dalam penantian pun semarak dengan berbagai tanda tanya bagaimana hasilnya, apakah diterima atau ditolak (Burgers 2010: 236). Bagaikan magnet yang menarik benda logam di sekitarnya, tanggapan terhadap petisi itu melampaui batas-batas primordial, seperti etnik, ras, daerah dan budaya, serta orientasi politik dan ideologi.

Perdebatan di dalam Dewan Rakyat di Hindia Belanda memperlihatkan polarisasi pendapat ke dalam kubu yang mendukung, menolak dan abstain. Pihak yang mendukung usulan itu adalah fraksi Nasional, IEV (*Indo Europeesche Verbond*), PEB (*Politiek Economisch Bond*), VAIB, *Regentebond* Sediomulio, PPBB, dan para penandatangannya GSSJ Ratu Langie, I.J. Kasimo, Lanjumin Datuk Tumenggung, Ko Kwat Tiong dan S.A. Alatas. Kelompok yang menolak meliputi fraksi *Vaderlandsche Club* (VC), CSP (*Christelijke Staatskundige*

Partij), Katholieke Partij dan perseorangan seperti Gusti M. Noor, Sosrohadikusumo serta ketua dewan W.H. van Helsdingen. Dari anggota yang hadir sebanyak 46 dari seluruhnya 60 pada saat sidang tanggal 29 September 1936, penentuan sikap dewan melalui pemungutan suara menghasilkan 26 suara menerima dan 20 menolak.¹⁹ Mereka yang tidak hadir sukar untuk diketahui sikap dan pendirian masing-masing, sehingga dapat dianggap abstain. Oleh karena itu, petisi tersebut disampaikan ke Majelis Rendah (*Tweede Kamer*) Negeri Belanda untuk dibicarakan dalam *Staten General*.

Alasan-alasan yang disampaikan dalam penolakan adalah antara lain, bahwa rakyat Indonesia belum matang untuk memerintah negerinya sendiri, bahkan VC menegaskan tidak akan pernah siap sehingga harus selamanya di bawah Negeri Belanda, sedangkan CSP sebenarnya dapat menyetujui usulan itu namun menyatakan belum saatnya, dan entah kapan, sementara M. Noor menegaskan tidak setuju dengan cara meminta atau menengadahkan tangan (*handjes ophouding*) kepada Kerajaan Belanda.

Perbedaan pendapat di dewan terutama di kalangan wakil-wakil masyarakat jajahan memperlihatkan polaritas dan dinamika orientasi politik. Spektrum itu merentang dari gerakan yang radikal, seperti Fraksi Nasional, hingga ke sikap konservatif seperti di kalangan wakil pejabat pemerintahan. Orientasi politik

19 R.Z. Leirissa (1985: 84) mengungkapkan bahwa “Dalam Volksraad muncul pula tiga macam pendapat yang mencerminkan keadaan masyarakat kolonial. Pendapat pertama berasal dari wakil-wakil masyarakat Belanda yang menolak petisi itu. Pendapat kedua berasal dari kalangan masyarakat Indonesia yang mewakili golongan ‘intelektual’ dengan pimpinan Soekardjo Wiryopranoto; mereka pun menyatakan penolakan. Pendapat ketiga juga dari kalangan masyarakat Indonesia yang disuarakan Soeroso (golongan pegawai negeri) yang juga menolaknya.”

yang menyangkut keadaan daerah jajahan (Hindia Belanda) dan hubungan kolonialisme membentang dari kemerdekaan penuh dan segera, kemerdekaan bertahap melalui otonomi dan negara bagian (*dominion*). Memang di kalangan fraksi priyayi atau pejabat pemerintahan tampaknya mempertahankan hubungan kolonial yang ada, walau banyak juga yang secara diam-diam menyimpan harapan merdeka. Tampaknya perbedaan, persaingan dan perjuangan orientasi politik itu lebih dilandaskan pada persaingan kepemimpinan ketimbang pada ideologi yang lebih jelas, dalam rangkaian strategi mempersiapkan dan menghimpun kekuatan untuk menerima peralihan tongkat estafet kepemimpinan kolonial menjadi nasional sebagaimana wacana politik yang berkembang ketika itu walau belum muncul janji dekolonisasi dari Kerajaan Belanda dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, namun bisa saja sewaktu-waktu terjadi mengingat keadaan dan perkembangan politik internasional yang sedang bergejolak.

Perbedaan politik yang jelas tampak pada penolakan terhadap usul itu di satu sisi dapat dikatakan sebagai hasil berkesinambungan dari politik kolonial yang memecah belah untuk dikuasai (*divide et impera*) walau tampaknya tidak sepenuh demikian. Introduksi pendidikan modern kolonial yang menimbulkan kesadaran dan emansipasi sehingga salah satunya berwujud pada pembentukan Dewan Rakyat tampaknya tidak diikuti oleh kesatuan pergerakan dalam mencapai kemerdekaan. Sebagaimana tinjauan ringkas tentang genealogi dan corak gagasan kemerdekaan yang beragam itu, kalangan wakil jajahan dalam dewan itu memiliki orientasi politik yang tidak sama, yang dari sudut pandang demokratisasi merupakan wujud proses yang mendengarkan, menghargai dan menerima perbedaan dan keragaman sudut pandang dan pendapat antara seseorang dan

lainnya walau kerap terjadi perdebatan. Dalam forum dewan itu, dialog dan bahkan perdebatan dengan fraksi pendukung dan juga pemerintahnya tidak jarang terjadi walau tidak dalam status dan fungsi legislatif yang penuh. Perjuangan legislatif dalam perwujudan demokratisasi yang mengalami pasang surut dalam perjalanan politik Republik Indonesia telah mulai sejak masa itu, yang dapat dikatakan berhasil pada masa reformasi terutama dalam corak pemerintahan presidensil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Setelah pertarungan di kancah dewan yang cukup sengit dengan hasil yang menggembirakan, perjuangan beralih ke jalan, atau luar dewan. Tahap perjalanan petisi itu lebih terjal, sehingga memerlukan dukungan yang lebih luas. Sekaligus juga petisi itu diuji di tengah-tengah masyarakat apakah dapat difahami dan diterima serta disokong agar diluluskan oleh pihak yang berwenang.

Turun ke Jalan

Pada awalnya, Soetardjo belum merasa perlu dan melihat kepentingan untuk memperluas dukungan terhadap usulannya itu ke berbagai kalangan melalui suatu gerakan turun ke jalan. Ia masih mengandalkan media yang dirintis dan diasuh oleh Ratoe Langie yaitu *Nationale Commentaren* yang memiliki *audience* pembaca yang cukup luas. Dengan sendirinya, petisi itu menimbulkan tanggapan-tanggapan di luar Dewan Rakyat. Tanggapan-tanggapan itu terutama berupa tulisan-tulisan dari berbagai kalangan. Agus Salim dan M. Natsir, yang berasal dari pergerakan Islam, ikut memberikan tanggapan dalam bentuk menterjemahkan pidato Soetardjo. Demikian Tabrani menanggapi dalam surat kabar *Pemandangan*, yang menyerukan dukungan luas terhadap usulan itu.

Dalam perkembangan internasional yang mengarah ke proses dekolonisasi, petisi Soetardjo perlahan-lahan menjadi batu ujian apakah pemerintah memang “berkemauan baik”, sebagaimana yang pernah diperlihatkan 3 dekade sebelumnya ketika mencanangkan politik Etis yang dibalut dengan (seolah-olah) untuk kepentingan daerah dan rakyat jajahan. Tanggapan terhadap gagasan itu berupa pembentukan berbagai komite, baik di tingkat pusat maupun daerah yang melakukan propaganda dukungan terhadap maksud dan tujuan itu. Demikian pula, di Negeri Belanda berlangsung gerakan serupa; bahwa dalam rancangan Program Perhimpunan Indonesia dan anggaran dasar partai yang didirikan oleh Soetomo, Partai Indonesia Raya (Parindra), tercantum sebagian gagasan dari petisi itu. Namun Parindra dan juga partai konsentrasi kiri yang juga dibentuk, yaitu Gerindo, tidak mendukung petisi itu, karena dianggap tidak cukup progresif. Namun tidak semua anggota kedua partai itu menolak, sebagian mereka mendukung petisi itu. Seperti misalnya, Amir Syarifudin dari Gerindo memperlihatkan sikap dan dukungan terhadap usulan itu (Aritonang 2010: 206). Awal 1937 PI di Negeri Belanda menyebarkan selebaran berkaitan dengan petisi itu; yang menegaskan kepada publik Belanda betapa penting dan perlu untuk menanggapi dan menjawab petisi itu demi masa depan hubungan politik kerajaan. PI yang sebelumnya dengan sepenuh tenaga mengobarkan semangat perjuangan kebangsaan dengan pernyataan tegas, merdeka sekarang juga, dapat menerima cara perjuangan kemerdekaan seperti yang diusung oleh Soetardjo dan kawan-kawan. Oleh karena itu, tampak bahwa PI yang sebelumnya melakukan cara perjuangan yang radikal begeser ke sisi moderat.

Soetardjo juga menyerukan agar membentuk komite di

Negeri Belanda. Pada Juli 1937 Hadiono Koesoemo Oetoyo memberikan ceramah tentang seruan itu dalam acara Roepeli, kumpulan masyarakat Indonesia di Negeri Belanda, yang dihadiri oleh beberapa gurubesar dari Leiden dan seorang pakar tentang tanah jajahan dari SDAP, Ir. Cramer.²⁰ Hadiono menjadi penggerak utama dari Comité-Petitie-Soetardjo Nederland yang didirikan pada musim gugur 1937. Duduk dalam komite itu juga, adalah tiga orang Belanda, yang di antaranya Ir. Cramer, dan dua orang Indonesia, yaitu Hadiono dan Adi Tjondro. Segera komite meluncurkan program dan kegiatannya. Bentuk kegiatan itu antara lain adalah mengadakan perhelatan dan rapat terbuka di Den Haag dan Amsterdam, diisi juga dengan pertunjukan tarian Jawa. Hadiono yang tampil berbicara dalam rapat itu, menekankan bahwa betapa perlunya kerjasama Indonesia-Belanda dalam melawan ancaman Jepang. Selain itu kegiatan komite itu berkaitan dengan petisi yang telah sampai di Majelis Rendah (*de Tweede Kamer*). Mereka mendengungkan betapa pentingnya persetujuan Dewan untuk masa depan bersama, Negeri Belanda dan Hindia Belanda.

Gerakan Komite petisi itu di Hindia Belanda meluas ke sejumlah daerah. Elit politik daerah memahami dan menyambut baik gagasan menuju kemerdekaan sehingga mau bergabung dengan gerakan menggalang dukungan itu. Pada awalnya,

20 Sedikit keterangan tentang tokoh ini adalah “*Op aandring van Soetardjo werd ook in Nederland een comité gevormd om actie te voeren voor inwilliging van de petitie. Het bekendste lid van dit comité was de vroegere voorzitter van de ISDP, ir. Cramer, die van 1918 tot 1923 in de Volksraad had gezeten (waar hij onder meer met Tjokroaminoto en Tjipto Mangoenkoesoemo had samengewerkt) en die van 1923 tot 1937 de Indonesië-expert van de SDAP in het Nederlandse parlement was geweest*” (Burgers 2010: 236).

pengumpulan tanda tangan dukungan itu berjalan lancar. Melalui seruan dan penjelasan yang dilakukan, tanggapan dan dukungan mulai mengalir. Namun, ketika gerakan itu kian membesar, hambatan pun muncul, terutama dari penguasa kolonial daerah. Mereka mulai melarang gerakan itu dan mengeluarkan ancaman pemberlakuan sanksi dan hukuman apabila peringatan itu tidak diindahkan. Peringatan itu ternyata bukan sekedar gertakan, beberapa pendukung gerakan itu ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian, larangan terhadap gerakan itu dicanangkan. Komite pusat segera mengeluarkan protes terhadap tindakan kolonial itu. Namun, mereka tidak bias berbuat banyak terhadap kebijakan itu.

Bulan November 1938 Petisi Soetardjo akhirnya ditolak oleh Pemerintah Belanda. Harry A. Poeze (2008) menyatakan “Uluran tangan telah ditolak, dan demikian banyak orang moderat dikecewakan, sedangkan mereka yang menolak diajukannya petisi dibenarkan pendapatnya.” Berkaitan dengan sikap dan pendirian Parindra, Susan Abayasekera (1972: 266, 267) mengungkapkan bahwa

“Before the outbreak of the Second World War, the main test of the extent of Parindra’s commitment to cooperation was the Soetardjo Petition, which requested a conference of representatives from Holland and the Indies to discuss the granting of political autonomy to the Indies. Half the Parindrists in the Volksraad voted against the petition and a conference of the party refused to join the public campaign in favour of the proposal. The arguments presented by Parindrists against the petition were curiously self-defeating? that the

petition was doomed to failure because it had no mass support and that it was not radical enough because it did not demand independence straight out. Political cooperation apparently did not yet mean gradualism to most Parindrists. Except for people like Thamrin who were willing to support the petition as at least a possible step on the way to autonomy, most Parindrists appeared only one degree more moderate than the non-cooperators : they were prepared to sit in the councils but not to support anything less than independence...”

Tidak dapat dipungkiri apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa gerakan turun ke jalan Soetardjo dan pendukungnya tidak lebih daripada peniruan pola pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan para nasionalis non kooperatif dan konfrontatif, yang kerap melakukan pengumpulan dan agitasi massa melalui penyelenggaraan rapat raksasa. Oleh karena, gerakan para nasionalis birokrat hanya terbatas pada rapat-rapat tertutup anggota perkumpulan dan tidak mengerahkan massa dalam pertemuan terbuka. Memahami gerakan turun ke jalan itu seyogyanya dari keadaan dan perkembangan zaman. Di tengah-tengah kekosongan kegiatan pergerakan dan penggalangan dukungan terbuka yang dikarenakan kebijakan represif kolonial dan pemenjaraan para pemimpin pergerakan non kooperatif, gerakan itu menjadi pengisi dan penerus pergerakan nasional secara terbuka, walau tidak berlangsung lama karena larangan pemerintah kolonial. Animo dan tanggapan dari berbagai kalangan, terutama yang memberikan dukungan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari lapisan elite hingga ke rakyat

biasa. Cakrawala dan aura pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan menjadi semarak kembali. Harapan untuk merdeka tidak menghilang bersama dengan kepergian para nasionalis radikal dari panggung serta kancah pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan, melainkan tetap hidup dan menyala-nyala, dan juga yang terlebih penting adalah bahwa harapan itu disebarkan ke seluruh kalangan, lapisan, dan daerah. Walau tanggapan yang diterima berbeda-beda, tidak semua memberikan simpati dan dukungan. Namun, untuk ukuran zamannya, yang diliputi oleh kungkungan politik kolonial dan perkembangan internasional yang penuh persaingan dan agitasi, gerakan turun ke jalan telah menoreh lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Panji-panji perjuangan masih berkibar dalam suatu dialog intelektual dan cara-cara beradab sebagaimana yang diajarkan oleh pemikiran dan etika humanisme politik modern.

Kesempatan yang Hilang

Tanggapan resmi Kerajaan Belanda berupa keputusan yang diterbitkan oleh Ratu Wilhelmina, yang berisikan sebagai berikut (van Helsdingen 1946: 135-136):²¹

21 Setelah dua tahunan, gagasan dan usulan politik itu memperoleh jawaban resmi, penyebabnya antara lain adalah sikap Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tidak memandangnya penting ketika dimintai pertimbangan, juga ketidaksiapan untuk mendalami petisi itu, yakni: *“Eén van de redenen waarom de Nederlandse regering lange tijd niet op de petitie antwoordde, was dat zij wachtte op een advies van het Nederlands-Indische gouvernement. Aan het hoofd hiervan stond nu A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die B.C. de Jonge in september 1936 was opgevolgd. De nieuwe gouverneur-generaal was commissaris van de koningin in Groningen en gezant in Brussel geweest, maar wist van Nederlands-Indië niets en had er ook nooit belang in gesteld. Al kort na de ontvangst van de Volksraadspetitie in Den Haag vroeg de regering hem hier advies over uit te brengen, maar hij maakte*

“Wij Wilhelmina, bij den gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz

Beschikkende op het met gebruikmaking van artikel 68 der Indische Staatsregeling gedan verzoek van den Volksraad van Nederlandsch-Indie van 1 October 1936, strekkende om te bevorderen, date en conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indie worde bijeengeroepen, welke conferentie op den voet van gelijk gerechtigdheid een plan zal hebben op te stellen, ten einde aan Nederlandsch-Indie langs den weg van geleidelijke hervorming binnen een zoodanigen tijd als de conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten, den staat van zelfstandigheid toe te kennen, binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet;

Op de voordracht van Onzen Minister van Kolonien van 8 November 1938, 4de Afdeeling Bur. B.O.Z. No. 13:

Overwegende:

dat het hooger omschreven tot ons gericht verzoek in zijn formulering de klaarheid van doelstelling mist, welke door het gewicht van het daarin behandeld onderwerp wordt geboden en dat de bijeenroeping van een conferentie op de wijze, als in de petitie kennelijk

daar niet de minste haast mee. Overigens bleek ook zonder officiële reactie, dat aan Nederlandse kant weinig bereidheid bestond om op de petitie-Soetardjo in te gaan. Hoewel de petitie uitging van handhaving van de rijkseenheid, stonden de koloniaalconservatieve kringen rondom de Utrechtse indologiefaculteit er volstrekt afwijzend tegenover” (Burgers 2010: 236).

beoogd wordt, strijdig moet worden geacht met het geldend staatsrecht;..dat reeds om deze redder het verzoek niet voor inwilliging vatbaar is; dat nochtan termen bestaan het verzoek ook te toetsen aan de normen, gesteld voor de staatskundige ontwikkeling van Nederlandsch –Indie.

Overwegende te dien aanzien:

dat artikel 1 der Grondwet geenerlei aanwijzing behelst omtrent den staat van zelfstandigheid, welke Nederlandsch-Indie in het Nederlandsch Staatsbestel bezit of zou kunnen verkrijgen;

dat aanwijzingen van die strekking wel zijn vervat in de artikelen 62 tot en met 64 der Grondwet;

dat de beginselen van beleid met betrekking tot de staatskundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indie, welke in de laatsgenoemde artikelen hun uitwerking hebben gevonden, door de Regeering die deze artikelen heeft ontwerpen, als volgt zijn omschreven:

“Wat de richting betreft, is de Regeering van oordeel, dat zoowel wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden zooveel mogelijk moeten worden geelgd in handen van in Indie zelf zetelende lichamen en overheden en dat aan de aldaar gevestigde bevolking een zoo groot invloed op en aandeel in de samenstelling dier lichamen moet worden toegekend. Bij elken stap in deze richting zal de grens worden bepaald door de mogelijkheden om, hetzij in de ontwikkeling der in Indie aanwezige krahcten, hetzij in de werking van het toezicht van uit Nederland, waarborgen te vinden voor een bestendig,

aan modern eischen voldoende regeeringsbeleid.”;

Dat deze beginselen, welke in feite de Nederlandsche staatkunde ten opzichte van Nederlandsch-Indie reeds op mening punt hadden beheerscht voordat daarvan ter gelegenheid van de in 1922 tot stand gekomen herziening der Grondwet de aangehaalde, heldere formuleering was gegeven, sedert dien der Regering tot richtsnoer hebben gestrekt;

dat in het kader van de aldus omschreven staatkunde binnen een kort tijdsverloop een aantal gewichtige hervormingen zijn tot stand gebracht, alle strekkende eenerzijds om den behartiging van inwendige Indische aangelegenheden in zoo groot mogelijke mate over te laten aan in Indie gevestigde organen, anderzijds om den daadwerkelijken invloed van de bevolking op de samenstelling van die organen zooveel mogelijk tot zijn recht te doen komen:

dat de bestaande Grondwettelijke en wettelijke bepalingen ruimte bieden voor verderen opbouw en vervollediging van de op de voorschreven beginselen berustende ontwikkeling in den zin van autonomie op democratischen grondslag;

dat voor den gezonden staatkundigen groei van Nederlandsch-indie als deel van het Rijk een onmisbare voorwaarde is, dat mate en vorm, waarin staatkundige zelfstandigheid wordt verworven, gelijken tred houden met de innerlijke ontwikkeling in social, economisch en intelletueel opzicht;

dat immers, bij aldien het verband tusschen deze factoren zou worden verbroken, de toekenning

van meerdere zelfstandigheid aan het gebiedsdeel Nederlandsch-Indie niet zou leiden tot wezenlijke ruimere autonomie van de aldaar gevestigde bevolking;

dat bovendien een grootere mate van zelfstandigheid, indien zij niet is gegroeid als de natuurlijk rijpende vrucht van maatschappelijke draagkracht en intellectueele ontwikkeling, doch kunstmatig in het leven wordt geropen ter voldoening aan een op zich zelf verklaarbaar en ook te waardeeren politiek verlangen, nimmer de hooge waarde voor het staatkundig leven des lands kan verkrijgen, die het oogmerk van een gezond staatkundig strijven moet zijn, dat er immers op gericht moet zijn die grootere zelfstandigheid het waarlijk geestelijk eigendom te maken van breede lagen der bevolking;

dat derhalve de gedachte om, al dan niet binnen een bepaalden termijn en al dan niet volgens een bepaald schema deze ontwikkeling te verhaasten niet kan worden aanvaard, als zijnde niet in het belang van Nederlandsch-Indie;

Overwegende voorts:

dat sedert de tetsatndkoming van de hoogervermelde artikelen 62 tot en met 64 der Grondwet niet is gebleken, dat die artikelen en de daarop berustense organieke wetgeving eenig beletsel inhouden voor de verwezenlijking van de staatkunde, die doelbewust is gericht op versteviging van de maatschappelijke grondslagen der verleende autonomie en op uitbreiding van die autonomie vooral

ook in de richting van behartiging van plaatselijke en regionale belangen;

dat integendeel de door de deelen des Rijks gemeenschappelijk doorleefde jaren van economischen nood en international spanning hebben geleerd, dat het bestaand wettelijk kader een waarborg biedt voor de doeltreffende behartiging van de algemeene Rijksbelangen en van de daarmede veelszins onverbrekkelijk verbonden belangen van de deelen des Rijks;

dat derhalve voorshand geen aanleiding bestaat een principeele herziening van de ter zake geldende wetsvoorschriften te hand te nemen:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan den Volksraad van Nederlandsch-Indie te kennen te geven, dat geen termen zijn gevonden aan zijn hooger omschreven verzoek te voldoen.

Onzer Minister van Kolonien is belast met de uitvoering van dit besluit, waaarvan afschrift zal worden gezonden aan den Volksraad van Nederlandsch-Indie

Het Loo, den 16 November 1938

(get.) WILHEMINA

De Minister van Kolonien

(get.) Ch. WELTER”

P.J.A. Idenburg memberikan ulasan dan mengangkat beberapa hal latar belakang dan alasan di balik penolakan terhadap tuntutan dalam petisi itu. Pendapatnya adalah (1987: 155):

“Kebijaksanaan Negeri Belanda dalam tahun-tahun tiga

puluhan, dengan jelas terlukis dalam beberapa kalimat tentang ‘pertimbangan’ pada waktu penolakan terhadap ‘Petisi Soetardjo’ yang telah diterima Dewan Rakyat pada tahun 1936, yang memuat permintaan untuk diselenggarakannya suatu konferensi meja bundar untuk menyusun sebuah rencana sepuluh tahun guna mencapai kemandirian di dalam ikatan kerajaan:

‘bahwa bagi suatu pertumbuhan ketatanegaraan yang sehat di Hindia Belanda sebagai bagian dari Kerajaan, adalah suatu syarat yang tidak biasa ditiadakan, bahwa ukuran dan bentuk, di dalam hal mana kemandirian ketatanegaraan dapat dibentuk, melakukan langkah-langkah yang sama dengan perkembangan internal dari segi sosial, ekonomis dan intelektual’

‘bahwa sesungguhnya di dalam hal-hal itu semua hubungan di antara faktor-faktor tersebut akan diputuskan, maka pemberian persetujuan tentang kemandirian yang lebih luas pada bagian wilayah Hindia Belanda tidak akan menjurus pada otonomi yang lebih luas yang bersifat hakiki bagi penduduk yang telah menghuni tempat tersebut.’

‘bahwa, selain itu, kemandirian yang lebih besar, jika hal itu tidak tumbuh dari dalam sebagai buah yang menjadi matang secara alamiah dari daya dukung masyarakat dan perkembangan intelektual tetapi yang secara artifisial dihidupkan untuk memenuhi hasrat politik, yang pada dasarnya dapat dimengerti dan dapat dihargai, tidak pernah akan memperoleh nilai yang tinggi bagi kehidupan ketatanegaraan dari negeri tersebut, yang harus

menjadi tanda mata bagi suatu cita-cita perjuangan ketatanegaraan yang sehat, yang seharusnya harus ditujukan agar kemandirian yang lebih besar itu benar-benar dijadikan milik spiritual yang sebenarnya dari lapisan-lapisan penduduk yang lebih luas..”

Sartono Kartodirdjo (1999: 183) mencoba meringkas latar belakang, dasar pemikiran dan alasan dari penolakan secara resmi itu ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1. “Berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petisi sangat prematur dalam hubungan itu
2. Dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam struktur politik baru itu
3. Siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti
4. Tuntutan otonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar alamiah, karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai

Alasan terakhir merupakan bukti nyata bahwa pihak kolonial senantiasa menghendaki *status quo*, setiap perubahan dianggapnya sebagai ancaman sehingga petisi dianggap prematur. Perkembangan di bawah pimpinan Belanda yang dianggap wajar alamiah...Waktu mengajukan petisi itu juga dianggap tidak tepat oleh karena sedang direncanakan reformasi struktur politik administratif sebagai pelaksanaan rencana Colijn, ialah terbentuknya ‘Negara-negara Pulau’; seperti Sumatra,

Kalimantan dan Sulawesi. Konsep Colijn yang merupakan konsep antikecenderungan mau tidak mau merupakan antagonisme terhadap ide persatuan yang secara mati-matian diperjuangkan oleh kaum nasionalis. Heterogenitas dipakai sebagai prinsip legitimasi pembagian itu, namun secara terselubung tampak pula politik *divide et impera*; Kecuali prinsip menganggap bahwa status otonomi atau kemerdekaan adalah hal yang prematur bagi bangsa Indonesia yang memerlukan perkembangan ‘alamiah’ untuk mencapai kemasakan.”²²

Frances Gouda juga memberikan analisisnya terhadap dampak penolakan petisi itu. Ia mengulasnya, termasuk bagaimana sudut pandang H. Colijn yang ikut terlibat dalam penolakan tersebut, sebagai berikut (1995/ 2008: 27, 28, 62, 63):

“Ultimately, the government in The Hague rejected the reasonable Soetardjo petition of 1936, which had already been accepted by the Indies Volksraad (People’s Council), the Duma-like parliament in which elected Dutch and Indonesian delegates could play an advisory political role. The fate of the Soetardjo petition composed a ‘depression story’ with unhappy ending. Thus mild-mannered proposal envisioned Indonesian independence in ten years but affirmed in articles 1 and 2 ‘that the centuries

22 Pendapat senada diajukan oleh Taufik Abdullah (2009: 54), yaitu: “A proposal that had been approved by the Volksraad, to grant Indonesia a dominion status (the Sutardjo Petition of 1938) was not only rejected but also ridiculed by the central government in the Hague. However commendable this petition might be, as the Royal Decree of 16 November 1938, stated, independence could only be achieved after a gradual process of maturity. It should also be based on ‘economic strength and intellectual development of the broad strata of the population.’ Yet how many decades would be needed to reach this stage of maturity?”

long history of joint material and ideological (ideeel) interests...requires an intimate and heart-felt cooperation between the two parts of the commonwealth....' The government in The Hague, however, could not bring itself to seize this felicitous opportunity and fostered, instead, 'the growing sense of (racial) superiority of the European community in the Indies, as an Indonesian member of the Volksraad called it, 'which paralyses the masses.' Before 1942, in other words, 'the colonial apparatus of power and control functioned as the slopes of a mountain that contained the churning mountain stream' of nationalist sentiments 'within its riverbeds.' After 1942, 'the mountains suddenly disappeared and the buoyant river swelled to the extent that it flooded the entire valley.'... He proclaimed in the Second Chamber in The Hague during the parliamentary discussions on the Soetardjo petition that the primary task of colonial governance was to train the separate ethnic populations of Indies for 'local and regional citizenship, expressed in participation in, and care for, their own daily interests.' From a purely human point of view, Colijn judged the goal of Indonesian independence 'onlogical'; from a religious perspective he viewed it as 'unwarranted'. Why should independence be the 'highest reward for centuries of labor on the part of the best human resources of our nation?' ...The Royal Decree of November 16, 1938, which was mostly the brainchild of Prime Minister Colijn and

his minister of Colonial Affairs (Welter), explained the government's rejection of the Soetardjo petition. At this stage, the decree pronounced, granting a higher level of autonomy to the Indies would be the wrong response to an 'artificially created political longing.' However understandable, even commendable, this political yearning might be, actual independence could only result from a slow, natural process of 'ripening' that was grounded in the 'economic strength' (draagkracht) and intellectual development of the broad strata of the population. And this gradual process of maturation would take many decades, if not centuries."

Tanggapan Soetardjo terhadap penolakan resmi dari Sri Ratu Kerajaan Belanda itu, adalah sebagai berikut: "Selama 2 tahun sejak Petisi diterima baik oleh Volksraad pada tanggal 29 September 1936, sampai jatuhnya putusan raja pada tanggal 16 November 1938, menilik suara-suara yang didengar dari Nederland, baik dari kalangan Staten General maupun dari kalangan pemerintah, rakyat di Hindia Belanda memang sudah menduga, bahwa Petisi Volksraad itu akan ditolak oleh Raja Belanda..... Surat-surat yang memuat pendapat pembesar-pembesar Belanda tersebut di atas, yang dulu dibikin rahasia, sekarang sudah diumumkan dalam bentuk buku dua jilid yang berjudul *De Volksraad en de Staatskundige Ontwikkeling van Nederlandsch Indie*, dikeluarkan oleh J.B. Wolters, Groningen, Nederland... Buku itu memuat surat-surat tersebut dan *Koninklijk Besluit* tanggal 16 November 1938, dengan lengkap. Dari surat-surat itu, terbukti dengan jelas, bahwa bangsa Belanda tidak berniat untuk selama-lamanya

memberi kedudukan sendiri (kemerdekaan) kepada Indonesia... Mereka takut kehilangan keuntungannya, yang selama itu sejak lebih dari 300 tahun diperoleh dari Indonesia. Semboyan mereka adalah: *Indie verloren, rampspoed geboren*, artinya: Hilangnya Indonesia akan mendatangkan bencana bagi negaranya... Dalam Volksraad, sesudah diterimanya putusan raja tersebut di atas, saya mengingatkan kepada bangsa Belanda dan pemerintahnya di Nederland dan Hindia Belanda, bahwa jalan buat mencapai kemerdekaan Indonesia tidak hanya satu saja... Pergolakan internasional dan kekuatan rakyat dalam negeri sendiripun bisa turut berbicara... saya ceriterakan bahwa saya telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari pihak tertentu, apa yang hendak saya perbuat, kalau petisi kita ditolak oleh pemerintah Belanda. Saya jawab pertanyaan itu, bahwa dalam hal yang demikian, *dan is het word aan den heer Thamrin* (terserah kepada saudara Thamrin)... Saudara Thamrin sudah memberi jawaban atas tantangan pemerintah Belanda itu dengan dibentuknya *Confederasi* partai-partai Politik Bangsa Indonesia, yang dinamakan “Gappi” (Gabungan Parta-partai Politik Indonesia). Ini berarti bahwa bangsa Indonesia telah menggalang persatuan nasional yang lebih teguh dan menyeluruh... Apa yang saya peringatan kepada Belanda yang mabuk kekuasaan, oleh Tuhan Yang Maha Adil telah dipenuhi. Pembicaraan dalam sidang *Volksraad* tentang petisi kita dimulai pada tanggal 17 September 1936. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 agustus 1945, menjadi dalam tempo 10 tahun, seperti yang tercantum dalam petisi, bangsa Indonesia memproklamkan ‘kemerdekaan’ penuh... *De mensch wikt, God beschikt* (Manusia merancang, Tuhan menentukan). Demikianlah selalu kenyataan yang kita alami sehari-hari.” (Kartohadikusumo 1990: 136-137).

Mengenai ungkapan *Indie verloren, rampspoed geboren* , tampak pada gambaran politik dan ekonomi masa akhir penjajahan Hindia Belanda yang diberikan oleh Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks (2012: 264, 265), sejarawan ekonomi kuantitatif. Gambaran itu adalah “Pergeseran ke arah konservatisme pada akhir tahun 1920-an ini sedikit mengejutkan, mengingat tren kebijakan yang dikembangkan sebelumnya di bawah Politik Etis tahun 1901. Sementara di India dan Filipina negosiasi yang serius tentang kemerdekaan tengah berlangsung yang secara perlahan mempersiapkan baik elite kolonial maupun ‘negara induk’ untuk perubahan yang tidak bisa dihentikan, Belanda dan Hindia Belanda masih mandek dalam sebuah negosiasi tentang perkembangan-perkembangan tersebut; dan kini dengan bantuan berbagai sumber kita bisa memahami perkembangan-perkembangan tersebut. Sebagian dari penjelasan atas perubahan konservatif itu barangkali adalah karena posisi Indonesia yang sangat penting bagi Belanda; Ia tidak bisa membayangkan dirinya tanpa wilayah jajahan yang luas ini. Semakin banyak orang Belanda, dalam arti relatif, yang hidup di Indonesia dibandingkan misalnya dengan warga negara Inggris di India (atau Amerika di Filipina). Dan, mungkin jauh lebih penting, sejumlah besar dari pendapatan finansial Belanda adalah diperoleh di Indonesia. *Royal Dutch Shell* hanyalah satu contoh paling nyata dari sangat eratnya hubungan dua negara ini. Pada tahun 1938, diperkirakan bahwa Indonesia merupakan tujuan dari sekitar 40 persen investasi Belanda di luar negeri, atau sekitar 20 persen dari total kekayaan Belanda pada tahun 1938; dari jumlah investasi ini membawa masuk sekitar 8 persen dari pendapatan nasional pada tahun-tahun tersebut. Seperti yang sudah kita lihat, hal ini memiliki berbagai implikasi politik. Sebagai contoh, negarawan Belanda yang berpengaruh pada taun

1930-an, Henderikus Colijn, yang memiliki karier dalam militer Belanda-Indonesia (dia membantu menaklukkan Lombok pada tahun 1894) dan bekas direktur Royal Dutch Shell antara tahun 1913 dan 1921, memiliki pandangan yang sangat konservatif tentang hubungan Belanda dengan wilayah koloni.”

Guno R. Jones (2007: 74) menyatakan makna di balik penolakan itu sebagai berikut,

“Diverse auters zijn het erover eens dat de Nederlandse regeering door de resolute afwijzing van het gemagtigde nationalisme de kans op een vreedzame en geleidelijke staatkundige hervorming van de relatie tussen Nederland en Indonesie definitief verspeelde, en zo het radicale nationalism, dat uitging van totale onafhankelijkheid, de wind in de zeilen legde. Sommige Kamerleden zouden bij de behandeling van de souvereiniteitswet in 1949 met spijt op de afwijzing van de petitie Soetardjo terugkijken onder meer de leden Tilanus (CHU)..Hadden wij niet de petitie Sutardjo(..) niet geheel aft e wijzen? En Van der Goes Naters (PvdA) wezen hierop, maar oud minister van kolonien Welter (voormalig) KVP) moest daar ook in 1949, toen de amcht van de republiek een feit was, niets van weten: ‘inheemsen’ waren volgens hem in 1938 nog niet rijp om het land te regeren. De deskundigheden van Nederlandse ambtenaren bleef, zo luidde welters redenering, onmisbaar.”

Sementara menurut Herman Smit (2006: 32-33) yang meninjau beberapa pendapat dan tulisan tentang penolakan petisi itu, makna

di baliknya adalah:

“Het is niet mijn bedoeling om uit te weiden over de impasse die het Nederlandse koloniale beleid in de jaren '30 ging kenmerken. Ik laat het bij een paar opmerkingen. De impasse ging gepaard met een harde repressie. Er was geen ruimte voor nationalistische kritiek en er was maar weinig voor nodig om zonder vorm van proces te worden geïnterneerd. Vrijwel alle genoemde schrijvers blijken die afwijzing van de petitie Soetardjo en vooral de manier waarop dat gebeurde een noodlottige vergissing te vinden. Fasseur noemt die afwijzing ‘hooghartig’ en het verknoeien van een van de laatste mogelijkheden om in vreedzaam overleg en onder Nederlands bestuurde weg van geleidelijke dekolonisatie in te slaan. Giebels is daar met Fasseur eens. Volgens hem begon met de afwijzing van de petitie een treurspel van gemiste kansen. Dat treurspel zou decennia lang duren. Nederland zou er een gewoonte van maken om een wens van nationalistische, later van republikeinse kant, eerst van de hand te wijzen om er later alsnog graag op in te gaan....wanneer het te laat is. Gouka wijdde een dissertatie aan de petitie Soetardjo. In zijn inleidende beschouwingen karakteriseert hij de periode tussen 1930 en 1940 als ‘tien verloren jaren’. He citeert met instemming Soetardjo die bij de toelichting op zijn petitie zei: ‘Laat men deze vrienden hand, die Nederland door de gematigde en loyale elementen in dit land wordt toegestoken, niet van zich afwijzen.’

Gouka maakt ook melding van de onverschilligheid bij de Nederlandsch-Indisch regering, de lauwe publieke reacties en van de spot en de hovaardige oordelen die de petitie in Nederland ten deel vielen. Abayasekere, dia al voor Gouka over Soetardjo publiceerde, haalt Soetardjo's waarschuwing uit 1937 aan dat—als de petitie verworpen wordt—de toekomst van Indie bevochten zou moeten worden. Maar de waarschuwingen van Soetardjo en ook die van de regeeringsadviseurs, Peekema en Gobeë, waren tevergeefs. Die twee Nederlands-Indische regering herhaaldelijk attent gemaakt op de groeiende frustaties bij de Indonesiers die bemerkten dat de niets meer van de Nederlanders te verwachten hadden. Maar desondanks bleven zowel de Nederlandse als Nederlands-Indische regering weigeren om de nationalistische beweging enig perspectief te bieden. Die weigering was typerend voor het 'immobilisatie' waarin het Nederlandse koloniale beleid was terecht gekomen."

Setiabudi Danudirdja atau E.F.E. Douwes Dekker, seorang perintis pergerakan politik dan penganjur nasionalisme Hindia ikut memberikan tanggapan tentang usulan petisi itu, yakni:

"In een brief van 10 maart 1938 reageerde Douwes Dekker daarop: 'Uw inzicht in de Soetardjo-petitie-actie is volkomen juist. Soetardjo is een patih (gewestelijkbestuurder) heel bekwam, onverdacht nationalist, persoonlijk gewaardeerd vriend van mij, maar hooggeplast ambtenaar, op de nominatie voor

regent. Zijn dominion-idee is een sort compromise tussen de reactief en de revolutionaren. Wij (de laatsten) verwierpen in openbare vergaderingen zijn idee geheel, met het doel (dat ook bereikt werd) om de midden partijen, zelfs de gecajoleerde Indo-beweging IEV (enkel koloniale buffer partij, waarnaar de weerzin van het Indonesische volk kan worden afgeleid) daarvoor te doen stemmen, niet omdat de petitie onze aandacht had, maar omdat dominion (zij het in verkeerd aspect) de banden zou kunnen losser maken en meer kans op ademen zou geven (..) Persoonlijk hecht ik net zo min mijn adhaesie aan deze 'oplossing' als U. De jonge Indonesiers zijn echter nog politiek-ongeschoolde. Het revolutionaren inzicht moet alle compromise met principen verwerpen. Dat is de weg van het liberalism" (Glissenaar 1999: 172, 173).

Perubahan di bidang ketatanegaraan itu jelas membawa perubahan hubungan kekuasaan di Hindia Belanda yang menganut pola pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Suatu pandangan yang bernada kekawatiran selain adanya analisis kritis tentang dampak perubahan itu disampaikan oleh P.J.A. Idenburg. Perubahan di kalangan pemerintahan tradisional (*Inlandsche Besturen*) menjadi fokus perhatiannya ketika ia menyatakan bahwa (1987: 161-163) “Di Hindia Belanda, suatu pembicaraan dengan kaum nasionalis tidak pernah terjadi, kecuali di dalam badan-badan perwakilan. Tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa tokoh dalam pembicaraan itu tidak memainkan peranan penting di dalam ketatanegaraan Hindia Belanda, juga sebelum

orang beralih pada badan-badan perwakilan menurut model Barat...Pembicaraan antara pemerintahan kolonial dengan para kawula negaranya di Hindia Belanda sudah lama ada. Hal ini memang menjadi sifat suatu sistem pemerintahan tidak langsung, seperti yang kita kenal. Di dalamnya termasuk hal, bahwa 'otoritas tradisional' (maksudnya para raja, pemuka rakyat dan para pejabat tinggi pemerintahan) bukan hanya berfungsi sebagai sambungan kekuasaan yang tertinggi, tetapi sedikitnya sama saja dengan suara penduduk pada aparat pemerintahan Hindia Belanda. Bahwa, seperti yang sudah sering dikatakan, pemerintahan kolonial Belanda telah dilaksanakan melalui perundingan dan upaya meyakinkan, pada umumnya dapat dikatakan tepat sekali. Hanya dengan sangat kurangnya luas sarana pemerintahan kita, terbukti bahwa faktor-faktor inilah, dan bukan paksaan, yang telah menentukan gaya kebijaksanaan kita... Para penyandang kekuasaan Indonesia yang tradisional tersebut, sekalipun watak mereka aristokratis, memiliki sifat terbuka pada penduduk. Hal ini merupakan suatu unsur yang wajar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Ini tentunya tidak berarti bahwa pemerintahan aristokratis yang demikian sampai menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi ini merupakan suatu hal, di mana suatu pemerintahan Eropa dengan cepat dapat dikendalikan. Karena para fungsionaris Indonesia pada umumnya memiliki informasi yang sangat baik tentang apa yang terjadi di daerahnya, demikian pula halnya dengan para pejabat pemerintahan Eropa, antara lain melalui perjalanan peninjauan keliling mereka, hubungan yang erat dengan penduduk, dan pada mulanya situasi pembicaraan yang bersinambung, yang memuaskan antara pihak pemerintah dengan pihak yang diperintah...Sistem pembicaraan ini, yang di dalamnya pemegang

otoritas tradisional bangsa Indonesia tampil sebagai kawan bicara dari penguasa kolonial, ternyata tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan lokal dan regional. Karena itu tidak cukup upaya yang dilakukan jika terdapat hal-hal yang menyangkut kasus-kasus umum, dan masalah-masalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok perorangan, yang secara psikologis dan sosial tidak termasuk dalam suasana yang sifatnya terbatas ini...Karena itu perlu didirikan perwakilan-perwakilan menurut cara Barat, yang di tempat ini tidak akan dilukiskan lebih lanjut. Kemudian, terdapat dua pertanyaan penting. Pertama, mengenai posisi ‘otoritas tradisional’, yang sudah sedemikian rupa menjadi inti dari hubungan kita dengan penduduk asli; kedua ialah mengenai masalah wewenang dan terutama susunan—menurut watak penduduk—dari perwakilan tersebut...Kerangka uraian ini tidak mengizinkan untuk menyajikan tinjauan yang luas tentang hal tersebut. Karena itu cukup dengan beberapa tanggapan saja. Dengan adanya perubahan pada pola kemasyarakatan —disebabkan oleh banyak keadaan dan dalam berbagai segi—posisi kekuasaan penyandang otoritas tradisional menjadi pokok persoalan. Perubahan-perubahan kemasyarakatan membawa serta hubungan-hubungan dan tugas-tugas lainnya. Kelompok pemegang kekuasaan pemerintahan yang telah ada—antara lain karena pendidikan yang lebih tinggi—hanya sebagian saja dapat disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang sedang berubah. Tetapi ciri kekuasaan, yang sedemikian rupa terpaut pada situasi asalnya, rupanya juga telah berubah. Timbul kelompok-kelompok besar orang Indonesia yang menganggap sudah tidak terwakili lagi oleh para penyandang otoritas tradisional dan yang menghendaki partisipasi tersendiri dengan persoalan-persoalan pemerintahan umum. Juga telah timbul suatu kelompok kaum

intelektual yang merasa dirinya terpanggil untuk tugas-tugas kepemimpinan, yang memiliki watak yang sangat berlainan dari yang telah disesuaikan dengan otoritas tradisional dalam suatu tatanan kolonial...Sekalipun kekuasaan dari kaum intelektual itu masih tetap besar di kalangan kelompok penyangga otoritas ini pun telah berkembang kesadaran, bahwa dengan situasi kemasyarakatan yang sedang berubah itu, tempat mereka di dalam kenegaraan harus pula berubah. Ada beberapa di antara mereka yang mempunyai hasrat demikian. Di samping itu, kita telah melihat bahwa banyak kaum muda dari kelas ini tidak bersedia lagi memiliki ambisi menyanggah fungsi-fungsi orang tua mereka, yang sudah sedemikian rupa terkait kepada aparat kekuasaan kolonial.”

Pandangan yang lebih seimbang diberikan oleh C. Fasseur (1982: 103), yang menjelaskan bahwa

“To be sure, there was understanding and sympathy for the ‘indigenous movement.’ Governor-general Jonkheer A.C.D. de Graeff had ‘respect’ for the nationalist ideals, and had said as much when accepting his office in 1926: ‘I should not be a right-minded Dutchman if it were otherwise.’ But the Dutch as a whole were firmly convinced that this nationalism had to be properly channeled and that it would be many years before power could be transferred to the indigenous majority. This attitude lay at the root of the haughty rejection in 1938 of the Soetardjo petition, drawn up by a number of moderate nationalists, which called for the convocation of a conference with the ultimate aim

of gradually granting self-government to the Indies within the framework of the kingdom. The minister for the Colonies, Welter, took the view (and this was shared by the government of the East Indies) that the nationalists would do better to co-operate with the Dutch authorities in advancing the spiritual and material development of the Indies; political autonomy must grow as 'the naturally ripening fruit' of the social and economic development of the country. The desire for political autonomy and independence, it was believed, existed only in 'an extremely thin stratum of intellectuals.' This response completely ignored international developments, among them the granting by America to the Philippines of self government in 1935 and the simultaneous promise that the country would become completely independent ten years later. It is conceivable that this development inspired those who were behind the Soetardjo petition."

Penyesalan selalu datang terlambat. Atau mungkin juga tidak lebih dari sekedar suatu kekeliruan kalkulasi politik, namun membawa akibat fatal. Kebenaran ungkapan itu tampak segera setelah Negeri Belanda dikuasai oleh NAZI Jerman. Setahun setelah itu, dalam keadaan pengasingan di London, Inggris, Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina dan pejabat lainnya menyampaikan janji pertama tentang reorganisasi besar-besaran Kerajaan Belanda dan wilayah bawahannya seperti Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao, segera setelah perang berakhir. Pada tanggal 16 Juni 1941, Gubernur Jenderal Hindia Belanda

menyampaikan, *“Immediately after the liberation of the mother country, the adaptation of the structure of the Kingdom to the demands of the times will be considered, the internal constitutional form of the overseas territories constituting an integral part of the program.”* Tidak beberapa setelahnya, Ratu menjanjikan bahwa suatu pembicaraan akan dibuka untuk memberikan masukan kepada Kerajaan tentang hubungan antar bagian Kerajaan satu dengan lainnya dan tentang perbaikan Undang-undang Pemerintahan dari keempat wilayah itu. Rincian konperensi itu diumumkan pada bulan Januari 1942, yaitu 15 utusan Negeri Belanda, 15 dari Hindia Belanda dan masing-masing 3 dari Suriname dan Curacao. Sepuluh dari Hindia Belanda diangkat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Rakyat, sedangkan 5 lainnya ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda secara penuh. Pidato Ratu tertanggal 6 Desember 1942 memperkuat keputusan itu, yakni *“I visualize, without anticipating the recommendations of the future conference, that they will be directed towards a commonwealth in which the Netherlands, Indonesia, Surinam and Curacao will participate, with complete self-reliance and freedom of conduct for each part regarding its internal affairs, but with the readiness to render mutual assistance.”* (Schiller 1944: 478)

Kembali, tujuan ganda konperensi dinyatakan, yaitu rekomendasi terhadap hubungan di masa mendatang dari keempat bagian Kerajaan Belanda dan nasehat untuk otonomi penuh masing-masing wilayah bagian dalam kerangka Kerajaan Belanda. Sejauh yang diketahui, tidak ada anggota delegasi yang ditetapkan, apalagi rincian lebih lanjut mekanisme konperensi itu. Tentang masa depan Hindia Belanda adalah

“In view of the significance of Indonesia, as it is

now officially designated, in the post-war Pacific area, it is opportune to consider the form this autonomous state might take, and the means by which complete autonomy can be achieved, in the light of the steps towards self-government in the past. A brief survey of the place of Indonesia in the Kingdom is necessary to a full understanding of the subject matter of this article."

Wujud upaya-upaya menuju ke arah reorganisasi itu di Hindia Belanda adalah jajak pendapat di kalangan rakyat jajahan sebagaimana yang dilakukan dan dikumpulkan oleh laporan suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Visman (Schiller 1944: 478)

Namun, bagaikan menjaring angin, seruan Ratu Belanda itu berlalu begitu saja karena perubahan zaman dan saat yang sudah terlambat. Amry van den Bosch (1950: 2) menggambarkaninya sebagai berikut:

"Queen Wilhelmina in a radio address from London on December 7, 1942, again promised a conference after the war to consider constitutional reforms. The declaration on this occasion was more specific as to the expected nature of the reforms. The Queen visualized 'a commonwealth in which the Netherlands, Indonesia, Surinam, and Curacao will participate, with complete self-reliance and freedom of conduct for each part regarding its internal affairs, but with readiness to render mutual assistance.' It is interesting to note that the term 'Round Table Conference' was used in the address. Unfortunately, Indonesia was now under Japanese

occupation; if any Indonesians heard the address it probably made little impression on them.”

Dalam kaitan dengan analisis van den Bosch, pengamatan C. Smit tampaknya menarik untuk diungkapkan. Ia mengulas (1952: 18, 19) bahwa

“ De petitie werd op 1 October 1936 bij de regering in Den Haag ingediend. Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd zij op grond van overwegend formalistische bezwaren verworpen. Volgens minister Welter eiste staatsrechtelijke hervorming langdurig vijlen en polijsten en was het daarom niet voldoende gezamenlijk om een tafel te gaan zitten. Bovendien, Aldus de minister, was Indonesie geen kolonie meer, want in de grondwet van 1922 was die benaming vervallen! Van de Kamerleden achtte Bajetto het striven naar een dominion-status, gelijk hij in de petitie ontdekte, ten zeerste afkeurenswaardig, Van Poll Indonesie verdure staatkundige ontplooiing “nog niet rijp” en vreesde Joekes door tegemoetkoming aan de petitie verwachtingen te wekken, welke voor in williging niet vatbaar waren. De pogingen der verdedigers der petitie mochten niet baten; zij werd voor kennisgeving aangenomen. Op 16 November 1938 kwam van de zijde der Nederlandse regering de afwijzende beschikking af, welke onder de Indonesische leiders een diepe teleurstelling veroorzaakte. Zij heeft ver strekkende gevolgen gehad. Ware de petitie-Soetardjo destijds aangenomen, dan zou onnomelijk veel leed en kwad

zijn voorkomen.”

Pandangan pengimbang tentang latar belakang, alasan dan dampak di balik penolakan itu disampaikan oleh W.H. Helsdingen. Ia menyatakan bahwa (1987: 232, 236, 237) “Penolakan terhadap petisi Soetardjo yang tidak menghentikan dorongan-dorongan berulang kali ke arah perubahan, yang semakin bertambah sejak Negeri Belanda diduduki oleh Jerman, tercetuskan dalam beberapa mosi yang lebih luas sifatnya dari pihak anggota-anggota pribumi dalam Dewan Rakyat. Akibatnya ialah, didirikannya ‘komisi untuk mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan’ dalam bulan September tahun 1940. Komisi itu bertugas antara lain meneliti hasrat, usaha-usaha dan pendapat-pendapat yang hidup di berbagai kelompok masyarakat Hindia Belanda di bidang perkembangan ketatanegaraan dan untuk memberikan laporan tentang masalah tersebut. Dengan sengaja tidak diminta untuk menyampaikan usul-usul, karena hal ini pun tidak dapat dibahas selama Negeri Belanda belum dapat dibebaskan...Pemerintah Belanda dan Hindia Belanda dan hampir semua tokoh pimpinan, telah memiliki pandangan ke suatu hari depan. Di dalamnya si kulit putih dan kulit coklat akan bekerja bersama-sama dalam suatu keadaan yang harmonis dalam fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan untuk kesejahteraan neegri. Ke arah itulah secara sadar usaha ditujukan. Tujuan yang jujur ini tidak dinilai karena ia menjadi kenyataan. Banyak faktor yang telah membuat frustrasi tujuan tersebut. Sebagian datang dari luar dan suatu pengaruh yang mencakup seluruh dunia, sebagian memiliki ciri-ciri internal. Terdapat kekurangan perasaan bersatu; sebagian besar nasionalis pribumi yang sedang tumbuh telah berupaya dengan daya yang meningkat menuju kemerdekaan, suatu kelompok

nasionalis Belanda berkeinginan untuk mempertahankan yang ada selama mungkin untuk kepentingan Belanda. Tidak disangsikan terdapat orang-orang kulit putih yang telah menyebabkan timbulnya perasaan amarah. Tetapi Pemerintah Hindia Belanda dan mayoritas pejabat dan kepada mereka itulah kebijaksanaan Belanda harus dinilainya selalu dengan jujur berjuang untuk kesejahteraan penduduk...Apakah Belanda telah terlambat dengan rencana perkembangan? Barangkali. Tetapi baiklah orang berpikir, bahwa setiap negara memiliki zamannya. Orang tidak boleh menilai negara-negara yang sedang berada dalam masa perkembangan, untuk menyamakannya atau dengan tolok ukur yang sama. Tambahan pula, Belanda dari abad kesembilan belas bukanlah Belanda dari abad kedua puluh. Orang jangan meletakkan ukuran masa lampau pada yang sekarang...Apakah tempo perkembangannya terlalu lambat? Barangkali. Suatu proses pertumbuhan memerlukan waktu apabila ia ingin menjadi kokoh. Derap yang terlalu cepat menyebabkan negara baru menjadi hancur. Di Hindia Belanda, pembaharuan yang satu segera menyusul yang lainnya; sayang sekali bahwa krisis ekonomi tahun 1930 dalam sekali pengaruhnya dan tidak ada bandingannya di Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan keterlambatan, dan pendudukan Jepang telah mematahkan perwujudan usaha kita dengan tiba-tiba. Apakah orang dapat mempermasalahkan pemerintah bahwa kebijaksanaannya yang berkenan dengan pengangkatan-pengangkatan, sebagai sesuatu yang lain yang seharusnya dipegang kokoh dan terlalu banyak yang diserahkan para kepala dinas? Barangkali. Tetapi ketelitian yang lebih besar mengenai mengenai hal itu tidak akan mempengaruhi gelombang besar nasionalisme. Apakah orang harus memperkenalkan dengan paksa lembaga-lembaga demokrasi Barat di Hindia Belanda?

Pasti tidak. Kita justru berusaha keras untuk menciptakan lembaga-lembaga dengan bentuknya dan cara kerjanya sendiri dan membiarkannya tumbuh sesuai dengan masyarakat Hindia Belanda yang beranekawarna coraknya. Kita telah dengan sengaja mencegah untuk memasukkan bentuk-bentuk lain dengan menyalinnya dari apa yang ada di Negeri Belanda atau negeri-negeri lainnya. Apabila orang sudah kembali menjadi sadar dan akan menimbang-nimbang penulisan sejarah tanpa praduga satu sama lainnya mengenai yang telah terjadi, maka neraca kebijaksanaan Belanda, sekalipun kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, dapat melihatnya kembali dengan perasaan yang tenang. Indonesia akan—apabila telah didapatnya kembali suatu hubungan kekuasaan yang normal—dengan kuatnya meneruskan membangun perkembangannya atas dasar fondasi-fondasi yang telah diletakkan dengan kokoh oleh kebijaksanaan Belanda.”

Zaman pendudukan Jepang membawa perubahan besar di Indonesia, di satu sisi menimbulkan akibat yang merusak (destruktif) namun di sisi lainnya menyebabkan rasa percaya diri (*self esteemed*), yang tergerus selama masa penjajahan sebelumnya. Keperkasaan Jepang menghancurkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang terus menerus membayangkan bahwa rakyat jajahannya adalah yang paling ramah (*het zachste volk*) dan sangat mengharapkan mereka kembali. Bayangan itu hancur berantakan ketika pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berada dalam pengasingan di Australia kembali hendak memulihkan kekuasaan jajahannya di Indonesia dengan bantuan Inggris, yang menemukan bukan hanya suatu negara dan bangsa yang merdeka, namun juga tekad dan semangat mempertahankan proklamasi kemerdekaan baik di meja perundingan melalui diplomasi maupun di kancah pertempuran melalui cara bersenjata

di tengah-tengah keterlibatan internasional dalam naungan mediasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Uni Sovyet, Ukraina, Australia dan lainnya.

Takdir, Kesempatan dan Pilihan

Perspektif terhadap kehidupan masa kini dan masa lampau dapat dipilah menjadi Takdir (*Destiny*), Kesempatan (*Chances*) dan Pilihan (*Choices*). Pandangan berlandaskan pada Takdir menyangkut keyakinan dan anggapan bahwa dalam kehidupan, perjalanan, arah dan nasib setiap orang telah ditentukan. Kemudian, pandangan Kesempatan berkenan dengan peluang-peluang dalam kehidupan yang menentukan jalan hidup dan nasib. Peluang tidak selalu muncul bahkan ada yang mengatakan bahwa kesempatan hanya datang sekali, walau ada yang meyakini kesempatan kedua (*second chance*). Kejelian melihat dan pemanfaatan kesempatan yang datang menjadi penting untuk meraih keberhasilan. Hidup adalah pilihan merupakan perspektif yang berkaitan dengan penentuan pilihan dalam upaya memperoleh keberhasilan dalam segala hal. Apabila perspektif Takdir meletakkan faktor eksternal yang menentukan (*providensia*), pada perspektif Kesempatan terdapat pertimbangan tentang pengaruh faktor luar dan peranan individu, kemudian perspektif Pilihan menekankan pada peranan seseorang dalam memilih hal-hal yang baik dan perlu dalam kehidupannya. Perspektif yang mulai berkembang dewasa ini adalah bahwa peluang dan pilihan harus diciptakan, karena keduanya tidak akan datang dengan sendirinya apalagi di tengah-tengah zaman kemajuan yang penuh dan persaingan dan perlombaan yang tidak selalu berlangsung adil dan sehat.

Soetardjo tumbuh dan berkembang menjadi matang terutama dalam ranah pemerintahan dan politik di kanc

kolonialisme dan di bawah pengaruh tradisionalisme. Tak pelak, ia masih mempercayai adanya dan keajaiban takdir. Namun, ia tidak membelenggu diri dengan keyakinan tradisional yang suprarasional dan semu itu dalam menanggapi perubahan dan perkembangan yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ia jeli melihat kesempatan dan peluang untuk mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Ia mengambil pilihan-pilihan yang ternyata ikut mewarnai perjalanan dan perkembangan pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan, seperti terjun sebagai priyayi pangreh praja ketimbang politisi, pamrih terhadap nasib rakyat kaulanya dan mengajukan petisi untuk memperoleh berpemerintahan mandiri sebagai awal menuju kemerdekaan penuh. Prakarsa dan gerakannya tidak memperoleh hasil yang diharapkan, namun pengaruh dan dampaknya tampak jelas pada cakrawala politik kolonialisme, baik di kalangan pergerakan nasional Indonesia dan di lingkungan pemerintahan jajahan.

Mengenai kebijakan kolonial dalam rentangan masa, sejak abad ke-19 memperlihatkan kesempatan yang hilang (*missed opportunity*) atau pilihan yang tidak diambil (*missed choices*). Kesemuanya memperlihatkan pola yang tidak jauh berbeda, yakni kepentingan kolonialisme yang selalu berdasarkan dan demi kekuasaan negeri induk dan mengabaikan bahkan jikalau perlu menekan kepentingan wilayah jajahan. Supremasi negeri induk berada di atas segala-galanya yang berkenan dengan negeri jajahan. Pandangan kolonialistik terhadap wilayah jajahan adalah sebagai penghasil bahan mentah dan baku untuk perekonomian negeri induk dan tempat pelemparan komoditas produksi negeri induk. Negeri jajahan adalah sumber penghasilan dan keuntungan untuk perekonomian negeri induk yang digunakan sepenuhnya untuk perkembangannya (*batig slot*). Kalau pun ada keuntungan

yang kembali ke negeri jajahan, tidak lebih berupa pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan kelangsungan kekuasaannya. Pengenalan pendidikan modern, termasuk pengetahuan mondia, tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang berkemampuan untuk dilibatkan dalam perkembangan dan pengembangan kolonialisme di tengah-tengah dinamika internasional yang sarat dengan persaingan dalam gerak dan geliat kapitalisme dan imperialisme. Dalam konteks itulah aspirasi emansipasi yang berkembang ditempatkan di bawah pengawasan dan pengelolaan yang penuh dengan kewaspadaan dan tindakan tegas walau tidak selalu keadaan dan perkembangannya dapat dikuasai seluruhnya.

Politik kolonialisme senantiasa bersifat sepihak, memaksa dan menindas. Kebijakan kolonial kerap tidak berada di atas pengamatan dan perhitungan yang matang terhadap berbagai perkembangan dan keadaan, seperti perubahan lingkungan mancanegara (*international environment shifts*). Perkembangan kapitalisme global menggerus struktur kolonialisme yang hirarkis dan diskriminatif hingga menjadi lapuk dan usang. Dalam perkembangan kapitalisme modern yang penuh (*full capitalism*), kolonialisme teritorial menjadi beban. Kapitalisme penuh memerlukan unsur ekonomi yang berdayaguna tinggi yang tidak dapat diperoleh melalui jaringan kolonialisme. Dekolonisasi pasca Perang Dunia II yang diikuti oleh kemunculan berbagai negara dan bangsa baru yang di sisi lainnya memperlihatkan perkembangan pesat bangsa dan negara mantan kolonialis. Sementara, banyak negara dan bangsa yang mengalami dekolonisasi justru menghadapi berbagai hambatan dan kendala untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya terutama kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, generasi Belanda dewasa ini dapat bernafas

lega karena tidak memikul beban (*burden*) dan mungkin kutukan (*curse*) kolonialisme sehingga lebih mudah untuk memulihkan keadaan perekonomian, melalui bantuan *Marshall Plan* pasca Perang Dunia II, untuk melangkah ke gerbang kemajuan dan kemakmuran. Sementara Imperialisme kolonialisme beralihrupa menjadi Imperialisme hegemoni dan dominasi dalam perluasan pasar bebas dan demokratisasi, yang tetap menjadikan bangsa dan negara yang baru merdeka sebagai target dan sasarannya.

Sejarah sebagai peristiwa tidak pernah dan tidak mungkin berulang karena bersifat unik dan terjadi sekali. *Gedane zaken nemen geen keer*, demikian pepatah Belanda. Apa yang telah terjadi atau masa lampau (*the past*) tidak dapat dipentaskan atau dihadirkan kembali di masa kini, namun dapat dipikirkan berulang-ulang atau hadir berkali-kali dalam pemikiran. Juga masa lampau kerap diceritakan berkali-kali, didiskusikan kembali dan ditulis ulang. Dalam konteks itu, Sejarah berulang. Namun pola yang dilalui oleh masa lampau bukanlah berbentuk lingkaran yang tiada berujung dan berulang-ulang, melainkan sebagai dialektika yang memiliki arah dan perbedaan kualitas dalam setiap tahapnya.

Kearifan di balik ungkapan Sejarah Berulang adalah tidak hanya harus jeli melihat peluang dan pilihan, melainkan juga jangan terantuk pada batu yang sama atau mengulangi kesalahan yang serupa. Pelajaran dari masa masa lampau memberikan rambu-rambu, kesadaran dan kearifan agar tidak bertindak keliru apalagi mengulang kekeliruan. Dalam upaya membangun bangsa dan negara dewasa ini di tengah-tengah deru dan dinamika internasional yang penuh dengan persaingan dan perlombaan terutama di bidang kemajuan teknologi dan ekonomi, refleksi sejarah diperlukan untuk menggali potensi yang belum

diberdayakan sepenuhnya dan warisan masa lampau yang masih ada hingga kini yang sudah tidak sesuai lagi dan menjadi hambatan serta beban untuk melangkah memasuki masa mendatang.

Menarik untuk menyimak makna yang tertera dalam kutipan berikut, “Apa yang ada dalam kepala Soetardjo adalah menciptakan sebuah hari depan yang lebih baik bagi Hindia, terlepas dari berhasil atau tidaknya rencana tersebut. Kendati gagal, bahkan dicap mengemis pada pemerintah kolonial, petisi Soetarjo dan kampanye menuntut ‘Indonesia Berparlemen’ adalah jalan menuju perubahan bagi Hindia Belanda tanpa menumpahkan darah. Perubahan yang menunjukkan kecerdasan bangsa Indonesia. Perubahan bagi demokrasi Hindia. Keinginan berparlemen adalah keinginan yang sejalan dengan semangat demokrasi, kendati itu diminta oleh rakyat jajahan. Sekiranya petisi dikabulkan Hindia akan mengalami proses demokratisasi lebih cepat daripada sekarang. **Mungkinkah 9 Juli, tanggal dibacakannya petisi Soetardjo untuk pertama kali, dijadikan sebagai momentum demokrasi bangsa Indonesia yang tengah belajar lebih banyak apa itu demokrasi. Inilah cara mengenang Soetardjo dan idenya yang tertuang dalam petisinya yang menggemparkan Hindia dan Negeri Belanda.**” (http://www.kompasiana.com/maspets/soetardjo-petisi-radikal-kaum-moderat_5500220d813311fb16fa7301)

Dalam kehidupan politik, baik pada alam kolonialisme maupun alam kemerdekaan, relasi kuasa memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern yang berlandaskan pada kepentingan (*interests*) dan distribusi kesejahteraan melalui penguasaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi (*economic resources*). Pola relasi kuasa kolonial (*colonial power relation patterns*) bukannya tidak mungkin tetap bertahan di masa

kemerdekaan ketika distribusi kesejahteraan sosial ekonomi tidak merata mengalir ke dalam kehidupan masyarakat yang tersebar (*dispersed*) di berbagai daerah karena sebagian besar tertahan di lingkungan penguasa yang dilegitimasi terutama dengan jargon dan politik pembangunan nasional. Cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kemajuan, kesetaraan dan tujuan luhur lainnya dicanangkan pada masa kebangkitan nasional untuk diwujudkan pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah yang utama namun bukan segala-galanya karena masih banyak cita dan tujuan yang harus diwujudkan demi kepentingan kesejahteraan kehidupan masyarakat atau rakyat.

Kebangkitan emansipasi, pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan merupakan rangkaian dalam proses modernisasi, demokratisasi, otonomisasi dan birokratisasi yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata pada saat ini dan masa mendatang. Semangat dan tekad berbangsa, bertanahair dan bernegara dalam rasa persatuan, kesatuan dan penyatuan Indonesia yang berasal dari berbagai perbedaan, keragaman dan kemajemukan, telah disemai, tumbuh dan dikokohkan sejak tahun 1908, 1928 dan seterusnya seyogyanya menjadi tak retak dan tak lekang dalam gerus, derap dan dinamika gelombang perkembangan, perubahan serta kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 2009. *Indonesia towards Democracy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Anderson, Benedict Richard O’Gorman. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944—1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aritonang, Jan S.2010. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ave, Jan B. 1989. “‘Insulinde’ and ‘Nusantara’: Dotting the I’s and Crossing the T.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, deel 145, 2/3de Afl., 1989, hal. 220-234
- Baudet, H & I.J. Brugmans (peny.).1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- van den Bosch, Amry. 1950 . “The Netherlands-Indonesian Union”. *Far Eastern Survey*, January, 11, vol. XIX NO. 1.
- Booth, Anne. 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunities*. St. Martins Press.
- Burgers, Herman. 2010. *De Garoeda en de Ooievaar: Indonesië van Kolonie tot Nationale Staat*. Verhandelingen van het KITLV 266. Leiden: KITLV Uitgeverij.

- Dick, Howard. 2000. "Industrialisasi Abad ke-19: Kesempatan yang Hilang," dalam: Thomas J. Lindblad (ed.). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Elson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi.
- Fasseur, C. 1982. "A Cheque Drawn on a Failing Bank: the Address Delivered by Queen Wilhemina on 6th/ 7th December 1942," *The Low Countries History Yearbook Acta Historiae Neerlandica XV*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Friend, Theodore. 1988. *Blue-Eyed Enemy: Japan against the West in Java and Luzon 1942—1945*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Glissenaar, Frans. 1999. *DD Het Leven van EFE Douwes Dekker*. Hilversum: Verloren.
- Gouda, Frances. 1995. *Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies 1900-1942*. Jakarta: Kuala Lumpur: Equinox Publishing.
- van Helsdingen, W.H. 1987. "Perkembangan Ketatanegaraan," dalam: H. Baudet & I.J. Brugmans (peny.). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- , 1946. *De Plaats van Nederlandsch-Indie in het Koninkrijk. Stemmen van Overzee*. Leiden: E.J. Brill.

- Henley, David. 1993. "Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa." *Indonesia, The East Indies and the Dutch*, no. 55, April 1993.
- Idenburg, P.J.A..1987. "Jawaban Belanda atas Nasionalisme Indonesia," dalam: H. Baudet & I.J. Brugmans (peny.). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.
- Jones, Guno R. 2007. *Tussen Onderdanen, Rijksgenoten, en Nederlander: Nederlandse Politici over Burgers Oost en West en Nederland, 1945-2005*.
- de Jonge, Huub.2004. "Abdul Rahman Baswedan and the Emancipation of the Hadramis in Indonesia," *Asian Journal of Social Science*, Special Focus: Arab Communities and Networks in South and Southeast Asia Vol. 32, No. 3.
- Kartohadikusumo, Setiadi.1990. *Soetardjo: "Petisi Soetardjo" dan Perjuangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Leirissa, R.Z. 2006. *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- , *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Madinier, Remy. 2015. *Islam and Politics in Indonesia The Masyumi Party between Democracy and Integration*. Singapore: NUS Press.
- Marihandono, Djoko (ed.). 2016. *Sisi Lain Kartini*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Mrazek, Rudolf. 2002. *Engineers of Happy Land: Technology*

and Nationalism in a Colony. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900—1942*. Jakarta: LP3ES.

Nordlinger, Eric. 1977. *Soldiers in Politics: Military Coup and Government*. Prentice Hall.

Notosusanto, Nugroho (ed.). 1991. *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Onghokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto (eds).
Tt. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka

Poeze, Harry A. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600—1950)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

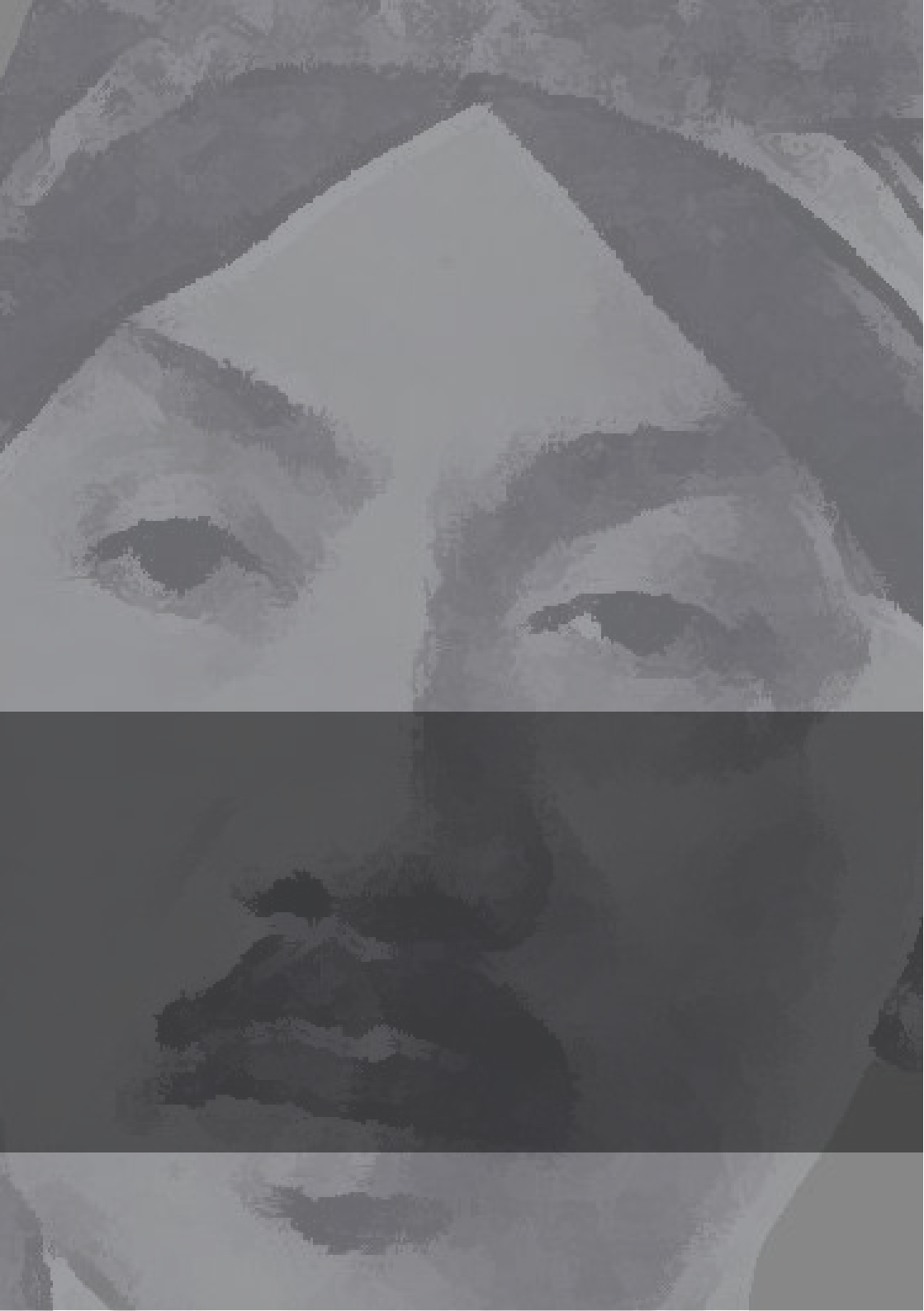
Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004*. Jakarta: Serambi.

Schiller, Arthur A. 1944. “Autonomy for Indonesia,” *Pacific Affairs*, Vol. 17, No. 4.

Sluimers, Laszlø. 1998. “Review.” *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 29, No. 2

Smit, C. 1952. *De Indonesische Quaestie: De Wordingsgeschie-*

- denis der Souvereiniteitsoverdracht*. Leiden: E.J. Brill.
- Smit, Herman. 2006. *Gezag is Gezag: Kanttekeningen bij de Houding van de Gereformeerden in de Indonesische Kwestie*. Hilversum: Verloren.
- Tangkilisan, Yuda B. 2015. "Indonesia Mulia: Visi Dokter Soetomo tentang Kesejahteraan Rakyat, Moral Ekonomi, dan Modal Sosial," *Sipatahoenan: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, Volume 1(1).
- . 2015. "R.H.O.S Tjokroaminoto (1882—1934): Semaian Benih Pergerakan Kebangsaan & Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dalam Kearifan dan Teladan Islam," Tim Museum Kebangkitan Nasional dkk. *H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan & Kemerdekaan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kemendikbud.
- . 2013. Beberapa Catatan tentang Kausalitas antara Perang Diponegoro (1825-1830) dan Penerapan Sistem Tanam Paksa (1830-1870). *Prosiding International Conference Kebinekaan dan Budaya*, Jakarta.
- . Sekutu atau Kaula: Analisa isi Petisi 31 Maret 1877 di Minahasa. Jakarta: Skripsi S-1 Jurusan Sejarah FSUI, 1987
- Tarling, Nicholas. 1988. *A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia 1941-1945*. London: Hurst & Company.
- van Zanden, Jan Luiten, Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas & KITLV Jakarta.



Tinjauan Buku *Soetardjo:* *“Petisi Soetardjo”* *dan Perjuangannya*

Penulis: Setiadi Kartohadikusumo

Penerbit: Pustaka Sinar Harapan (1990)

Jaka Perbawa



Profil Wedana di Jawa

(Foto koleksi KITLV)

Desa: Inspirasi Perjuangan

Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Kunduran Blora (Jawa Tengah) pada 22 Oktober 1890. Ayahnya bernama Kiai Ngabehi Kartorejo seorang Wedana distrik Ngaben Blora.

Oleh pengasuhnya Soetardjo kecil diajarkan kebiasaan-kebiasaan positif, yaitu seperti *nembang Jawa*, bermain gamelan, mendalang, membaca dan menulis huruf Jawa serta mengetahui dongeng-dongeng cerita rakyat Jawa. Hal-hal yang diajarkan tersebut mengandung nilai-nilai luhur kearifan lokal yang mengandung pesan-pesan moral di dalamnya.

Setelah berusia 4 tahun, Soetardjo mulai bergaul dengan anak-anak desa yang berlatar belakang orang biasa. Hal ini berbeda dengan dirinya yang berasal dari golongan bangsawan. Kedekatan Soetardjo dengan lingkungan sekitar membentuk karakter Soetardjo yang sangat mencintai dan memperhatikan lingkungan desa. Kematangan berpikir Soetardjo yang sejak kecil dekat dengan lingkungannya membuatnya peka terhadap lingkungan sekitar.

Kedekatan Soetardjo dengan lingkungan desa beserta isinya dikarenakan Soetardjo merasakan bahwa orang desa memiliki watak yang baik, ikhlas sepenuh hati, penuh kasih sayang kepada sesama, setia kawan, suka dan rela menolong, murah hati, jujur, tidak suka berbohong dan rendah hati. Hal inilah yang membuat Soetardjo menyukai desa beserta isinya. Ia menyadari bahwa desa telah mengajarkan nilai-nilai positif yang mewakili sosok masyarakat Indonesia. Hal itu tergambarkan secara alami dari perilaku orang-orang di desa.



Profil Rakyat Jelata Blora 1924 (*Foto koleksi KITLV*)

Pada usia 9 tahun Soetardjo mulai bersekolah di sekolah Jawa di desa Ngawen. Pada saat itu berlaku peraturan bahwa hanya putra bupati yang boleh bersekolah di sekolah Belanda. Namun, karena ada perubahan peraturan, anak seorang wedana pun dapat bersekolah di sekolah Belanda. Akhirnya Soetardjo dapat bersekolah di sekolah Belanda di Blora. Akan tetapi, karena kecintaannya dengan desanya Soetardjo berusaha untuk mengatur jadwalnya agar dapat pulang seminggu sekali ke desanya agar tidak terlepas dari lingkungan yang ia cintainya. Hubungan inilah yang membuat Soetardjo banyak bergaul dengan semua kalangan tanpa membedakan kelompok atau golongan dari mana mereka berasal. Hal ini yang pada akhirnya membuat sosok Soetardjo begitu memperhatikan potensi sebuah desa beserta isinya. Soetardjo kecil beruntung memperoleh fasilitas yang didapatkannya, yang sebelumnya terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu hanya anak-anak dari golongan terpandang saja yang berhak sekolah di sekolah Eropa.

Di sekolah Belanda tersebut Soetardjo hanya sampai kelas lima karena harus mengikuti ayahnya yang dipindahtugaskan ke Kawedanaan Banjar Kabupaten Tuban. Pada saat berada di Tuban inilah ayah Soetardjo meninggal dunia sebelum Soetardjo sampai menamatkan sekolahnya. Soetardjo sendiri berhasil menamatkan sekolahnya dalam waktu tujuh tahun pada 1906.

Selanjutnya Soetardjo pada 1907 melanjutkan sekolah menengahnya ke Sekolah Menengah Pamong Praja OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandse Ambtenaaren*) di Magelang. Pada saat bersekolah di Magelang inilah Soetardjo mulai mengenal dunia pergerakan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, karena pada 1909 diadakan pertemuan Jawa di sekolah OSVIA Magelang yang dihadiri tidak saja oleh siswa OSVIA namun juga oleh pegawai-pegawai pamong praja se-Kabupaten

Magelang. Maksud pertemuan ini adalah untuk meresmikan cabang perkumpulan Boedi Oetomo.

Benih-benih kecintaan pada desa membuat Soetardjo merasa tidak ingin berada jauh dari bidang yang diminatinya. Dengan bersekolah di sekolah pamong praja, Soetardjo merasa ilmu yang akan didapatkannya dapat diterapkan di daerah asalnya, karena dengan menjadi pamong praja berarti dirinya dapat menjadi seorang birokrat yang tetap berada di sekeliling desanya.

Pada saat Soetardjo bersekolah di OSVIA bertepatan dengan bangkitnya organisasi-organisasi pergerakan, seperti halnya organisasi Boedi Oetomo yang mulai merambah ke sekolah-sekolah untuk kaum bumiputera. Rumitnya birokrasi di daerah-daerah dirasakan oleh Soetardjo. Oleh karena itu, ia berniat melakukan reformasi. Kaum birokrat yang tidak pro rakyat harus diubah perlahan-lahan, sehingga Soetardjo merasa mendapat kecocokan dengan corak perjuangan yang ditawarkan oleh Boedi Oetomo.

Soetardjo yang pada waktu itu masih berusia 19 tahun secara aklamasi diangkat menjadi Ketua Cabang Boedi Oetomo Magelang hingga pertengahan 1911. Sedangkan yang menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Boedi Oetomo saat itu adalah Bupati Karanganyar R.T.A Tirtokoesoemo. Perhimpunan Boedi Oetomo didirikan pertama kali pada Kongres Pertama di Yogyakarta pada 3 – 4 Oktober 1908. Tujuan dari perhimpunan Boedi Oetomo adalah memajukan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat di Jawa pada khususnya. Lahirnya perkumpulan ini diharapkan berfungsi untuk menghimpun seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kala itu yang mulai menghangat dan terbakar semangat nasionalismenya sebagai akibat dari peristiwa penting kemenangan Jepang atas Rusia di Korea.

Di usia yang masih belia, berkat kecakapannya Soetardjo diberi



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

amanat untuk memimpin organisasi Boedi Oetomo cabang Magelang. Sebagai organisasi yang menghimpun generasi muda priyayi yang peduli akan nasib kaum pribumi yang masih jauh tertinggal taraf kehidupannya, Boedi Oetomo mendapat tempat di hati sanubari kaum terpelajar saat itu. Geliat paham kebangsaan dan nasionalisme yang didapatkan dari terbitan koran-koran lokal dan manca negara menjadi pemicu munculnya organisasi-organisasi baru. Pemikiran baru ini menjadikan tekad kaum cendekia semakin tebal dalam memperjuangkan nasib bangsanya yang masih dalam cengkeraman penguasa asing. Fenomena ini merupakan momentum dimulainya babak baru perjuangan untuk menentukan nasib bangsanya.

Pamong Praja Pengabdi Negeri

Setelah lulus sekolah, Soetardjo kemudian menjadi pegawai negeri di kantor Residen Rembang. Pada 19 Oktober 1911 ia

tercatat sebagai pembantu juru tulis. Baru dua bulan Soetardjo bekerja sebagai pembantu juru tulis, ia diangkat menjadi juru tulis jaksa pada 23 Desember 1911. Lima bulan kemudian, ia diangkat menjadi mantri di Kabupaten Rembang.

Aktivitas sebagai mantri kabupaten juga membuat Soetardjo memiliki waktu luang untuk mendidik para pemuda di wilayahnya seperti sepak bola, kesenian Jawa, pemberantasan buta huruf,



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

dan kepanduan. Cita-citanya senantiasa berada dekat dengan masyarakat desa membuat Soetardjo dapat leluasa melakukan aktivitas yang disukainya. Sebagai seorang birokrat, Ia dapat melihat kekurangan-kekurangan yang melanda tempatnya bertugas. Kesempatan yang sangat kecil bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan aktivitas positif lainnya menginspirasi Soetardjo untuk memberikan pelatihan cuma-cuma guna meningkatkan kualitas pemikiran rakyatnya. Pendidikan dan keterampilan menjadi kunci bagi seorang birokrat untuk menerapkan kebijakan-kebijakan strategis lainnya di daerah tempatnya mengabdikan, karena merupakan hal yang percuma

jika ingin menerapkan modernisasi di daerah, rakyat yang dipimpinnya tidak memahami instruksi dan arahan dari seorang kepala daerah yang bersangkutan. Untuk memajukan sebuah daerah diperlukan sinergitas dari seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya agar program-program pembangunan dapat terarah dan terencana untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan rakyat mendapatkan hasil yang bermanfaat.

Pada 1913 Soetardjo kembali mendapat kenaikan pangkat dan menjabat sebagai Asisten Wedana Bogorejo di wilayah Blora. Setelah mendapat jabatan yang cukup strategis, ibunda Soetardjo kemudian menjodohkannya dengan salah seorang kerabat yang bernama Siti Djaetoen Kamar-Roekmini yang akhirnya disuntinnya pada 1 Mei 1914.

Modernisasi Desa (Tata Cara)

Tugas sebagai Asisten Wedana memungkinkan Soetardjo untuk bertemu dengan para lurah yang berada dalam onderdistrik dalam pertemuan bulanan. Laporan yang didapat dari para lurah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: keamanan umum, makanan rakyat, keadaan pertanian, perhewanan, kesehatan rakyat, persekolahan, perdagangan pasar, kriminalitas, permasalahan pajak, pemeliharaan akses jalan dan jembatan dan pekerjaan lainnya.

Jika sebelumnya Soetardjo dapat berhubungan langsung dengan rakyatnya, namun selanjutnya terdapat perbedaan ketika laporan-laporan dari tiap kepala desa menjadi tugasnya sehari-hari. Berdasarkan laporan-laporan tersebut terdapat kelemahan dalam menangani permasalahan yang terjadi di tiap wilayah tanggungjawabnya. Ternyata semangat feodalisme yang masih melekat pada pribadi para lurah inilah yang menjadi penyebabnya,



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

dan merupakan titik lemah pengembangan wilayah. Paham itulah yang menyebabkan arahan Soetardjo tidak dapat mereka jalankan dengan baik. Soetardjo pun memfokuskan diri untuk melakukan pembenahan di tubuh para pengelola wilayah itu.

Kecintaan Soetardjo kepada desa diterapkan ketika ia menjabat sebagai penguasa seluruh wilayah di desa di Blora. Cita-citanya untuk membangun negeri dimulainya dengan membangun pada tingkat desa. Ide-ide modernisasi desa diawalinya dengan melakukan pembaharuan bagi para kepala desa yang masih berpikiran kolot.

Tata cara yang egaliter dalam memperlakukan bawahannya ternyata disambut baik oleh para atasan Soetardjo. Bahkan telah terjadi perubahan signifikan yang berlaku secara nasional pada waktu itu ketika OSVIA sebagai sekolah yang mempersiapkan para pejabat pamong praja sekaligus mempropagandakan tata cara tersebut melalui majalah bulanan Oud Osviaan.

Perubahan kebiasaan konservatif akhirnya dapat diterima semua pihak demi terwujudnya roda pemerintahan yang tidak

kaku. Hal ini didasarkan pada rasa rendah diri para pemimpin di lingkup terrendah, yakni kepala desa, khususnya dalam memberikan laporan kepada atasannya.

Dalam bidang ekonomi Soetardjo amat memperhatikan kesejahteraan petani desa dengan membentuk sebuah usaha dagang yang berbentuk koperasi. Maksud dari didirikannya koperasi ini adalah untuk mencegah masuknya tengkulak dan pedagang Cina yang memonopoli harga hasil bumi. Koperasi berlangsung pada 1914 hingga 1919 karena Soetardjo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi seorang jaksa di Rembang.

Pola kehidupan ekonomi yang diterapkan oleh Soetardjo di Bogorejo Blora inilah yang dinamakan juga sebagai “Ekonomi Pancasila” atau “Ekonomi Kekeluargaan” yang sesuai dengan jati diri orang Indonesia pada waktu itu. Soetardjo memperhatikan benar nasib para petani kecil dengan memberikan rasa aman bagi mereka untuk menjalankan usahanya dengan baik. Tersedianya stok bibit berkualitas, pupuk berkualitas dengan harga terjangkau serta peralatan pertanian lainnya yang dibutuhkan para petani dapat berkembang sesuai yang diharapkannya. Mereka tidak harus khawatir dengan keberadaan para tengkulak yang terlalu mengontrol kebutuhan para petani.

Dalam membangun pendidikan di desa, Soetardjo membentuk sekolah desa dan sekolah sore, yang diasuh oleh para guru, termasuk Soetardjo dan melibatkan pegawai kehutanan, pengairan, kantor pamong praja, guru sekolah desa dan kepala desa. Sektor pendidikan kembali menjadi prioritas utama Soetardjo untuk membangun desanya. Kondisi rakyat di tempat Soetardjo tinggal, pendidikannya masih jauh terbelakang, dengan fasilitasnya masing sangat terbatas. Bahkan pemerintah pun belum memberikan perhatian pada kegiatan pendidikan tersebut. Ia menyiasatinya dengan memberdayakan seluruh potensi desa untuk mendukung program tersebut.

Menjadi Pejabat Kejaksaan

Pada 18 Oktober 1915 Soetardjo kemudian diangkat menjadi jaksa di Rembang dengan jabatan pembantu jaksa kepala. Selain tugas perkantoran pengurusan perkara hukum, Soetardjo juga memiliki tugas lain dalam memberantas apa yang dinamakan penyakit masyarakat yang menjadi benih-benih peningkatan kriminalitas. Cara-cara preventif dilakukan oleh Soetardjo dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat seperti kursus bahasa Belanda, kesenian gamelan, menari Jawa, sepak bola, senam, bilyar.

Soetardjo menganggap bahwa penyakit masyarakat timbul akibat kurangnya aktivitas yang bermanfaat sebagai pengganti lapangan kerja yang minim. Oleh karenanya, Soetardjo lebih memilih memaksimalkan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat daripada penyelesaian melalui jalur hukum kepada orang-orang yang meresahkan tersebut. Dampak kesenjangan ekonomilah yang menjadi penyebab utama timbulnya masalah.

Saat menjadi jaksa di Rembang pada 1916, Soetardjo dipilih menjadi Wakil Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Oud Osvianen Bond (OOB) oleh para pegawai lulusan OSVIA seluruh Indonesia. Jabatan ketua dipercayakan kepada Moh. Tayib seorang Jaksa Karanganyar. Maksud dari didirikannya perhimpunan ini adalah untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan kolot yang lebih mengagungkan pemimpin atau atasan namun malah merugikan rakyat banyak. Praktek konservatif inilah yang menghambat kemajuan dalam upaya membangun wilayah pemerintahan para penguasa lokal.

Kondisi sistem birokrasi saat itu memang masih kental dengan nuansa feodalistik, yaitu bawahan masih belum terfokus untuk melayani rakyat namun masih melayani atasan atau

pimpinan. Apa yang dilaporkan kepada atasan tidak menyentuh permasalahan yang ada di lapisan bawah. Laporan dibuat berdasarkan asal bapak senang saja. Para birokrat lulusan OSVIA membaca situasi ini dimana perlu dilakukan pembenahan besar-besaran dalam mengubah perilaku tersebut.

Restrukturisasi ini direspon positif oleh pemerintah pusat dengan lebih luasnya kesempatan untuk anak-anak bumiputera bersekolah, jabatan bupati yang hanya bisa dijabat oleh keturunan bupati menjadi terbuka bagi pegawai-pegawai bukan keturunan bupati. Posisi-posisi strategis yang biasanya diduduki oleh pegawai Belanda namun bisa juga diduduki oleh pegawai orang Indonesia. Hal tersebut tidak saja terjadi pada instansi pemerintahan namun juga menular ke jawatan lainnya. Usaha para pemuda pamong praja telah berhasil memodernisasi pemerintahan negeri jajahan di Indonesia. Sebuah hasil perjuangan yang terjadi dari dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, suatu hal yang tidak dapat dianggap remeh bagi kemerdekaan Indonesia.

Para lulusan sekolah OSVIA menganggap ketersediaan tenaga terdidik hasil didikan dari sekolah OSVIA dirasakan mulai mencukupi untuk mengisi kedudukan pemerintahan hingga ke lingkup kecil. Pola didikan di bangku sekolah sudah seyogyanya dapat diterapkan dalam posisi jabatan apapun di birokrasi tradisional. Rintisan dari para lulusan sekolah pamog praja untuk menjadikan jabatan-jabatan birokrat diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Sekolah Lanjutan Pamong Praja

Pada 30 Agustus 1918 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal, Soetardjo ditunjuk untuk melanjutkan sekolah ke Bestuurschool di Batavia, sebuah sekolah pamong praja tertinggi

pada saat itu. Selama bersekolah di Batavia, Soetardjo selaku Wakil Ketua perhimpunan OOB melakukan penyelidikan mengenai adanya kekecewaan dari para pamong praja terhadap kebijakan dari para atasannya. Praktek-praktek yang bersifat konservatif masih diberlakukan oleh para petinggi pemerintahan kolonial. Hasil penyelidikan ini dibukukan dan dilaporkan oleh Soetardjo kepada pemerintah. Hasil penyelidikan tersebut direspon oleh Gubernur Jenderal yang memanggil seluruh kepala daerah bangsa Belanda dan para bupati untuk menghadiri konferensi di Paleis Koningsplein (Istana Merdeka) yang dinamakan “Regenten Conferentie”. Hasil dari pertemuan ini adalah untuk menampung berbagai macam keluhan kesah yang dialami oleh para pegawai atau pun pejabat pamong praja dapat disampaikan langsung ke Departemen “Binnenlands Bestuur” (Departemen Dalam Negeri). Imbasnya adalah berkurangnya tindakan sewenang-wenang dari pejabat tinggi kepada pegawai pamong praja dan rakyat kebanyakan.

Kesempatan untuk bersekolah di sekolah pamong praja tertinggi di Batavia mendekatkan Soetardjo kepada pemegang kebijakan pemerintahan di pusat. Apa yang selama ini didapat oleh Soetardjo semasa menjadi seorang birokrat di daerah adalah adanya ketidakberdayaan dari para pamong praja bawahan yang menganggap ada suatu sistem yang tidak berjalan. Kesewenang-wenangan yang dialami oleh para bawahan akan kebijakan dari para atasan dijadikan dasar oleh Soetardjo untuk membuat sistem pelaporan yang legal dimana para bawahan juga dapat mengkritik kinerja para atasannya. Studi yang dilakukan oleh Soetardjo demi munculnya kebijakan yang mengatur permasalahan tersebut disambut baik oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang selama ini dapat menghambat kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat mendapat titik temu dalam pembenahan reformasi birokrasi.

Departemen “Binnenlands Bestuur” (Departemen Dalam Negeri) adalah instansi yang mengurus birokrasi hingga di daerah pada akhirnya membuka layanan pengaduan akan keluhan terhadap kebijakan dan kinerja atasannya. Layanan pengaduan ini tidak hanya berlaku untuk para pamong praja namun juga bagi rakyat yang tidak mendapat kepuasan akan kebijakan pemimpinnya.

Kembali Mengabdikan

Soetardjo berhasil menamatkan sekolahnya pada 1921, kemudian kembali mengabdikan menjadi Asisten Wedana di Sambong Kabupaten Blora. Belum genap satu tahun menjabat, Soetardjo kembali dipindahkan ke Bangilan Kabupaten Tuban.

Aktivitas Soetardjo di wilayah Bangilan ini selain memberantas kriminalitas seperti perampokan, begal, pencurian ternak, pembalakan liar di hutan, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga sanitasi dalam upaya pemberantasan penyakit menular, penyuluhan pertanian kepada para petani, memperhatikan



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

sarana irigasi desa, meningkatkan kualitas bibit tanaman dan hewan serta memperbaiki sarana akses jalan. Selain kerja nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, Soetardjo sadar bahwa anggota masyarakat huga harus dididik agar tidak jauh ketinggalan dengan bangsa lain. Upaya yang dirintisnya yaitu dengan menyelenggarakan kursus membaca untuk memberantas buta huruf. Harapan yang terkandung dalam benaknya adalah apabila masyarakat sudah melek huruf, mereka akan mampu belajar dengan lebih baik dan mampu untuk mengetahui keadaan yang ada di negeri ini dengan cara membaca koran. Beberapa ruang kosong dijadikan ruang belajar untuk penyelenggaraan kursus-kursus tersebut. Untuk menggerakkan gairah anak muda, Soetardjo juga memunculkan kegiatan olah raga baik itu olahraga modern maupun olah raga tradisional.

Permasalahan di tiap wilayah berbeda antara wilayah satu dan lainnya, sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Kecakapan seorang pemimpin amat dibutuhkan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di wilayahnya. Namun, satu hal yang tidak berbeda di tiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya adalah penekanan dalam sektor pendidikan yang selalu sama di tiap daerah. Hal ini terjadi karena kondisi pendidikan di tiap wilayah adalah sama, yakni kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan.

Banyak kemajuan positif saat Soetardjo menjabat sebagai Asisten Wedana di Bangilan ini. Menurut data yang ada tingkat kriminalitas menurun drastis. Hal tersebut dikarenakan Soetardjo memberlakukan penegakan hukum secara kekeluargaan, yaitu dengan tidak menghukum para penjahat dengan proses persidangan, akan tetapi mereka satu per satu disadarkan untuk kemudian direkrut untuk menjadi petugas resmi desa. Akibatnya, banyak buronan yang menyerahkan diri secara sukarela.

Penghargaan terhadap jerih payah Soetardjo adalah dengan memperoleh kenaikan pangkat dari Gubernur Jenderal dan menjabat Wedana Distrik Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Soetardjo yang menjabat sebagai Asisten Wedana di Bangilan dari Oktober 1921 hingga Januari 1924 mendapat kenaikan pangkat yang tergolong cepat pada waktu itu.

Di distrik Tambakrejo ini Soetardjo tidak terlalu banyak melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini disebabkan kondisi alam yang lebih sulit, hingga Soetardjo memfokuskan diri kepada pembangunan fisik, yaitu dengan membuka akses jalan yang saat itu masih minim kondisinya, serta membuat jembatan yang dapat menghubungkan tiap-tiap desa yang terisolasi. Atas prestasinya ini Soetardjo dimutasi ke distrik Sumberrejo, yang masih berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Mei 1926.

Di distrik Sumberrejo ini, tanggung jawab Soetardjo semakin besar karena daerah tersebut sudah cukup maju dibandingkan wilayah-wilayah tempat sebelumnya ia bertugas. Wilayah Sumberrejo dibelah oleh akses jalan raya menuju ke Surabaya. Akses jalan ini tidak hanya untuk kepentingan lalu lintas pergerakan masyarakat dari desa ke kota, tetapi juga merupakan akses lalu lintas perdagangan yang cukup vital bagi kota Surabaya. Di wilayah ini, Soetardjo memfokuskan diri untuk memajukan pertanian, perdagangan dan industri rumahan. Hal yang tidak pernah ketinggalan dalam program Soetardjo adalah memajukan pendidikan masyarakat. Ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah dan mengadakan kegiatan olah raga. Hal yang sangat membanggakan saat Soetardjo bertugas di Sumberrejo adalah dengan diselenggarakannya pameran pembangunan hasil bumi dan industri rumahan yang dilakukan swadaya oleh seluruh rakyat Sumberrejo. Pameran pembangunan

ini berlangsung sukses guna menunjukkan kepada khalayak bahwa wilayah ini berhasil memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tergolong masyarakat miskin.

Setelah bekerja sebagai pejabat di Distrik Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro selama 2 tahun, tanpa ia duga sebelumnya, Gubernur Jawa Timur datang guna menawarkan kepadanya untuk pindah ke Distrik Papar Kabupaten Kediri. Tawaran itu ia sanggupi agar pejabat penggantinya dapat meneruskan program yang sudah ia rintis. Soetardjo bertugas selama 7 bulan di Distrik Papar Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Danudiningrat menyatakan telah mendapat mandat dari Gubernur Jawa Timur untuk menaikkan pangkat Soetardjo menjadi Patih, kemudian ia dipindahkan ke Gresik pada 1929.

Masa tugas selama 2 tahun di Gresik ini menjadi karir terakhirnya sebagai pamong praja di daerah, karena selanjutnya Soetardjo mulai berjuang dalam kancah nasional melalui Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai wakil dari organisasi Perkumpulan Pamong Praja PPBB.

Rintisan karir Soetardjo saat menjadi birokrat di daerah selepas lulus dari sekolah OSVIA berawal dari jabatan paling rendah saat itu yaitu menjadi pembantu juru tulis. Tugas seorang pembantu juru tulis memungkinkan Soetardjo untuk turut membaca laporan-laporan kondisi yang ada di lapangan. Berawal dari membaca laporan-laporan tersebut, Soetardjo belajar memahami situasi paling di daerah serta kebijakan-kebijakan untuk menyikapi kondisi yang terjadi pada saat itu.

Laporan-laporan yang diterima dianalisis oleh Soetardjo dengan menggunakan pendekatan-pendekatan materi yang didapatkan semasa sekolah di OSVIA. Hasil analisis tersebut menjadi catatan pribadi Soetardjo dan dijadikannya sebagai sumber belajar untuk melihat dari dekat ketidakberesan sistem birokrasi pemerintahan di daerah.

Tiba saatnya Soetardjo mendapat kesempatan ditunjuk untuk memimpin dari jajaran wilayah terendah, Soetardjo sedikit memiliki pandangan terkait kebijakan seperti apa yang harus diterapkan di wilayah yang dipimpinnya, serta bagaimana cara untuk mendekatkan diri dengan rakyat yang dipimpinnya.

Perpaduan antara kenangan dan kedekatan dengan rakyat desa ditambah dengan ilmu pemerintahan yang didapat saat bersekolah mempermudah Soetardjo untuk merebut hati rakyat, kemudian membangun jiwanya. Tugas inilah yang selama ini diabaikan oleh para pejabat sebelumnya.

Dukungan dari pemerintah pusat terkait reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Soetardjo dapat dibuktikan dengan peran, prestasi dan dedikasinya menjalankan kebijakan dan pembangunan yang selama ini terkendala akibat buruknya sistem pemerintahan di daerah.

Beragam karakteristik daerah yang diamanatkan kepada Soetardjo bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang ia lakukan dengan berbagai pendekatan. Namun, yang tak pernah luput dari perhatiannya adalah penekanan sektor pendidikan bagi warganya, karena melalui pendidikan, secara perlahan tetapi pasti, akan terjadi perubahan pola pikir yang memudahkannya dalam menerapkan kebijakan yang sudah diputuskan. Jika sebelumnya rakyat hanya menerima begitu saja aturan yang diterapkan tanpa berani untuk menolak, berkat meningkatnya daya intelektual masyarakat, mereka berani bersikap dalam menanggapi kebijakan itu. Oleh karena itu, bagi Soetardjo, pendidikan merupakan program yang harus mendapatkan prioritas. Dengan meningkatnya taraf pendidikan, masyarakat berani menuntut hak yang selama ini dibelenggu oleh pemerintah kolonial yang semula tidak disadarinya.

Menuju Volksraad: Perjuangan Menuju Kemerdekaan

Saat bertugas di Gresik, Soetardjo dan rekan-rekan dari Oud Osvianen Bond sepakat untuk membubarkan perkumpulan tersebut. Semangat perjuangan yang mulai melanda para pamong praja melahirkan terbentuknya Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) pada 1929 di Solo yang merupakan hasil peleburan dari organisasi-organisasi pegawai pamong praja seluruh Indonesia. PPBB ini diketuai oleh Raden Adipati Aria Wiranatakusumah Bupati Bandung dan Soetardjo menjabat sebagai Wakil Ketua.

Munculnya organisasi-organisasi profesi sebagai bentuk perwujudan bergelornya semangat untuk mengabdikan diri bagi negeri, merupakan usaha untuk mencapai kemerdekaan yang berdasarkan profesinya masing-masing sesuai potensi yang dimilikinya.

Keinginan besar dari PPBB adalah turut terlibat dalam Dewan Rakyat (Volksraad), Dewan Provinsi (Provinciale Raad), Dewan Pemerintahan Tingkat II (Regentschapsraad), Dewan Kota praja (Gemeenteraad), Dewan Golongan Masyarakat baik di pusat maupun daerah (Groepsgemeenschapsraad). Keinginan ini direspon positif oleh semua pamong praja seluruh Indonesia dari segala tingkatan mulai dari pegawai rendahan hingga pejabat tertinggi bumiputra. Pembantu juru tulis, Juru tulis, mantri polisi, mantri kabupaten, asisten wedana, wedana, demang, hakim besar, sekretaris kabupaten, jaksa, jaksa kepala, patih, bupati semua bersatu bersama-sama memperbaiki nasib bangsanya dalam wadah perkumpulan tersebut.

Upaya dari PPBB untuk menempatkan wakilnya di Volksraad hingga ke dewan-dewan di daerah-daerah dimaksudkan untuk menjalin komunikasi politik antarpamong praja dengan

pemerintah pusat demi menyuarakan aspirasi rakyat di daerah-daerah. Selain memperjuangkan aspirasi rakyat, PPBB juga sebagai corong aspirasi para pamong praja yang memiliki tugas mulia melayani rakyat. Kesejahteraan dan tata cara kerja para pamong praja juga harus menjadi titik perhatian pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan yang strategis, bahwa segala keperluan para pamong praja juga harus diperhatikan dalam kebutuhan menjalankan tugas kesehariannya.

Akhirnya pada awal 1931 diadakanlah pemilihan wakil-wakil yang akan duduk dalam keanggotaan Volksraad. PPBB mengirimkan wakilnya sebagai berikut:

- Wilayah Jawa Barat:
 1. R.A.A. Wiranatakusumah, Bupati Bandung, Ketua Pengurus Besar PPBB.
 2. R.D. Wiriadmadja, Patih Majalengka.
- Wilayah Jawa Tengah:
 1. Pangeran Ario Gondosubroto, Bupati Banyumas.
 2. R. Prawoto Sumodilogo, Patih Banjarnegara.
- Wilayah Jawa Timur:
 1. R.A.A. Cakraningrat, Bupati Bangkalan.
 2. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Patih Gresik, Wakil Ketua Pengurus Besar PPBB.

Sebagai permulaan para tokoh rakyat yang mewakili fraksi pamong praja hanya berasal dari 3 wilayah saja, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian pada Juni 1931 Soetardjo berangkat ke Batavia untuk hadir dalam sidang Volksraad yang pertama. Di dalam Volksraad tersebut Soetardjo terpilih menjadi anggota Badan Pekerja Dewan Rakyat (College van Gedelegeerden Volksraad).

Jabatan tersebut bersifat tetap sehingga Soetardjo pun harus meletakkan jabatan sebagai Patih Gresik. Dengan demikian secara resmi Soetardjo melepas pekerjaannya sebagai pamong praja dan beralih ke kancah pergerakan politik. Namun begitu, kendati telah terjun dalam bidang politik, Soetardjo tetap bersikap amanah karena ia terpilih berdasarkan pemilihan, baik itu dari kalangan pamong praja serta rakyat di daerah-daerah Jawa Timur.

Agar supaya dapat memfokuskan diri dan menghindari terjadinya konflik kepentingan, para pamong praja ini harus segera melepaskan jabatan yang diembannya. Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh para pamong praja dan rakyat Jawa Timur, Soetardjo dianggap mampu mengaspirasikan keinginan dan kebutuhan daerahnya. Perpindahan daerah dengan tugas-tugasnya masih di wilayah provinsi yang sama, Soetardjo mengenal betul permasalahan dan potensi yang dimiliki Jawa Timur.

Berdasarkan pemahaman bahwa para perwakilan PPBB ini merupakan utusan yang dipilih oleh rakyat demi kesejahteraan yang diidam-idamkan dan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pendahulunya, Soetardjo dan kawan-kawan meyakinkan diri sendiri bahwa mereka mampu menyampaikan aspirasi keinginan rakyat seluruh Indonesia pada waktu itu. Resmi terhitung sejak 16 Juni 1931 wakil-wakil dari PPBB mulai bertugas di Volksraad berjuang melalui bidang politik.

Fraksi persatuan pamong praja ini memiliki pemikiran yang progresif dan moderat yang berangkat dari pengalaman dan pengamatan selama puluhan tahun saat bergelut menjadi pamong praja yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Fraksi ini kemudian bertambah jumlah anggotanya dengan masuknya perwakilan-perwakilan dari daerah lainnya.

Masa keterlibatan PPBB dalam Volksraad berlangsung

selama 11 tahun, yakni dari 1931-1942. Dari 11 perjalanan PPBB bergabung dengan Volksraad, banyak hasil yang diperoleh, khususnya dalam memperjuangkan peran aparat pemerintah bumiputera demi memperjuangkan kepentingan rakyat banyak di negeri yang masih terjajah itu.

Pergulatan perjuangan melalui Volksraad ini memberi sumbangsih besar dalam mengusahakan penghidupan yang lebih baik bagi rakyat bumiputera. Fraksi-fraksi yang terlibat di dalamnya memang terbagi menjadi dua kutub, antara kubu yang pro perjuangan kemerdekaan dan kubu konservatif yang anti perubahan. Dua kutub yang dimaksud adalah:

1. Pro Kemerdekaan

- Fraksi PPBB
- Fraksi Nasional, dengan ketuanya Mohammad Husni Thamrin.
- Fraksi IEV (Indo Europeesch Verbond), dengan ketuanya Dick de Hoog.
- Fraksi Katolik, dengan ketuanya Piet Kerstens

2. Konservatif

- Fraksi Europeesch bestuur
- Fraksi Regentenbond
- Fraksi Valid
- Fraksi VC (Vaderlandsche Club), yang berhaluan kanan dan kapitalis.

Dalam persidangan-persidangan Volksraad, Soetardjo mengemukakan pendapatnya mengenai anggaran belanja daerah terkait dengan garis-garis besar haluan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan ditingkatkan menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan penting dari

pidato Soetardjo adalah berujung kepada perjuangan Bangsa Indonesia yang terjajah untuk diberikan kesempatan dalam mengurus sendiri tanah airnya, dengan sistem pemerintahan beserta perangkat kaum bumiputra sendiri. Kemandirian yang dimaksudkan dengan tanpa memutuskan hubungan erat antara Belanda dengan Hindia Belanda terutama dalam hal membantu penyelenggaraan suatu negara.

Hasil nyata dari pendapat Soetardjo yang diterapkan langsung dalam pemerintahan di daerah adalah dengan beralihnya kepala pemerintahan dari yang sebelumnya dipimpin oleh Asisten Residen menjadi berada di tangan Bupati. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala di beberapa daerah yang tingkat ekonominya rendah. Di daerah-daerah yang nilai ekonominya tinggi dan menguntungkan tetap dipimpin oleh seorang asisten residen. Hal lain yang menyulitkan penerapan kebijakan tersebut di lapangan adalah tingkat pendidikan yang cukup tertinggal dibandingkan dengan aparat pemerintah Eropa. Kesulitan ini terjadi tidak saja pada tingkat pegawai-pegawai biasanya, bahkan sampai pada tingkat bupati pun masih terlalu riskan jika aparat bumiputera disertai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri.

Oleh karena itu, maka Fraksi PPBB memperjuangkan sebuah kurikulum agar para calon pegawai diberikan pendidikan akademis yang memadai. Hingga 1938 didirikanlah Bestuursacademie di Batavia. Usulan lain dari Fraksi PPBB terkait dengan peningkatan kemampuan para calon pegawai pamong praja adalah dengan melakukan proses seleksi di dalam asrama yang dilakukan oleh sebuah komisi yang berkompeten dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pegawai pamong praja. Hal tersebut dibuat agar tercipta mutu layanan bagi masyarakat luas.

Usulan yang berhubungan dengan modernisasi pemerintahan dengan cara memperbaiki pola hubungan serta tata cara dalam

korps Pegawai Pamong Praja yang bersifat feodal dihilangkan. Hubungan antara atasan dan bawahan lebih bersifat persaudaraan untuk menghilangkan rasa sungkan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Usulan mengenai kesejahteraan pegawai adalah dengan cara mendirikan sebuah bank yang dinamakan Soetardjo Bank. Hal ini dikarenakan kehidupan ekonomi para pegawai pamong praja berada jauh dari standar kecukupan, karena biaya operasional sehari-hari seperti penerimaan tamu dinas, pemeliharaan aset negara dikeluarkan dari uang pribadi dan tidak mendapatkan penggantian yang sebanding dari negara. Oleh karena itu, demi kesejahteraan dan peningkatan kinerja maka perhatian terhadap sisi ekonomi para pegawai haruslah diperhatikan. Pendirian Soetardjo Bank ini juga sebagai bentuk pemberantasan para rentenir yang menjamur dan berkeliaran di sekitar kehidupan para pegawai pamong praja. Sangatlah ironis jika pejabat patih demi untuk mengongkosi keperluan dinas harus dililit hutang yang banyak yang sebenarnya sangat memalukan jika diketahui oleh banyak orang.

Usulan dari PPBB lainnya adalah perlunya dirancang sebuah aturan tentang kredit lunak bagi pegawai pamong praja sebagai modal kerja bagi pegawai di Algemene Volkskredietbank (AVB). Hal ini juga diberlakukan pada Soetardjo Bank. Namun usulan tersebut ditolak karena pihak AVB telah memberlakukan aturan pengawasan terhadap operasional Soetardjo Bank.

Kemajuan dari pegawai pamong praja yang dilakukan oleh PPBB adalah kenaikan gaji dari para pegawai pamong praja yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Gaji Regional (Regionale Bezoldingsregeling) yang berada di bawah kewajiban menjadi standar sesuai aturan Peraturan Gaji Pegawai atau BBL (Bezoldingsregeling Burgerlijke Landsdienaren)

Hasil-hasil perjuangan PPBB di Volksraad selama periode 1931-1942 adalah ongkos jalan dinas, pensiun janda, kedudukan hukum, sekolah untuk anak-anak di HIS, perbaikan kedudukan bupati, hutang-hutang pegawai, pengadaan pakaian dinas pegawai, dan lain-lain. Keberhasilan orang-orang bumiputra yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan kolonial juga sedikitnya merupakan andil dari PPBB sesuai dengan keinginan bahwa rakyat Indonesia harus dilibatkan dalam mengurus negerinya sendiri.

Untuk menghindarkan diri terlepasnya ikatan perjuangan antara anggota PPBB yang duduk di Volksraad dengan konstituentnya, PPBB membuat ketetapan untuk dijalankan anggotanya di Volksraad, yaitu:

1. Dalam hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan dalam negeri yang menjadi kompetensi Departemen Dalam Negeri, anggota-anggota kita dalam Volksraad berkedudukan sebagai wakil-wakil dari dan bertanggungjawab kepada PPBB.
2. Dalam hal-hal lain, mereka dianggap sebagai wakil rakyat dan bebas atas tanggungjawabnya sendiri untuk memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya.

Demi mewujudkan sistem kerja yang baik dalam menjalankan kedua tugas tersebut, maka Fraksi PPBB diizinkan untuk menambah anggotanya yang berasal dari luar PPBB yaitu:

- Perwakilan Swapraja: P.A. Hadiwijoyo
- Perwakilan Aceh: Tuanku Mahmud

- Perwakilan Sumatera Barat: Yubhar
- Perwakilan Maluku: De Quelyu
- Perwakilan Minahasa: G.S.S.J. Ratulangi
- Perwakilan Golongan Tionghoa: Ko Kwat Tiong
- Perwakilan Golongan Arab: Said Abdul Alatas

Soetardjo dalam Volksraad juga mengusulkan perhatian untuk bidang olahraga dengan mempersatukan induk cabang olahraga dalam satu ikatan, yaitu Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang didalamnya tergabung Persatuan Sepak Bola (PSSI), Tennis (PELTI), Atletik, Bilyar, Catur, Renang dan cabang-cabang olah raga lainnya. ISI berada dalam Departemen Onderwijs en Eeredienst yang bertugas untuk memajukan olahraga bangsa Indonesia dengan keputusan membangun lapangan olahraga di tiap kewedanaan. Hingga akhirnya pada setiap tahun diadakanlah Pekan Olahraga Bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi rakyat bumiputera di seluruh negeri.

Di bidang Kebudayaan peran Soetardjo melalui PPBB di Volksraad mengenai pengambil alihan NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Masstchappij) sebagai induk dari siaran radio di Hindia Belanda kepada Perikatan Perkumpulan-perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK). PPRK sendiri merupakan gabungan dari perhimpunan siaran radio di Surakarta, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dimana Soetardjo menjadi ketuanya.

Pada 26 Maret 1938 pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengakui keberadaan PPRK sebagai badan hukum. NIROM yang selama ini menjadi induk keseluruhan radio siaran

di nusantara mengatur segala hal terkait regulasi radio siaran. Semenjak PPRK berdiri maka seluruh radio siaran berbahasa melayu dan bahasa daerah menyatakan diri bergabung di bawah PPRK. Mayoritas radio siaran pada waktu itu berbahasa melayu dan bahasa daerah serta hanya sedikit saja yang masih menggunakan bahasa Belanda. Oleh karena itu, NIROM mengalami kemunduran karena kehilangan anggotanya yang menjadi sumber dana terbesar bagi pemasukan NIROM. Hingga akhirnya terhitung sejak 30 Juni 1940 pemerintah menyerahkan biaya operasional kepada PPRK dan secara resmi siaran pertama pada 1 November 1940.

Usulan Fraksi PPBB dalam bidang ekonomi pada periode krisis ekonomi saat itu adalah dengan mengajukan mosi agar Belanda memberi sumbangan kepada Indonesia sebesar 25 Juta Gulden yang akan dipergunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Indonesia yang tengah terimbas krisis. Namun pemerintah Belanda menolak dengan keras usulan dari Fraksi PPBB ini. Selain pengusulan uang bantuan, Soetardjo melalui Fraksi PPBB juga mengusulkan bidang transmigrasi, irigasi dan pemberantasan ijon. Usulan mengenai irigasi akhirnya terwujud dengan membangun waduk di Cipanas, Kabupaten Indramayu. Pengusulan lain juga terkait dengan pembudidayaan garam untuk menekan harga garam yang tinggi sehingga tidak mampu dibeli oleh rakyat kebanyakan.

Usulan mengenai pemberantasan ijon diajukan kepada pemerintah untuk diberlakukan peraturan dengan undang-undang. Ijon ini sering terjadi pada pembelian padi dan buah-buahan.

Sedangkan usulan yang lebih bersifat harga diri sebagai sebuah bangsa yaitu usulan untuk menghapus istilah “inlander” dan menggantinya dengan “Indonesia”.



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

Di dalam bidang pertahanan diajukan mosi agar makin banyak pemuda Indonesia yang diberi kesempatan untuk menjadi perwira angkatan darat di Belanda serta membuat sekolah calon perwira di Indonesia. Di bidang pertahanan juga diusulkan untuk merekrut milisi-milisi dari penduduk Indonesia.

Sedangkan di dalam bidang pendidikan berdasarkan usulan yang telah disetujui dalam Volksraad, maka pemerintah menambah jumlah sekolah Inlandsche MULO. Hal yang menyulitkan bagi para lulusan inlandsche school adalah jika mereka harus melanjutkan ke sekolah MULO yang berbahasa Belanda. Selain itu juga didirikannya sekolah-sekolah kejuruan yang mengajarkan pertanian, perhewanan, perikanan, pertukangan, perdagangan. Diharapkan para lulusan Inlandsche MULO memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan sekolah. Sekolah model ini sangat berguna bagi pemuda-pemuda di desa.

Terkait pendidikan, Fraksi PPBB mengusulkan adanya wajib

belajar bagi rakyat. Hal ini sebenarnya telah dirintis oleh Soetardjo di setiap tempat yang ia pimpin semasa menjadi pegawai pamong praja dalam bentuk pendirian kursus-kursus di sekolah desa. Permasalahan beasiswa juga menjadi pemikiran dan usulan dimana banyak siswa yang berprestasi namun terkendala biaya. Hingga pada 1938 semakin banyaklah para pelajar yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai imbas dari peraturan tersebut.

Usulan di bidang lain yaitu bidang pedesaan. Akhirnya terbentuklah undang-undang mengenai desa, yaitu *Desaordonnantie* tahun 1941 untuk mengganti peraturan 1905, yang isinya adalah menghilangkan pekerjaan-pekerjaan, yang selama ini harus dilakukan oleh desa yang sudah dianggap ketinggalan zaman, yang membebani desa sehingga dengan ordonansi ini penduduk desa dapat lebih fokus untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Usulan di bidang pengadilan agama adalah dengan mendorong pemerintah untuk mengadakan *Hof van Islamitische Zaken* yang sejak 1938 mulai mengurus tugas dan kewajibannya di bidang pengadilan agama.

Keseluruhan usulan-usulan baik itu dari fraksi PPBB maupun fraksi lainnya yang berhaluan progresif nasionalis cukup membuat goncang pemerintah, baik itu di Hindia Belanda maupun di pemerintah pusat di Belanda. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah dapat memadamkan gairah munculnya rasa nasionalisme kaum pembaharu dengan pelarangan pegawai negeri masuk menjadi anggota PNI dan Partindo pada 27 Juni 1933. Kegiatan berkumpul seluruh organisasi termasuk Partai Nasional Indonesia dan Partindo dilarang, bahkan dilanjutkan dengan penangkapan-penangkapan para pemimpin-pemimpinnya termasuk Ir. Soekarno dari PNI dibuang ke Ende pada 1 Agustus

1933 serta Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir ke Pulau Banda pada 25 Februari 1934. Beberapa petinggi PNI juga dibuang ke Boven Digul Papua pada 16 November 1934. Hilangnya tokoh-tokoh nasionalis seperti mereka yang dibuang tanpa melalui proses pengadilan membuat Soetardjo dengan Fraksi PPBB bereaksi keras. Akhirnya memunculkan apa yang disebut “Petisi Soetardjo”.

Petisi Soetardjo: Indonesia Yang Mandiri

Latar belakang lahirnya Petisi Soetardjo dilandasi keadaan dunia secara umum, ketika negara-negara koloni menuntut pengelolaan yang lebih mandiri akan wilayahnya masing-masing. Indonesia, Suriname dan Curacao yang merupakan wilayah jajahan Belanda merasa memiliki hak untuk mengurus urusan wilayahnya sendiri. Soetardjo yang melakukan penelaahan mengenai hukum dasar Grondwet, yang di dalamnya meliputi empat negara yaitu Belanda, Hindia Belanda (Indonesia), Suriname dan Curacao.

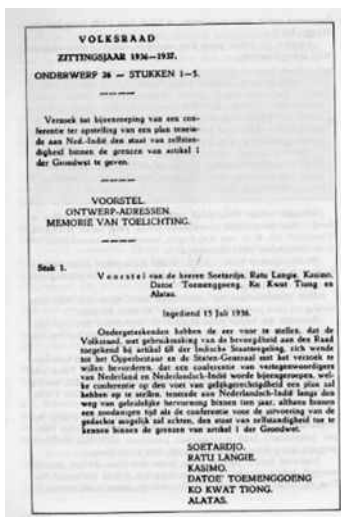


Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

Penelaahan tersebut disimpulkan oleh Soetardjo bahwa terdapat kesetaraan dari empat negara tersebut, bahwa tidak ada satu sama lain yang berada di atas sebagai induk dari tiga lainnya.

Berangkat dari hal demikianlah Petisi Soetardjo lahir, bahwa adanya kesempatan dari rakyat di tiap-tiap negara tersebut mengurus rumah tangganya masing-masing, tentu dengan mengacu kepada peraturan undang-undang yang sama.

Hasil penelaahan berhari-hari tersebut oleh Soetardjo dibawa ke rumah peristirahatan keluarga di daerah Cemelati Sukabumi. Di sana Soetardjo menyusun rancangan petisi dan sumber-sumber yang diperlukan. Rancangan tersebut diserahkan kepada Ratulangi yang juga memiliki rumah peristirahatan. Draf tersebut dinamakan Konsep Usul Petitsi (Concept voorstel Petitie) untuk Volksraad.

Ratulangi sepakat dengan isi petisi tersebut serta membubuhkan tanda tangan pertanda mendukung isinya. Selanjutnya Ratulangi dan Soetardjo kembali ke Jakarta menemui kolega yang satu fraksi dengannya dan anggota Volksraad yang sehaluan dengan mereka. Rekan-rekan seperjuangan akhirnya menyatakan dukungan dan turut membubuhkan tanda tangan. Mereka itu adalah Kasimo dari Partai Katolik, Lanjumin Datuk Tumenggung, Mr. Ko Kwat Tiong dan S.A. Alatas dari fraksi PPBB.

Petisi tersebut akhirnya disampaikan dalam sidang Volksraad pada 9 Juli 1936 saat tengah membahas mengenai Anggaran Belanja/Pendapatan tahun 1937. Pembukaan Soetardjo sebelum membacakan soal petisi adalah dengan menyampaikan pandangan umum mengenai kondisi dunia secara umum yang berakibat kepada kondisi rakyat Hindia Belanda. Kondisi ekonomi, sosial, politik yang makin lama semakin berat. Pukulan-pukulan kepada gerakan-gerakan baik yang beraliran kiri maupun kanan yang telah dilakukan pemerintah benar-benar membuat rakyat apatis kepada

niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Secara garis besar Petisi Soetardjo ini berisi mengenai suatu keinginan yang dibatasi waktu mengenai kesempatan untuk mengurus sendiri pemerintahan oleh rakyat bumiputera setidaknya yang akan siap dalam waktu 10 tahun yang akan datang yang mengacu dari hukum Grondtwet. Untuk mewujudkan hal tersebut maka sebaiknya kedua negara bertemu untuk sama-sama membahas dalam situasi yang berimbang duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Permintaan ini diajukan sebagai pernyataan akan ketidakseriusannya pemerintah dalam menjalankan kewajiban mengurus rakyat yang dipimpinnya.

Petisi Soetardjo ini awalnya hanya dianggap angin lalu oleh pemimpin sidang Volksraad. Ketua sidang Mr. W.H. van Helsdingen menetapkan bahwa pembahasan terkait petisi akan dibicarakan di lain waktu. Perkembangan selanjutnya pada Agustus 1936 usul petisi tersebut mulai dibicarakan dalam rapat-rapat kecil yang menghasilkan sebuah “Memori Jawaban”. Pada 17 September 1936 diadakanlah sidang pleno terbuka mengenai

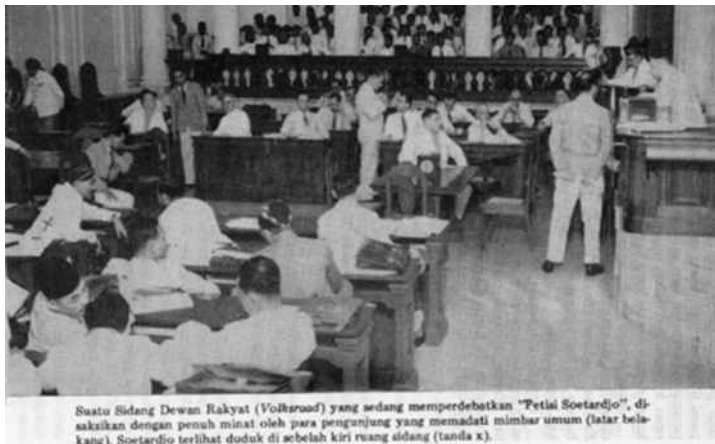


Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

petisi tersebut yang diawali oleh pidato dari Sam Ratulangi. Setelah pidato Sam Ratulangi tersebut respon dari para anggota Volksraad serta masyarakat luas cukup memuaskan, namun justru dari pemerintah Belanda sama sekali tidak hadir dalam acara sidang Volksraad tersebut. Hal ini sebagai pertanda bahwa keberadaan dari Volksraad memang hanya sebatas kamufase, sama sekali tidak ada keseriusan untuk mengurus warga kaum terjajah. Volksraad hanya sebatas tempat untuk mengadu saja.

Pembagian tugas dalam pemaparan dari Fraksi PPBB adalah sebagai berikut:

1. Ratulangi: memberikan penjelasan umum tentang tujuan dari petisi.
2. Kasimo: membahas bidang ekonomi
3. Datu Tumenggung: membahas bidang sosial, kultur dan politik
4. Ko Kwat Tiong: membahas perihal kedudukan golongan Indo (Belanda, Cina, Arab dan lain-lain)
5. Alatas: membahas mengenai hubungan berbagai golongan agama.
6. Soetardjo: pembelaan umum petisi

Sedangkan tanggapan-tanggapan mengenai petisi dari fraksi lainnya adalah sebagai berikut:

1. *Vaderlandsche Club (VC) & golongan pengusaha kapitalis Belanda:*
Menyatakan bahwa rakyat Indonesia belum matang dan selamanya tidak akan pernah matang untuk menguasai negara sendiri.

2. Christelijke Staatkundige Partij (CSP):
Menyatakan persetujuannya untuk memberikan kedudukan sendiri sebagai negara kepada Hindia Belanda, namun belum saatnya sekarang dan entah sampai kapan tiba saatnya.
3. Partai Katolik
Kurang menyetujui isi dan tujuan petisi.
4. Sosrohadikusumo
Tidak menyetujui isi dan tujuan petisi.
5. Indo Europeesch Verbond (IEV)
Mendukung isi petisi asalkan nantinya dibentuk dewan legislatif untuk keseluruhan negara bagian.
6. Politiek Economisch Bond (PEB)
Menyetujui isi petisi
7. Nationale Fraksi
Fraksi Mohammad Husni Thamrin ini terpecah menjadi dua kubu yang menyetujui dan menolak petisi.

Hingga akhirnya dilakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan yang dilaksanakan pada 29 September 1936. Dari 60 anggota, hadir 46 orang dan menghasilkan 26 orang menyetujui serta 20 orang menolak. pelaksanaan sidang 17 - 29 September 1936 menjadi momentum bagi Volksraad dan pemerintahan Hindia Belanda memulai lembaran baru.

Upaya untuk menyebarluaskan hasil dari Petisi Soetardjo

bukan tanpa hambatan, bahkan rakyat bumiputera pun pada awalnya menyangsikan hal tersebut, sebuah keputusan penting dari Volksraad yang selama ini tidak pernah memiliki gebrakan dalam perjuangan. Selama ini perjuangan yang nyata tujuannya berasal dari tokoh-tokoh pergerakan politik. Kalimat-kalimat yang tersurat di dalam petisi tersebut cukup asing didengar oleh rakyat. Rekan-rekan dari surat kabar nasionalislah yang turut berperan serta aktif dalam memberikan edukasi dari tulisan-tulisan mereka, seperti Tabrani dari harian *Pemandangan* yang terbit di Jakarta. Tabrani menulis sebuah karangan yang meminta perhatian dari para pembaca mengenai Petisi Soetardjo yang telah disahkan Volksraad. Tulisan tersebut mengupas secara lebih mendalam apa isi dan tujuan dari Petisi Soetardjo. Sejak munculnya tulisan Tabrani pada harian *Pemandangan*, muncul pula bahasan mengenai Petisi Soetardjo baik itu dari surat kabar berbahasa Indonesia maupun berbahasa Belanda.

Soetardjo berdasarkan saran dari Tabrani membentuk suatu



Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

Panitia Petisi Soetardjo yang bertugas untuk menyebarluaskan isi petisi kepada rakyat Indonesia. Susunan panitia adalah sebagai berikut:

- Ketua: Soetardjo
- Anggota:
 1. Mr. Hendromartono
 2. Atik Suwardi
 3. Oto Iskandar Di Nata
 4. H. Agus Salim
 5. I. J. Kasimo
 6. Sinsu
 7. Mr. Sartono
 8. Lanjumi Gelar Datu Tumenggung
 9. S. A. Alatas
 10. Mr. Ko Kwat Tiong

Panitia ini dibentuk dalam rapat di gedung pertemuan rakyat di Gang Kenari pada 5 Oktober 1937, sebelum adanya keputusan resmi dari Ratu Belanda dan Staten Generaal Nederland terkait petisi. Panitia bukan hanya dibentuk di pusat namun dibentuk hingga di daerah-daerah lainnya.

Keputusan dari Ratu Wilhelmina terkait petisi akhirnya resmi keluar pada 16 November 1938 dengan jawaban yang telah diduga sebelumnya bahwa Petisi Soetardjo ditolak. Dengan ditolaknya petisi tersebut bukan berarti telah memadamkan semangat perjuangan Soetardjo dan kawan-kawan dari PPBB, justru nilai penting dari petisi tersebut adalah tergugahnya kesadaran berpolitik rakyat bumiputera bahwa memang sudah sepatutnyalah Hindia Belanda diurus dan dinikmati oleh rakyat Hindia Belanda itu sendiri.

Beberapa waktu setelah Petisi Soetardjo ditolak,

Soetardjo mulai dimintai keterangan yang mempertanyakan maksud sebenarnya dari petisi tersebut. Statusnya sebagai pegawai negeri dipertanyakan karena dianggap merongrong pemerintahan, namun ketika dinyatakan bahwa maksud petisi tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bumiputera, para pejabat pemeriksa bisa memaklumi adanya.



Soetardjo (1941)

Foto koleksi Setiadi Kartohadikusumo (1990)

Penutup

Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai seorang pamong praja hidup dan berjuang menjadi pelayan rakyat. Sikapnya ini tertanam sejak kecil berkat kecintaannya terhadap desa. Apa yang dilakukannya dalam merevolusi tradisi feodal yang berlaku di birokrasi telah menyadarkan kaum pamong praja bahwa ada tugas utama yang harus dilakukan mereka, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat yang dipimpinnya.

Tujuan dari peningkatan taraf hidup agar rakyat dapat mengelola dan hidup sentosa di tanah airnya sendiri suatu saat

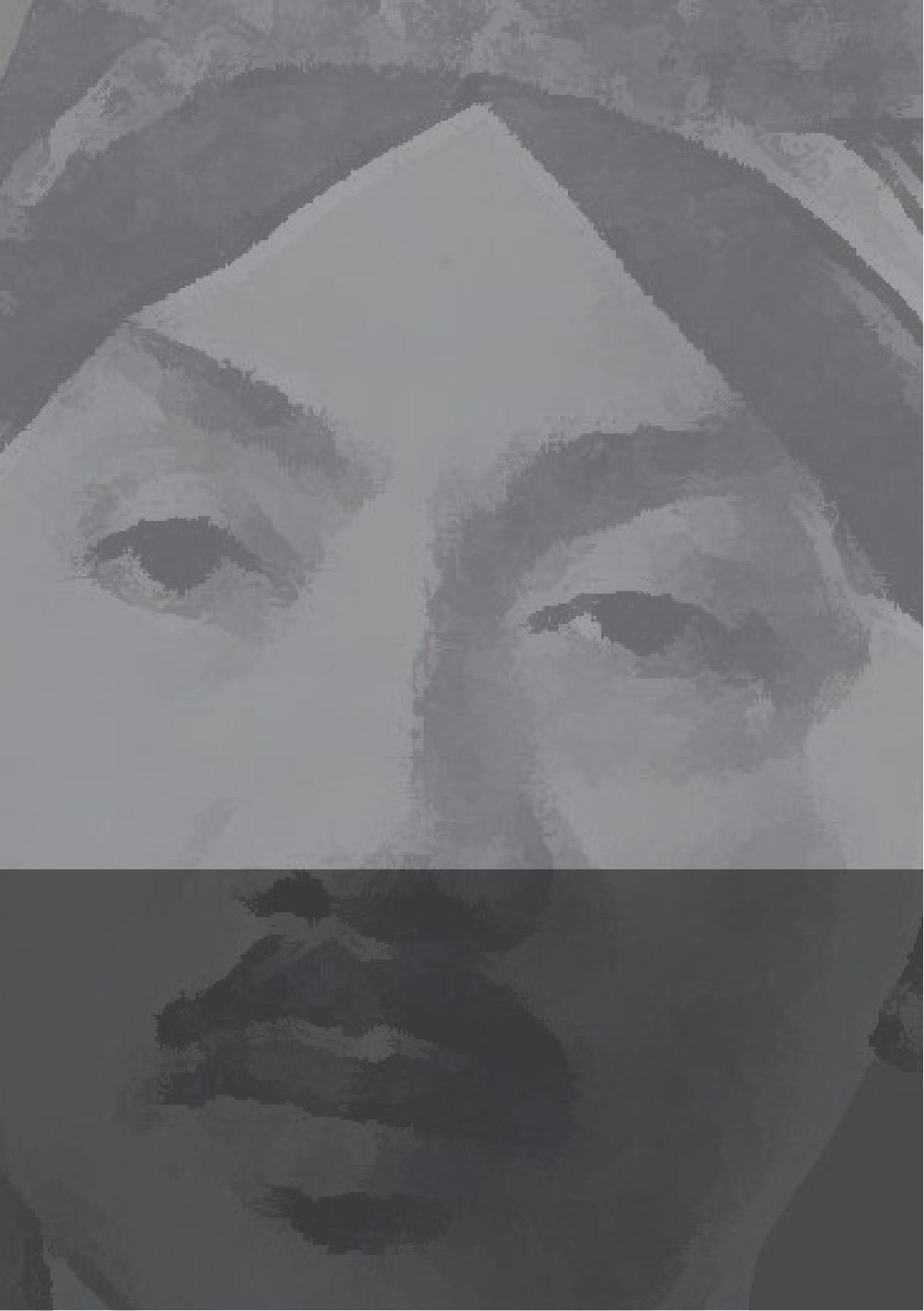
nanti. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing sebagai wujud persiapan bagi rakyat, dimana tanah airnya yang masih dikuasai bangsa asing tengah diperjuangkan oleh para pejuang dari kaum terdidik.

Cita-cita Soetardjo akhirnya mencapai puncak saat ia akhirnya bersuara mengenai keinginan dari kaum bumiputera untuk hidup dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hal tersebut menggambarkan sinergi perjuangan Soetardjo yang mewakili kaum terpelajar dan rakyat yang membutuhkan sosok pemimpin yang mengayomi dan memberikan ruang nyaman bagi rakyat untuk hidup sejahtera.

Situasi negeri Hindia Belanda melatarbelakangi beragamnya corak perjuangan Bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Saat organisasi-organisasi pergerakan dilarang keberadaannya serta para tokoh golongan nasionalis non-kooperatif dikekang, dipenjara dan dibuang, maka perlu ada golongan lain yang tetap memelihara semangat dan mimpi kemerdekaan.

Pada periode 1930 – 1941 perjuangan menuju kemerdekaan dilanda kelesuan berpikir. Namun, para tokoh yang berkecimpung di parlemen Dewan Rakyat (Volksraad) mengisi peran tersebut. Segala usulan, kritikan dan ide-ide mereka berhasil menghidupkan kembali harapan akan kemerdekaan dan membangkitkan semangat segenap rakyat terjajah yang siap menjadi tuan di tanah airnya sendiri.

Soetardjo Kartohadikoesoemo melalui petisinya telah membuka mata semua pihak bahwa cita-cita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat dapat terus diperjuangkan.



Tentang Penulis:

Yuda Benharry Tangkilisan

Lahir di Jakarta tahun 1961 dan menyelesaikan pendidikan tingginya S-1, S-2 dan S-3 di Universitas Indonesia. Ia adalah pengajar tetap pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok. Ia aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan profesi, seperti seminar, konferensi, lokakarya dan kongres, baik nasional maupun internasional. Karyanya meliputi makalah seminar, artikel jurnal, artikel bunga rampai dan buku monografi.

Jaka Perbawa

Jaka Perbawa merupakan Kurator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dilahirkan di Bandung pada 19 November 1980. Ia menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung Program Studi Sejarah, lulus pada 2006, dengan skripsi berjudul “Dinamika Pengobatan Tradisional di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang 1972-2002”. Pada 2008 ia mulai bekerja di Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan posisi sebagai Bimbingan Edukasi. Kemampuannya dalam mengelola museum didapatkan dari pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya selama ini. Pada 2013 ia menyelesaikan studi Magister Arkeologi di Universitas Indonesia, yang merupakan program Beasiswa dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan judul tesis “Taman Proklamasi Sebagai Sebuah Museum Situs Bersejarah”. Sejak 2012, ia menjabat sebagai kurator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta.

Djoko Marihandono

Djoko Marihandono, dilahirkan dan dibesarkan di kota Yogyakarta. Setelah menamatkan sekolah dasar dan menengahnya di Yogyakarta, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia tempatnya bekerja hingga kini. Ia adalah lulusan sarjana S1 Sastra Prancis, Magister Antropologi dan Doktor Ilmu Sejarah di Universitas yang sama. Sejak mahasiswa ia menyukai mempelajari hubungan antara Eropa dan Indonesia. Hal ini terbukti dari judul penelitian tesis S2 yang berjudul *Istilah Sapaan yang Bermakna Afektif dalam bahasa Prancis dan bahasa Jawa* dan disertasinya yang berjudul *Sentralisme Kekuasaan Herman Willem Daendels di Jawa 1808—1811: Penerapan Instruksi Napoléon Bonaparte*. Setelah menyelesaikan studi doktornya, ia banyak menulis artikel yang dimuat di majalah nasional maupun internasional serta menulis makalah untuk seminar baik di dalam maupun di luar negeri.



Museum Kebangkitan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan